

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2021 - 2026

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021–2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksnaaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut RPJMN Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutanya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
22. Kegiatan Perangkat Daerah dalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/asaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran yang menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

Pasal 2

Kebijakan dalam RPJMD dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:

a. RPJMN Tahun 2020 - 2024;
b. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026;
c. RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
d. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036;
e. Visi, Misi dan Program Strategis Kepala Daerah Terpilih;
f. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
g. Berorientasi pada kinerja Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD adalah:

a. Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah.
b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi.
c. Sebagai pedoman dalam:
   1. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
   2. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

(2) Sistematika RPJMD terdiri atas:

Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab III Gambaran Keuangan Daerah
Bab IV Permasalahan dan Isu strategis Daerah
Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Bab IX Penutup

(3) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

(1) Visi RPJMD adalah **" Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA) "**

(2) Misi RPJMD adalah:

a. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural;

b. Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional;

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia;

d. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;

e. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial;

(3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran RPJMD.

(3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan mewujudkan :

a) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;

b) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;

c) Konsistensi antara RKPD dan RPJMD.

(4) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi :

(a) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

(b) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah;

(c) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

(1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemantauan terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:

a. bencana alam;
b. goncangan politik;
c. krisis ekonomi;
d. konflik sosial budaya;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; atau
g. perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RKPD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Perubahan asumsi ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaan;
b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
c. Pagu indikatif dan target kinerja program perangkat daerah; dan
d. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

(3) Perubahan indikator dituangkan dalam peraturan bupati tersendiri;

(4) Perubahan RPJMD yang dituangkan pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dasar hukum atau penjelasan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat atau rancangan awal RPJMD periode berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 18 Agustus 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 06

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (6-79 / 2021)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		xi
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-9
1.4	Maksud dan Tujuan	I-15
1.5	Sistematika Penulisan	I-15
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-30
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-61
2.4	Aspek Daya Saing Rendah	II-97
BAB III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-16
3.3	Kerangka Pendanaan	III-34
BAB IV	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu-Isu Strategis	IV-57
BAB V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	V-1
5.1	Visi	V-2
5.2	Misi	V-7
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-19
BAB VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	VI-1
6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan	VI-5

6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan VI-10

6.4 Program Pembangunan VI-11

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1 Kerangka Pendanaan VII-1

7.2 Program Perangkat Daerah VII-8

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1

9.2 Pedoman Transisi IX-2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	2.1	Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-3
TABEL	2.2	Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-7
TABEL	2.3	Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-9
TABEL	2.4	Curah Hujan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019	II-10
TABEL	2,5	Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019	II-11
TABEL	2.6	Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 s/d 2019	II-12
TABEL	2.7	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2036	II-20
TABEL	2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2020	II-23
TABEL	2.9	Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-24
TABEL	2.10	Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-25
TABEL	2.11	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-26
TABEL	2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-29
TABEL	2.13	PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020 (Milyar Rupiah)	II-31
TABEL	2.14	PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020 (Milyar Rupiah)	II-32
TABEL	2.15	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)	II-39
TABEL	2.16	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 (%)	II-41
TABEL	2.17	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	II-45
TABEL	2.18	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020	II-50
TABEL	2.19	Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-53
TABEL	2.20	Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020	II-55
TABEL	2.21	AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2020	II-58
TABEL	2.22	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	II-59
TABEL	2.23	Rasio Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2020	II-59

TABEL	2.24	Persentase Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berusia 15+ Tahun Menurut Kegiatan Usaha Tahun 2020	II-60
TABEL	2.25	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-61
TABEL	2.26	APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2020	II-63
TABEL	2.27	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2016-2020	II-64
TABEL	2.28	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	II-65
TABEL	2.29	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020	II-66
TABEL	2.30	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-68
TABEL	2.31	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020	II-69
TABEL	2.32	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020	II-69
TABEL	2.33	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020	II-70
TABEL	2.34	Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	II-71
TABEL	2.35	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020	II-73
TABEL	2.36	Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020	II-73
TABEL	2.37	Capaian Perkembangan Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	II-74
TABEL	2.38	Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2016-2020	II-75
TABEL	2.39	Indikator Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020	II-76
TABEL	2.40	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020	II-77
TABEL	2.41	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020	II-77
TABEL	2.42	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020	II-77
TABEL	2.43	Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-79
TABEL	2.44	Indikator Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020	II-79
TABEL	2.45	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020	II-80
TABEL	2.46	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020	II-81

TABEL	2.47	Capaian Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) per Kategori per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	II-81
TABEL	2.48	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016 – 2020	II-85
TABEL	2.49	Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020	II-86
TABEL	2.50	Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020	II-87
TABEL	2.51	Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020	II-87
TABEL	2.52	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020	II-88
TABEL	2.53	Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020	II-88
TABEL	2.54	Indikator Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020	II-89
TABEL	2.55	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020	II-89
TABEL	2.56	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-90
TABEL	2.57	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020	II-90
TABEL	2.58	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020	II-91
TABEL	2.59	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020	II-91
TABEL	2.60	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020	II-92
TABEL	2.61	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020	II-92
TABEL	2.62	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020	II-93
TABEL	2.63	Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020	II-93
TABEL	2.64	Indikator Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020	II-94
TABEL	2.65	Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2016-2020	II-94
TABEL	2.66	Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020	II-95
TABEL	2.67	Indikator Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020	II-95
TABEL	2.68	Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020	II-96
TABEL	2.69	Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020	II-96
TABEL	2.70	Indikator Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2020	II-97
TABEL	2.71	Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2016-2020	II-98

TABEL	2.72	Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2016-2020	II-98
TABEL	2.73	Pencapaian Indikator Iklim Investasi Tahun 2016-2020	II-99
TABEL	2.74	Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2016-2020	II-100
TABEL	2.75	Hasil Analisis Gambaran Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Target RPJMD Tahun 2016-2021	II-101
TABEL	2.76	Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026	II-117
TABEL	3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020	III-4
TABEL	3.2	Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020	III-7
TABEL	3.3	Proporsi Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-8
TABEL	3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-10
TABEL	3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-13
TABEL	3.6	Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-16
TABEL	3.7	Belanja Periodik yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-26
TABEL	3.8	Total Belanja Kebutuhan Aparatur dan Total Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-28
TABEL	3.9	Komposisi Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020	III-30
TABEL	3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-31
TABEL	3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-32
TABEL	3.12	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	III-33
TABEL	3.13	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	III-36
TABEL	3.14	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	III-38
TABEL	3.15	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	III-40
TABEL	3.16	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	III-41
TABEL	3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	III-43

TABEL	4.1	Perbandingan Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6 (Enam) Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	IV-3
TABEL	4.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	IV-4
TABEL	4.3	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-5
TABEL	4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-6
TABEL	4.5	Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-7
TABEL	4.6	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-8
TABEL	4.7	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2019	IV-9
TABEL	4.8	Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2020	IV-10
TABEL	4.9	Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014-2020	IV-10
TABEL	4.10	Perkembangan Prestasi Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan	IV-11
TABEL	4.11	Rumusan Permasalahan Pokok “Belum Optimalnya Kualitas dan Kemandirian Sumber Daya Manusia”	IV-12
TABEL	4.12	Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020	IV-13
TABEL	4.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-14
TABEL	4.14	Perkembangan Struktur Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020 (%)	IV-15
TABEL	4.15	Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-17
TABEL	4.16	Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-17
TABEL	4.17	Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-18
TABEL	4.18	Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2020	IV-19
TABEL	4.19	Perbandingan Nilai PDRB ADHB Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-19
TABEL	4.20	Perbandingan Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-20

TABEL	4.21	Jumlah UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019	IV-20
TABEL	4.22	Perbandingan Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-21
TABEL	4.23	Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2014-2020	IV-22
TABEL	4.24	Perbandingan Nilai Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2019	IV-22
TABEL	4.25	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 (%)	IV-23
TABEL	4.26	Perbandingan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020	IV-24
TABEL	4.27	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-25
TABEL	4.28	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-26
TABEL	4.29	Perkembangan Tingkat Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	IV-27
TABEL	4.30	Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2018 - 2020	IV-28
TABEL	4.31	Rumusan Permasalahan Pokok “Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat”	IV-28
TABEL	4.32	Perkembangan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 - 2020	IV-31
TABEL	4.33	Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020	IV-31
TABEL	4.34	Perbandingan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020	IV-32
TABEL	4.35	Perbandingan Akses Layanan Air Minum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019	IV-33
TABEL	4.36	Perbandingan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019	IV-34
TABEL	4.37	Perbandingan Kondisi Penanganan Persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019	IV-35
TABEL	4.38	Persentase Lahan Kritis Terhadap Jumlah Keseluruhan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2017	IV-37
TABEL	4.39	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2019	IV-37
TABEL	4.40	Data Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019	IV-38
TABEL	4.41	Rumusan Permasalahan Pokok “Lambannya perkembangan kawasan pertumbuhan dan belum terpenuhinya secara merata pembangunan infrastruktur”	IV-39
TABEL	4.42	Perbandingan Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019-2020	IV-43
TABEL	4.43	Perbandingan Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019-2020	IV-44

TABEL	4.44	Rumusan Permasalahan Pokok "Adanya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat, kecenderungan naiknya kejadian penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas serta bencana"	IV-45
TABEL	4.45	Perbandingan Tingkat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 13 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019	IV-48
TABEL	4.46	Capaian Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019	IV-49
TABEL	4.47	Rumusan Permasalahan Pokok "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat"	IV-51
TABEL	4.48	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Belum Mencapai Target di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	IV-52
TABEL	4.49	Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Hulu Tengah Tahun 2005 - 2025	IV-94
TABEL	4.50	Sasaran Pembangunan Prasarana & Sarana Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 - 2025	IV-95
TABEL	5.1	Penjelasan Perumusan Misi	V-4
TABEL	5.2	Persandingan Visi RPJPD dengan RPJMD	V-5
TABEL	5.3	Persandingan Visi RPJMN. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah	V-6
TABEL	5.4	Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	V-8
TABEL	5.5	Persandingan Misi RPJPD dengan RPJMD	V-15
TABEL	5.6	Persandingan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	V-17
TABEL	5.7	Indikator Tujuan (Makro Pembangunan) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	V-23
TABEL	5.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	V-25
TABEL	6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	VI-2
TABEL	6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	VI-6
TABEL	6.3	Penjabaran Janji-Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati ke Dalam Program Pembangunan Daerah	VI-16
TABEL	6.4	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan	VI-25
TABEL	6.5	Program Pembangunan Daerah yang merupakan Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	VI-41
TABEL	7.1	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026	VII-4
TABEL	7.2	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026	VII-5

TABEL	7.3	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	VII-6
TABEL	7.4	Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021	VII-7
TABEL	7.5	Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026	VII-10
TABEL	8.1	Penetapan Indikator Kinerja Macro Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026	VIII-3
TABEL	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026	VIII-4
TABEL	8.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026	VIII-7

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	1.1	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
GAMBAR	1.2	Hubungan RPJMD dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	I-11
GAMBAR	1.3	Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah	I-12
GAMBAR	2.1	Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-4
GAMBAR	2.2	Peta Letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-5
GAMBAR	2.3	Peta Topografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-6
GAMBAR	2.4	Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-8
GAMBAR	2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-8
GAMBAR	2.6	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-9
GAMBAR	2.7	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-13
GAMBAR	2.8	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-19
GAMBAR	2.9	Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah	II-22
GAMBAR	2.10	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2020	II-24
GAMBAR	2.11	Peta Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-26
GAMBAR	2.12	Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-27
GAMBAR	2.13	Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-28
GAMBAR	2.14	Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) serta Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020	II-34
GAMBAR	2.15	Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020	II-35
GAMBAR	2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2015 - 2020 (persen)	II-36
GAMBAR	2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020	II-38
GAMBAR	2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-42
GAMBAR	2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2015-2020	II-43
GAMBAR	2.20	Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020	II-44

GAMBAR	2.21	PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (Juta Rupiah)	II-47
GAMBAR	2.22	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-48
GAMBAR	2.23	Perbandingan Gini Ratio Tahun 2015 -2019 Kabupaten HST, HSS, HSU, Balangan dan Tabalong	II-49
GAMBAR	2.24	Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-51
GAMBAR	2.25	Perbandingan Garis Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-51
GAMBAR	2.26	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2020	II-52
GAMBAR	2.27	Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-53
GAMBAR	2.28	IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-54
GAMBAR	2.29	Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-56
GAMBAR	2.30	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-56
GAMBAR	2.31	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-57
GAMBAR	2.32	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-57
GAMBAR	5.1	Diagram Elemen Visi	V-3
GAMBAR	5.2	Konstruksi Bangunan Misi Dalam Pencapaian Visi	V-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Agar pembangunan daerah dapat mengefektifkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dimaksud maka diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan secara berkualitas.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 9 Desember 2020 Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Periode 2021-2024. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan H. Aulia Oktafiandi, ST.,MApp.Com dan

Drs. H. Mansyah Sabri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Periode 2021-2024, serta telah dilantik oleh Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Februari 2021. Sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJMD dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak dilantik.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik. Dokumen RPJMD ini disusun juga dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Rancangan Awal yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Kabupaten Hulu Sungai Tengah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2021-2026 ini merupakan Tahap ke IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau yang disingkat RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2005-2025. Hal ini merupakan hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjamin kesinambungan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 ini disusun dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD, keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD, seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra berpedoman pada program prioritas dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana 5 (lima) tahun dalam RPJMD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negarai Republik Indonesia Nomor 6485);
32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah;

37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

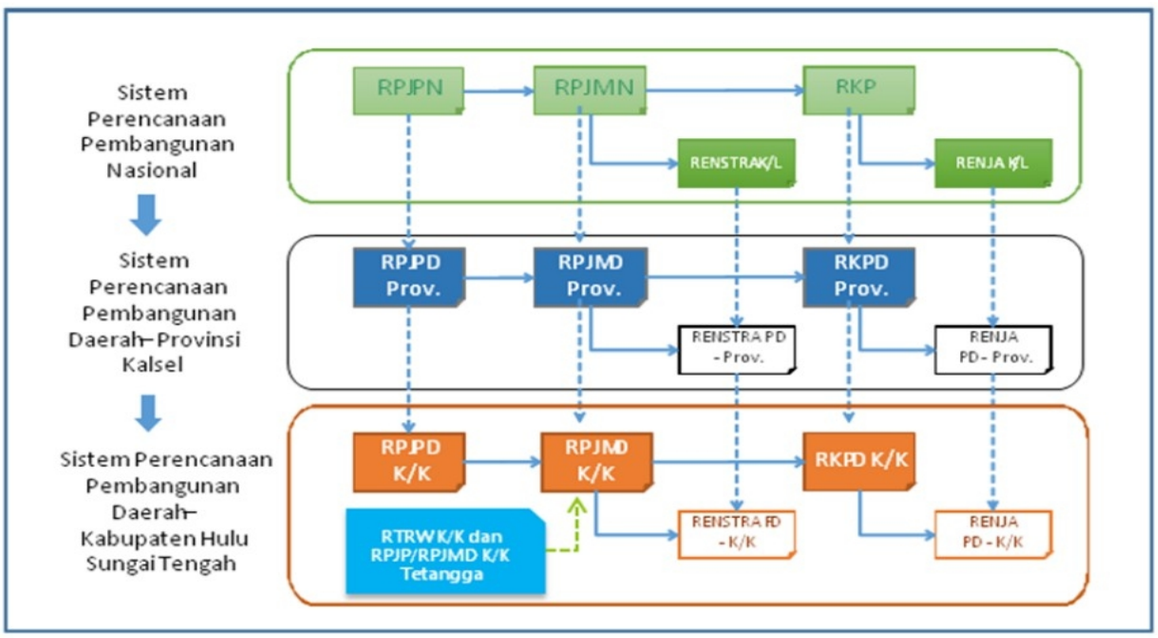
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
49. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid 19 sebagai Bencana Nasional;
50. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 ;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang daerah RPJPD, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan pada periode yang sesuai. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus memiliki garis lurus berupa pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum pada UUD 1945.

Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya diterjemahkan secara operasional ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut sangat krusial untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan, agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

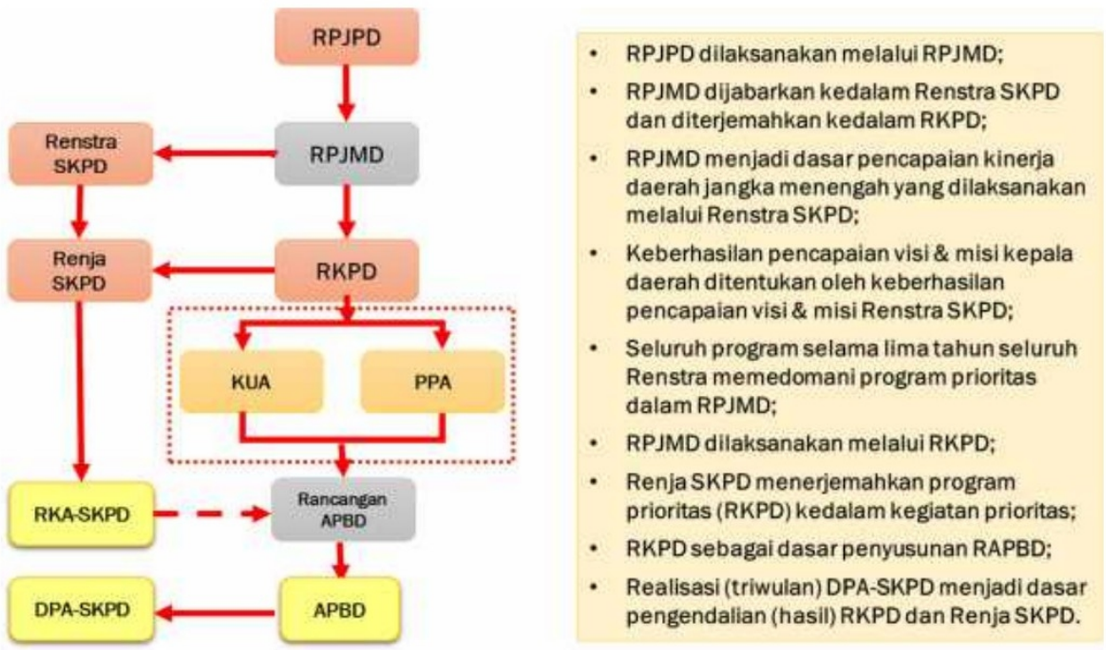


Gambar 1. 1. Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Diagram Hubungan pada gambar diatas, sistem perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi perencanaannya baik dari Rencana jangka panjang, menengah maupun tahunan. Selanjutnya, RPJMD di samping harus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah, juga harus mempedomani RPJPD dan RPJMN.

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

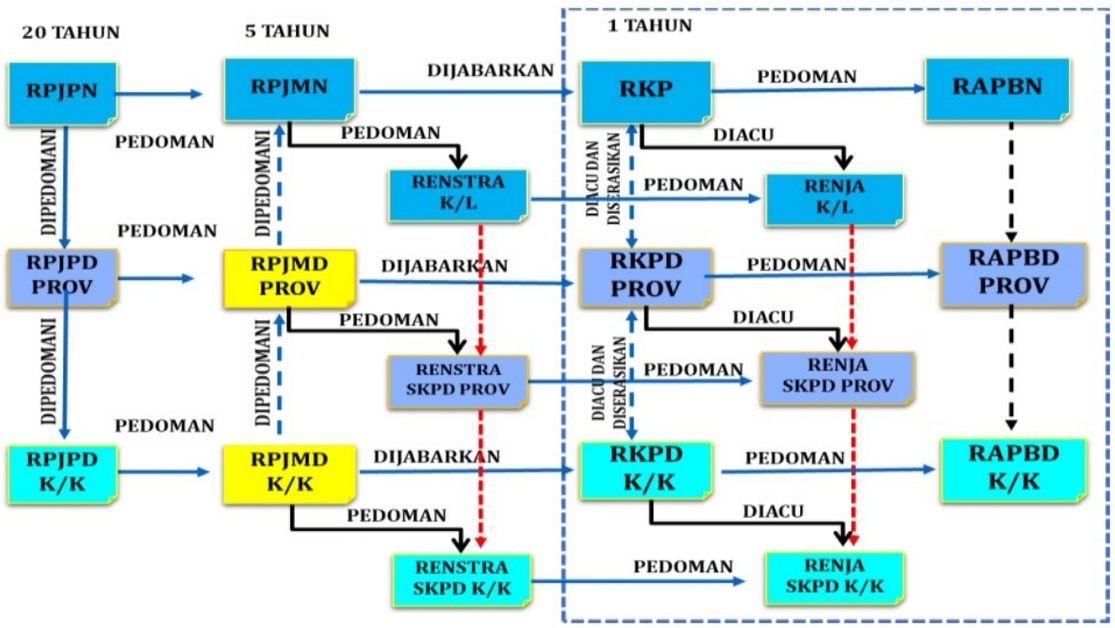


Gambar 1. 2. Hubungan RPJMD dalam Kerangka Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

1.3.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya

RPJMD disusun dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi, untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan strategi serta program pembangunan. Selanjutnya, RPJMD akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD. Secara bersamaan, baik RPJMD maupun Renstra PD akan digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang terinci ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD.

Dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD daerah sekitar. Penjelasan tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini.



Gambar 1. 3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

1.3.1.1 RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka menengah 2021-2026 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahap pada periode keempat.

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.1.2 RPJMD dengan RKPD, Renstra PD dan Renja PD

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan Pemerintah Daerah. RPJMD dan RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat Daerah dalam menyusun rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.1.3 RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.3.1.4 RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RTRW

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan setiap Rencana Tata Ruang (RTR), baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam penyusunannya harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adanya integrasi antara RTR dengan kebijakan pembangunan. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan RPJMD, dan sekaligus RTRW kabupaten/kota juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD. RTRW berperan sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah, memberikan norma, batasan, dan arahan terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah, termasuk pengendaliannya sehingga harmonisasi antara RTRW dengan RPJMD dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dengan baik. Dengan kata lain, RTRW harus dapat menjadi pedoman bagi perumusan RPJMD dan RPJPD di daerah.

1.3.3 Hubungan RPJMD dengan KLHS

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, adalah dalam rangka tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan dalam menetapkan :

a. Arah kebijakan keuangan daerah.
b. Strategi pembangunan daerah.
c. Kebijakan umum daerah.
d. Program PD dan lintas PD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Rendah
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu-Isu Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Strategi
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan
6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan
6.4 Program Pembangunan
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7.1. Kerangka Pendanaan
7.2 Program Perangkat Daerah
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP
9.1 Kaidah Pelaksanaan
9.2 Pedoman Transisi
LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut *Barabai Plaatslijke*. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah bahwa tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, rumusan kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah ini selanjutnya menjadi titik tolak pengembangan berbagai program prioritas.

Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi terkait geografi dan demografi wilayah menjadi landasan dan dasar kajian yang penting. Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Selain itu, analisis terhadap aspek demografi dalam pembangunan daerah dapat memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan.

Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama utamanya dalam partisipasi sumberdaya manusia dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1,770,77 km^2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa. Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

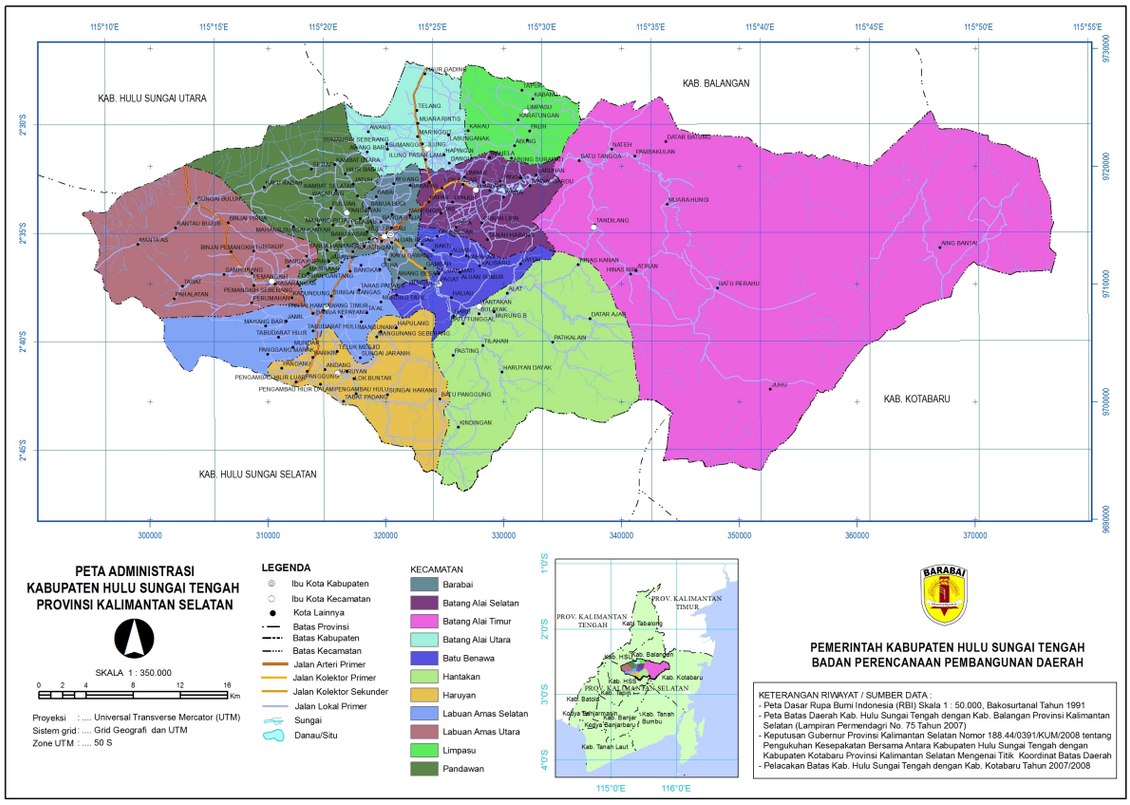
Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km²)	%	Kelu rahan	Desa	RW	RT
1	Haruyan	Haruyan	101,35	5,72	-	17	51	103
2	Batu Benawa	Pagat	54,44	3,07	-	14	41	80
3	Hantakan	Hantakan	208,55	11,78	-	12	36	60
4	Batang Alai Selatan	Birayang	76,06	4,3	1	18	51	90
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71	43,98	-	11	33	57
6	Barabai	Barabai	40,71	2,3	6	12	30	90
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82	5,52	1	17	51	91
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32	9,62	-	16	40	102
9	Pandawan	Pandawan	116,41	6,57	-	21	60	127
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36	3,69	-	14	42	82
11	Limpasu	Limpasu	61,04	3,45	-	9	27	47
	Jumlah		**1,770,77**	**100**	**8**	**161**	**462**	**929**

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2020

Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. 1. Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

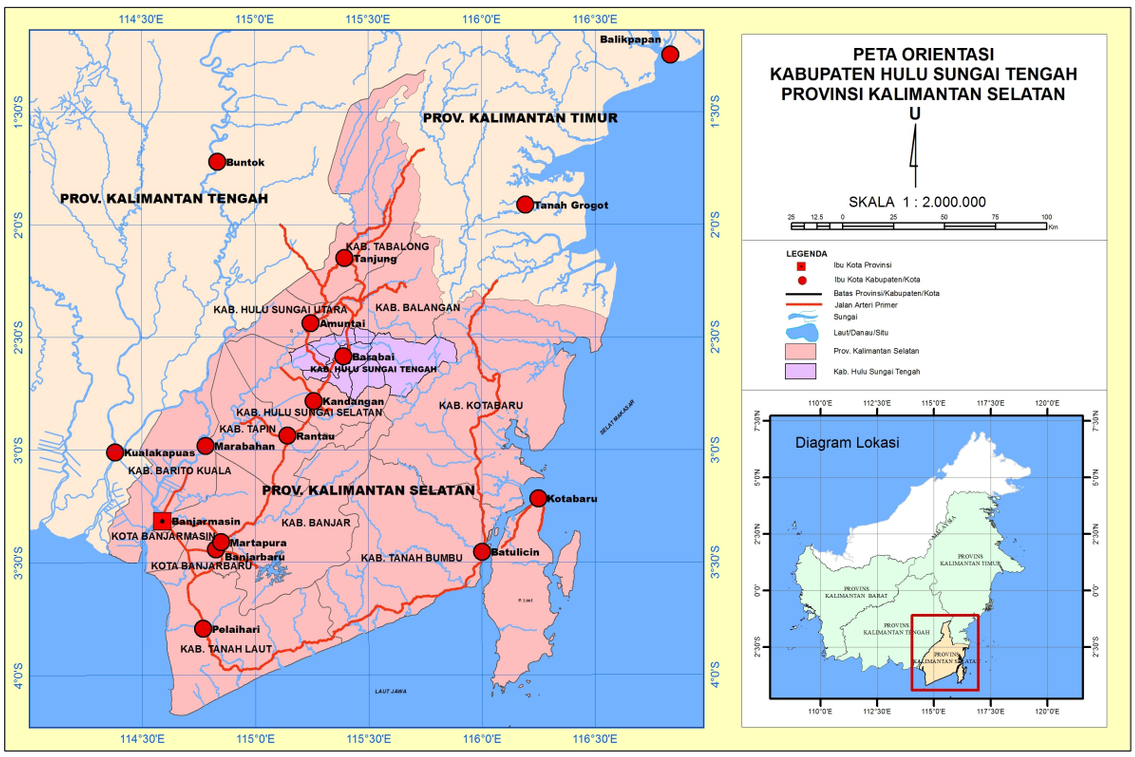
Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di

sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut “Banua Anam”. Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.



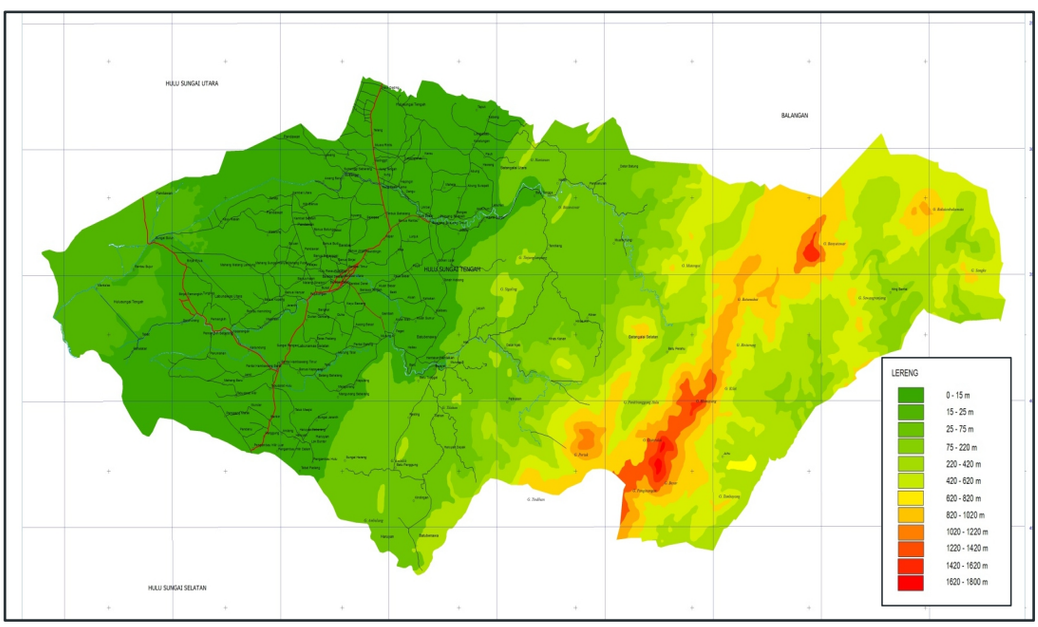
Gambar 2. 2. Peta Letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan >25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100-500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000 mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl

seluas 9.152,63 ha. Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus dengan ketinggian ± 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas 20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha.

Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.



Gambar 2. 3. Peta Topografi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

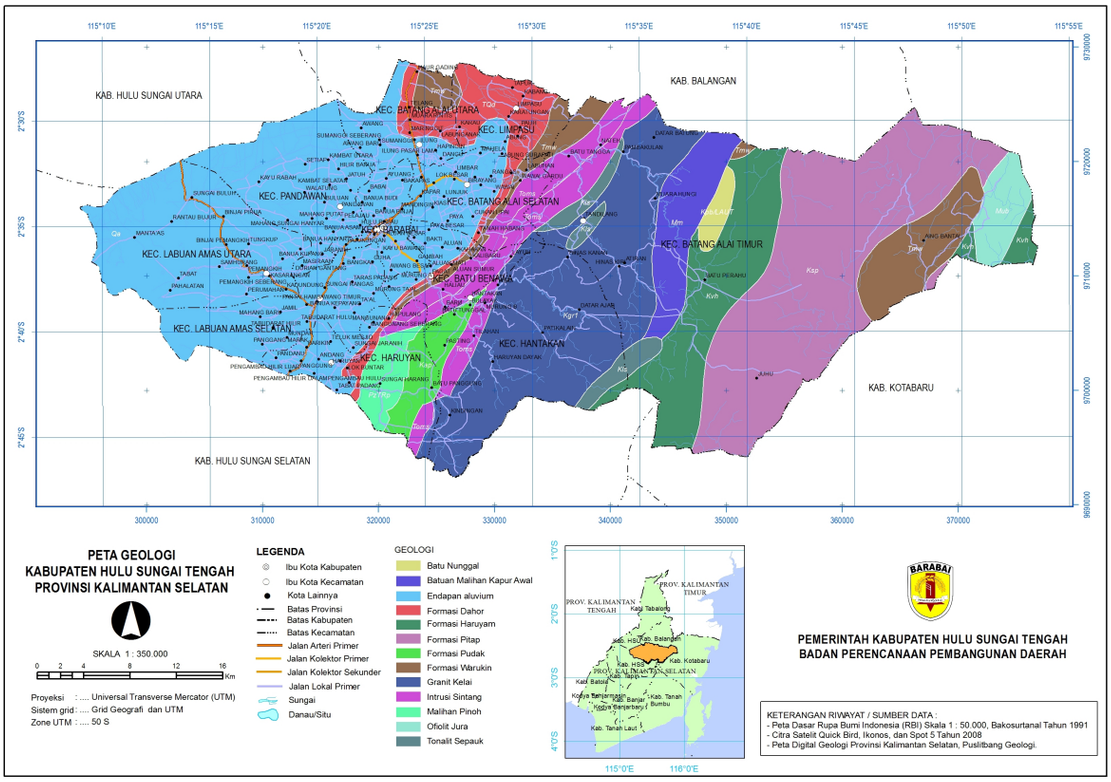
4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC (terdiri atas Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut :

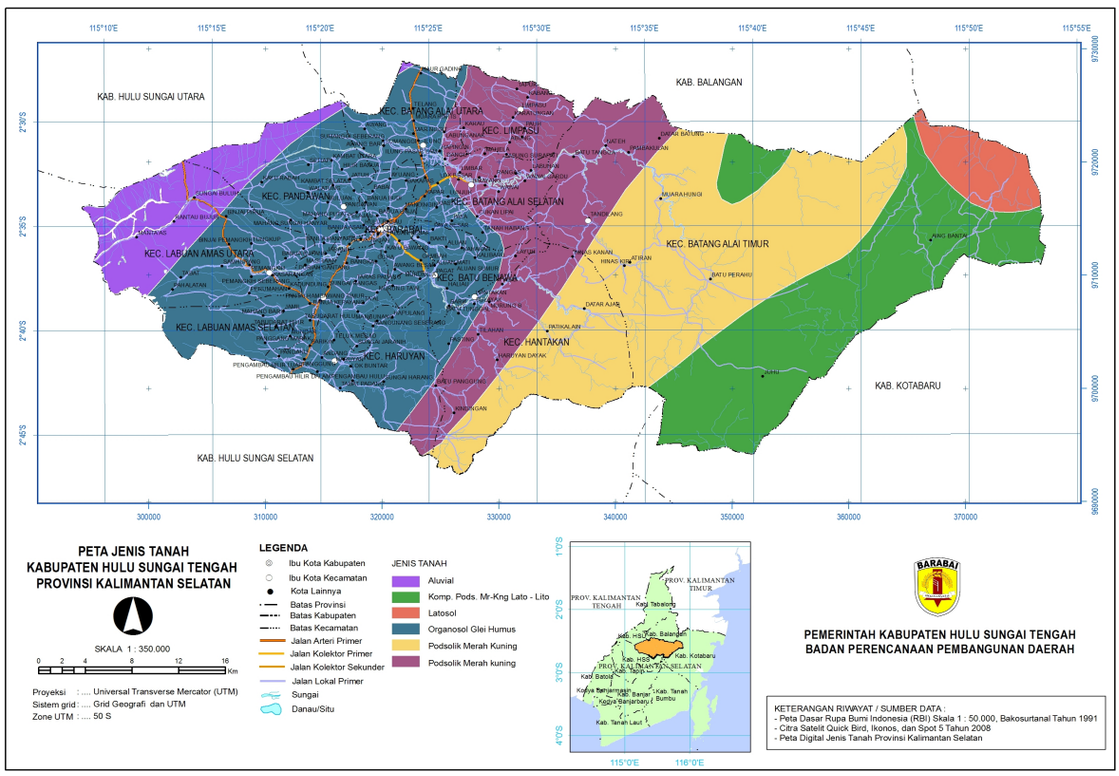
Tabel 2. 2. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate:*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub-volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub-volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high-grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2016



Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Gambar 2. 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

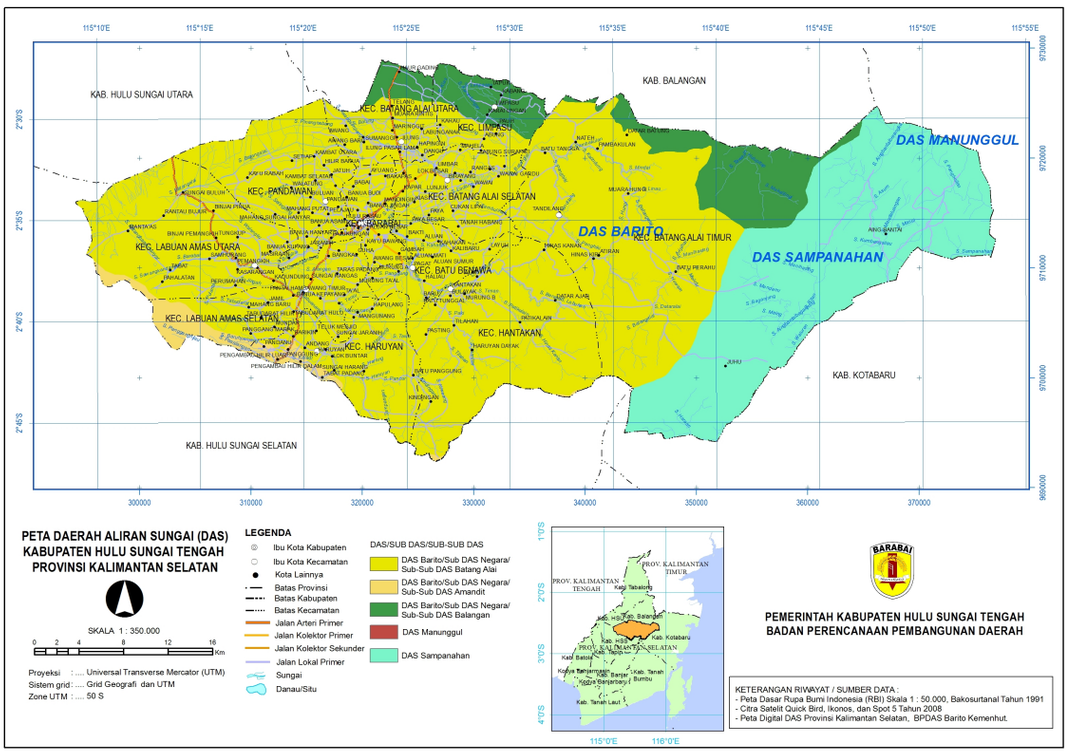
5. Hidrologi

Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada dalam wilayah Sub-Sub DAS Batang Alai yang merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Negara dan DAS Barito sebagai daerah tangkapan air sebelah barat Pegunungan Meratus dan DAS Sampanahan sebagai daerah tangkapan air sebelah timur Pegunungan Meratus.

Tabel 2. 3. Area Wilayah DAS dan Sub DAS di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	DAS	Sub DAS	Sub-Sub DAS	Luas (Ha)
1.	Barito	Negara	Balangan Batang Alai Amandit	13.990 121.765 3.520
2.	Sampanahan	-	-	37.800
3.	Manunggul	-	-	5
JUMLAH				177.080

Sumber : Peta Digital DAS Provinsi Kalimantan Selatan, BPDAS Barito KLHK



Gambar 2. 6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

6. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata pada tahun 2019 adalah sebanyak 225 mm3 dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 18 hari/bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 4. Curah Hujan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	**Januari**	330,9	22	50,79
2	**Februari**	185,3	15	62,79
3	**Maret**	225,6	18	46,62
4	**April**	426,3	18	56,00
5	**Mei**	72,1	11	80,90
6	**Juni**	118,3	15	63,29
7	**Juli**	65,6	7	77,39
8	**Agustus**	27,8	7	86,67

No	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
9	**September**	1,0	1	82,87
10	**Oktober**	85,1	10	69,00
11	**November**	128,4	10	65,00
12	**Desember**	304,2	22	41,90

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2020

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata sekitar 29 ° C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara di Hulu Sungai Tengah adalah 84%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

Bulan	Temperatur (oC)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari	36,2	22,4	29,3	98,0	77,0	87,5
Februari	38,4	22,6	30,5	98,0	74,2	86,1
Maret	36,0	22,2	29,1	98,0	74,4	86,2
April	36,0	23,2	29,6	98,0	77,6	87,8
Mei	36,6	22,5	29,55	98,0	71,0	84,5
Juni	35,4	20,8	28,1	98,0	74,6	86,3
Juli	36,2	18,2	27,2	98,0	65,4	81,7
Agustus	37,0	19,6	28,3	98,0	62,4	80,2
September	39,4	17,0	28,2	98,0	56,8	77,4
Oktober	38,8	19,2	29	98,0	64,4	81,2
November	38,2	21,6	29,9	98,0	67,6	82,8
Desember	36,0	23,2	29,6	98,0	76,6	87,3

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2020

7. Penggunaan Lahan

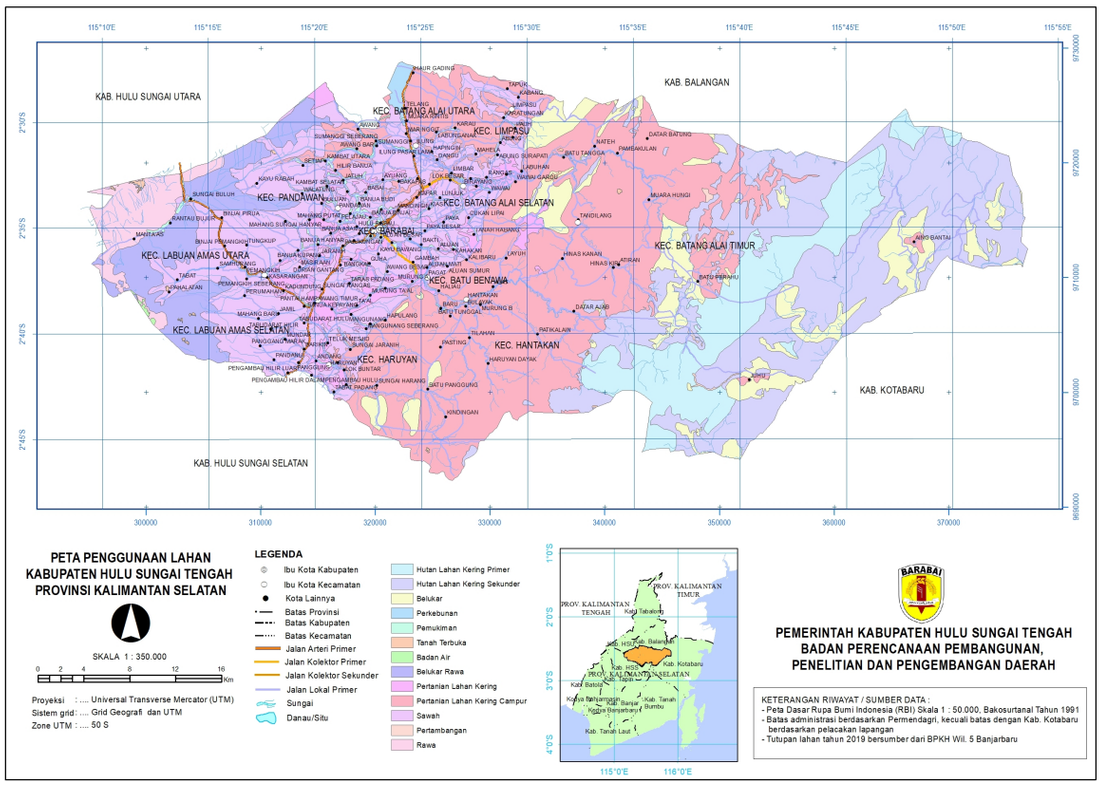
Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara umum masih didominasi oleh daerah persawahan, perkebunan dan berupa hutan. Bentuk penggunaan lahan seperti ini menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dan merupakan penunjang utama sistem perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, daerah penggunungan yang didominasi hutan sebagai pengatur tata air dan menjadikan daerah penyangga bagi wilayah di bawahnya.

Berdasarkan penggunaan lahan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016-2019 penggunaan lahannya dapat dilihat sebagaimana pada tabel dan peta berikut :

Tabel 2. 6. Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 s/d 2019

No.	Kelas Tutupan Lahan	Luas (Ha)			
		2016	2017	2018	2019
1	Hutan Lahan Kering Primer	14.896	14.896	14.896	14.896
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	34.958	34.789	35.367	35.291
3	Belukar	13.520	13.539	12.982	12.419
4	Perkebunan	9	9	9	585
5	Pemukiman	3.832	3.876	4.157	4.157
6	Tanah Terbuka	289	338	63	204
7	Badan Air	68	70	70	70
8	Belukar Rawa	6.036	6.033	6.033	9.441
9	Pertanian Lahan Kering	11.077	10.696	10.696	7.039
10	Pertanian Lahan Kering Campur	56.354	56.389	56.363	56.963
11	Sawah	31.528	31.896	31.896	31.531
12	Pertambangan	60	160	160	160
13	Rawa	4.492	4.425	4.425	4.361
Total Luas (Ha)		**177.118**	**177.118**	**177.118**	**177.118**

Sumber : BPKH Wilayah V Banjarbaru KLHK, 2021



Gambar 2. 7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

a). Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya berada di

Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan.

- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur.

- Kawasan Perlindungan Setempat

  Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung, Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan

Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan, Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.

- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam

  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam Tumenggung Jayapati Kecamatan Limpasu, makam wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat yang berada di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Rawan Bencana Alam

  Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari : Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak, Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran hutan yang berada di Kecamatan Batang Alai Timur,

Batang Alai Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran permukiman di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Lindung Geologi

  Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan dan Labuan Amas Selatan.

b). Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan budidaya, terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan parawisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.

- Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan

pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha, kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang meliputi kawasan perternakan kerbau rawa, kawasan perternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.

- Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi : kawasan perikanan budidaya air tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan, Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan, Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta'as Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi : mineral logam terdiri dari emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam terdiri dari phospat dan lempung; batuan terdiri dari granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan peruntukan industri menengah berupa industri karet di Kecamatan Haruyan dan Indutri Logam di Kecamatan Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro berupa industry kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas Selatan, industry kerajinan anyaman, batubata, meubel di Kecamatan Pandawan, industry meubel di Kecamatan Batu Benawa, industry jasa perbengkelan dan mesin dan

industry produk makanan olahan di Kecamatan Barabai, industry kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di Kecamatan Haruyan, industry meubel dan hasil perikanan di Kecamatan Labuan Amas Utara, industry aneka makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industry arang kelapa di Kecamatan Limpasu.

- Kawasan Peruntukan Pariwisata

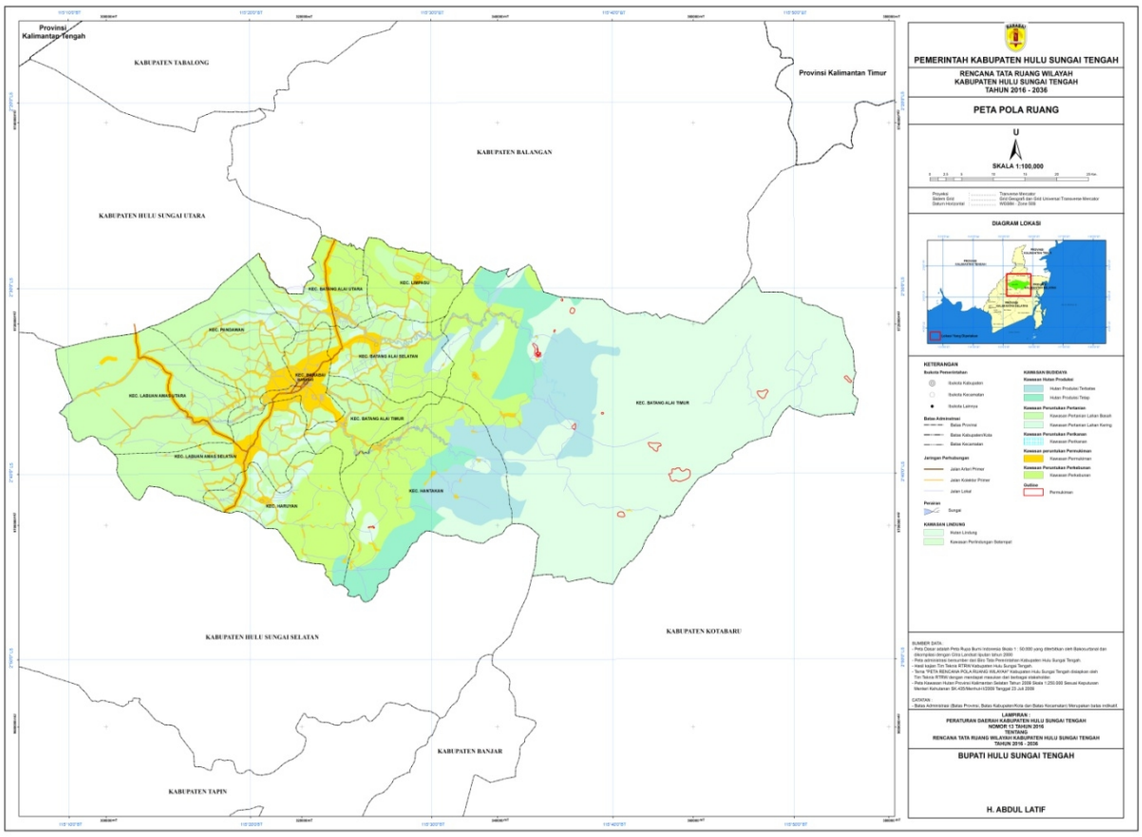
Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari (1) Wisata Budaya yang meliputi kecamatan Haruyan, Hantakan, Labuan Amas Utara dan Batang Alai Timur; (2) Wisata Religi yang meliputi kecamatan Barabai, Pandawan, Labuan Amas Selatan, Batu Benawa dan Labuan Amas Utara; (3) Wisata Alam yang meliputi kecamatan Batu Benawa, Hantakan, Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan, Limpasu dan Labuan Amas Utara; (4) Wisata Kuliner yang meliputi kecamatan Barabai dan Batang Alai Utara; dan (5) Sentra Kerajinan Pendukung Kepariwisataan yang meliputi kecamatan Haruyan berupa kerajinan anyaman ijuk, dan kecamatan Pandawan berupa kerajinan anyaman purun.

- Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha, kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha, Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha, Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha, Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara yang seluas 1.615 ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.

- Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisan Sektor dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah kecamatan.



Gambar 2. 8. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai daya dukung untuk mengembangkan berbagai potensi sumberdaya dengan kebijakan pembangunan spasial dalam rumusan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daya dukung geografis tersebut antara lain letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pusat banua anam dan menjadi perlintasan jalur antar daerah dan jalur antar provinsi sehingga posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat mendukung untuk berbagai budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dalam rangka realisasi pembangunan, dirumuskan kawasan strategis untuk mendukung potensi pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 7. Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036

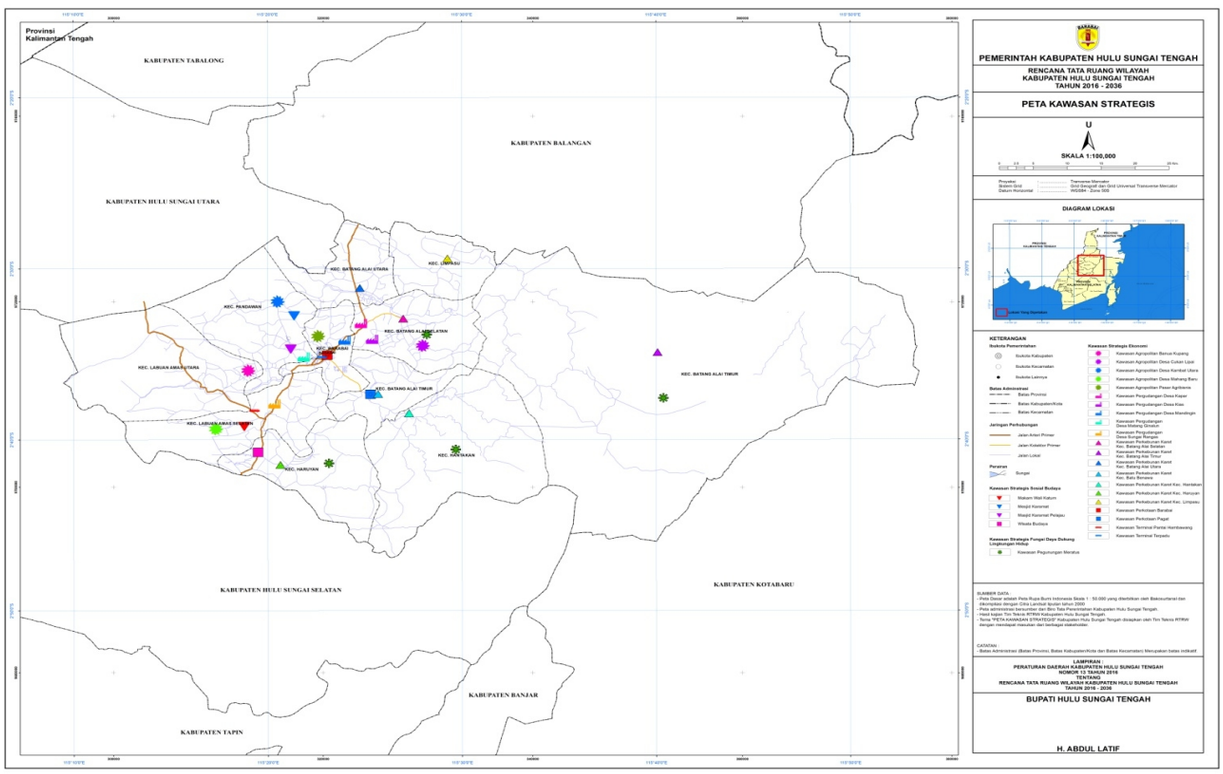
Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
Kabupaten	Kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perkotaan Barabai sebagai ibukota kabupaten	
		Kawasan Pagat di Kecamatan Batu Benawa	
		Kawasan *agropolitan*	Pasar agribisnis di Kecamatan Barabai
			Desa Banua Kupang di kecamatan Labuan Amas Utara
			Desa Cukan Lipai di Kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Kambat Utara di Kecamatan Pandawan
			Desa Murung Taal dan Mahang Baru di Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
		Kawasan pergudangan	Desa Mandingin di Kecamatan Barabai
			Desa Kapar dan Desa Kias di kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Sungai Rangas di Kecamatan Labuan Amas Selatan
			Desa Matang Ginalun di Kecamatan Pandawan
			Kawasan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Barabai
		Kawasan terminal Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Kawasan terminal terpadu di Kecamatan Barabai	
		Kawasan *strategis* ekonomi jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Barabai	
		Kawasan perkebunan karet	Kecamatan Batang Alai Selatan
			Kecamatan Hantakan
			Kecamatan Batang Alai Timur
			Kecamatan Limpasu
			Kecamatan Batang Alai Utara
			Kecamatan Batu Benawa
			Kecamatan Haruyan
	Kepentingan Sosial Budaya	Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau kecamatan Pandawan	
		Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan Pandawan	

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi
		Makam Wali Katum di desa Tabudarat Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan
		Wisata Budaya di Desa Barikin Kecamatan Haruyan
	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan
	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036

Detail lokasi kawasan strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. 9. Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 berjumlah 244.889 Jiwa, sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2018 diperkirakan berjumlah 269.384 jiwa. Dalam kurun waktu enam tahun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 15.403 jiwa atau sebesar 8,83%. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

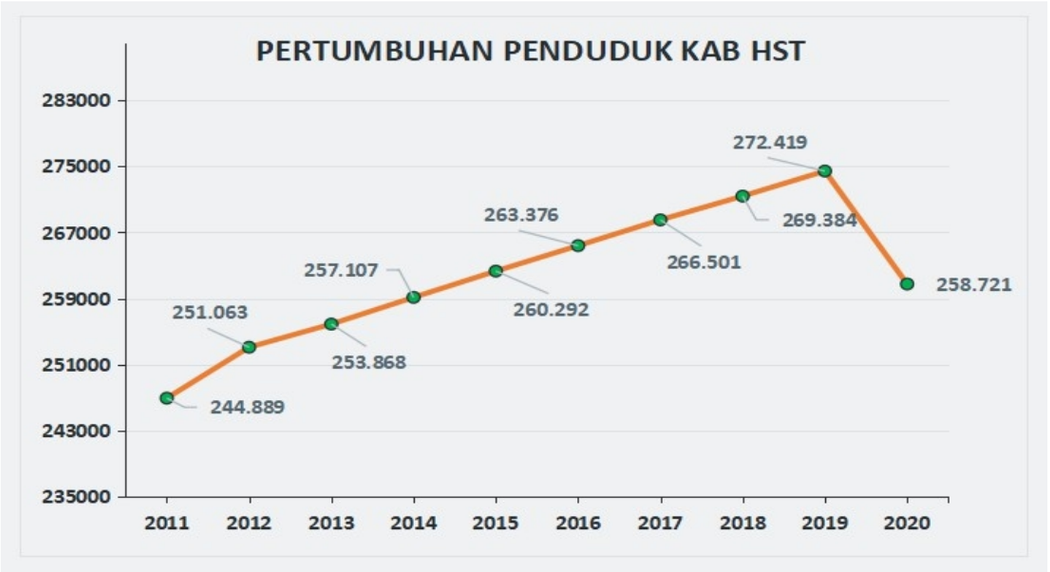
Tabel 2. 8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
2011	122.213	122.676	244.889
2012	125.312	125.751	251.063
2013	126.887	126.981	253.868
2014	128.464	128.643	257.107
2015	130.252	130.040	260.292
2016	131.875	131.501	263.376
2017	133.695	132.806	266.501
2018	135.173	134.211	269.384
2019	136.778	135.641	272.419
2020	130.068	128.653	258.721

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (September) yang telah dilaksanakan oleh BPS, terdapat koreksi atau penurunan

jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hingga total penduduknya menjadi 258.721 jiwa.



Gambar 2. 10. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 - 2020

Pada tahun 2020, terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Diketahui bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih sedikit dibandingkan berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 130.068 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 128.653 jiwa dengan sex ratio 101,1.

Tabel 2. 9. Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Orang)	Sex ratio
1	Haruyan	101,35	21.635	101,0
2	Batu Benawa	54,44	19.699	100,6
3	Hantakan	208,55	12.393	104,8
4	Batang Alai Selatan	76,06	23.560	99,4
5	Batang Alai Timur	778,71	7.099	106,9
6	Barabai	40,71	55.754	98,9

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Orang)	Sex ratio
7	Labuan Amas Selatan	97,82	28.436	99,3
8	Labuan Amas Utara	170,32	27.023	102,6
9	Pandawan	116,41	34.103	103,1
10	Batang Alai Utara	65,36	18.040	101,9
11	Limpasu	61,04	10.979	103,4
Jumlah		**1770,77**	**258.721**	**101,1**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2. 10. Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Haruyan	10.869	10.766	21.635
2	Batu Benawa	9.877	9.822	19.699
3	Hantakan	6.342	6.051	12.393
4	Batang Alai Selatan	11.743	11.817	23.560
5	Batang Alai Timur	3.668	3.431	7.099
6	Barabai	27.721	28.033	55.754
7	Labuan Amas Selatan	14.165	14.271	28.436
8	Labuan Amas Utara	13.685	13.338	27.023
9	Pandawan	17.311	16.792	34.103
10	Batang Alai Utara	9.106	8.934	18.040
11	Limpasu	5.581	5.398	10.979
Jumlah		**130.068**	**128.653**	**258.721**

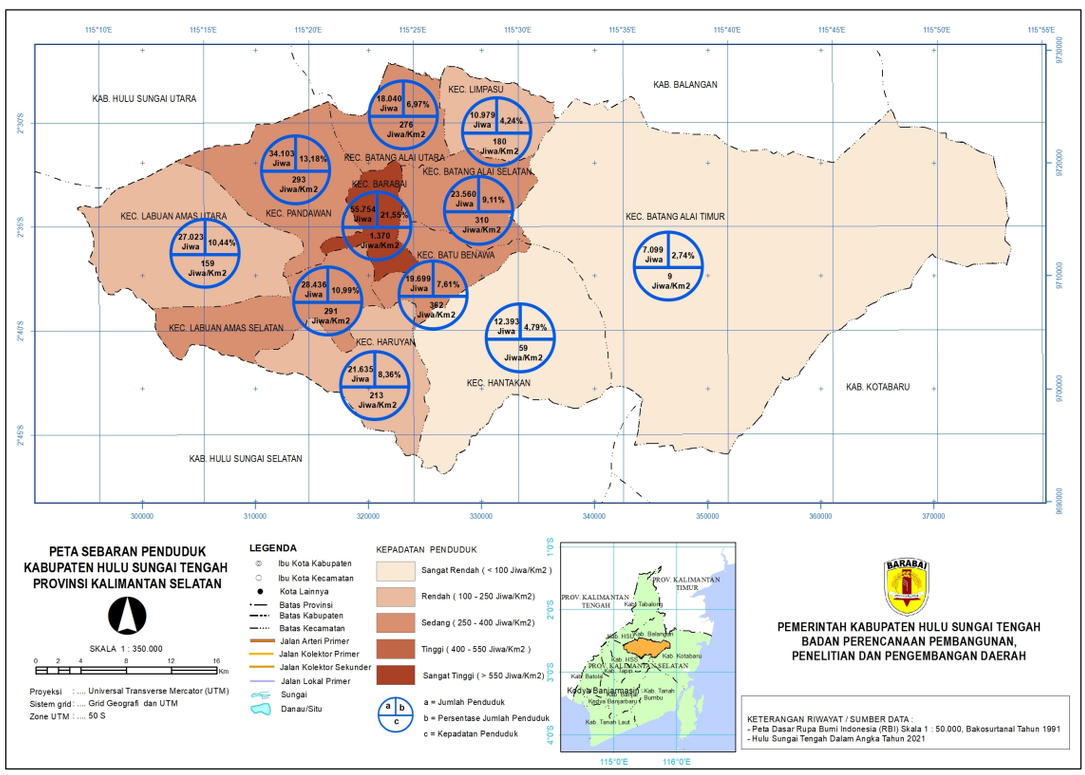
Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Meskipun terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, ternyata pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk dari tahun 2019 sebelumnya baik jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Pengurangan jumlah penduduk ini akan berdampak pada kepadatan penduduk. Pada tahun 2020, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 146 jiwa/Km^2. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11. Kepadatan Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

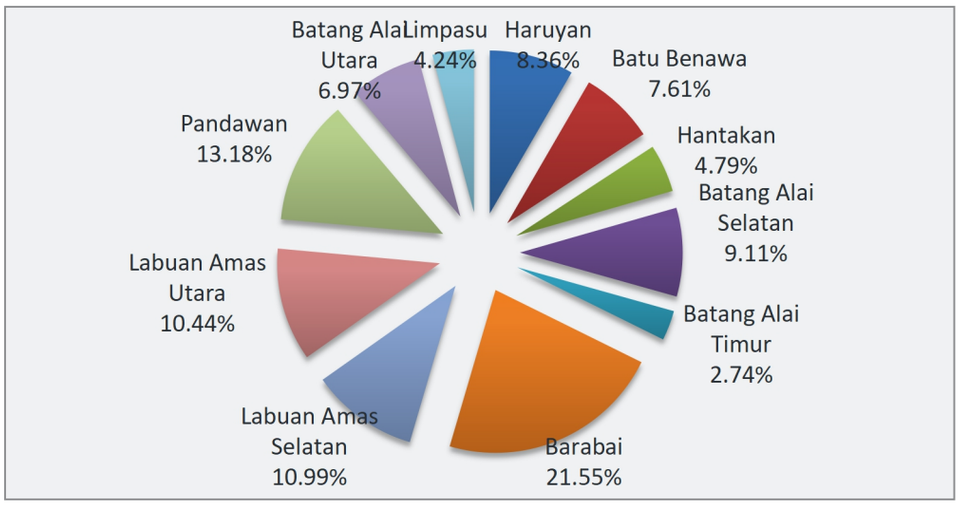
No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per km2)
1	Haruyan	101,35	21.635	8,36	213
2	Batu Benawa	54,44	19.699	7,61	362
3	Hantakan	208,55	12.393	4,79	59
4	Batang Alai Selatan	76,06	23.560	9,11	310
5	Batang Alai Timur	778,71	7.099	2,74	9
6	Barabai	40,71	55.754	21,55	1370
7	Labuan Amas Selatan	97,82	28.436	10,99	291
8	Labuan Amas Utara	170,32	27.023	10,44	159
9	Pandawan	116,41	34.103	13,18	293
10	Batang Alai Utara	65,36	18.040	6,97	276
11	Limpasu	61,04	10.979	4,24	180
	Jumlah	**1770,77**	**258.721**	**100,00**	**146**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021



Gambar 2. 11. Peta Distribusi Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di Kecamatan Barabai yakni sebesar 1.370 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur sebesar 9 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketimpangan distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020, dapat dilihat pada gambar berikut.

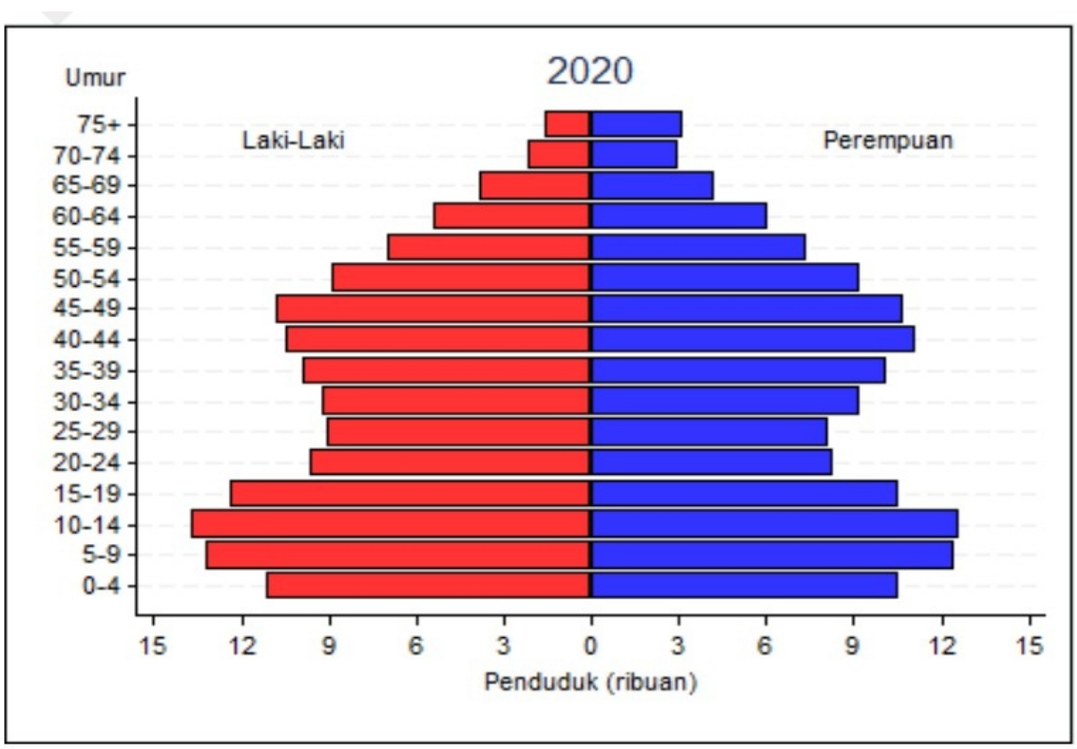


Gambar 2. 12. Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Distribusi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat berdasarkan wilayah kecamatan tidak merata, terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai dengan jumlah penduduk sebanyak 55.754 jiwa atau 21,55%) dengan kecamatan yang minim penduduk (Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.099 jiwa atau 2,74%). Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Barabai yang merupakan ibukota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Pandawan (13,18%) yang sebagian wilayahnya dekat dengan perkotaan Barabai, Kecamatan Labuan Amas Utara (10,44%) dan Labuan Amas Selatan (10,99%) yang sebagian wilayahnya dilalui jalur antar provinsi. Ketimpangan distribusi penduduk

ini dikarenakan tidak meratanya fasilitas antar wilayah kecamatan. Daerah perkotaan lebih menarik sebagian besar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan fasilitasnya yang lebih lengkap.

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 258.721 jiwa yang terdiri atas 130.068 jiwa penduduk laki-laki dan 128.653 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,1. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif seimbang. Selain itu, sebanyak 65.476 jiwa (25,31%) penduduk pada kelompok umur 0-14 tahun, 178.500 jiwa (68,99%) penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun, dan 14.745 jiwa (5,70%) penduduk pada kelompok umur 65 tahun keatas dengan rasio ketergantungan 49,87.



Gambar 2. 13. Piramida Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Tabel 2. 12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	11.139	10.801	21.940
5-9	11.644	11.259	22.903
10-14	10.628	10.005	20.633
15-19	11.588	10.717	22.305
20-24	11.469	10.165	21.634
25-29	10.661	9.570	20.231
30-34	10.054	9.448	19.502
35-39	8.888	8.608	17.496
40-44	9.003	9.175	18.178
45-49	8.621	9.069	17.690
50-54	8.049	8.527	16.576
55-59	7.053	7.149	14.202
60-64	5.074	5.612	10.686
65-69	3.236	3.644	6.880
70-75	1.579	2.386	3.965
75+	1.382	2.518	3.900
Total	**130.068**	**128.653**	**258.721**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki piramida penduduk muda atau ekspansif. Sebagian besar penduduk merupakan penduduk umur muda dengan jumlah kelahiran dan kematian masih cukup tinggi. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi penduduk umur sekolah atau penduduk kelompok umur 5-19 tahun. Piramida penduduk meramping pada penduduk kelompok umur 20-34 tahun.

Jumlah kelahiran selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan semakin kecilnya jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok umur 5-9 tahun. Hal ini terkait dengan semakin intensifnya program Keluarga Berencana (KB) dan meningkatnya kesadaran pasangan usia subur untuk mengatur kelahiran. Selain itu, masih banyaknya penduduk

usia tua menunjukkan semakin baiknya tingkat kesehatan dan meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten HST.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari capaian pembangunan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga. Pada aspek ini terlihat sebuah f*enomena* daerah serta *analisis* dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain: Produk *Domestik Regional Bruto* (3), PDRB Perkapita, struktur perekonomian wilayah, Indeks gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju *inflasi* hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan.

1. Nilai Produk *Domestik Regional Bruto*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga

menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 13. PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.311,30	1.438,48	1.552,88	1.653,20	1.695,97	1.704,46
B	Pertambangan dan Penggalian	37,87	41,25	45,10	49,14	53,05	52,39
C	Industri Pengolahan	773,78	834,63	909,13	954,49	1.006,45	989,95
D	Pengadaan Listrik, Gas	6,15	8,01	9,40	11,02	11,86	12,72
E	Pengadaan Air	24,53	26,60	29,62	32,01	35,01	35,20
F	Konstruksi	443,60	485,43	534,46	571,08	609,61	594,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	523,72	590,75	650,14	727,33	823,18	819,73
H	Transportasi dan Pergudangan	247,67	280,29	295,71	314,91	339,75	333,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,58	199,08	216,33	238,99	265,64	263,00
J	Informasi dan Komunikasi	208,79	230,40	254,18	279,73	306,70	329,81
K	Jasa Keuangan	104,07	114,81	130,69	144,03	155,36	156,20
L	Real Estate	169,15	184,57	194,42	212,24	231,20	238,54
M,N	Jasa Perusahaan	9,97	11,03	12,21	13,59	14,82	14,53

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	566,13	594,26	625,69	674,38	727,72	726,15
P	Jasa Pendidikan	359,61	417,92	446,51	481,94	522,36	528,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	98,98	112,49	119,51	128,89	139,60	151,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	69,99	77,65	84,03	92,37	102,17	103,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**5.135,88**	**5.647,63**	**6.109,98**	**6.579,34**	**7.040,47**	**7.054,45**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari Tabel diatas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan sebesar 24,91%. Hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

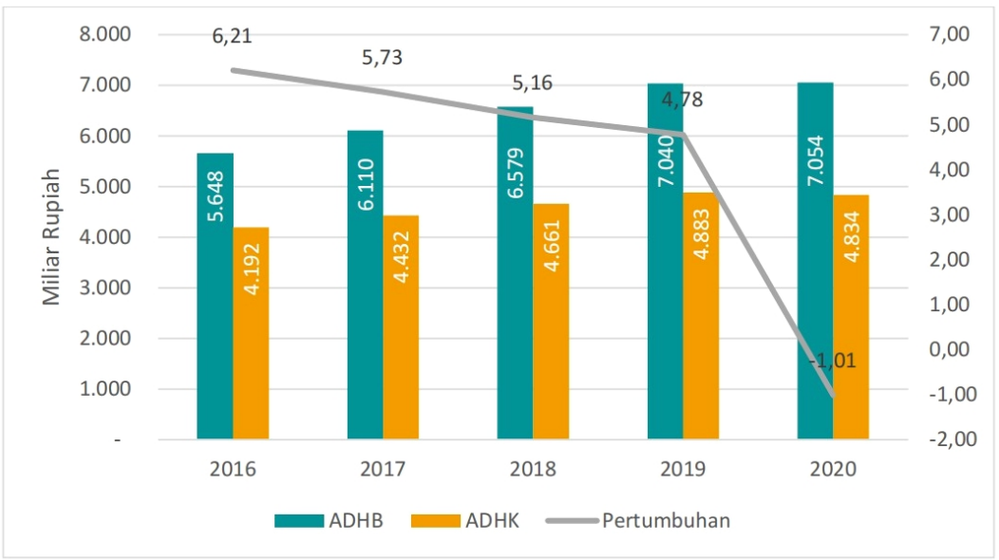
Tabel 2. 14. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020 (Milyar Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.035,33	1.096,33	1.160,07	1.210,22	1.229,22	1.225,92
B	Pertambangan dan Penggalian	28,49	30,01	32,55	34,56	36,95	36,15
C	Industri Pengolahan	586,90	621,11	654,10	682,48	706,53	681,61
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,81	6,15	6,47	6,93	7,27	7,58
E	Pengadaan Air	19,16	20,53	22,10	23,35	25,13	25,03
F	Konstruksi	342,70	364,37	391,18	407,25	428,01	415,73

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	394,72	425,93	456,36	493,15	533,05	514,79
H	Transportasi dan Pergudangan	191,21	204,02	214,43	225,46	237,39	228,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	141,83	152,50	161,49	172,44	185,77	180,85
J	Informasi dan Komunikasi	176,64	192,37	205,84	220,90	238,32	257,67
K	Jasa Keuangan	78,60	83,56	91,21	96,41	101,01	102,11
L	Real Estate	134,49	142,59	149,73	159,79	170,90	174,35
M,N	Jasa Perusahaan	7,16	7,69	8,22	8,83	9,39	9,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	397,52	405,71	416,56	432,21	456,63	448,12
P	Jasa Pendidikan	280,46	302,86	318,70	336,48	358,77	362,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	74,12	80,88	84,83	88,48	93,76	99,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	51,73	55,34	58,17	61,64	65,31	64,22
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**3.946,89**	**4.191,95**	**4.431,99**	**4.660,57**	**4.883,41**	**4.834,07**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini menunjukan adanya perbaikan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK, serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

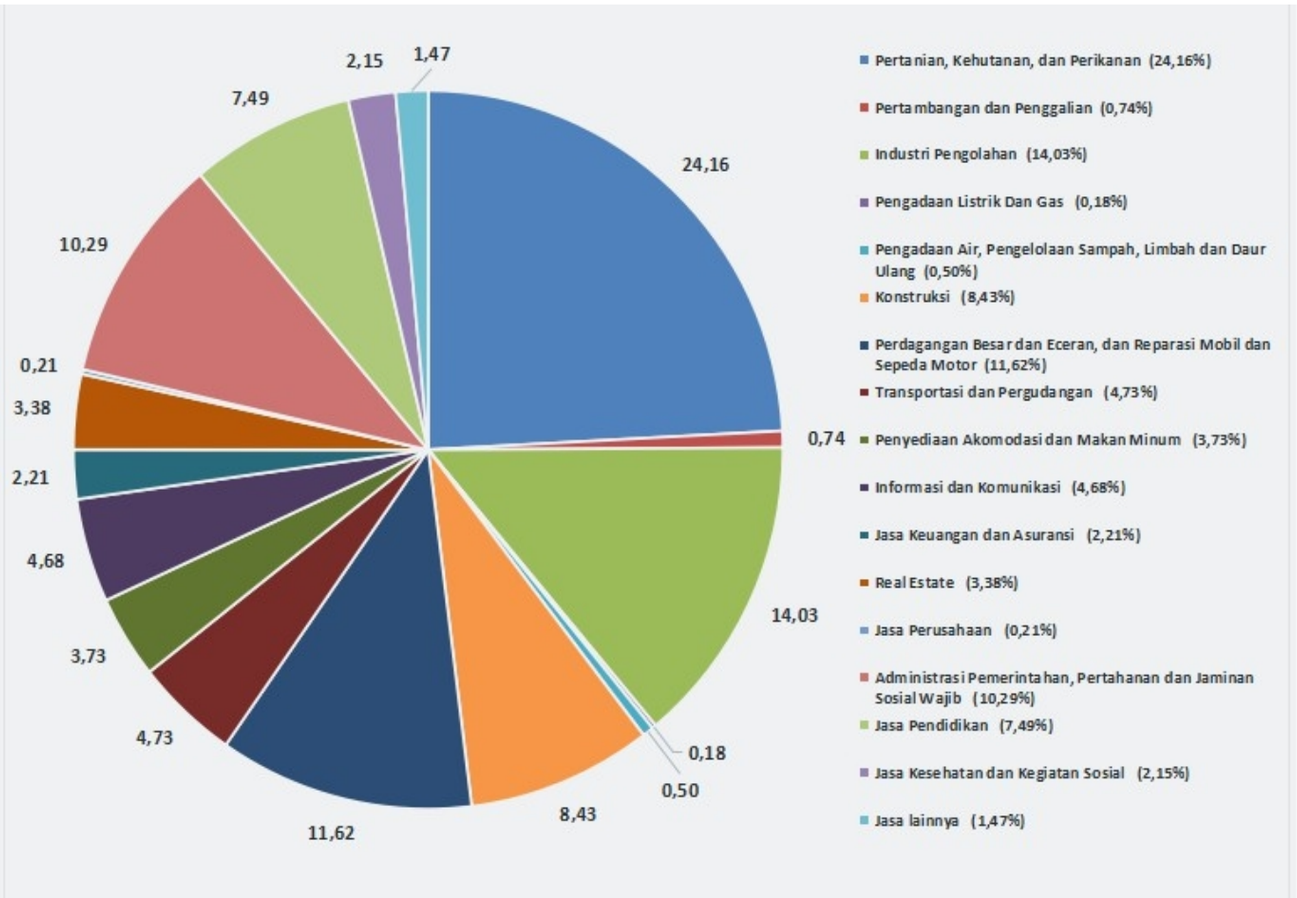


Gambar 2. 14. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) serta Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai 2020. PDRB atas dasar harga berlaku yang mencapai 5,65 triliun rupiah tahun 2016 meningkat setiap tahun sehingga mencapai 7,05 triliun pada tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan harga konstan, nilai PDRB menurun atau terkontraksi 1,01 persen pada tahun 2020 setelah beberapa tahun sebelumnya terus tumbuh positif. PDRB atas dasar harga konstan yang pada tahun 2019 mencapai 4,88 triliun rupiah menurun menjadi 4,83 triliun rupiah pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicirikan oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lain yang juga mendominasi perkembangan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah kategori Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kategori-kategori dominan tersebut memberikan kontribusi terhadap

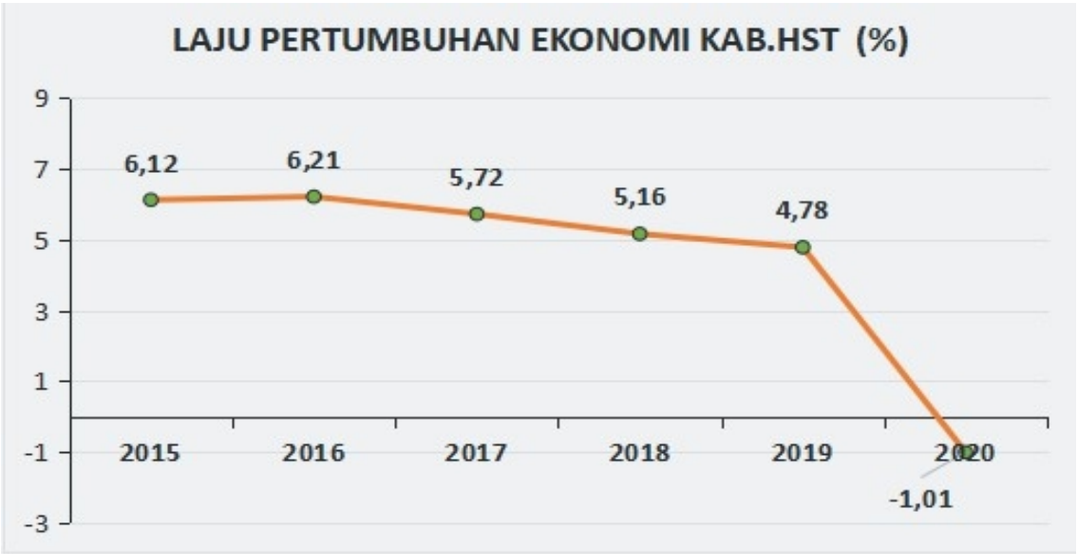
perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 60,10%. Distribusi masing-masing sektor/ kategori pada tahun 2020 tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 15. Distribusi Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Salah satu penyebab meningkatnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2020 adalah perannya sebagai lapangan kerja yang dominan dan mampu bertahan selama Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan mengapa kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sedalam Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020 hampir 25 persen distribusi perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan sumbangan dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Daerah dengan sektor basis Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan lebih tahan dengan kontraksi ekonomi selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sejak tahun 2016 hingga 2020 memiliki kecenderungan melambat. Rentang pertumbuhan ekonominya pada periode tahun 2014-2018 antara 5,15% sampai 6,21%. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi sebesar -1,01%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 4,78%. Kemungkinan besar,salah satu penyebabnya adalah dikarenakan adanya dampak penyakit pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang sangat berpengaruh besar dan begitu menghambat perkembangan serta aktivitas semua sektor kehidupan manusia, termasuk pula dari segi perekonomian.



Gambar 2. 16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2015 - 2020 (persen)

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu sebesar 8,12 persen. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 tadi. Dimana secara langsung merubah kebiasaan masyarakat dalam hal berinteraksi dan berhubungan antar sesama, disebabkan adanya protokol kesehatan yang wajib dipatuhi demi mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Diantaranya adalah dengan adanya batasan jarak dan tidak saling bersentuhan antar sesama, tidak melakukan pertemuan tatap muka atau tidak mengumpulkan orang banyak dalam satu lokasi. Akhirnya, sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, manfaat dan kebutuhan akan media informasi dan komunikasi menjadi berperan dominan bagi masyarakat pada masa pandemi ini, dimana hampir semua aktivitas kerja dilaksanakan secara virtual atau *online* agar semuanya dapat tetap terlaksana dengan baik, meski dalam suasana keterbatasan untuk bisa berinteraksi secara langsung.

Tertinggi kedua adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,61 persen. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari adanya dampak pandemi Covid-19 di kehidupan masyarakat saat ini seperti halnya kebutuhan akan jasa informasi dan komunikasi tersebut diatas. Penyediaan layanan jasa kesehatan menjadi suatu yang sangat diperlukan saat ini oleh masyarakat dalam menghadapi wabah yang berlaku ini. Termasuk juga penyediaan bantuan atau kegiatan sosial lainnya, menjadi suatu yang begitu ditunggu-tunggu bagi sebagian besar masyarakat yang tidak berkemampuan, terlebih lagi bagi mereka yang terganggu roda perekonomiannya akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat oleh Pemerintah sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin besar sampai saat ini.

Tertinggi ketiga ditempati oleh pengadaan listrik dan gas, sebesar 4,22 persen. Tertinggi keempat dan kelima adalah jasa keuangan dan asuransi (1,09 persen), serta jasa pendidikan (1,08 persen). Sedangkan untuk lapangan-lapangan usaha lainnya, hampir semuanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat menurun, atau persentase semuanya bernilai negatif atau berada di bawah 0 (nol) persen, jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebelumnya.



Gambar 2. 17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020

Dari 17 lapangan usaha yang ada, ada 11 (sebelas) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020, dengan angka penurunan yang paling besar terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mencapai nilai (-3,86) persen. Hanya ada sekitar 6 (enam) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dengan kisaran sebesar 1 hingga 8 persen lebih, yaitu lapangan usaha pada bidang: Informasi dan Komunikasi (8,12 persen); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,61 persen); Pengadaan Listrik dan Gas (4,22 persen); Real Estate (2,02 persen); Jasa Keuangan dan Akuntansi (1,09 persen); dan Jasa Pendidikan (1,08 persen).

Tabel 2. 15. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,47	25,42	25,13	24,09	24,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,74	0,75	0,75	0,74
C	Industri Pengolahan	14,78	14,88	14,51	14,30	14,03
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,15	0,17	0,17	0,18
E	Pengadaan Air	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50
F	Konstruksi	8,60	8,75	8,68	8,66	8,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,46	10,64	11,05	11,69	11,62
H	Transportasi dan Pergudangan	4,96	4,84	4,79	4,83	4,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,53	3,54	3,63	3,77	3,73
J	Informasi dan Komunikasi	4,08	4,16	4,25	4,36	4,68
K	Jasa Keuangan	2,03	2,14	2,19	2,21	2,21
L	Real Estate	3,27	3,18	3,23	3,28	3,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,52	10,24	10,25	10,34	10,29
P	Jasa Pendidikan	7,40	7,31	7,32	7,42	7,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99	1,96	1,96	1,98	2,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,37	1,38	1,40	1,45	1,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya. Sektor dominan

yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat kepada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini yang menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Lapangan Usaha, dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Nilai PDRB Hulu Sungai Tengah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh akan adanya dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang begitu mengganggu aktivitas hampir seluruh lapangan usaha, sehingga banyak yang mengalami keterlambatan perkembangan usaha, bahkan ada yang cenderung stagnan atau menurun drastis. Meskipun, pada beberapa lapangan usaha ada yang masih bisa bertahan, atau bahkan bisa meningkat karena adanya peluang yang positifdalam situasi pandemi saat ini. Seperti misalnya pada lapangan usaha jasa infomasi dan komunikasi, serta pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Selama 9 (sembilan) tahun terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi, namun selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi melambat, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2. 16. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,89	5,81	4,32	1,57	-0,27
B	Pertambangan dan Penggalian	5,33	8,47	6,18	6,91	-2,17
C	Industri Pengolahan	5,83	5,31	4,34	3,52	-3,53
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,90	5,13	7,20	4,92	4,22
E	Pengadaan Air	7,12	7,66	5,63	7,63	-0,37
F	Konstruksi	6,33	7,36	4,11	5,10	-2,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,91	7,14	8,06	8,09	-3,43
H	Transportasi dan Pergudangan	6,70	5,11	5,14	5,29	-3,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,52	5,89	6,78	7,73	-2,65
J	Informasi dan Komunikasi	8,90	7,00	7,32	7,88	8,12
K	Jasa Keuangan	6,31	9,16	5,70	4,77	1,09
L	Real Estate	6,02	5,01	6,72	6,96	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	7,33	6,88	7,39	6,42	-3,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	2,67	3,76	5,65	-1,86
P	Jasa Pendidikan	7,99	5,23	5,58	6,62	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,13	4,88	4,31	5,97	6,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,97	5,12	5,96	5,95	-1,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**6,21**	**5,73**	**5,16**	**4,78**	**-1,01**

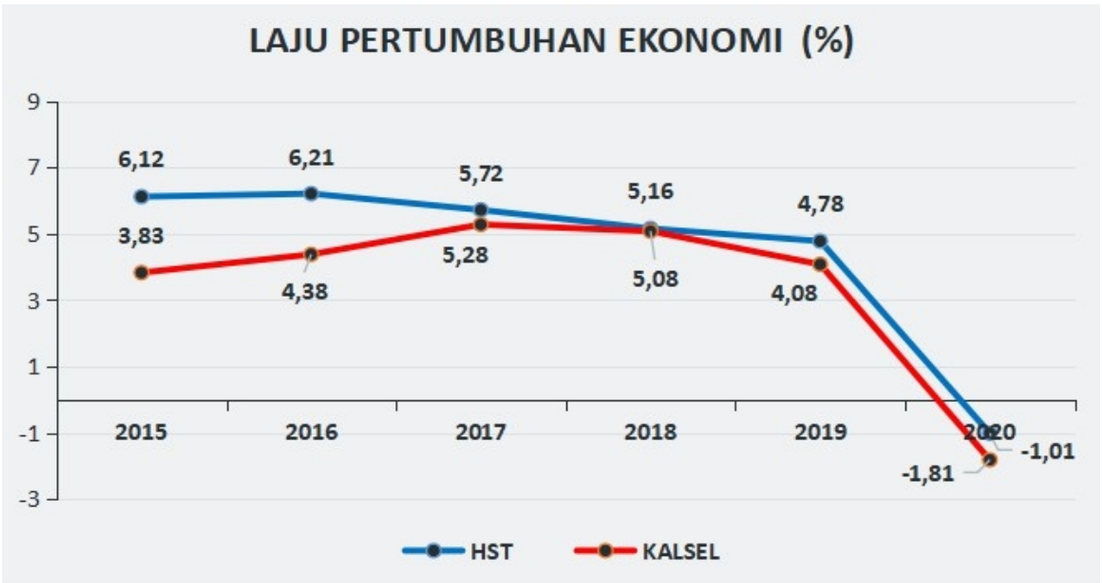
Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 4,834 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang nilainya sebesar 4,883 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, yaitu sebesar -1,01 persen, jauh turun sangat rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang mencapai 4,78 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang dulunya bernilai sebesar 4,78 persen, yaitu dengan angka laju pertumbuhannya sebesar -1,01 persen pada tahun 2020. Angka ini mendekati sama dengan angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar -1,81 persen, yang juga mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019

sebelumnya yang dulunya sebesar 4,08 persen. Dengan demikian, ada selisih angka sebesar -0,8 persen antara angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020.

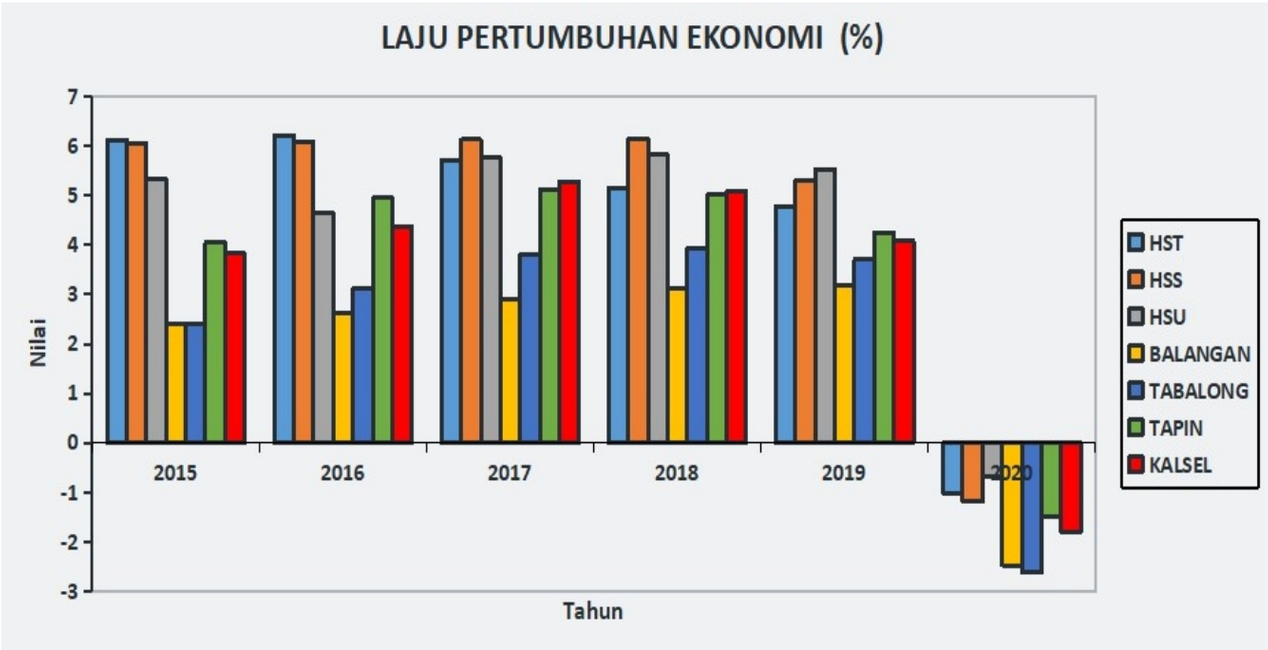
Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.



Gambar 2. 18. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan beberapa Kabupaten sekitar, juga terhadap Provinsi Kalimantan Selatan, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut ini.



Gambar 2. 19. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2015-2020

2. Inflasi

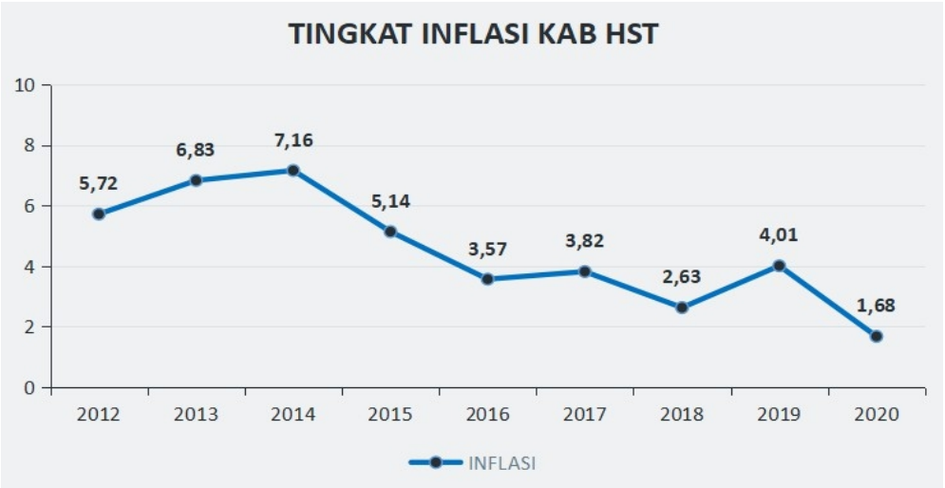
Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), terjadinya *negative supply* shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan hanya diperhitungkan pada 2 (dua) kota, yaitu di kota Banjarmasin dan kota Tanjung. Inflasi di kota Barabai menggunakan kota Tanjung karena jarak lebih dekat dan memiliki karakteristik yang sama sehingga diasumsikan harga, kualitas, dan spesifikasi dari komoditas sama.

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 terjadi fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 20. Tingkat Inflasi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16%. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,14% pada tahun 2015 dan 3,57% pada tahun 2016 serta naik pada tahun 2017 menjadi 3,82%, Selanjutnya, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2,63% tetapi naik kembali pada tahun 2019 menjadi 4,01%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan tingkat inflasi menjadi 1,68%.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2016-2020 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

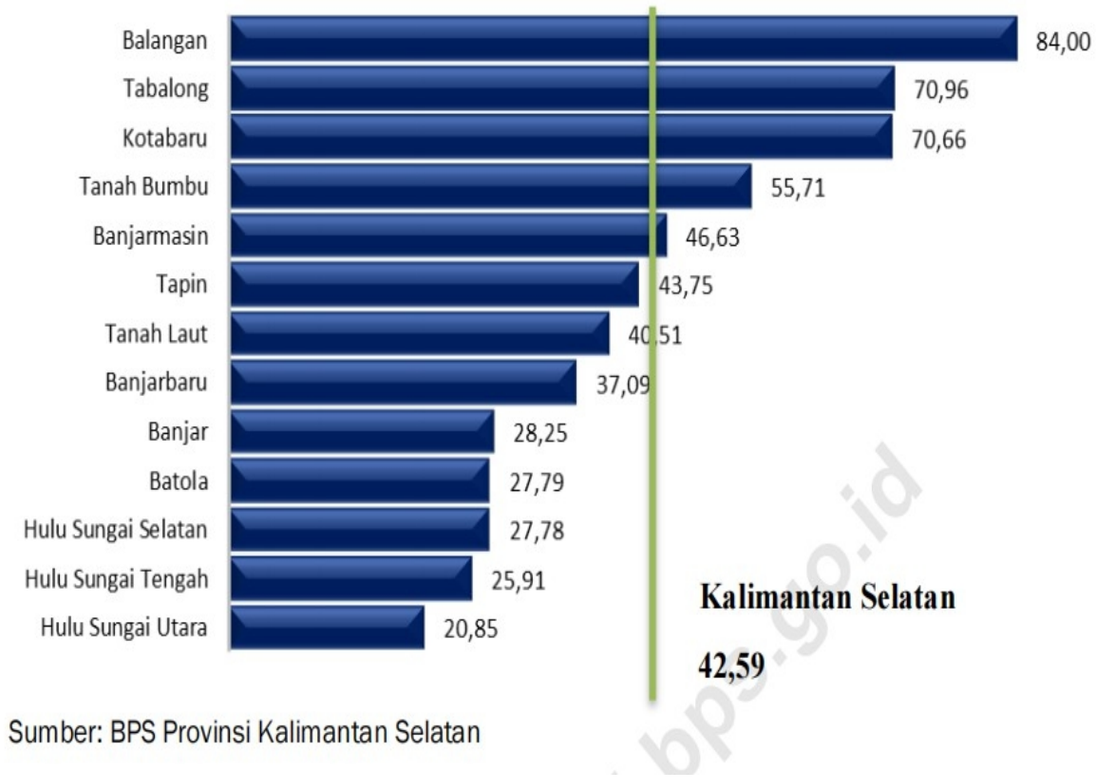
Tabel 2. 17. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	21,45	23,02	24,5	25,91	27,27
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,21	5,72	5,16	4,78	-1,01

Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 21,45 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020, yaitu mencapai 27,27 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan oleh pengaruh faktor inflasi. Meskipun demikian, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sejak tahun 2016 sampai 2020, terlihat mengalami penurunan persentase laju pertumbuhan ekonomi, dari sebelumnya sebesar 6,21% pada tahun 2016, terus menurun hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar -1,01%.

Gambar di bawah ini menampilkan PDRB perkapita untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa ada 3 (tiga) wilayah kabupaten di Kalimantan Selatan yang tergolong memiliki PDRB per kapita tinggi adalah Kabupaten Balangan (Rp 84,00 juta), Kabupaten Tabalong (Rp 70,96 juta), dan Kabupaten Kotabaru (Rp 70,66 juta). Ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi tambang batubara, dimana batubara merupakan produk yang dominan di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, wilayah yang memiliki PDRB perkapita terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni sebesar Rp 20,85 juta. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada posisi diatasnya dengan PDRB perkapita yang relatif rendah sebesar Rp 25,91 juta pada tahun 2019, serta masih berada dibawah PDRB perkapita Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar Rp 42,59 juta, Berdasarkan nilai PDRB per kapita, terlihat adanya kesenjangan, terutama antara daerah yang dominan dengan aktivitas pertambangan batubara dan daerah non tambang batubara.



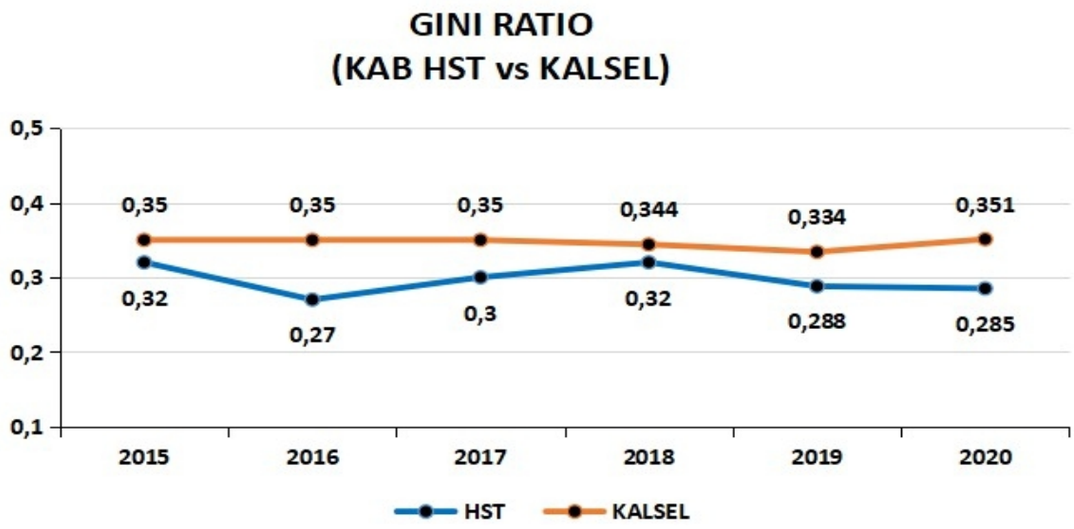
Gambar 2. 21. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 (Juta Rupiah)

4. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.

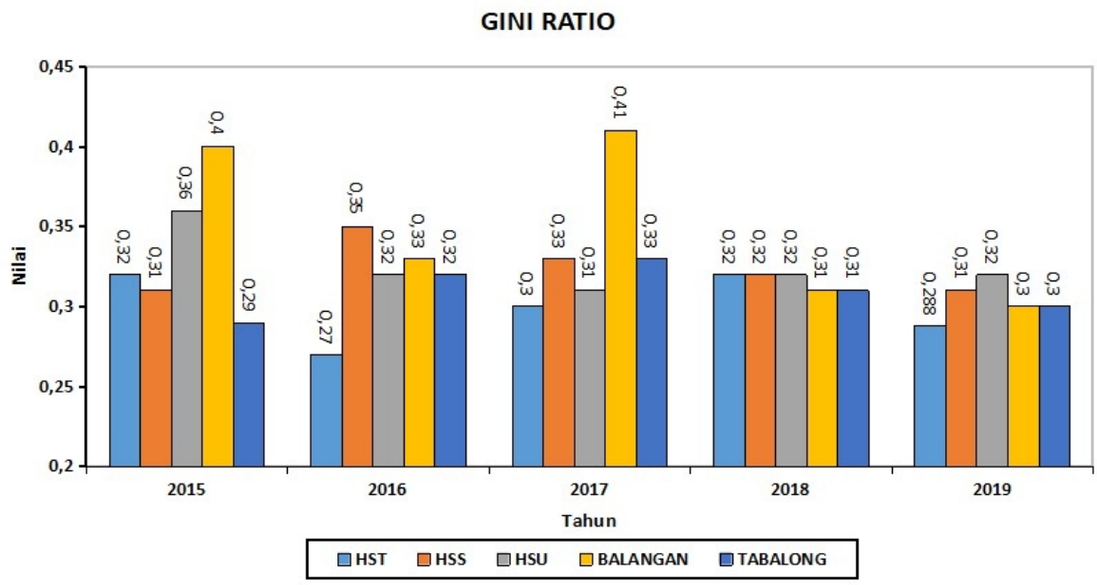
Angka gini ratio dibawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka gini ratio diatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika diantara 0,3-0,5 kondisi ketimpangan sedang.

Dari data dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2017 dan 2018, angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di angka 0,3 keatas, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Hulu Sungai Tengah saat itu masih kategori sedang. Namun pada tahun 2019 dan 2020, angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah angka 0,3 atau masuk kategori distribusi pendapatannya cukup merata atau masih baik, yaitu masing-masing angka gini ratio nya sebesar 0,288 dan 0,285. Dibawah ini ditampilkan grafik perbandingan gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2015-2020.



Gambar 2. 22. Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Berikut grafik perbandingan gini ratio selama kurun waktu 2015-2019 antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan 4 (empat) kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2019, keempat kabupaten tetangga tersebut memiliki angka gini ratio yang relatif sama, yaitu berkisar antara 0,30-0,32, atau sama-sama memiliki kondisi tingkat ketimpangan kategori sedang.



Gambar 2. 23. Perbandingan Gini Ratio Tahun 2015 -2019 Kabupaten HST, HSS, HSU, Balangan dan Tabalong

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp417.778,- dengan persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 5,64%. Dengan kata lain, pada tahun 2020, ada sekitar 15.470 jiwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah garis kemiskinan. Data-data kondisi kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 18. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2012	241.973	14.274	5,68
2013	257.580	14.181	5,57
2014	268.522	14.557	5,65
2015	279.530	15.080	5,81
2016	322.392	16.220	6,18
2017	341.024	16.169	6,09
2018	354.214	16.170	6,01
2019	365.008	16.096	5,93
2020	417.778	15.470	5,64

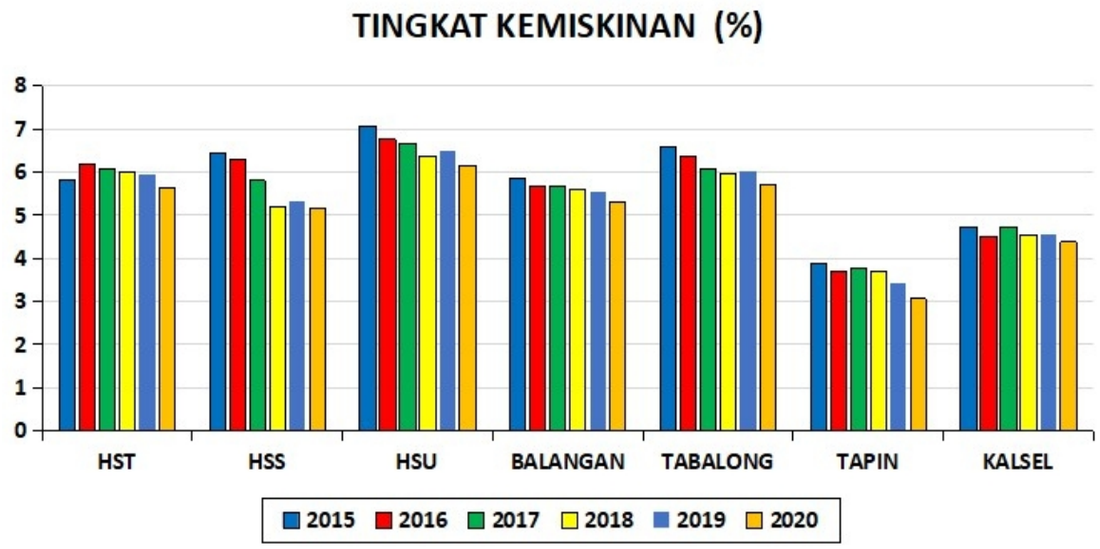
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021

Selama tahun 2015-2020, angka kemiskinan Kabupaten HST berfluktuatif. Tahun 2015 persentase penduduk miskin hanya 5,81%, kemudian selalu meningkat dan menjadi 6,18% pada tahun 2016. Angka kemiskinan akhirnya menurun menjadi 5,93% pada tahun 2019, kemudian menurun lagi pada tahun 2020 menjadi 5,64%.

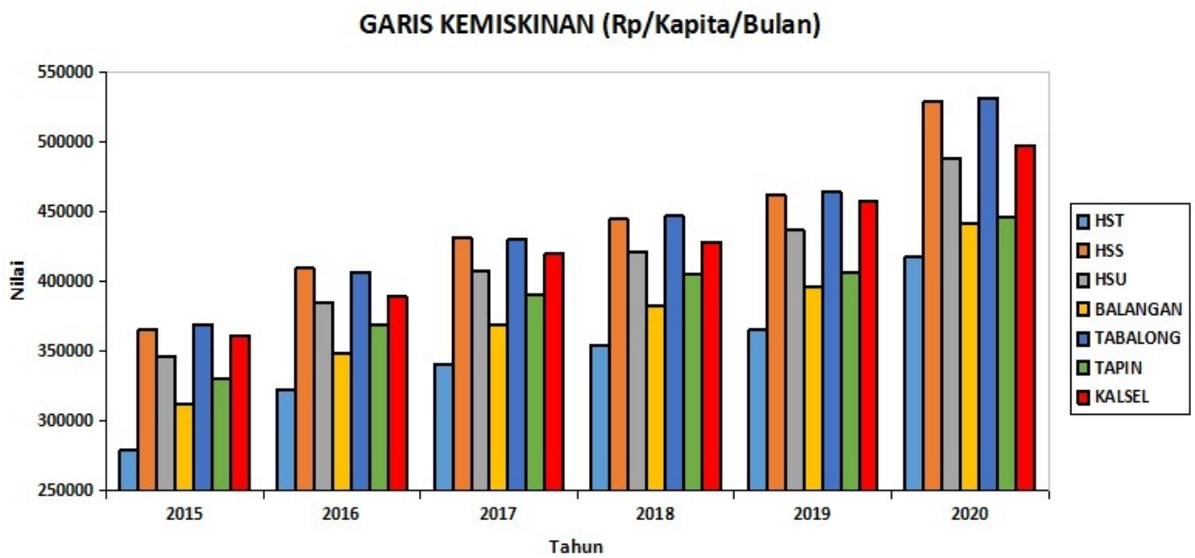
Persentase kemiskinan Kabupaten HST pada tahun 2019 sebesar 5,93% tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan 5 (lima) kabupaten/kota lainnya (HSS, HSU, Balangan, Tabalong, Tapin) di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari seluruh Kabupaten se-Banua Enam, maka persentase tertinggi ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang mencapai 6,50% pada tahun 2019.

Sedangkan, persentase kemiskinan terendah kedua pada tahun 2019 berada di Kabupaten Tabalong sebesar 6,01%.

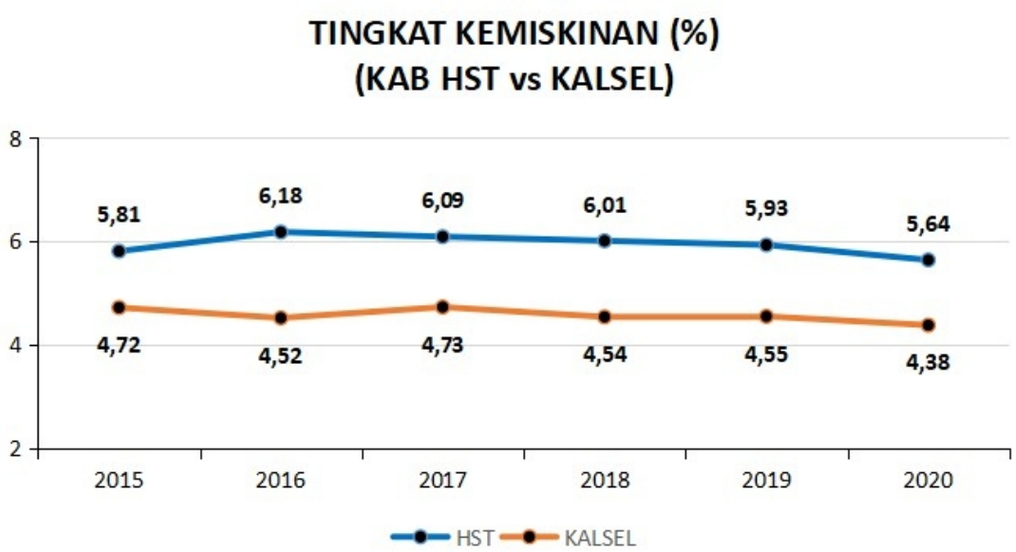
Berikut ditampilkan gambar grafik perbandingan tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2015-2020 antara 6 (enam) Kabupaten se-Banua Enam dengan Kalimantan Selatan.



Gambar 2. 24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



Gambar 2. 25. Perbandingan Garis Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



Gambar 2. 26. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2020

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan pada tahun 2016. meskipun pada periode selanjutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan, namun demikian masih tetap lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan dan Kabupaten lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2019 laju pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pendapatan perkapita serta penurunan angka inflasi, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menangani fenomena tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir masih lebih tinggi.

Tabel 2. 19. Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatna Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	322392	341024	354214	365008	417778
Provinsi Kalimantan Selatan	389273	419974	427774	457222	497262



Gambar 2. 27. Tingkat Kemiskinan 6 (Enam) Kabupaten Se-Banua Enam dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

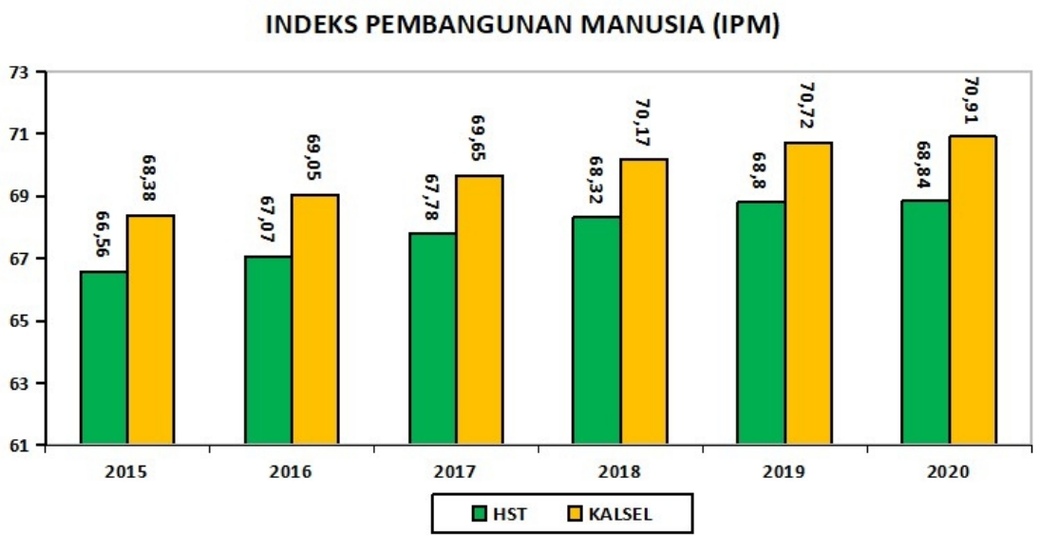
b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Perkembangan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat secara umum dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, IPM dapat dijadikan indeks acuan pembangunan manusia di suatu daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit dari komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dari indikator umur harapan hidup. Indeks pendidikan mencerminkan dimensi pengetahuan yang diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedang indeks pendapatan merupakan dimensi kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita rill. Semakin tinggi angka yang dihasilkan semakin baik kualitas manusianya.

Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan metode perhitungan baru pada kurun tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah IPM Kalimantan Selatan. Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai tengah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu tahun 2015-2020.



Gambar 2. 28. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 64,34 dan terus meningkat sampai tahun 2020 menjadi 68,84. Lebih rinci perkembangan komponen perhitungan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

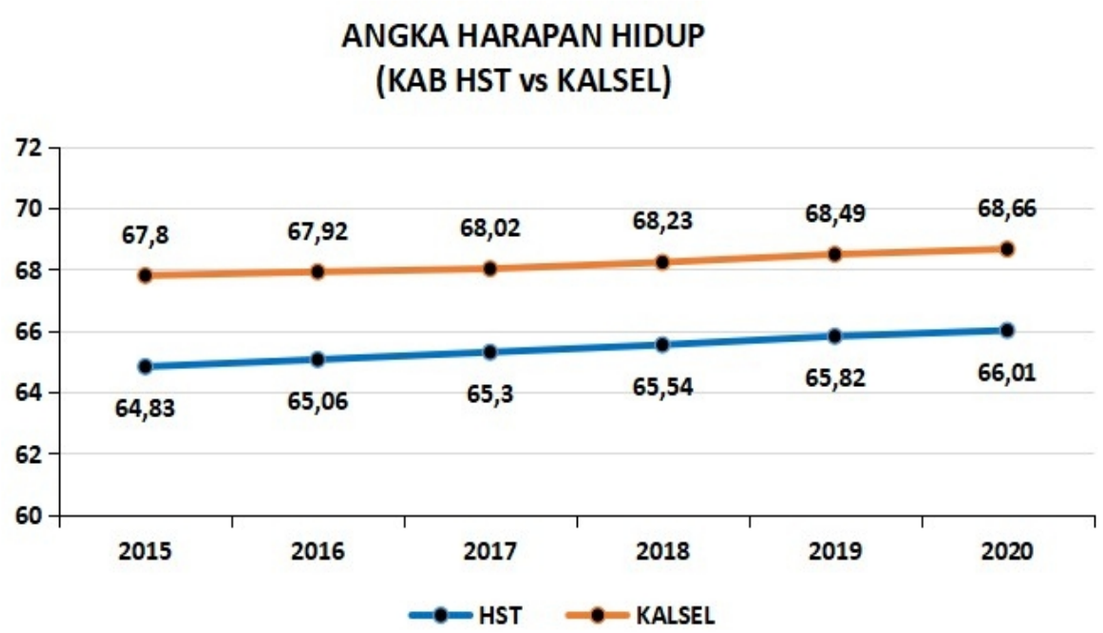
Tabel 2. 20. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM
2012	64,06	11,23	6,90	10.802	64,34
2013	64,24	11,25	6,94	10.960	64,63
2014	64,33	11,42	7,27	11.040	65,37
2015	64,83	11,94	7,52	11.142	66,56
2016	65,06	12,00	7,53	11.527	67,07
2017	65,30	12,17	7,79	11.635	67,78
2018	65,54	12,18	7,80	12.138	68,32
2019	65,82	12,19	7,99	12.257	68,80
2020	66,01	12,20	8,00	12.153	68,84

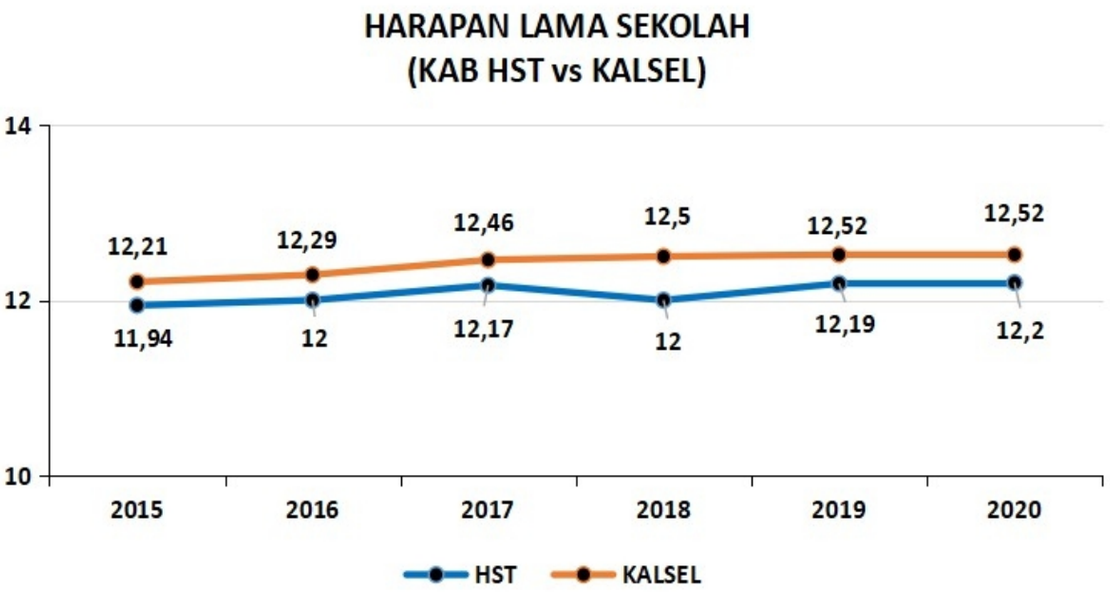
Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021

Kenaikan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah hasil komposit dari kenaikan angka umur harapan hidup dari 64,06 (tahun) pada tahun 2012 menjadi 66,01 (tahun) pada tahun 2020 atau naik 1,95 tahun. Sama halnya dengan angka harapan sekolah selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2020 naik dari 11,23 tahun menjadi 12,20 tahun atau naik 0,97 tahun. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dari 6,90 tahun menjadi 8,00 tahun atau naik sebesar 1,10 tahun. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita rill naik dari Rp10.802,- pada tahun 2012 menjadi Rp 12.153,- pada tahun 2020.

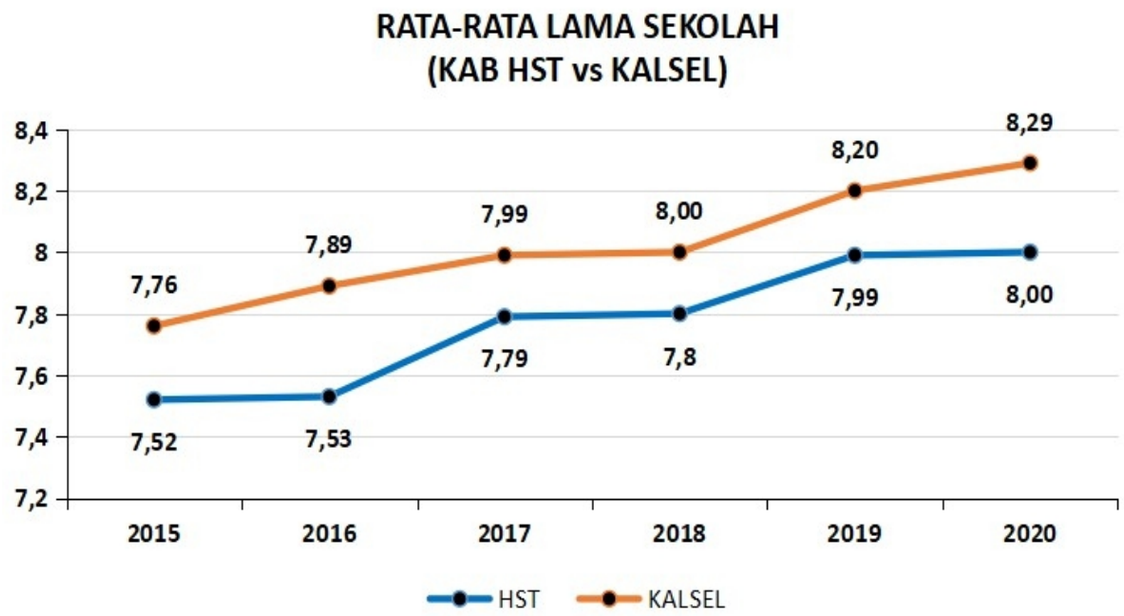
Berikut ditampilkan beberapa gambar grafik perbandingan angka/nilai antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu yaitu antara tahun 2015-2020, yaitu terkait angka harapan hidup, angka harapan sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.



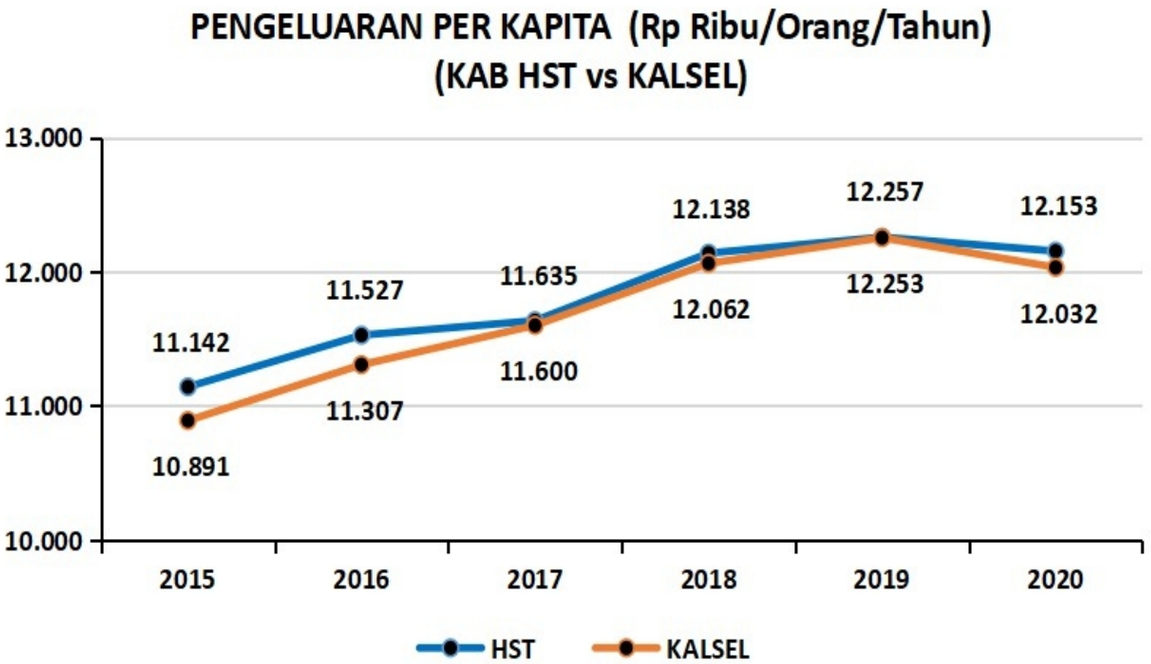
Gambar 2. 29. Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



Gambar 2. 30. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



Gambar 2. 31. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020



Gambar 2. 32. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

2. Kesehatan

▪ Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Fokus kesejahteraan Sosial lainnya dapat tergambar dari tingkat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB didapatkan dengan menghitung Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran. Semakin kecil AKHB yang dicapai berarti tingkat kesejahteraan masyarakat makin rendah karena berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 21. AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2020

No.	Tahun	AKB per 1,000 kelahiran	AKHB
1	2006	7	993
2	2007	12	988
3	2008	14	986
4	2009	11	989
5	2010	10	990
6	2011	13	987
7	2012	12	988
8	2013	12	988
9	2014	18	982
10	2015	18	982
11	2016	18	982
12	2017	14	986
13	2018	12	988
14	2019	12	988
15	2020	15	985

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HST, 2021

▪ Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 22. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

Tahun	Balita Gizi Buruk
2016	0,03 %
2017	0,03 %
2018	0,02 %
2019	0,04 %
2020	0,06 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.HST, 2021

3. Ketenagakerjaan

▪ Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau disebut juga kesempatan kerja digunakan untuk mengetahui peluang atau tersedianya lapangan pekerjaan sehingga penduduk angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja merupakan seberapa besar permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 23. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

TAHUN	PENDUDUK BEKERJA	ANGKATAN KERJA	RASIO PENDUDUK BEKERJA
2011	129.882	137.574	0,94
2012	128.801	135.299	0,95
2013	127.339	129.502	0,98
2014	123.276	128.481	0,96
2015	135.082	139.214	0,97
2016	136.754	140.934	0,97
2017	138.463	144.426	0,96
2018	139.391	146.496	0,95
2019	134.441	140.335	0,96
2020	134.441	140.336	0,96

Sumber : Dinas PTSP, Namod Naker Kab. HST, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 sebesar 96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 4% dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Karja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan utama dari keseluruhan penduduk usia kerja adalah bekerja yaitu nilanya mencapai 68,37 persen, diikuti mengurus rumah tangga yang nilainya sebesar 18,46 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin penduduk usia kerja laki-laki 80,08 persen diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja, jauh dibandingkan penduduk usia perempuan yang hanya 56,97 persen yang memiliki kegiatan utama bekerja. Perbandingan tersebut disebabkan karena pada umumnya laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi di dalam rumah tangga, sementara perempuan yang sudah berkeluarga umumnya lebih berkewajiban mengurus rumah tangga. Dalam proses pembangunan, partisipasi penduduk perempuan juga penting untuk meningkatkan perekonomian. Semakin banyaknya penduduk perempuan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi menunjukkan terjadinya kesetaraan gender yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi.

Tabel 2. 24. Persentase Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berusia 15+ Tahun Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020

Kegiatan Utama (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
a. Bekerja	80,08	56,97	68,37
b. Pengangguran	3,80	1,77	2,77
c. Sekolah	6,01	6,40	6,21
d. Mengurus Rumah Tangga	3,48	33,05	18,46
e. Lainnya	6,63	1,80	4,18
Penduduk Usia Kerja (15+)	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Capaian kinerja pembangunan atas beberapa indikator-indikator pelayanan urusan Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 25. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata lama sekolah (th)	th	7,58	7,79	7,53	7,80	8
2	Usia Harapan Sekolah (th)	th	12	12,17	12	12,18	12,2
3	Angka Melek Huruf (%)	%	97,92	97,50	98,89	98,00	98,65
4	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	%	99,98	93,19	89,84	99,87	89,93
5	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)	%	92,20	91,43	97,5	86,6	87,78
6	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	%	74,9	75,5	77,0	75,3	79.72
7	Rasio Guru/Murid	-	787,75	838,78	819,51	769,23	720,42
8	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	62	80	85	90	82,35
9	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	%	70	80	88	91	100
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	%	0,006	0,03	0,15	0,1	0,44
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	%	0,1	0,99	0,75	0,60	2,07
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	92,96	99,78	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	%	94,1	98,27	97,56	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	%	97,4	100	99,8	90,87	N/A
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA (%)	%	80,45	100	99	99,35	N/A

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	%	85,64	90,82	85,07	88,49	85
17	Jumlah Sekolah SD	Unit	267	267	259	255	255
18	Jumlah Sekolah SMP	Unit	37	37	37	37	37
19	Jumlah Total Murid SD	Siswa	22365	22081	21528	21218	20811
20	Jumlah Total Murid SMP	Siswa	5576	5600	4950	4664	4554
21	Jumlah Anak Usia Sekolah jenjang SD	Siswa	23823	24066	22667	23.506	26.898
22	Jumlah Anak Usia Sekolah jenjang SMP	Siswa	10811	13286	12062	10.565	13.132

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

- Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

  Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

  Perbedaan mendasar antara APM dan APK adalah bahwa APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolahnya, sedangkan APK tidak memperhatikan siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolah. Baik APK maupun APM merupakan indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Indikator ini dapat menunjukkan keterjangkauan pendidikan di suatu daerah.

Perkembangan APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 26. APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2020

No.	Tahun	SD/MI		SMP/MTs	
		APK	APM	APK	APM
1	2006	102,06	92,06	89,78	69,11
2	2007	102,06	92,21	84,62	77,05
3	2008	110,05	95,90	91,16	74,88
4	2009	112,38	97,08	95,67	77,00
5	2010	113,51	98,23	96,21	76,90
6	2011	114,11	99,18	98,43	77,94
7	2012	111,43	97,49	97,50	85,36
8	2013	117,52	87,07	97,47	85,69
9	2014	103,91	87,06	100,53	78,90
10	2015	113,66	99,32	84,80	74,50
11	2016	106,68	96,49	79,19	74,85
12	2017	109,32	96,93	81,27	70,00
13	2018	111,68	97,24	71,96	69,76
14	2019	109,92	97,55	73,63	69,53
15	2020	108,09	99,01	74,71	72,44

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Pada indikator APM pada jenjang SMP/MTs menunjukkan tren penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2017, 2018 dan 2019, yang berarti pada rentang waktu itu terjadi penurunan anak usia sekolah yang bersekolah, meskipun akhirnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan APM jenjang SMP/MTs. Terlepas dari hal tersebut, perlu adanya upaya dalam rangka peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan sehingga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan maupun peningkatan minat bersekolah.

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Pendidikan, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 27. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	85,67	83,465	83,5	83,54	63,93	Belum Mencapai Target SPM (63,93%)
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,10	1,02	0,9	0,7	2,51	Belum Mencapai Target SPM (2,51%)
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	83,20	81,55	82,09	63,93	61,06	Belum Mencapai Target SPM (61,06%)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

2. Kesehatan

Capaian pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 28. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu per jumlah balita	%	55,70	61,98	61	60,11	60,11
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk	%	0,30	0,35	0,24	0,35	0,35
3	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk	%	0,0038	0,0038	0,0074	4,20	4,20
4	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0,27	0,22	0,15	0,35	0,33
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0,83	0,49	0,27	4,20	2,26
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	%	68,52%	66,78%	86,26%	75,73%	83,40%
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%	85,14%
8	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	%	90,53	84,61	80,5	85	65
9	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,40%	43,81%	49,00%	33,00%	40,23%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan kunjungan Bayi	%	76,96%	83,50%	83,30%	71,50%	87,51%
14	Cakupan puskesmas	%	152,50	155,70	155,70	172,73	173
15	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu,Poskesdes,Polindes dll)	%	56,70	60,50	60,50	60,50	60,50
16	Jumlah Tenaga Kesehatan	orang	838	625	612	769	710
17	Jumlah Sarana Kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu, dll)	Buah	70	70	70	70	70
18	Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000 KH	181/ 100.000 KH	167/ 100.000 KH	198/ 100.000 KH	202/ 100.000 KH	428/ 100.000 KH

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
19	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000 KH	14/ 1.000 KH	13,6/ 1.000 KH	11,9/ 1.000 KH	11,6/ 1.000 KH	14,9/ 1.000 KH
20	Angka Kematian Balita (AKABA)	1.000 KH	14/ 1.000 KH	14,8/ 1.000 KH	14,1/ 1.000 KH	11,6/ 1.000 KH	15,4/ 1.000 KH
21	Status Gizi (Wasting)	%	3,76%	4,90%	5,42%	6,30%	5,20%
22	Angka Kesakitan (5 Penyakit terbanyak)	Kasus	159089	154828	150567	146305	142044
23	Prevalensi Stunting	%	35,94%	39,10%	23,50%	14,30%	10,92%
24	Capaian ODF / Kesehatan Lingkungan	%	1,18%	9,47%	10,65%	17,15%	17,16%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

  Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Kesehatan, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4830	3880	3737	3595	3769	Belum Mencapai Target SPM (77,84%)
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4292	3885	3870	3813	3856	Belum Mencapai Target SPM (96,91%)
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	4286	3973	3824	3786	3911	Belum Mencapai Target SPM (88,84%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	16815	16625	15620	17126	15582	Belum Mencapai Target SPM (71,73%)
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	9685	8539	8223	12406	10065	Belum Mencapai Target SPM (26,6%)
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	1228	25065	21692	73430	76436	Belum Mencapai Target SPM (43,6%)
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	6000	6721	10858	10996	14395	Belum Mencapai Target SPM (36,7%)
Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	12565	17331	17578	23075	19029	Belum Mencapai Target SPM (18%)
Pelayanan Kesehatan penderita *diabetes melitus*	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes melitus* yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	2310	3939	3095	2609	1322	Belum Mencapai Target SPM (33,9%)
Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	43	60	89	279	338	Belum Mencapai Target SPM (87,8%)
Pelayanan Kesehatan orang terduga *tuberkulosis*	Jumlah Warga Negara terduga *tuberkulosis* yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	483	505	544	2226	1600	Belum Mencapai Target SPM (32,3%)
Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency virus)*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency virus)* yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	15	20	2695	4154	6206	Belum Mencapai Target SPM (76,3%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 30. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	%	66,13%	67,06%	67,88%	69,63%	72,73%
2	Rasio jaringan Irigasi	%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%	18,33%
3	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	%	43,93%	48,54%	51,25%	55,30%	55,99%
4	Persentase infrastruktur pejalan kaki yang layak di perkotaan	%	9,07%	41,58%	52,32%	53,43%	53,43%
5	Persentase berkurangnya luas genangan	%	25,52%	29,44%	46,11%	56,11%	57,78%
6	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	27,18%	28,22%	28,53%	29,31%	29,31%
7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	46,13%	52,20%	57,54%	60,83%	63,95%
8	Persentase penambahan luas Ruang Terbuka Hijau	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Persentase peraturan Tata ruang Daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundangan Tata Ruang	%	14,29%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%
10	Meningkatnya kepuasan pelayanan pemanfaatan ruang	%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase tingkat kepatuhan sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan ruang	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Pekerjaan Umum, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	%	74,28	76,99	78,97	80,58	81,49	Belum Mencapai Target SPM (81,49%)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan air limbah Domestik	%	66,18	72,23	80,06	88,89	55,99	Belum Mencapai Target SPM (55,99%)

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 32. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga pengguna air bersih	%	74,28%	77,95%	0,7997	81,07%	81,49%
2	Rumah tangga pengguna listrik	%	88,14%	89,95%	94,01%	94,27%	95,02%

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Rumah tangga Bersanitasi	%	43,93%	48,54%	51,25%	55,30%	55,99%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	%	7,46%	6,93%	4,66%	2,69%	1,85%
5	Rumah Layak Huni	%	90,28%	90,82%	91,15%	93,48%	95,25%
6	Rasio permukiman layak huni	%	92,54%	93,07%	95,34%	97,31%	98,15%

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Perumahan Rakyat, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini..

Tabel 2. 33. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	%	0	0	100	100	-- *)	**0 - 100%**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah bupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	-- **)	**0 - 100%**
Penjelasan :								
**) Terkait bantuan rehabilitasi rumah layak huni akibat korban bencana alam, bisa dilaksanakan apabila ada terjadi bencana alam yang ditetapkan oleh BPBD. Secara anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mengalokasikan dana untuk membantu Rehabilitasi rumah korban bencana alam melalui anggaran bantuan sosial khusus untuk penanganan darurat. Tahun 2020 tidak ada laporan bencana alam yang mengakibatkan kerusakan rumah, sehingga anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan untuk korban bencana*								
***) Terkait bantuan Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum bisa dilaksanakan penerapan SPM nya dan belum bisa dianggarkan, karena terkait dengan ada atau tidak adanya Program dari Pemerintah Daerah yang berdampak pada rumah warga yang perlu di relokasi. Untuk Tahun 2020 diketahui tidak ada Program Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berdampak direlokasinya rumah warga, sehingga capaian SPM terkait hal tersebut belum bisa di isi.*								

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 34. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	keg	4	4	0	1	0
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	keg	5	1	1	3	1

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	orang	43	187	157	157	157
4	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	orang	2	2	2	2	2
5	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	unit	2	2	2	2	2
6	Penegakan PERDA	-	20	20	20	20	20
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	-	20	20	20	20	20
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten	%	55	60	65	100	100
9	Petugas Linmas di Kabupaten	orang	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	95%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	95%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satpol PP dan PK, Kesbangpol dan BPBD Kab. HST, 2021

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

  Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 35. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Orang	-	32	23	30	32	Belum Mencapai Target SPM (96,7%)
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	-	-	41	36	36	Belum Mencapai Target SPM (80%)
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	-	-	150	180	144	Belum Mencapai Target SPM (80%)
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	-	-	34	67	67	Mencapai Target SPM (100%)
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	-	96	231	53	50	Belum Mencapai Target SPM (80,6%)

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

6. Sosial

Capaian pembangunan urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 36. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	14	14	14	13	13
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	16	16	20	17	30

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	-	16	19	22	60	30

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Perkembangan data urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 37. Capaian Perkembangan Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

No	26 Jenis PMKS	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Balita Terlantar	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Anak Terlantar	orang	220	N/A	N/A	775	664
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	2	1	1	6	8
4	Anak Jalanan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	orang	150	70	85	40	50
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	orang	2	1	1	6	8
7	Anak yang memerlukan pelindungan khusus	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Lanjut Usia Terlantar	orang	30	20	20	10	10
9	Penyandang Disabilitas	orang	137	137	137	87	87
10	Tuna Susila	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gelandangan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Pengemis	orang	N/A	N/A	N/A	13	13
13	Pemulung	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kelompok minoritas	orang	N/A	N/A	N/A	25	40
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	Korban Penyalahgunaan NAFZA	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Korban Trafficking	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Korban tindak kekerasan	orang	1	1	9	11	6
20	Pekerja Migran Bermasalah	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Korban Bencana Alam	orang	231	1.722	988	249	100
22	Korban Bencana Sosial	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	26 Jenis PMKS	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Fakir Miskin	orang	N/A	5.668	8.585	8.460	17.890
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	97	0	0	10	0

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

- Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kondisi umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pencapaian realisasi penerima layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada periode tahun 2016 s/d 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, khususnya untuk Bidang Sosial, dapat dirangkum dan ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2016-2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	137	137	137	108	109	Mencapai Target SPM (100%)
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	-	3	3	3	3	Mencapai Target SPM (100%)
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	70	70	20	20	10	Mencapai Target SPM (100%)

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja					Capaian 2020 atas Target SPM (100%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	-	-	-	-	0	Belum Mencapai Target SPM (0%)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang	231	1722	988	247	100	Belum Mencapai Target SPM (66,66%)

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

7. Tenaga Kerja

Capaian pembangunan urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 39. Indikator Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	1,50	0	0	0	1
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,65%	71,96%	74,58%	74,85%	70,47%
3	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	org	194 orang	386 orang	447 orang	585 orang	336 orang
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,37%	4,13%	4,13%	3,63%	2,96%
5	Keselamatan dan perlindungan		1,70	2,70	2,70	2,70	2,70
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah		-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 40. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	82	86	90	53,39	64,42
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	18	14	11	13,33	35,58
3	Rasio KDRT	%	0,0026%	0,002%	0,0012%	0,0041%	0%
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96	98	98	99	99
6	Rasio Pendidikan, Pelayanan Umum dan Pengambilan Keputusan	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Persentase anggaran yang responsif gender (pengarusutamaan gender)	%	70,53	23,76	19,85	70,02	35,14

Sumber : Dinsos, PPKB. PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

9. Pangan

Capaian pembangunan urusan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 41. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan pangan utama	%	52%	78%	76,6%	84,0%	85,7%
2	Regulasi ketahanan pangan	-	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan Kabupaten HST, 2021

10. Pertanahan

Capaian pembangunan urusan Pertanahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 42. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	-	-	0,07%	0,11%
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	-	-	-	-
3	Penyelesaian izin lokasi	%	-	-	-	100%	100%
4	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas ijin lokasi	%	-	-	-	100%	100%
5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	-	-
6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	-	-	-
7	Tersedianya tanah obyek landreform yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	-	-	-	100%	100%
8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	-
9	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	0%	100%

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

11. Lingkungan Hidup

Capaian pembangunan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 43. Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah	%	72,86%	50,11%	73,90%	74,00%	78,87%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	100	100	100	100	100
3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,47	0,31	0,79	0,81	0,81
4	Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 44. Indikator Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kepemilikan KTP	%	85%	90%	95%	98,13%	99,01%
2	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,85	0,90	0,96	0,98%	0,99%
3	Rasio bayi ber akte kelahiran	%	0,86	0,89	0,96	1,00	1,00
4	Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	%	0,35	0,45	0,50	0,45%	0,44%
5	Rasio pasangan ber akte nikah	%	0,38	0,52	0,54	0,58%	0,53%
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
8	Jumlah penduduk yang memerlukan identitas hak sipil masyarakat	orang	250.031	252.238	255.983	259.245	261.042

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 45. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio kecukupan sarana/prasarana desa	-	160:161	160:161	161:161	161:161	161:161
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kel	220	220	220	220	220
3	LPM Aktif	LPM	23	38	161	161	161
4	PKK Aktif	PKK	181	181	181	181	181
5	Posyandu Aktif	Unit	420	420	430	429	367
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	35%	35%	40%	40%	40%
7	Jumlah Status IDM (Desa Mandiri)	Desa	-	0	0	0	0
8	Jumlah Status IDM (Desa Maju)	Desa	-	1	3	9	23
9	Jumlah Status IDM (Desa Berkembang)	Desa	-	41	106	131	125
10	Jumlah Status IDM (Desa Tertinggal)	Desa	-	100	45	17	9
11	Jumlah Status IDM (Desa Sangat Tertinggal)	Desa	-	19	7	4	4

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian pembangunan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 46. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	org	3,31	3,24	3,19	3,17	2,51
2	Rasio akseptor KB	%	77	80	86	80	79
3	Cakupan peserta KB aktif	%	76,18	76	79	79,65	78,76
4	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	TFR (Total Fertility Rate) / Angka Pertumbuhan Kasar	indeks	N/A	2,55	2,53	2,51	2,51
6	Jumlah PUS Umnedneed	orang	6.667	6.432	6.134	6.072	6.146
7	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) : usia 15 - 19 Tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Capaian jumlah peserta keluarga berencana (KB) aktif per kategori pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 47. Capaian Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) per Kategori per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Pra Sejahtera)							
No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Haruyan	akseptor	166	105	141	150	147
2	Batu Benawa	akseptor	113	106	107	108	108
3	Labuan Amas Selatan	akseptor	302	326	331	324	288

Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Pra Sejahtera)							
No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Labuan Amas Utara	akseptor	176	206	208	244	107
5	Pandawan	akseptor	208	215	218	86	86
6	Barabai	akseptor	167	175	574	578	578
7	Batang Alai Selatan	akseptor	145	151	144	172	210
8	Batang Alai Utara	akseptor	116	118	119	120	120
9	Hantakan	akseptor	110	105	110	100	90
10	Batang Alai Timur	akseptor	81	83	84	84	83
11	Limpasu	akseptor	64	69	69	69	69

Jumlah Peserta KB Baru (Keluarga Pra Sejahtera)							
No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Haruyan	akseptor	44	23	25	27	22
2	Batu Benawa	akseptor	2	3	6	2	0
3	Labuan Amas Selatan	akseptor	4	2	23	23	29
4	Labuan Amas Utara	akseptor	22	15	49	31	22
5	Pandawan	akseptor	46	30	38	52	58
6	Barabai	akseptor	53	70	13	0	0
7	Batang Alai Selatan	akseptor	14	5	4	14	9
8	Batang Alai Utara	akseptor	21	21	7	35	42
9	Hantakan	akseptor	5	12	26	30	14
10	Batang Alai Timur	akseptor	0	2	5	5	9
11	Limpasu	akseptor	0	4	2	1	1

Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Pra Sejahtera)							
No	Kecamatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Haruyan	%	0,28	0,78	0,51	0,72	0,13
2	Batu Benawa	%	1,27	1,34	1,33	1,33	0,52

Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Pra Sejahtera)							
No	**Kecamatan**	**Satuan**	**Realisasi Capaian Kinerja**				
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
3	Labuan Amas Selatan	%	1,17	0,70	0,74	0,75	1,01
4	Labuan Amas Utara	%	1,16	1,04	1,11	1,14	0,54
5	Pandawan	%	0,78	0,70	0,69	1,56	0,30
6	Barabai	%	1,07	1,06	0,84	0,84	0,49
7	Batang Alai Selatan	%	1,58	1,72	2,12	1,34	0,11
8	Batang Alai Utara	%	1,50	1,46	1,46	1,39	0,67
9	Hantakan	%	0,80	0,98	0,65	0,63	0,79
10	Batang Alai Timur	%	1,14	1,10	1,10	1,10	0,73
11	Limpasu	%	1,62	1,48	1,48	1,48	0,70

Jumlah Peserta KB Aktif (Keluarga Sejahtera I)							
No	**Kecamatan**	**Satuan**	**Realisasi Capaian Kinerja**				
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Haruyan	akseptor	1.494	941	1.266	1.350	1.320
2	Batu Benawa	akseptor	1.015	952	959	968	968
3	Labuan Amas Selatan	akseptor	2.715	2.936	2.975	2.918	2.591
4	Labuan Amas Utara	akseptor	1.580	1.851	1.871	2.197	959
5	Pandawan	akseptor	1.876	1.931	1.959	776	776
6	Barabai	akseptor	1.503	1.574	5.162	5.199	5.202
7	Batang Alai Selatan	akseptor	1.309	1.362	1.299	1.552	1.886
8	Batang Alai Utara	akseptor	1.047	1.062	1.073	1.080	1.083
9	Hantakan	akseptor	988	948	987	897	807
10	Batang Alai Timur	akseptor	730	743	753	756	746
11	Limpasu	akseptor	572	625	625	625	625

Jumlah Peserta KB Baru (Keluarga Sejahtera I)							
No	**Kecamatan**	**Satuan**	**Realisasi Capaian Kinerja**				
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Haruyan	akseptor	394	205	221	239	202
2	Batu Benawa	akseptor	18	23	56	22	3
3	Labuan Amas Selatan	akseptor	40	14	211	203	265
4	Labuan Amas Utara	akseptor	196	136	445	283	194
5	Pandawan	akseptor	414	266	342	464	521
6	Barabai	akseptor	475	632	119	0	0
7	Batang Alai Selatan	akseptor	125	48	39	125	80
8	Batang Alai Utara	akseptor	191	185	59	317	381
9	Hantakan	akseptor	41	104	233	274	122
10	Batang Alai Timur	akseptor	0	18	44	49	77
11	Limpasu	akseptor	0	4	2	1	1

Jumlah Peserta Umnedneed (Keluarga Sejahtera I)							
No	**Kecamatan**	**Satuan**	**Realisasi Capaian Kinerja**				
			2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
1	Haruyan	%	2,49	6,98	4,60	6,47	1,29
2	Batu Benawa	%	11,45	12,04	11,98	11,98	5,18
3	Labuan Amas Selatan	%	10,50	6,32	6,64	6,75	10,07
4	Labuan Amas Utara	%	10,45	9,36	10,03	10,26	5,36
5	Pandawan	%	7,06	6,33	6,18	14,04	2,96
6	Barabai	%	9,66	9,58	7,56	7,56	4,93
7	Batang Alai Selatan	%	14,19	15,51	19,10	12,10	1,12
8	Batang Alai Utara	%	13,48	13,16	13,10	12,53	6,74
9	Hantakan	%	7,17	8,85	5,87	5,66	7,92
10	Batang Alai Timur	%	10,24	9,89	9,87	9,87	7,35
11	Limpasu	%	14,54	13,28	13,28	13,28	7,03

Sumber : Dinsos, PPKB, PPPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

15. Perhubungan

Capaian pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 48. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	111.800	110.300	109.400	103.000	101.450
2	Rasio ijin trayek	-	0,001	0,001	0,001	0,008	0,008
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	buah	1327	1020	945	836	803
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	buah'	1	1	1	1	1
5	Angkutan darat	%	0,107	0,116	0	2,079	2.145
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	org	1.056	1.169	1.225	1.258	1297
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	1. mobil angkutan umum	Rp	-	-	-	-	-
	2. mobil bus	Rp	-	-	-	-	-
	3. mobil barang						
	a, JBB s/d 2ton	Rp	35.000	35.000	35.000	35.000	-
	b, JBB 2 tons/d 7 ton	Rp	40.000	40.000	40.000	40.000	-
	c, JBB 7 ton keatas	Rp	45.000	45.000	45.000	45.000	-
	1. Roda 3	Rp	-	-	-	-	50.000
	2. Penumpang (Umum)	Rp	-	-	-	-	75.000
	3. Barang :						
	Barang Kecil (JBB sd 3,5 Ton)	Rp	-	-	-	-	75.000
	Barang Sedang (JBB 3,5 sd 10 Ton)	Rp	-	-	-	-	100.000
	Barang Besar (JBB >10 Ton)	Rp	-	-	-	-	125.000

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	4. Bus :						
	Bus Kecil (JBB sd 3,5 Ton)	Rp	-	-	-	-	75.000
	Bus Sedang (JBB 3,5 sd 10 Ton)	Rp	-	-	-	-	100.000
	Bus Besar (JBB >10 Ton)	Rp	-	-	-	-	125.000
	5. Traktor Penarik (Tracctor Head)	Rp	-	-	-	-	150.000
	6. Kereta Tempelan	Rp	-	-	-	-	150.000
	7. Kereta Gandengan	Rp	-	-	-	-	150.000
	8. Kendaraan Khusus	Rp	-	-	-	-	250.000
9	Pemasangan rambu-rambu	buah	N/A	24	N/A	65	0

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

16. Komunikasi dan Informatika

Capaian pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 49. Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	72	75	77	77	77
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	-	35	37	33	N/A	N/A
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	jenis	12	12	12	12	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	jenis	3	4	5	3	3
5	Website milik pemda	website	5	7	9	9	9
6	Sistem informasi manajemen pemda	aplikasi	5	8	12	21	21

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2021

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian pembangunan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 50. Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi aktif	%	47,74%	47,74%	68,83%	70,12%	54,00%
2	Proporsi Usaha Micro dan Kecil	%	93,50%	95,85%	91,65%	98,58%	98,75%

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

18. Penanaman Modal

Capaian pembangunan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 51. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	0	98	13	187	66
2	Jumlah nilai investasi berskalanasional (PMDN/PMA) Rp Milyar	Rp Milyar	79,331	40,22	61,265	114,156	98,655

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

19. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 52. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda/OKP Yang Aktif	Org	17	18	18	27	27
2	Jumlah organisasi olahraga	Org	29	29	30	32	36
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	event	6	6	6	6	6
4	Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diikuti	event	7	7	7	7	7
5	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	unit	1	2	2	2	2
6	Jumlah Lapangan Olahraga milik Pemda	unit	78	95	101	101	101

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten HST, 2021

20. Statistik

Capaian pembangunan urusan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 53. Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku ”Kabupaten dalam Angka"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB Kabupaten"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

21. Persandian

Capaian pembangunan urusan persandian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 54. Indikator Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	NA	0	0	0	0
2	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Indeks	NA	NA	NA	212	212

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

22. Kebudayaan

Capaian pembangunan urusan Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 55. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	3	3	9	9	0
2	Jumlah Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	16	16	16	16	19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

23. Perpustakaan

Capaian pembangunan urusan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 56. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	Org	28.545 Org	36.505 Org	36.505 Org	40.249 Org	7.857 Org
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	Judul	7.555 Judul	9.039 Judul	9.039 Judul	9.739 Judul	9.739 Judul
3	Jumlah Perpustakaan	unit	419	419	420	493	352

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2021

24. Kearsipan

Capaian pembangunan urusan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 57. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Kearsipan Sesuai Ketentuan	SKPD	12	16	36	36	36
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	org	1	1	1	2	2
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	SKPD	17	22	27	32	37
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	SKPD	17	22	27	32	37

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Capaian pembangunan urusan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 58. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	ton/ha	5,1	5,25	5,25	5,35	5,49
2	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	-	25,47	25,5	25,2	25,24	24,03*)

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

2. Pariwisata

Capaian pembangunan urusan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 59. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan wisata pertahun	orang	68.780	69.689	77.208	80.705	78.847
2	Kontribusi sektor parawisata terhadap PDRB	-	7,15	8,14	8,3	8,38	8,32

Sumber : Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

3. Kelautan dan Perikanan

Capaian pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 60. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan	-	10271,5	10480,5	10611,5	10713,5	10821
2	Konsumsi Ikan	-	50,86	50,87	51,35	51,4	51,5
3	Cakupan bina kelompok nelayan	-	16	21	13	13	13
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	7.691	7.740	7.829	7.907	7.986

Sumber : Dinas KP dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

4. Perdagangan

Capaian pembangunan urusan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 61. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	-	10,44	10,44	10,62	11,03	11,66
2	Ekspor bersih perdagangan (Rp Milyar)	Rp Milyar	264,7	476,8	263,54	230,64	239,9

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

5. Perindustrian

Capaian pembangunan urusan Perindustrian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 62. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	-	14,73%	14,77%	14,87%	14,50%	14,27%
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase tingkat pertumbuhan IKM	%	5,77%	3,44%	15,89%	22,61%	3,48%
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

c. Fokus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan

Capaian pembangunan urusan Perencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator :

Tabel 2. 63. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
5	Persentase rata-rata kinerja capaian target RKPD	%	90%	88,83%	91%	92%	96%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

2. Keuangan

Capaian pembangunan urusan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator :

Tabel 2. 64. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio PAD	%	1,89%	2,60%	1,48%	1,55%	1,57%
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
3	Persentase Keakuratan Data BMD	%	70,00%	75,00%	87,50%	95,00%	90,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

3. Kepegawaian

Capaian pembangunan urusan Kepegawaian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 65. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Pegawai berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,00%	29,00%	29,00%	21,00%	22,00%
2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11,00%	11,00%	11,00%	6,00%	7,00%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8,00%	7,00%	8,00%	9,00%	9,00%

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

4. Pendidikan dan Pelatihan

Capaian pembangunan urusan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 66. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Diklat Kepegawaian yang dilaksanakan	peserta	143	67	99	156	115

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

5. Penelitian dan Pengembangan

Capaian pembangunan urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 67. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

d. Fokus Layanan Urusan Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Capaian pembangunan urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 68. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase tata kelola pemerintahan yang responsif dan profesional di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase tata kelola pemerintahan yang responsif dan profesional di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase tata kelola pemerintahan yang responsif dan profesional di Bidang Administrasi Umum	%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

2. Sekretariat DPRD

Capaian pembangunan urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 69. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja tugas dan fungsi (legislasi, budgeting dan pengawasan) DPRD	%	60%	70%	82%	85%	85%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

e. Fokus Layanan Urusan Pengawasan

1. Inspektorat Daerah

Capaian pembangunan urusan Inspektorat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 70. Indikator Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	100%	100%	66,66%	93%	93%
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	100%	100%	66,66%	66,66%	66,66%
3	Nilai AKIP	indeks	52,8 (CC)	53,35 (CC)	57,87 (CC)	63,9 (CC)	66,17 (CC)
4	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	indeks	-	-	-	-	50,93

Sumber : Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, pencapaian beberapa indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71. Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga /kapita/bln (Rp)	Rp	752.361	880.008	929.531	961.871	1.122.246
2	Pengeluaran Konsumsi RT non pangan /kapita/bln (Rp)	Rp	315.632	379.063	402.006	421.370	600.658
3	Pengeluaran Konsumsi pangan RT per kapita/bln (Rp)	Rp	436.729	500.945	527.525	540.495	521.588
4	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan (%)	%	41,95	43,07	43,25	43,81	53,52
5	Produktivitas total daerah (Rp)	Rp	22.880.372	23.853.485	24.826.598	25.799.711	26.772.825
6	Nilai Tukar Petani	-	96,069	93,398	90,73	88,06	85,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72. Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	1.800	1.825	1.920	1.242	1.235
2	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	item	32.100	30.100	7.825	8.102	8.050
3	Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun	item	7.800	7.300	6.900	7.075	8.085
4	Rasio ketersediaan daya listrik	-	89,41	92,49	98,37	99,05	99,14

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	99,36%	99,87%	99,59%	99,65%	99,78%
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon	%	90%	92%	92%	95%	97%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Pencapaian indikator aspek daya saing daerah dengan fokus iklim investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 73. Pencapaian Indikator Iklim Investasi Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kriminalitas	%	6,87	7,52	13	8	6
2	Lama proses perijinan	hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari
3	Jumlah pajak dan retribusi daerah	jenis	27 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis	28 jenis
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	buah	0	2	3	3	2
5	Persentase desa berkembang terhadap total desa	%	25%	25%	67%	81%	78%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74. Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	5,27	6,26	6,43	7,04	7,91
2	Rasio ketergantungan	%	50,55	50,34	50,16	50,01	49,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Sebagai tambahan informasi, berikut ini disajikan 2 (dua) Tabel terkait gambaran umum hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode tahun 2016-2020, dimana setiap Tabel menyajikan capaian indikator kinerja yang bersumber dari referensi 2 (dua) RPJMD yang berbeda.

Berdasarkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2021, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.75. Sedangkan gambaran capaian kinerja daerah tahun 2016 - 2020 yang berdasarkan kepada indikator-indikator kinerja sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2. 75. Hasil Analisis Gambaran Umum Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Target RPJMD Tahun 2016-2021

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	%	6,21	5,72	5,16	4,78	-1,01	Tidak tercapai tahun 2020	
1.2	Laju Inflasi Provinsi	-	3,57	3,82	2,63	4,01	1,68	Melampaui	
1.4	Indeks Gini	-	0,27	0,30	0,32	0,288	0,285	Melampaui	
1.5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,82	93,91	93,99	94,07	94,36	Belum tercapai	
1.6	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	-	6,87	7,52	13	8	6	Melampaui	
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1	***Pendidikan***								
1.1	Angka Melek Huruf	%	97,92	97,50	98,89	98,00	98,65	Melampaui	
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	thn	7,58	7,79	7,53	7,80	8	Melampaui	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.3	**Angka Partisipasi Kasar :**								
1.3.1	APK SD/MI/Paket A	%	106,68	109,32	111,68	109,92	108,09	Melampaui	
1.3.2	APK SMP/MTs/Paket B	%	79,19	81,27	71,96	73,63	74,71	Belum tercapai	
1.4	**Angka Partisipasi Murni :**								
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI /Paket A	%	96,49	96,93	97,24	97,55	99,01	Melampaui	
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs /Paket B	%	74,85	70,00	69,76	69,53	72,44	Belum tercapai	
2	***Kesehatan***								
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	986	986	988	988	985	Belum tercapai	
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	thn	65,06	65,30	65,54	65,82	66,01	Belum tercapai	
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,02	0,04	0,06	Belum tercapai	
3	***Ketenagakerjaan***								
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	97	96	95	96	96	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1	***Kebudayaan***								
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	103	103	103	103	103	Melampaui	
2	***Pemuda dan Olahraga***								
2.1	Jumlah klub olahraga	klub/ org	33	33	33	33	35	Melampaui	
2.2	Jumlah gedung olahraga	buah	7	7	7	8	8	Melampaui	
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	***Pendidikan***								
1.1	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	74,9	75,5	77,0	75,3	79.72	Belum tercapai	
1.2	Sekolah Pendidikan SD/ MI kondisi bangunan baik	%	62	80	85	90	82,35	Belum tercapai	
1.3	Sekolah pendidikan SMP/ MTs dan kondisi bangunan baik	%	70	80	88	91	100	Tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
1.4	***Angka Putus Sekolah :***								
1.4.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0,006	0,03	0,15	0,1	0,44	Belum tercapai	
1.4.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,1	0,99	0,75	0,60	2,07	Belum tercapai	
1.5	***Angka Kelulusan :***								
1.5.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	92,96	99,78	100	100	100	Tercapai	
1.5.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	94,1	98,27	97,56	100	100	Tercapai	
1.6	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	97,4	100	99,8	90,87	91,2	Belum tercapai	
1.7	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	%	80,45	100	99	99,35	-	Tercapai	
1.8	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85,64	90,82	85,07	88,49	85	Tercapai	
2	***Kesehatan***								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	%	55,70	61,98	61	60,11	60,11	Melampaui	
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,30	0,35	0,24	0,35	0,35	Belum Tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,0038	0,0038	0,0074	4,20	4,20	Melampaui	
2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk	%	0,27	0,22	0,15	0,35	0,33	Melampaui	
2.5	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	%	0,83	0,49	0,27	4,20	2,26	Belum tercapai	
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	68,52%	66,78%	86,26%	75,73%	83,40%	Belum tercapai	
2.7	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%	85,14%	Belum tercapai	
2.8	Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90,53	84,61	80,5	85	65,5	Belum tercapai	
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,40%	43,81%	49,00%	33,00%	40,23%	Belum tercapai	
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	Tecapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2.12	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi	%	76,96%	83,50%	83,30%	71,50%	87,51%	Belum tercapai	
2.14	Cakupan Puskesmas	%	152,50	155,70	155,70	172,73	173	Melampaui	
2.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	56,70	60,50	60,50	60,50	60,50	Belum tercapai	
3	***Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***								
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,07%	48,30%	49,30%	51,14%	48,26%	Belum tercapai	
3.2	Rasio jaringan Irigasi	%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%	18,33%	Belum tercapai	
3.3	persentase rumah tinggal bersanitasi	%	43,93%	48,54%	51,25%	55,30%	55,99%	Belum tercapai	
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	M	812	812	1244	1244	1244	Belum tercapai	
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
3.6	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	28,5	29,5	30,2	32,5	33,60%	Belum tercapai	
3.7	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	34,56%	39,11%	43,11%	45,58%	47,91%	Belum tercapai	
4	***Perumahan dan Kawasan Permukiman***								
4.1	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	7,46%	6,93%	4,66%	2,69%	1,85%	Belum tercapai	
4.2	Rasio rumah layak huni	%	90,28%	90,82%	91,15%	93,48%	95,25%	Melampaui	
4.3	Rasio permukiman layak huni	%	92,54%	93,07%	95,34%	97,31%	98,15%	Belum tercapai	
5	***Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat***								
5.1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	55	60	65	100	100	Tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	95%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	%	95%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
6	***Sosial***								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	16	16	20	17	30	Belum tercapai	
7	***Tenaga Kerja***								
7.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	71,65%	71,96%	74,58%	74,85%	70,47%	Belum tercapai tahun 2020	
7.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	1,50	0	0	0	1	Tercapai	
7.3	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,37%	4,13%	4,13%	3,63%	2,96%	Melampaui	
7.4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	0	0	0	0	0	Tercapai	
8	***Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***								
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	82	86	90	53,39	64,42	Melampaui	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
8.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	18	14	11	13,33	35,58	Melampaui	
8.3	Rasio KDRT	%	0,0026%	0,002%	0,0012%	0,0041%	0%	Tercapai	
8.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96	98	98	99	99	Tercapai	
8.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	2%	1%	1%	6%	8%	Belum tercapai	
9	***Pangan***								
9.1	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	52%	78%	76,6%	84,0%	85,7%	Melampaui	
10	***Lingkungan Hidup***								
10.1	Persentase penanganan sampah	%	72,86%	50,11%	73,90%	74,00%	78,87%	Belum tercapai	
10.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100	100	100	100	100	Tecapai	
10.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,47	0,31	0,79	0,81	0,81	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
10.4	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	
11	***Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil***								
11.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,85	0,90	0,96	0,98%	0,99%	Belum tercapai	
11.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,86	0,89	0,96	1,00	1,00	Tecapai	
11.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,38	0,52	0,54	0,58%	0,53%	Belum tercapai	
11.4	Kepemilikan KTP	%	85%	90%	95%	98,13%	99,01%	Melampaui	
11.5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
11.6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Tercapai	
12	***Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***								
12.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-	160:161	160:161	161:161	161:161	161:161	Tercapai	
12.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kel	220	220	220	220	220	Tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
12.3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	35%	35%	40%	40%	40%	Tercapai	
13	***Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***								
13.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	org	3,31	3,24	3,19	3,17	2,51	Tercapai	
13.2	Rasio akseptor KB	%	77	80	86	80	79	Belum tercapai	
13.3	Cakupan peserta KB aktif	%	76,18	76	79	79,65	78,76	Belum tercapai	
13.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
14	***Perhubungan***								
14.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	111800	110300	109400	103000	101450	Melampaui	
14.2	Rasio ijin trayek	-	0,001	0,001	0,001	0,008	0,008	Melampaui	
14.3	Jumlah uji kir angkutan umum	buah	1327	1020	945	836	803	Belum tercapai	
14.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	1	1	1	1	1	Tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
14.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	org	1056	1169	1225	1258	1297	Melampaui	
14.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	Belum tercapai	
15	***Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah***								
15.1	Persentase koperasi aktif	%	47,74%	47,74%	68,83%	70,12%	54,00%	Belum tercapai tahun 2020	
15.2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	%	93,50%	95,85%	91,65%	98,58%	98,75%	Melampaui	
16	***Penanaman Modal***								
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	0	98	13	187	66	Melampaui	
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	79,331	40,22	61,265	114,156	98,655	Belum tercapai tahun 2020	
17	***Kebudayaan***								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	3	3	9	9	0	Belum tercapai tahun 2020	
17.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	16	16	16	16	19	Melampaui	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
18	***Perpustakaan***								
18.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	28.545	36.505	36.505	40.249	7.857	Belum tercapai	
18.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	14095	15595	20630	22730	22730	Melampaui	
19	***Kearsipan***								
19.1	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		1	1	1	2	2	Melampaui	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	***Kelautan dan Perikanan***								
1.1	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	10271,5	10480,5	10611,5	10713,5	10821	Belum tercapai	
1.2	Konsumsi ikan	%	50,86	50,87	51,35	51,4	51,5	Belum tercapai	
1.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kel	16	21	13	13	13	Belum tercapai	
1.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	7.691	7.740	7.829	7.907	7.986	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
2	***Pariwisata***								
2.1	Kunjungan wisata	orang	68.780	69.689	77.208	80.705	78.847	Belum tercapai	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	7,15	8,14	8,3	8,38	8,32	Belum tercapai	
3	***Pertanian***								
3.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	ton/ha	5,1	5,25	5,25	5,35	5,49	Melampaui	
3.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (data yang ada di analisa PDRB hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)	-	25,47	25,5	25,2	25,24	24,03*)	Belum tercapai	
4	***Perdagangan***								
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	10,44	10,44	10,62	11,03	11,66	Belum tercapai	
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp Milyar	264,7	476,8	263,54	230,64	239,9	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
5	***Perindustrian***								
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	14,73%	14,77%	14,87%	14,50%	14,27%	Melampaui	
5.2	Pertumbuhan Industri.	%	5,77%	3,44%	15,89%	22,61%	3,48%	Belum tercapai	
5.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	Belum tercapai	
	Fokus Layanan Urusan Penunjang								
1	***Perencanaan***								
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Belum tercapai	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<) , tercapai (=) , melampaui (>)	Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		
	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	Rp	752.361	880.008	929.531	961.871	1.122.246	Tercapai	
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	315.632	379.063	402.006	421.370	600.658	Tercapai	
1.3	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	%	6,87	7,52	13	8	6	Tercapai	
1.4	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	%	25%	25%	67%	81%	78%	-	
1.5	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	5,27	6,26	6,43	7,04	7,91	Belum tercapai	
1.6	Rasio ketergantungan	%	50,55	50,34	50,16	50,01	49,87	Belum tercapai	

Tabel 2. 76. Hasil Analisis Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	%	6,21	5,72	5,16	4,78	-1,01	
2	Laju Inflasi	-	3,57	3,82	2,63	4,01	1,68	
3	PDRB ADHB perkapita (juta rupiah)	Juta Rp	21,44	22,93	24,42	25,84	25,63	
4	PDRB ADHK perkapita (juta rupiah)	Juta Rp	15,92	16,63	17,30	17,93	17,56	
5	Indeks Gini	-	0,27	0,30	0,32	0,288	0,285	
6	Indeks Pembangunan Manusia	-	67,07	67,78	68,32	68,8	68,84	
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	6,18	6,09	6,01	5,93	5,64	
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	0	0	80,19	77,69	77,53	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	0	0	96,52	96,60	96,50	
10	Status Kota Layak Anak	KLA	0	0	0	0	0	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
11	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	-	6,87	7,52	13	8	6	
12	Angka Melek Huruf	%	97,92	97,50	98,89	98,00	98,65	
13	Angka rata-rata lama sekolah	thn	7,58	7,79	7,53	7,80	8	
14	Angka Harapan Lama Sekolah	thn	12,00	12,17	12,00	12,18	12,20	
15	APK SD/MI/Paket A	%	106,68	109,32	111,68	109,92	108,09	
16	APK SMP/MTs/Paket B	%	79,19	81,27	71,96	73,63	74,71	
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI /Paket A	%	96,49	96,93	97,24	97,55	99,01	
18	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs /Paket B	%	74,85	70,00	69,76	69,53	72,44	
19	Angka Pendidikan SD/MI yang ditamatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Angka Pendidikan SMP/MTs yang ditamatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	986	986	988	988	985	
22	Angka Usia Harapan Hidup	thn	65,06	65,30	65,54	65,82	66,01	
23	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,03	0,02	0,04	0,06	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
24	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,96	0,95	0,96	0,96	
25	Jumlah Grup Kesenian	Unit	103	103	103	103	103	
26	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0	
27	Jumlah klub olahraga	klub/ org	33	33	33	33	35	
28	Jumlah gedung olahraga	buah	7	7	7	8	8	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	**Pendidikan**							
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (usia 0-6 tahun)	%	60,89	71,05	55,60	55,21	35,22	
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	106,68	109,32	111,68	109,92	108,09	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	79,19	81,27	71,96	73,63	74,71	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	96,49	96,93	97,24	97,55	99,01	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	74,85	70	69,76	69,53	72,44	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	96,49	96,93	97,24	97,55	99,01	
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	74,85	70	69,76	69,53	72,44	
1.8	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	74,9	75,5	77,0	75,3	79.72	
1.9	Rasio Guru / Murid SD	Angka	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	
1.10	Rasio Guru / Murid SMP	Angka	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	
1.11	Rasio Guru / Murid per kelas rata-rata SD	Angka	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	
1.12	Rasio Guru / Murid per kelas rata-rata SMP	Angka	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	
1.13	Sekolah Pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	62	80	85	90	82,35	
1.14	Sekolah pendidikan SMP dan kondisi bangunan baik	%	70	80	88	91	100	
1.15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0,006	0,03	0,15	0,1	0,44	
1.16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,1	0,99	0,75	0,60	2,07	
1.17	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	92,96	99,78	100	100	100	
1.18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	94,1	98,27	97,56	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.19	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	97,4	100	99,8	90,87	91,2	
1.20	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	%	80,45	100	99	99,35	0	
1.21	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85,64	90,82	85,07	88,49	85	
1.22	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	36,20	36,50	37,00	37,25	37,70	
1.23	Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia SD	Angka	112,07	110,94	114,26	108,48	94,80	
1.24	Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia SMP	Angka	34,22	27,84	30,07	35,02	28,17	
1.25	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	0	0	0	0	50,01	
1.26	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,6	93,32	84,14	87,81	97,76	
1.27	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78,18	91,43	88,03	80,55	88,56	
1.28	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0	0	0	0	66	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.29	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	0	0	0	0	
1.30	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	0	0	0	0	
2	**Kesehatan**							
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	%	55,70	61,98	61	60,11	60,11	
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,30	0,35	0,24	0,35	0,35	
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	0,0038	0,0038	0,0074	4,20	4,20	
2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk	%	0,27	0,22	0,15	0,35	0,33	
2.5	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	%	0,83	0,49	0,27	4,20	2,26	
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	68,52%	66,78%	86,26%	75,73%	83,40%	
2.7	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%	85,14%	
2.8	Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90,53	84,61	80,5	85	65,5	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,40%	43,81%	49,00%	33,00%	40,23%	
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi	%	76,96%	83,50%	83,30%	71,50%	87,51%	
2.14	Cakupan Puskesmas	%	152,50	155,70	155,70	172,73	173	
2.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	56,70	60,50	60,50	60,50	60,50	
2.16	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	%	39,98	53,7	64	100	95,6	
2.17	Angka Kematian Ibu/ 100.000 kelahiran hidup	/100.000 KH	181	167	198	202	428	
2.18	Persentase penurunan kematian ibu (AKI) per tahun	%	8,40%	7,65%	-18,5%	-2,02 %	-111,8 %	
2.19	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 kelahiran hidup	/1.000 KH	14	13,6	11,9	11,6	14,9	
2.20	Angka Kematian Balita / 1.000 kelahiran hidup	/1.000 KH	14	14,8	14,1	11,6	15,4	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.21	Angka Kematian Neonatal /1.000 kelahiran hidup	/1.000 KH	14	11,2	8,4	10,3	11,6	
2.22	Persentase Capaian pemenuhan SPM Kesehatan	%	50,35	50,54	67,55	61,17	63,69	
2.23	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,5	0,61	0,51	0,57	0,25	
2.24	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.25	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	75,71%	76,09%	74,62%	72,99%	77,84%	
2.26	Cakupan Pelayanan Nifas	%	81,07%	79,33%	79,96%	77,71%	82,69%	
2.27	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	46,39%	58,89%	55,12%	70,23%	79,65%	
2.28	Cakupan pelayanan anak balita	%	71,88%	70,75%	66,73%	75,08%	67,79%	
2.29	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	-	1:877	1:877	1:877	1:877	1:877	
2.30	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.31	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	%	75,71%	76,09%	74,62%	72,99%	77,84%	
2.32	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan	%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%	85,14%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.33	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96,11%	94,57%	94,72%	84,57%	88,85%	
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	72,82%	73,09%	69,77%	77,63%	71,73%	
2.35	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	95%	100%	100%	100%	26,63%	
2.36	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	-	14,77%	12,80%	43,30%	43,60%	
2.37	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	18,33%	19,66%	17,85%	25,40%	36,71%	
2.38	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	-	26,39%	26,80%	22,30%	18,00%	
2.39	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	-	33,64%	26,40%	68,40%	33,90%	
2.40	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	%	-	100%	29,40%	73,00%	87,80%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.41	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	%	60,22	66,12	48,79	65,01	31,51	
2.42	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart	%	0	0,96	77	100,4	76,3	
2.43	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	84,51%	84,40%	83,00%	96,14%	85,14%	
2.44	Prevalensi stunting pada balita	%	35,94%	39,10%	23,50%	14,30%	10,92%	
2.45	Prevalensi wasting pada balita	%	3,76%	4,90%	5,42%	6,30%	5,20%	
2.46	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Orang	83	189	203	151	128	
2.47	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	Per 1000 penduduk	0,057	0,075	0,069	0,084	0,058	
2.48	Persentase temuan kasus baru TB menggunakan indikator SPM (terduga TB)	%	0	0	48,79	65,01	31,51	
2.49	Treatment coverage pada pasien TB	%	39,6	43,8	48,79	46,87	40,22	
2.50	Persentasi bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	90,53	86,98	85,18	91,58	72,4	
2.51	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standart	%	N/A	70	75%	75%	78,9%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.52	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	%	-	-	-	-	40%	
2.53	Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	-	-	-	-	5%	
2.54	Persentase implementasi KTR pada 9 tempat	%	-	-	-	-	15%	
2.55	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	N/A	N/A	57,80%	63,15%	68,50%	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,07%	48,30%	49,30%	51,14%	48,26%	
3.2	Rasio jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%	18,33%	
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	43,93%	48,54%	51,25%	55,30%	55,99%	
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	M	812	812	1244	1244	1244	
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
3.6	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	28,5	29,5	30,2	32,5	33,60%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
3.7	Persentase luasan daerah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	25,52%	29,44%	46,11%	56,11%	57,00%	
3.8	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	27,18%	28,22%	28,53%	29,31%	29,31%	
3.9	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	34,56%	39,11%	43,11%	45,58%	47,91%	
3.10	Rasio jaringan irigasi	%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%	18,33%	
3.11	Ketaatan terhadap RTRW	%	45,12%	45,14%	45,16%	45,23%	45,26%	
3.12	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS kewenangan kabupaten	%	8,33%	8,97%	9,16%	9,65%	9,65%	
3.13	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	17,42%	17,56%	17,64%	17,96%	18,33%	
3.14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	74,28%	77,95%	79,97%	81,07%	85,06%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
3.15	Rasio kepatuhan IMB	%	100,00%	91,40%	95,52%	99,35%	94,87%	
3.16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	66,13%	67,06%	67,88%	68,27%	76,42%	
3.17	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3.18	Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	buah	0	15	2	5	3	
3.19	Persentase Luasan RTH yang Dibangun di Wilayah Perkotaan terhadap luasan perkotaan	%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	
3.20	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	45,12%	45,14%	45,16%	45,23%	45,26%	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	%	90,28%	90,82%	91,15%	93,48%	95,25%	
4.2	Rasio Permukiman Layak Huni	%	92,54%	93,07%	95,34%	97,31%	98,15%	
4.3	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	90,28%	90,82%	91,15%	93,48%	95,25%	
4.4	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	%	7,46%	6,93%	4,66%	2,69%	1,85%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
4.5	Persentase permukiman yang tertata	%	92,54%	93,07%	95,34%	97,31%	98,15%	
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	93,38%	86,78%	58,29%	33,72%	26,65%	
4.7	Proporsi Rumah Tangga kumuh perkotaan	%	93,38%	86,78%	58,29%	33,72%	26,65%	
4.8	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	63.82%	67,89%	68,52%	75,85%	77,90%	
4.9	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	-	-	-	-	-	
4.10	Persentase Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	-	-	-	-	-	
4.11	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	100,00%	82,80%	78,67%	31,71%	8,89%	
4.12	Persentase rumah tidak layak huni	%	91.70%	78,43%	69,60%	60,24%	44,46%	
4.13	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	63.82%	67,89%	68,52%	75,85%	77,90%	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	75	75	75	75	75	
5.2	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	55	60	65	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5.3	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%	95%	100%	100%	100%	100%	
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	%	95%	100%	100%	100%	100%	
5.5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	buah	20	20	20	20	20	
5.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	75	76	78	80	82	
5.7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	N/A	150	188	225	180	
5.8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	N/A	45	52	45	45	
5.9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	N/A	50	34	67	67	
5.10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75	75	75	75	75	
6	**Sosial**							
6.1	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	orang	16	16	20	17	30	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	N/A	23,56%	22,29%	27,73%	30,63%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	N/A	N/A	N/A	9,10%	7,46%	
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	99%	58%	68%	76%	
6.6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	orang	454	364	379	245	256	
6.7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	orang	70	70	70	20	10	
6.8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100%	99%	58%	68%	76%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
7	**Tenaga Kerja**							
7.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	71,65%	71,96%	74,58%	74,85%	70,47%	
7.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	-	1,50	0	0	0	1	
7.3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	-	0 kasus	0 kasus	0 kasus	1 kasus	
7.4	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	-	238 orang	447 orang	585 orang	336 orang	
7.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,37%	4,13%	4,13%	3,63%	2,96%	
7.6	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	%	-	-	-	-	-	
7.7	Besaran Pekerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan	orang	-	3355 orang	3327 orang	3350 orang	3360 orang	
7.8	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	0	0	0	0	0	
7.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, kewirausahaan	orang	-	72 orang	36 orang	136 orang	60 orang	
7.10	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%		20,8	18,5	21,2	30,0	
7.11	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%		1,62	1,23	5,45	4,42	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
7.12	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	
7.13	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	-	17,2	4,2	5,8	7,7	
7.14	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	-	5,36	15,33	23,45	24,76	
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	82	86	90	53,39	64,42	
8.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	18	14	11	13,33	35,58	
8.3	Rasio KDRT	%	0,0026%	0,002%	0,0012%	0,0041%	0%	
8.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96	98	98	99	99	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
8.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	2%	1%	1%	6%	8%	
8.7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	25	21,42	20	20	20	
8.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	orang	0	0	2/9	6/7	8/6	
8.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	orang	0	0	0	0	0	
8.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	2/1	1/1	1/9	6/11	8/6	
8.11	Persentase ARG pada belanja APBD	%	70,53	23,76	19,85	70,02	35,14	
8.12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
8.13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	0,0015	0,0007	0,0007	0,00084	0,0046	
9	**Pangan**							
9.1	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	52%	78%	76,6%	84,0%	85,7%	
9.2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	-	-	-	-	-	7028 dan 184	
9.3	Persentase keamanan pangan	%	-	-	-	-	80	
10.	**Pertanahan**							
10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	-	-	-	0,07%	0,11%	
10.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	-	-	-	-	
10.3	Penyelesaian izin lokasi	%	-	-	-	100%	100%	
10.4	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas ijin lokasi	%	-	-	-	100%	100%	
10.5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	-	-	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
10.6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	-	-	-	
10.7	Tersedianya tanah obyek landreform yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	-	-	-	100%	100%	
10.8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	-	
10.9	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	-	-	0%	100%	
11	**Lingkungan Hidup**							
11.1	Persentase penanganan sampah	%	72,86%	50,11%	73,90%	74,00%	78,87%	
11.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100	100	100	100	100	
11.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,47	0,31	0,79	0,81	0,81	
11.4	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	
11.5	Indeks Kualitas Air	indeks	-	59,30	66,00	61,00	60,83	
11.6	Indeks Kualitas Udara	indeks	-	91,93	92,71	92,73	89,75	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
11.7	Indeks Tutupan Lahan	indeks	-	61,00	59,71	38,85	38,50	
11.8	Persentase pelaku usaha /kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan (izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan	%	-	70,00	70,00	70,00	70,00	
11.9	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	5,00	15,00	15,00	16,00	21,00	
11.10	Persentase cakupan area pelayanan	%	70,00	73,00	74,00	75,00	78,00	
11.11	Timbunan sampah yang ditangani	RT	54.852,00	56.852,00	68.654,00	60.358,00	62.784,00	
11.12	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.13	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang undangan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	-	69,77	71,50	61,70	67,65	
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
12.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,85	0,90	0,96	0,98%	0,99%	
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,86	0,89	0,96	1,00	1,00	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,38	0,52	0,54	0,58%	0,53%	
12.4	Kepemilikan KTP	%	85%	90%	95%	98,13%	99,01%	
12.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
12.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	
12.8	Persentase anak usia 01 - 7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	0%	0%	0%	0%	31,33%	
12.9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	0	0	2	2	2	
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
13.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		160:161	160:161	161:161	161:161	161:161	
13.2	Persentase LPM Aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.3	Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.4	Persentase Posyandu aktif	%	100%	98,82%	100,00%	98,62%	83,41%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
13.5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	35%	35%	40%	40%	40%	
13.6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	220	220	220	220	220	
13.7	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	-	-	34,16%	17,39%	4,97%	
13.8	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	-	-	-	-	
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	org	3,31	3,24	3,19	3,17	2,51	
14.2	Rasio akseptor KB	%	77	80	86	80	79	
14.3	Cakupan peserta KB aktif	%	76,18	76	79	79,65	78,76	
14.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14.5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,59	
14.6	Total Fertility Rate (TFR)	%	N/A	2,55	2,53	2,51	2,51	
14.7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,06	13,30	12,32	12,22	12,12	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
14.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	6,69	6,69	6,68	6,98	7,09	
14.9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	76,18	79,34	81,84	79,65	78,76	
14.10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	6.225	6.689	6.684	7.090	7.184	
14.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	1.087	1.298	1.352	1.376	1.381	
14.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	1.535	1.539	1.569	1.699	1.485	
14.13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Buah	0	0	0	0	0	
14.14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kelompok	37	37	30	35	30	
14.15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	5,78	6,79	7,49	5,74	10,00	
14.16	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	%	76,18	79,34	81,84	79,65	78,76	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
15	**Perhubungan**							
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	111800	110300	109400	103000	101450	
15.2	Rasio ijin trayek		0,001	0,001	0,001	0,008	0,008	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	buah	1327	1020	945	836	803	
15.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	1	1	1	1	1	
15.5	Persentase Layanan angkutan darat	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
15.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	org	1056	1169	1225	1258	1297	
15.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	
15.8	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
15.9	Rasio konektivitas kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15.10	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
16	**Komunikasi dan Informatika**							
16.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan	Buah	0	0	0	0	0	
16.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Desa	NA	NA	NA	136	136	
16.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	91,71%	91,35%	89,68%	89,68%	89,68%	
16.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	%	NA	NA	66,67%	13,59%	14,46%	
16.5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	0%	0%	0%	91,89%	91,89%	
16.6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	NA	NA	NA	NA	37,5%	
16.7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	NA	NA	NA	NA	78,52%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
17	**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**							
17.1	Persentase koperasi aktif	%	47,74%	47,74%	68,83%	70,12%	54,00%	
17.2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	%	93,50%	95,85%	91,65%	98,58%	98,75%	
17.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.4	Persentase koperasi yang berkualitas	%	16,71%	16,71%	24,09%	24,54%	18,90%	
17.5	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	N/A	N/A	N/A	N/A	17,32%	
18	**Penanaman Modal**							
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	0	98	13	187	66	
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	79,331	40,22	61,265	114,156	98,655	
18.3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	-	-	136 orang	
18.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp Milyar	-	-	21,05	52,89	-15,50	
18.5	Persentase peningkatan investasi	%	-	0,51	1,52	1,86	1,90	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**							
19.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	54,3%	54,3%	54,3%	54,3%	68,6%	
19.2	Persentase wirausaha muda	%	20%	20%	20%	20%	20%	
19.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100%	100%	100%	100%	100%	
19.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	13,33%	14,29%	15,24%	16,19%	18,10%	
19.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	34%	46%	39%	44%	38%	
19.6	Jumlah atlet berprestasi	orang	0	0	0	1	1	
19.7	Jumlah prestasi olahraga	medali	4 (4 POPDA)	59 (34 Porprov, 25 Popda)	2 (2 Popda)	44 (43 Popda, 1 Internat ional)	8 (7 Popda, 1 Nasional)	
19.8	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	12,44%	12,79%	12,88%	13,65%	13,72%	
19.9	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,55%	5,17%	5,33%	5,41%	5,50%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
19.10	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	4 (4 POPDA)	59 (34 Porprov, 25 Popda)	2 (2 Popda)	44 (43 Popda, 1 Internat ional)	8 (7 Popda, 1 Nasional)	
20	**Statistik**							
20.1	Buku " Kabupaten dalam Angka"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.2	Buku "PDRB Kabupaten"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20.3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	-	-	-	-	-	
20.4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100	
20.5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100	
21	**Persandian**							
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	NA	0	0	0	0	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
21.2	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Indeks	NA	NA	NA	212	212	
22	**Kebudayaan**							
22.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	3	3	9	9	0	
22.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	16	16	16	16	19	
23	**Perpustakaan**							
23.1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	%	0,159%	0,157%	0,156%	0,181%	0,136%	
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	org	28.545	36.505	36.505	40.249	7.857	
23.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	14095	15595	20630	22730	22730	
23.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	7.555	9.039	9.039	9.739	9.739	
23.5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	NA	NA	NA	NA	NA	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
23.6	Indeks pembangunan literasi masyarakat	-	NA	NA	11	12	10	
24	**Kearsipan**							
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	45%	59%	72%	86%	100%	
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	1	1	2	2	
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	-	17 SKPD	22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD	37 SKPD	
24.4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	-	17 SKPD	22 SKPD	27 SKPD	32 SKPD	37 SKPD	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	**Pertanian**							
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	ton/ha	5,1	5,25	5,25	5,35	5,49	
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (data yang ada di analisa	-	25,47	25,5	25,2	25,24	24,03*)	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
	PDRB hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)							
1.3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	6	5	4	3	2	
2	**Pariwisata**							
2.1	Kunjungan wisata	orang	68.780	69.689	77.208	80.705	78.847	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-	7,15	8,14	8,3	8,38	8,32	
2.3	PAD sektor Pariwisata	Rupiah	NA	187.090.000	133.090.000	79.710.000	20.205.000	
2.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	0,30%	0,30%	0,35%	0,39%	0,43%	
2.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	%	85%	88%	90%	98%	80%	
2.6	Tingkat hunian akomodasi	Orang	12500	13125	13253	13563	7643	
3	**Kelautan dan Perikanan**							
3.1	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	10271,5	10480,5	10611,5	10713,5	10821	
3.2	Konsumsi ikan	%	50,86	50,87	51,35	51,4	51,5	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	16	21	13	13	13	
3.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	7.691	7.740	7.829	7.907	7.986	
4	**Perdagangan**							
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	10,44	10,44	10,62	11,03	11,66	
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp Milyar	264,7	476,8	263,54	230,64	239,9	
4.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, IUTM/IUTS)	%	75	80	100	100	100	
4.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	60	60	60	60	70	
4.5	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	70	50	50	50	70	
5	**Perindustrian**							
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	14,73%	14,77%	14,87%	14,50%	14,27%	
5.2	Pertumbuhan Industri.	%	5,77%	3,44%	15,89%	22,61%	3,48%	
5.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5.4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		N/A	N/A	3323	4295	4330	
5.5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri (turunan indikator RIPIN dan RPIP)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	-	-	-	-	-	
5.8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	Kawasan	-	-	-	-	-	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5.9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	N/A	N/A	N/A	1	1	
	Fokus Layanan Urusan Penunjang							
1	**Perencanaan Pembangunan**							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	78,22%	97,62%	98%	98,9%	97%	
2	**Keuangan**							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini LK	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	
2.2	Persentase SiLPA	%	0,76%	-3,80%	9,54%	1,21%	1,70%	
2.3	Persentase belanja pendidikan	%	28,14%	23,52%	29,03%	25,75%	26,95%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.4	Persentase belanja kesehatan	%	15,74%	21,33%	18,92%	17,42%	20,95%	
2.5	Penetapan APBD	-	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	
2.6	Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
2.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	4,91%	0,79%	9,16%	11,94%	11,60%	
2.8	Manajemen Aset	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.9	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	9,00%	25,40%	6,10%	7,00%	34,00%	
2.10	Deviasi Realisasi belanja terhadap anggaran belanja dalam APBD	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2.11	Rasio Belanja Pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	25,00%	20,00%	28,00%	26,00%	28,00%	
2.12	Rasio PAD	%	1,89%	2,60%	1,48%	1,55%	1,57%	
2.13	Rasio Belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60,14%	66,92%	62,72%	67,36%	66,35%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2.14	Opini Laporan Keuangan	Opini LK	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP	
3	**Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan**							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	20	20	20	20	20	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,92%	1,28%	2,17%	3,75%	2,90%	
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	1,54%	2,14%	2,00%	0,93%	0,00%	
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	-	29	29	29	29	29	
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	-	583	593	567	571	571	
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	3253	3058	2935	2899	2916	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
3.7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30%	29%	29%	21%	22%	
3.8	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11%	11%	11%	6%	7%	
3.9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	8%	7%	8%	9%	9%	
4	**Penelitian dan Pengembangan**							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	33,33%	
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	**Pengawasan**							

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	77,77%	46,42%	50,00%	20%	7%	
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	-	-	-	-	
5.3	Jumlah temuan BPK	temuan	11	21	14	14	12	
5.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	100,00%	100,00%	66,66%	93,00%	93,00%	
5.5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	100,00%	100,00%	66,66%	66,66%	66,66%	
6	**Sekretariat DPRD**							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Program	8	6	7	6	6	
6.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Program	8	6	7	6	6	
7	**Sekretariat Daerah**							
7.1	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0%	0%	0%	0%	0%	
7.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	19,58%	22,06%	7,54%	57,52%	18,31%	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
7.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	22,56%	24,18%	7,23%	14,29%	9,50%	
8	**Kesatuan Bangsa dan Politik**							
8.1	Jumlah Ormas yang aktif	%	-	-	-	10%	10%	
8.2	Indeks Ketahanan Nasional	-	-	-	-	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	
8.3	Indeks Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	Sedang	Sedang	
8.4	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-	-	48	48	
8.5	Tingkat kewaspadaan dan kasus konflik yang berhasil ditangani	%	-	-	-	75%	75%	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	Rp	752.361	880.008	929.531	961.871	1.122.246	
2	Nilai Tukar Petani	-	97,51	96,69	95,4	95,31	100,98	
3	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	315.632	379.063	402.006	421.370	600.658	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Ket
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
4	Produktivitas total daerah	Rp	N/A	42,31 Jt	44,80 Jt	50,17 Jt	N/A	
5	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	%	6,87	7,52	13	8	6	
6	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	%	25%	25%	67%	81%	78%	
7	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	5,27	6,26	6,43	7,04	7,91	
8	Rasio ketergantungan	%	50,55	50,34	50,16	50,01	49,87	

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah perlu direncanakan sebaik mungkin mengingat pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian *integral* dari perencanaan pembangunan daerah dimana kebijakan pembangunan yang disusun harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan *prediksi* penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, sebagai upaya memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang, diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD selama kurun waktu beberapa tahun lalu.

Pelaksanaan *otonomi* daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam *konteks otonomi* daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal

(*fiscal gap*). Salah satu upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kaitan itu, pelaksanaan *otonomi* daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah merencanakan pembangunan dan mengembangkan *potensi* sumberdaya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara *efektif*, yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat, dimana Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama.

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat *krusial* dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah meliputi, kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan. Masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah pada masa sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Adapun peraturan yang berlaku pada masa ini, adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Salah satu proses pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBDP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Analisa proyeksi pendapatan daerah difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Trasnfer Antar Daerah
(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang meliputi : Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan.

Realisasi Pendapatan Daerah beberapa tahun kebelakang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**Pendapatan Daerah**	**1.267.822.948.739,00**	**1.125.165.680.319,00**	**1.132.223.422.681,00**	**1.219.107.267.371,00**	**1.141.971.557.669,69**	(0,02)
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**96.994.158.192,00**	**118.421.755.241,00**	**91.332.357.283,00**	**117.059.912.839,00**	**142.450.480.280,69**	0,12
1.1.1	Pajak Daerah	9.965.754.476,00	12.083.082.101,00	12.853.345.156,00	13.567.359.199,00	11.114.134.812,80	0,04
1.1.2	Retribusi Daerah	10.017.993.958,00	11.311.663.467,00	8.607.453.298,00	10.985.811.066,00	9.868.450.550,00	0,02
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.275.374.095,00	7.310.808.360,00	7.862.245.494,00	3.173.704.322,00	4.841.522.022,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	69.735.035.663,00	87.716.201.313,00	62.009.313.335,00	89.333.038.252,00	116.626.372.895,89	0,18
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.170.054.185.547,00**	**1.006.398.203.018,00**	**1.040.798.650.792,00**	**1.101.617.444.043,00**	**991.508.740.706,00**	(0,04)
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.117.073.672.972,00**	**947.578.509.002,00**	**975.329.580.912,00**	**1.017.241.020.881,00**	**923.647.746.342,00**	(0,04)
1.2.1.1	**Dana Perimbangan**	**931.939.688.972,00**	**770.217.653.002,00**	**827.531.125.912,00**	**889.486.273.881,00**	**923.647.746.342,00**	0,00
1.2.1.1.1	**Dana Transfer Umum**	**689.864.055.021,00**	**614.004.305.201,00**	**658.114.984.142,00**	**706.794.327.466,00**	**619.238.831.565,00**	(0,02)
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	160.829.096.021,00	94.262.789.201,00	138.373.468.142,00	172.194.089.466,00	133.401.541.565,00	0,02
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	529.034.959.000,00	519.741.516.000,00	519.741.516.000,00	534.600.238.000,00	485.837.290.000,00	(0,02)
1.2.1.1.2	**Dana Transfer Khusus**	**242.075.633.951,00**	**156.213.347.801,00**	**169.416.141.770,00**	**182.691.946.415,00**	**304.408.914.777,00**	0,12
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	233.111.153.951,00	73.652.440.094,00	59.355.325.712,00	81.480.649.177,00	58.480.054.354,00	(0,20)
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	8.964.480.000,00	82.560.907.707,00	110.060.816.058,00	101.211.297.238,00	107.624.291.423,00	2,13

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	53.985.765.000,00	34.750.000.000,00	-	9.884.370.000,00	4,72
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	83.258.129.000,00	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	
1.2.1.5	Dana Desa	96.875.855.000,00	123.375.091.000,00	113.048.455.000,00	127.754.747.000,00	128.420.199.000,00	0,08
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**52.980.512.575,00**	**58.819.694.016,00**	**65.469.069.880,00**	**84.376.423.162,00**	**67.860.994.364,00**	0,08
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	52.980.512.575,00	58.819.694.016,00	65.469.069.880,00	84.376.423.162,00	67.860.994.364,00	0,08
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**774.605.000,00**	**345.722.060,00**	**92.414.606,00**	**429.910.489,00**	**8.012.336.683,00**	5,00
1.3.1	Hibah	774.605.000,00	345.722.060,00	92.414.606,00	429.910.489,00	8.012.336.683,00	5,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-	-	

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari 2016 sampai dengan 2020 hanya -0,02 persen. Sangat jauh berbeda dengan 5 tahun sebelumnya yang rata-rata pertumbuhannya sampai dengan 15,86 persen.
2. Rendahnya rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh transfer Pemerintah Pusat yang terus menurun dari tahun 2016 dibandingkan tahun 2020, sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari transfer Pemerintah Pusat -0,04 persen.
3. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari transfer antar daerah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,08 persen.
4. Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni hibah juga ada mengalami sedikit pertumbuihan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,00 persen, tetapi pendapatan ini sangat situasional, tergantung ada tidaknya program hibah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah pada pelaksanaan pembangunan periode mendatang. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 2. Realisasi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**BELANJA DAERAH**	**1.256.997.809.330,00**	**1.175.975.773.612,91**	**1.042.562.473.117,20**	**1.223.919.331.772,00**	**1.127.091.771.242,97**	**(0,02)**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**749.994.287.265,00**	**664.689.376.396,00**	**660.652.926.988,17**	**781.228.103.422,00**	**779.205.497.290,50**	**0,02**
5.1.1	Belanja Pegawai	488.935.927.300,00	435.522.347.699,00	442.515.089.973,00	476.474.791.926,00	447.477.338.991,00	(0,02)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.892.659.865,00	206.846.170.797,00	200.881.145.863,17	280.668.496.711,00	271.494.117.099,50	0,04
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	13.468.450.100,00	9.630.807.900,00	5.915.136.000,00	12.444.666.007,00	56.575.441.200,00	0,99
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.697.250.000,00	12.690.050.000,00	11.341.555.152,00	11.640.148.778,00	3.658.600.000,00	1,43
5.2	**BELANJA MODAL**	**340.222.906.965,00**	**324.702.093.288,91**	**202.533.263.392,03**	**238.208.536.731,00**	**101.115.015.437,47**	**(0,21)**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**816.074.200,00**	**204.000.000,00**	**341.284.265,00**	**3.541.899.011,00**	**52.819.164.468,00**	**5,80**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**165.964.540.900,00**	**186.380.303.928,00**	**179.034.998.472,00**	**200.940.792.608,00**	**193.952.094.047,00**	**0,04**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.697.206.000,00	763.159.028,00	3.052.331.972,00	2.291.884.108,00	2.844.607.047,00	0,61
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	164.267.334.900,00	185.617.144.900,00	175.982.666.500,00	198.648.908.500,00	191.107.487.000,00	0,04

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2020 turun sebesar -0,02 persen. Turunnya kemampuan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan menurunnya tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan tingkat realisasi belanja daerah dibandingkan anggaran digunakan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran dan efektifitas dalam melakukan penganggaran. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3. Proporsi Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

Kode	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	**BELANJA DAERAH**	**64,73**	**87,98**	**89,08**	**94,00**	**84,74**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**53,64**	**92,52**	**86,06**	**97,44**	**85,9**
5.1.1	Belanja Pegawai	45,76	97,83	88,54	95,01	86,49
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79,25	82,89	82,04	102,57	85,21
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	88,81	95,80	69,63	91,39	93,51
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	39,21	93,05	78,27	89,66	37,03
5.2	**BELANJA MODAL**	**90,81**	**75,84**	**91,10**	**80,84**	**80,07**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40,80**	**11,25**	**68,26**	**78,36**	**76,98**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**99,40**	**98,99**	**99,52**	**99,92**	**99,02**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	89,66	34,33	95,11	93,23	95,45
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	99,51	99,76	99,60	100,00	99,08

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, tingkat realisasi belanja terhadap anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terus meningkat. Namun pada tahun 2020 ada mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini menggambarkan semakin baiknya serapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada rentang waktu 2016 sampai 2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja, yang

kemungkinan besar terjadi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait *refocusing* anggaran sehubungan dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan penganggaran yang efektif selama beberapa tahun terakhir terus membaik sehingga *gap* antara anggaran dan realisasi terus menurun.

C. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah baik dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan adalah seperti tabel berikut :

Tabel 3. 4. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Pembiayaan Daerah						
A.	**Penerimaan pembiyaan :**	**51.272.192.504,00**	**62.097.331.913,00**	**11.287.238.618,00**	**122.467.077.232,00**	**139.388.736.413,00**	234,53
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	51.272.192.504,00	62.097.331.913,00	11.287.238.618,00	122.467.077.232,00	139.388.736.413,00	234,53
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	0,00
6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
B	**Penngeluaran Pembiayaan Daerah**	-	-	-	-	-	0,00
	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00

No.	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Penyertaan modal daerah	-	-	-	-	-	0,00
	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	0,00
	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	0,00
	Pengeluaran pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	Pembiayaan Netto	**51.272.192.504,00**	**62.097.331.913,00**	**11.287.238.618,00**	**122.467.077.232,00**	**139.388.736.413,00**	**234,53**

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Penerimaan pembiayaan daerah 100 % berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA). Realisasi penerimaan pembiayaan fluktuatif , tetapi ada kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya realisasi pendapatan daerah, sedang persentase realisasi belanja ada kecenderungan stagnan. Pengeluaran pembiayaan pada periode tahun 2016 - 2020 realisasinya tidak ada, karena memang dalam periode tersebut tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan. Hal ini terjadi mengingat kemampuan keuangan yang tidak tinggi, sehingga seluruh penerimaan pembiayaan hanya mampu untuk menutup defisit anggaran.

D. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Neraca Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami perkembangan yang pesat pada periode tahun 2016 - 2020 seperti dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Ket
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**ASET**							
1.1	**ASET LANCAR**	**11,028,004,617,542.00**	**63,914,152,251.34**	**233,097,872,912.99**	**204,908,705,383.83**	**219,225,667,056.73**	**40.04**	
1.1.1	**Kas**	62,785,717,247.45	11,297,508,927.59	122,467,077,232.30	144,812,563,279.22	161,392,278,151.94	232.93	
1.1.2	**Piutang**	29,725,657,731.80	26,629,448,469.94	97,728,205,539.78	50,792,302,432.16	43,498,949,911.11	48.55	
1.1.3	**Beban Dibayar Di Muka**	91,500,000.00	87,821,250.00	142,322,083.33	247,416,666.67	43,330,237.50	12.35	
1.1.4	**Persediaan**	17,677,171,196.17	25,899,373,603.81	12,760,268,057.58	9,056,423,005.78	14,291,108,756.18	6.14	
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**123,223,968,765.04**	**119,214,439,955.10**	**143,210,102,619.61**	**140,832,466,492.18**	**139,036,394,410.62**	**3.48**	
1.2.1	**Investasi Non Permanen**	-	-	-	-	-		
1.2.2	**Investasi Permanen**	123,223,968,765.04	119,214,439,955.10	143,210,102,619.61	140,832,466,492.18	139,036,394,410.62	3.48	
1.3	**ASET TETAP**	**1,686,981,335,506.15**	**1,870,138,577,338.86**	**1,737,800,715,204.27**	**1,814,524,602,457.27**	**1,809,846,257,711.83**	**1.98**	
1.3.1	**Tanah**	313,282,272,839.00	316,594,886,839.00	290,440,706,708.00	304,087,820,540.38	305,991,261,874.38	-0.47	
1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	271,620,172,220.65	321,756,839,783.16	360,698,248,573.58	400,873,883,166.76	454,580,665,682.76	13.77	
1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	704,058,333,804.89	740,350,675,625.44	858,742,006,778.81	903,002,295,184.84	929,617,601,582.39	7.31	
1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	1,536,350,937,767.63	1,713,342,773,982.33	1,664,851,810,677.25	1,781,183,877,524.65	1,837,907,768,283.96	4.72	
1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	30,389,594,963.33	37,796,900,795.85	33,405,171,927.40	38,491,377,333.30	37,753,462,656.30	6.52	

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Ket
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.3.6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	11,828,888,937.06	112,204,208,302.06	24,729,968,343.37	51,764,254,165.44	28,000,255,201.44	208.50	
1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	-1,180,548,865,026.41	-1,371,907,707,988.98	-1,495,067,197,804.14	-1,664,878,905,458.10	-1,784,004,757,569.40	10.92	
1.4	**ASET LAINNYA**	**63,129,222,804.55**	**17,180,033,003.98**	**10,772,272,812.10**	**21,501,150,829.10**	**21,238,291,945.10**	**-2.93**	
1.4.1	**Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**	150,000,000.00	4,439,000,507.79	-	1,471,692,064.00	1,471,692,064.00	689.83	
1.4.2	**Aset Tak Berwujud**	-551,860,394.00	776,653,249.00	1,003,726,672.00	894,770,638.00	559,771,021.00	-64.95	
1.4.3	**Aset Lain-Lain**	63,531,083,198.55	11,964,379,247.19	9,768,546,140.10	19,134,688,127.10	19,206,828,860.10	-0.82	
	JUMLAH ASET DAERAH	**12,901,339,144,617.70**	**2,070,447,202,549.28**	**2,124,880,963,548.97**	**2,181,766,925,162.38**	**2,189,346,611,124.28**	**-19.57**	
2	**KEWAJIBAN**							
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**56,809,651,377.76**	**164,829,636,413.13**	**102,441,939,361.90**	**63,038,590,011.87**	**52,588,462,652.68**	**24.31**	
2.1.1	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	-	10,270,309.00	-	-	-	-25.00	
2.1.2	**Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat**	42,859,424,497.00	85,220,575,596.00	86,721,491,041.00	36,637,467,288.00	33,649,687,771.00	8.67	

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Ket
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.3	**Pendapatan Diterima Dimuka**	107,920,363.00	47,033,951.00	40,844,662.00	40,599,470.00	42,704,477.00	-16.25	
2.1.4	**Utang Belanja**	13,226,868,245.76	19,812,391,872.92	13,508,129,386.90	22,084,941,630.87	18,146,978,433.55	15.91	
2.1.5	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	615,438,272.00	59,739,364,684.21	2,171,474,272.00	4,275,581,623.00	749,091,971.13	2,381.21	
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	-	-	-	-	-	**0.00**	
	JUMLAH KEWAJIBAN	**56,809,651,377.76**	**164,829,636,413.13**	**102,441,939,361.90**	**63,038,590,011.87**	**52,588,462,652.68**	**24.31**	
3	**EKUITAS**	**1,926,804,921,873.40**	**1,905,617,566,136.15**	**2,022,439,024,187.07**	**2,118,728,335,150.51**	**2,136,758,148,471.60**	**2.66**	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1,983,614,573,251.16**	**2,070,447,202,549.28**	**2,124,880,963,548.97**	**2,181,766,925,162.38**	**2,189,346,611,124.28**	**2.51**	

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Analisis terhadap neraca keuangan daerah pada lima tahun terakhir yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas. Namun pada analisis berikut yang disajikan hanya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, seperti dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6. Analisis Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Rasio Likuiditas**					
1.1	Rasio Lancar	19.412	38,78	227,54	325,05	816,87
1.2	Rasio Quick	193,81	0,23	2,15	3,11	3,90
2.	**Rasio Solvabilitas**					
2.2	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,44	7,96	4,82	2,89	2,40
2.2	Rasio Hutang Terhadap Modal (Ekuitas)	2,95	8,65	5,07	2,98	2,46

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Arah kebijakan pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari 3 sumber pendapatan daerah tersebut, kemampuan keuangan daerah masih bertumpu pada pendapatan transfer. Sekitar 90 % pendapatan daerah masih tergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun Prov. Kalimantan Selatan,

9 – 10 % dari Pendapatan Asli Daerah dan 0 – 1 % dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2022 dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan optimalisasi sumber-sumber PAD yang berasal dari :

1. Pajak Daerah

   Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Sarang Burung Walet.

2. Retribusi Daerah

   Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

   Penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan modal.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari penerimaan jasa giro, denda keterlambatan dan pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi BPJS, penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan bunga deposito.

Pendapatan dari Pendapatan asli daerah diproyeksikan sesuai dengan perhitungan potensi dan situasi kondisi perekonomian daerah.

Pendapatan dari dana transfer berasal dari transfer pusat dan transfer antar daerah. Transfer pusat diharapkan dari 3 sumber yaitu :

1. Dana Perimbangan yang terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH/BP)

Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan, pajak PBB Pemerataan, pajak PBB sektor pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan (PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria /kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

3. Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Transfer antar daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun daerah lainnya yang terdiri dari :

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Bagi Hasil dipekirakan hanya berasal dari dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2. Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan peraturan perundangan

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2021 - 2026 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah. Belanja Daerah diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pemenuhan belanja program prioritas pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan (*money follow programme*).
2. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat dan Prov. Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan pembiayaan sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan tidak negatif. Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Disamping itu belanja daerah disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan.

Belanja daerah secara garis besar terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang

tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.

Dalam belanja daerah, terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang Jasa

   Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja Bunga; merupakan belanja pembayaran bunga utang.

4. Belanja Subsidi; merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat.

5. Belanja Hibah; merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan.
6. Belanja Bantuan Sosial; merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Belanja modal meliputi :

1. Belanja Tanah

   Belanja ini digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

2. Belanja Peralatan dan Mesin

   Belanja peralatan dan mesin ini digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3. Belanja Bangunan dan Gedung

   Belanja bangunan dan gedung ini, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4. Belanja Jalan

   Belanja jalan ini, digunakan untuk menganggarkan jalan mencakup jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5. Belanja Irigasi dan Jaringan

   Belanja irigasi dan jaringan ini, digunakan untuk menganggarkan irigasi dan jaringan mencakup irigasi dan

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6. Belanja Aset Tetap Lainnya

   Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

Belanja Tidak Terduga dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer meliputi :

1. Belanja Bagi Hasil

   Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa, dianggarkan dana 10 % dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

   Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

A. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak

dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 7. Belanja Periodik yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
A	**Belanja Operasi**	**375.425.170.489**	**340.478.048.118**	**347.517.832.351**	**380.362.590.625**	**434.178.106.215**	**0,04**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	317.560.242.011	286.908.433.795	276.989.210.229	277.923.748.539	343.144.662.128	**0,03**
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	44.491.172.500	40.608.898.000	58.664.561.251	87.721.410.264	77.416.090.885	**0,18**
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.667.669.216	4.445.498.350	8.111.413.710	7.761.123.100	7.957.660.940	**0,37**
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	381.825.552	476.888.790	310.218.132	436.678.017	1.003.919.845	**0,40**
5	Belanja Honorarium PNS**)	10.324.261.210	8.038.329.183	3.442.429.029	6.519.630.705	4.655.772.417	**(0,05)**
B	**Belanja Barang dan Jasa**	**399.917.513.612**	**372.262.731.120**	**253.896.441.990**	**337.161.011.775**	**210.289.558.469**	**(0,11)**
1	Belanja Uang Lembur**)	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	411.000.000	-	-	35.000.000	-	-
3	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	2.090.425.000	1.877.776.000	1.398.058.000	3.591.080.525	2.234.648.064	**0,21**
4	Belanja premi asuransi kesehatan	66.280.000	2.442.929.000	-	25.660.957.500	47.409.319.964	**8,93**
5	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	13.952.571.932	4.589.750.540	13.396.333.776	16.791.913.366	10.091.264.633	**0,28**
6	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	452.224.100	469.229.100	467.767.061	554.652.400	431.229.201	**0,00**
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	667.672.050	599.633.900	774.957.650	1.277.384.759	547.897.203	**0,07**
8	Belanja perjalanan dinas**)	28.365.774.684	23.920.741.048	24.193.145.108	37.067.136.737	33.579.374.025	**0,07**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
9	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	340.222.906.965	324.702.093.289	202.533.263.392	238.208.536.731	101.115.015.437	**(0,21)**
12	Belanja Telepon	236.243.538	260.795.239	204.622.674	144.649.301	140.728.243	**(0,11)**
13	Belanja Air	215.804.707	269.250.546	287.204.895	263.601.081	271.261.301	**0,07**
14	Belanja Listrik	6.772.303.035	7.197.012.100	7.400.450.174	7.584.269.750	7.603.233.196	**0,03**
15	Belanja Surat Kabar/Majalah	296.740.000	217.145.500	193.488.000	194.521.500	179.380.000	**(0,11)**
16	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.105.326.275	1.190.914.747	1.168.312.962	1.412.948.599	2.143.929.807	**0,20**
17	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.991.316.889	3.313.169.560	1.404.627.912	2.973.058.399	2.903.642.809	**0,09**
18	Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin	357.871.100	327.664.624	307.080.050	604.152.310	673.441.462	**0,23**
19	Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya	1.430.000	-	7.826.000	43.780.000	7.495.000	**0,69**
20	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Rumah Jabatan	483.954.437	609.495.675	137.160.236	513.600.417	957.698.124	**0,77**
21	Belanja Service Komputer/PC/ Laptop	66.440.000	31.145.000	-	42.789.600	-	**(0,63)**
22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Elektronik/Digital/ Komputer	161.228.900	243.985.252	22.144.100	196.978.800	-	**1,62**
C	**Pembiayaan Pengeluaran**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	**775.342.684.101**	**712.740.779.238**	**601.414.274.341**	**717.523.602.400**	**644.467.664.684**	**(0,04)**

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Tabel 3. 8. Total Belanja Kebutuhan Aparatur dan Total Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2016	775.342.684.101	1.308.270.001.834	59%
2	Tahun Anggaran 2017	712.740.779.238	1.238.073.105.526	58%
3	Tahun Anggaran 2018	601.414.274.341	1.052.064.130.554	57%
4	Tahun Anggaran 2019	717.523.602.400	1.346.386.409.004	53%
5	Tahun Anggaran 2020	644.467.664.684	1.127.091.771.243	57%

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami penurunan sebesar Rp 57.819.081.701,- atau turun sebesar 7,46 %. Pada belanja Operasi terjadi penurunan pada belanja gaji dan tunjangan serta honorarium PNS. Untuk belanja gaji dan tunjangan penurunan dipengaruhi oleh pengurangan jumlah aparatur karena pensiun dan pindah tugas serta moratorium penerimaan PNS, sedangkan penurunan pada belanja honorarium PNS karena dilakukannya rasionalisasi belanja honorarium PNS pada beberapa tahun kebelakang. Belanja barang dan jasa pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar Rp 62.756.501.837,- atau sebesar 15,69%. Pada tahun 2020, turun lagi karena adanya bencana pandemi covid 19, sehingga terjadi realokasi anggaran termasuk belanja kebutuhan aparatur untuk penanganan bencana. Penurunan pada belanja barang dan jasa ini, karena adanya rasionalisasi belanja yang dilakukan beberapa tahun kebelakang.

2. Proporsi belanja aparatur terhadap total belanja terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar 6%, yakni 53% pada tahun 2019 yang sebelumnya pada tahun 2016 mencapai 59%. Meskipun sudah turun akan tetapi masih tinggi diatas 50%. Dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 57 %, karena adanya pandemi covid 19, sehingga kemampuan keuangan menurun, sementara kebutuhan belanja aparatur khususnya belanja pegawai tetap harus dikeluarkan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai berikut.

   a. Meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah sehingga proporsi belanja menjadi lebih ideal.
   b. Rasionalisasi belanja aparatur berbasis kinerja.
   c. Penganggaran berbasis Analisis Standar Belanja.

B. Analisa Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman serta penerimaan piutang daerah. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan defisit anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3. 9. Komposisi Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Ket
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,267,822,948,739.00	1,125,165,680,319.00	1,132,223,422,681.00	1,219,107,267,371.00	1,141,971,557,669.69	
	Dikurangi realisasi :						
2	Belanja Daerah	1,256,997,809,330.00	1,175,975,773,613.00	1,040,776,891,936.00	1,223,919,331,772.00	1,127,091,771,242.97	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	0	0	0	
	Defisit Riil	10,825,139,409.00	-50,810,093,294.00	91,446,530,745.00	-4,812,064,401.00	14,879,786,426.72	

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2016 - 2020 terjadi dua kali defisit anggaran yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 50,810,093,294.00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 4,812,064,401.00. Komposisi *defisit* anggaran belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 10. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil					Ket
		Tahun 2016 (%)	Tahun 2017 (%)	Tahun 2018 (%)	Tahun 2019 (%)	Tahun 2020 (%)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Realisasi SiLPA dari tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 11. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 - 2021

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Ket
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1	Jumlah SiLPA	62,097,331,912.45	100.00	11,287,238,618.59	100.00	122,467,077,232.30	100.00	139,388,754,641.22	100.00	61,392,277,881.94	100.00	
2	Pelampauan penerimaan PAD	-		-		-		-		-		
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan											
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah											
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	5,287,680,534.69	8.52	-	-	20,025,137,870.40	16.35	76,350,164,629.35	54.77	08,803,815,229.26	67.42	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	56,809,651,377.76	91.48	164,829,636,413.13	1,460.32	102,441,939,361.90	83.65	63,038,590,011.87	45.23	52,588,462,652.68	32.58	
7	Kegiatan lanjutan											

Sumber : BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah yang dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang kemudian digambarkan/dipetakan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan, dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan kenaikan dalam rentang 5 tahun tersebut. Sebagaimana terlihat pada tabel, pada tahun 2016 kapasitas fiskal daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk kategori tinggi. Namun pada tahun-tahun selanjutnya menurun pada kategori sedang dan rendah dan kemudian naik kembali menjadi sedang. Menurunnya tingkatan kategori tersebut mengindikasikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap pendanaan dari pusat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Indeks KFD	Kategori KFD *)
2016	1,160	Tinggi
2017	0,740	Sedang
2018	0,752	Rendah
2019	0,691	Rendah
2020	0,754	Sedang

***) Tahun 2018 terjadi perubahan rentang indeks kategori KFD**

Sumber : Kementerian Keuangan, 2020

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Sama seperti periode terdahulu maka proyeksi pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat dan dari transfer pemerintah Provinsi. Transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Transfer Provinsi berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan. Dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah maka dilakukan strategi berupa optimalisasi seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah berbasis elektronik /digitalisasi.

2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana pemungutan Pajak dan retribusi.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana transfer yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Proyeksi pendapatan daerah untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 13. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Ket
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**Pendapatan Daerah**	**1,153,725,023,275.00**	**1,138,041,306,915.00**	**1,173,401,652,310.00**	**1,208,830,684,764.00**	**1,244,330,227,937.00**	**1,279,902,159,580.00**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**135,231,720,597.00**	**128,930,087,915.00**	**131,790,433,310.00**	**134,719,465,764.00**	**137,719,008,937.00**	**140,790,940,580.00**	
1.1.1	Pajak Daerah	12,665,452,039.00	13,172,070,120.00	13,698,952,924.00	14,246,911,041.00	14,816,787,482.00	15,409,458,981.00	
1.1.2	Retribusi Daerah	9,879,329,225.00	10,126,312,455.00	10,379,470,266.00	10,638,957,022.00	10,904,930,947.00	11,177,554,220.00	
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,841,522,022.00	3,232,932,735.00	3,265,262,063.00	3,297,914,683.00	3,330,893,830.00	3,364,202,768.00	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107,845,417,311.00	102,398,772,605.00	104,446,748,057.00	106,535,683,018.00	108,666,396,678.00	110,839,724,611.00	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**989,357,486,916.00**	**1,009,111,219,000.00**	**1,041,611,219,000.00**	**1,074,111,219,000.00**	**1,106,611,219,000.00**	**1,139,111,219,000.00**	
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**908,750,225,000.00**	**933,750,225,000.00**	**958,750,225,000.00**	**983,750,225,000.00**	**1,008,750,225,000.00**	**1,033,750,225,000.00**	
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**80,607,261,916.00**	**75,360,994,000.00**	**82,860,994,000.00**	**90,360,994,000.00**	**97,860,994,000.00**	**105,360,994,000.00**	

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Ket
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**29,135,815,762.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1.3.1	Hibah	29,135,815,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan	-	-	-	-	-	-	

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Tabel 3. 14. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**134,668,625,473.00**	**64,809,008,461.00**	**66,997,725,243.00**	**69,392,124,388.00**	**72,016,525,220.00**	**74,898,410,246.00**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	134,668,625,473.00	64,809,008,461.00	66,997,725,243.00	69,392,124,388.00	72,016,525,220.00	74,898,410,246.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-		-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-		-	-	-	
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-		-	-	-	

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**		**-**	**-**	**-**	
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	-		-	-	-	
8	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-		-	-	-	
9	Pembentukan Dana Cadangan	-		-	-	-	
10	Pemberian Pinjaman Daerah	-		-	-	-	
11	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-		-	-	-	
A-B	**JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO**	**134,668,625,473.00**	**64,809,008,461.00**	**66,997,725,243.00**	**69,392,124,388.00**	**72,016,525,220.00**	**74,898,410,246.00**

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

3.3.3. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Tabel 3. 15. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Belanja Operasi	572.590.737.537	420.849.188.288	435.348.579.204	450.383.004.202	465.973.579.443	482.142.308.412
B	Belanja Barang dan Jasa	349.942.647.212	342.881.832.882	344.925.617.802	347.043.311.486	349.238.466.649	351.514.823.224
C	Pembiayaan Pengeluaran	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (A+B+C)	**922.533.384.749**	**763.731.021.171**	**780.274.197.006**	**797.426.315.688**	**815.212.046.092**	**833.657.131.636**

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

3.3.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 16. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Proyeksi						Ket
		Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	
1	**Pendapatan**	1,153,725,023,275.00	1,138,041,306,915.00	1,173,401,652,310.00	1,208,830,684,764.00	1,244,330,227,937.00	1,279,902,159,580.00	
	Persentase	89.55	94.61	94.60	94.57	94.53	94.47	
2	**Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)**	-	-	-	-	-	-	
	Persentase	-	-	-	-	-	-	
3	**Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran**	134,668,625,473.00	64,809,008,461.00	66,997,725,243.00	69,392,124,388.79	72,016,525,220.86	74,898,410,246.36	
	Persentase	10.45	5,39	5.40	5.43	5.47	5.53	
	Total Penerimaan	1,288,393,648,748	1,202,850,315,376.00	1,240,399,377,554	1,278,222,809,153	1,316,346,753,158	1,354,800,569,826	
	Persentase	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Dikurangi :							

No	Uraian	Proyeksi						Ket
		Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Tahun 2025 (%)	Tahun 2026 (%)	
4	**Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama**	922,533,384,749	763,731,021,171	780,274,197,006	797,426,315,688	815,212,046,092	833,657,131,636	
	Persentase	71.60	63.49	62.91	62.39	61.93	61.53	
5	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-	-	-	-	
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	365,860,263,999	439,119,294,205	460,125,180,548	480,796,493,465	501,134,707,066	521,143,438,190	
	Persentase	28.40	36.51	37.09	37.61	38.07	38.47	

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan, proporsinya masih berada di bawah 50 %. Beban belanja masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja wajib serta belanja mengikat.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai program-program prioritas RPJMD dan program-program penyelenggaraan urusan pemerintah daerah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 17. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Proyeksi						Ket
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	
1	**Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan**	365,860,263,999	439,119,294,205	460,125,180,548	480,796,493,465	501,134,707,066	521,143,438,190	
2	**Prioritas I**	256,102,184,799	307,383,505,944	322,087,626,383	336,557,545,425	350,794,294,946	364,800,406,733	
3	**Prioritas II**	109,758,079,200	131,735,788,261	138,037,554,164	144,238,948,039	150,340,412,120	156,343,031,457	

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya secara merata, *konsisten* dan berkualitas. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah wajib dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan yang memiliki *relevansi* dengan berbagai fenomena daerah sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Perlu adanya analisis permasalahan pembangunan maupun analisis isu-isu strategis sebagai bahan dan modal utama untuk menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan demi mengantisipasi berbagai permasalahan di masyarakat, mengatasi permasalahan yang mengiringi pembangunan, hingga mempercepat capaian pembangunan melalui telaahan isu-isu pembangunan, baik daerah, *regional*, nasional hingga internasional.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *riil* saat perencanaan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan diuraikan menurut misi pembangunan RPJPD Tahun 2005 – 2025, karena RPJMD periode 2021-2026 adalah implementasi Tahap IV (terakhir) dari RPJPD tersebut. Dengan perumusan permasalahan daerah bertujuan agar dapat terpetakan dan dijabarkan dalam berbagai permasalahan terkait dengan pencapaian visi dan misi RPJPD Tahun 2005 -2025. Selain itu permasalahan daerah juga dilakukan dengan

menganalisis perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang atau gambaran umum kondisi daerah dalam periode pembangunan sebelumnya khususnya terkait dengan perkembangan pencapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan berdasarkan RPJPD, maka permasalahan utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah **"Pembangunan daerah yang belum mampu mensejahterakan masyarakat".** Lebih lanjut dari permasalahan utama tersebut, maka permasalahan pokok daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kemandirian Sumber Daya Manusia.
2. Rendahnya kesejahteraan masyarakat.
3. Lambannya perkembangan kawasan pertumbuhan dan belum terpenuhinya secara merata pembangunan infrastruktur
4. Adanya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat, kecenderungan naiknya kejadian penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas serta bencana;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

Berikut penjabaran permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kemandirian Sumber Daya Manusia

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dipelbagai bidang serta sektor pembangunan. sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang dimiliki menuju tercapainya

kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Sumber daya manusia merupakan subyek utama pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Namun, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hanya sebesar 68,84 pada tahun 2020. Angka ini menduduki peringkat ke sembilan dari tiga belas Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang mencapai 70,91. Peringkat ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2015, walaupun IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4. 1. Perbandingan Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6 (Enam) Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	PPP (Ribu Rupiah)	IPM
1	**Hulu Sungai Tengah**	66,01	12,20	8,00	12.153	68,84
2	Hulu Sungai Selatan	65,97	12,17	7,75	12.672	68,85
3	Hulu Sungai Utara	63,83	12,91	7,53	9.527	65,59
4	Balangan	67,72	12,46	7,55	11.452	68,82
5	Tabalong	70,44	12,72	9,1	11.283	72,19
6	Tapin	70,40	11,94	7,76	11.841	70,11
Kalimantan Selatan		**68,66**	**12,52**	**8,29**	**12.032**	**70,91**

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang mempunyai kecenderungan terus mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/Provinsi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Hulu Sungai Tengah	67,07	67,78	68,32	68,80	68,84
2	Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan daerah, sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan melalui berbagai realisasi keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan keberhasilan program dan kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menyukseskan setiap tahapan pembangunan, peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan menjadi syarat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan.

a. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki, baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peningkatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga masih belum optimal, dimana angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8 tahun pada tahun 2020. Hal ini

mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah rata-rata telah bersekolah hingga jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Dua Semester Dua. Meskipun begitu, harapan untuk peningkatan pendidikan masa mendatang cukup terbuka lebar dimana harapan usia sekolah mencapai 12,20 tahun pada tahun 2020. Hal ini merupakan rapor positif bagi *stakeholder* maupun instansi pembangunan pendidikan dimana meningkatnya harapan lama sekolah menjadikan potensi sumber daya manusia generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang masuk usia sekolah pada tahun 2020 memiliki kesempatan mengenyam bangku pendidikan formal hingga 12 tahun dimana lama sekolah lebih 12 tahun berarti sudah bisa menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4. 3. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	7.53	7.79	7.8	7.81	8.00
2	Hulu Sungai Selatan	7.68	7.71	7.72	7.74	7.75
3	Hulu Sungai Utara	7	7.19	7.36	7.37	7.53
4	Balangan	6.71	7.03	7.55	7.63	7.55
5	Tabalong	8.32	8.56	8.57	8.78	9.10
6	Tapin	7.44	7.53	7.54	7.75	7.76
Kalimantan Selatan		7.89	7.99	8.00	8.20	8.29

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu meningkat setiap tahun, tetapi masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada peringkat ke-2 dari 6 (enam) kabupaten sekitar. Dengan rata-rata lama sekolah baru mencapai jenjang Kelas 8 (Kelas 2 SMP), maka kualitas SDM masih berpendidikan rendah.

Kualitas SDM juga masih rendah dilihat dari indikator angka harapan lama sekolah yang baru mencapai 12,20 tahun, berada pada peringkat ke-4 tingkat capaiannya jika dibandingkan dengan capaian 5 (lima) kabupaten tetangga.

Tabel 4. 4. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	12	12.17	12	12.18	12.20
2	Hulu Sungai Selatan	12.02	12.05	12.07	12.11	12.17
3	Hulu Sungai Utara	12.81	12.82	12.83	12.88	12.91
4	Balangan	11.77	12.07	12.36	12.37	12.46
5	Tabalong	12.46	12.47	12.53	12.59	12.72
6	Tapin	11.24	11.52	11.85	11.86	11.94
Kalimantan Selatan		12.29	12.46	12.5	12.52	12.52

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

b. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Tinggi

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah derajat kesehatan masyarakat yang belum tinggi karena kurangnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Buruknya pelayanan kesehatan disebabkan berbagai hal, salah satunya diukur dari tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Selama ini, sebaran fasilitas medis dan tenaga kesehatan belum merata dan lengkap serta masih belum standar, sehingga pelayanan kesehatan masih di daerah pedalaman kurang terlayani dengan baik. Berdasar data-data yang ada, secara umum status kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengalami peningkatan, walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan status kesehatan di Kabupaten lain se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Ketimpangan derajat kesehatan masyarakat terlihat antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan-pedesaan. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

Melahirkan lebih tinggi pada tingkat pendidikan rendah, di pedesaan dan kawasan pedalaman. Akses pelayanan kesehatan yang rendah ini disebabkan karena kendala geografis, psikologis, dasar indikator angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan *prevalensi* gizi kurang. Hal ini digambarkan dengan angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 baru mencapai 66,01 tahun, masih berada di bawah rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 68,66 tahun.

Tabel 4. 5. Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Usia Harapan Hidup (Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	65.06	65.3	65.54	65.82	66.01
2	Hulu Sungai Selatan	65.38	65.39	65.59	65.89	65.97
3	Hulu Sungai Utara	62.71	62.94	63.24	63.58	63.83
4	Balangan	67.07	67.19	67.37	67.59	67.72
5	Tabalong	69.84	69.95	70.12	70.33	70.44
6	Tapin	69.62	69.77	69.98	70.23	70.40
Kalimantan Selatan		67.92	68.02	68.23	69.31	68.66

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

c. Belum Optimalnya Kemandirian dan Peran Perempuan dan Pemuda Dalam Pembangunan

Sebagai bagian dari komponen bangsa, peran perempuan dan pemuda menjadi sangat penting. Idealnya pembangunan harus bisa melibatkan partisipasi dari semua komponen bangsa. Sumber Daya Manusia (SDM) perempuan juga merupakan asset yang sangat berharga bagi pembangunan. Selama ini keterlibatan SDM perempuan dalam pembangunan masih terbatas. Hal ini bisa dilihat dari data Indeks Pembangunan Gender, yaitu indeks untuk mengukur pembangunan manusia dilihat dari gender dengan mengungkap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 4. 6. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	-	96,89	96,52	96,6	96,50
2	Hulu Sungai Selatan	-	89,07	89,10	89,21	89,23
3	Hulu Sungai Utara	-	92,36	92,09	91,59	91,52
4	Balangan	-	92,31	92,32	92,12	92,22
5	Tabalong	-	85,15	84,99	85,43	85,34
6	Tapin	-	83,87	84,56	84,44	84,08
Kalimantan Selatan		88,86	88,6	88,61	88,61	88,86

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Dari data pada Tabel diatas dapat terlihat bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan lebih rendah dari kualitas SDM laki-laki di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada kecenderungan dari tahun ke tahun terjadi penurunan kualitas perempuan. Permasalahan pembangunan gender di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan pada tahun 2019 mencapai 7,69 tahun dibandingkan dengan laki-laki sudah mencapai 8,47 tahun. Begitu pula dengan rata-rata pengeluaran per kapita perempuan masih lebih rendah dari laki-laki yaitu baru mencapai Rp 11,954 juta/jiwa/tahun dibandingkan dengan laki-laki sebesar Rp 13,509 juta/jiwa/tahun.

Kiprah perempuan dalam pembangunan dapat tergambar dari data Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik sudah baik walaupun belum maksimal. Perkembangan IPG dari tahun ke tahun terjadi peningkatan seperti terlihat pada tabel.

Tabel 4. 7. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2019

No	Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
		2016	2017	2018	2019
1	**Hulu Sungai Tengah**	-	80,07	80,19	77,69
2	Hulu Sungai Selatan	-	61,1	60,48	54,5
3	Hulu Sungai Utara	-	64,5	64,59	70,36
4	Balangan	-	65,79	65,97	69,55
5	Tabalong	-	70,77	71,97	72,3
6	Tapin	-	72,99	73,11	65,16
Kalimantan Selatan		67,4	67,56	71,31	74,6

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Dari komponen IDG, maka keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019 baru mencapai 23,33% dari harapan 30%, perempuan sebagai tenaga professional mencapai 46,59% dan sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 48,53%. Peran perempuan sangat strategis dalam membangun keluarga yang berkualitas, sehingga peran perempuan perlu ditingkatkan lagi.

Selama ini peran perempuan belum optimal karena belum optimalnya pembinaan kepada perempuan dan pemuda. Dilihat dari indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan, maka perkembangannya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 8. Perkembangan Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80,34	77,46	82	86	90	53,39	64,42

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	19,66	22,54	18	14	11	13,33	35,58
3	Rasio KDRT	0,0010%	0,0026%	0,0026%	0,0020%	0,0012%	0,0041%	0%

Sumber: Dinas Sosial, PPKB, PPPA Kab. HST, 2021

Begitu pula peran pemuda dirasakan masih kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi. Perkembangan capaian indikator urusan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 9. Perkembangan Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda/OKP Yang Aktif	14	14	17	18	18	27	27
2	Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	30	32	36
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	6	6	6	6	6	6
4	Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diikuti	7	7	7	7	7	7	7
5	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	1	1	1	2	2	2	2
6	Jumlah Lapangan Olahraga milik Pemda	78	78	78	95	101	101	101

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten HST, 2021

Begitu pula dengan pertumbuhan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang atletnya didominasi oleh pemuda belum menggembirakan. Tempat-tempat berolahraga di lingkungan lembaga pendidikan, pemukiman, dan industri masih terbatas,

bahkan banyak lapangan olahraga yang sudah ada berubah atau beralih fungsi, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk berolahraga. Demikian pula kurangnya tenaga keolahragaan profesional yang mengabdikan diri sepenuhnya pada perkembangan olahraga, seperti pembina, penggerak, dan pelatih, merupakan kendala pula dalam pembangunan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4. 10. Perkembangan Prestasi Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten	Peringkat (Klasemen) pada PORPROV Kalsel	
		2013 (IX)	2017 (X)
1	**Hulu Sungai Tengah**	13	11
2	Hulu Sungai Selatan	11	12
3	Hulu Sungai Utara	9	7
4	Balangan	12	13
5	Tabalong	10	3
6	Tapin	3	7

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata Kabupaten HST, 2021

Kualitas pemuda bisa dilihat dari prestasi olahraga. Pada PORPROV X Tahun 2013, prestasi olahraga atlet Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada peringkat 13 dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, pada PORPROV X Tahun 2017 tadi, prestasi olahraga atlet Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai mengalami peningkatan hingga berada di peringkat 11.

Berkaitan dengan uraian data dan informasi di atas, serta terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 11. Rumusan Permasalahan Pokok
"Belum Optimalnya Kualitas dan Kemandirian Sumber Daya Manusia"

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
A.	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Belum optimalnya akses pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat	Belum memadainya infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang merata
			Belum optimalnya kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga administrasi pendidikan
			Rendahnya inovasi pembelajaran yang efektif dan efisien
			Belum adanya pengembangan kurikulum berbasis karakter dan lokal
			Belum berkembangnya budaya literasi
B.	Derajat kesehatan masyarakat belum tinggi	Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum merata dan tinggi	Masih kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan
			Kurang meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan kesehatan
			Rendahnya kemampuan masyarakat memenuhi biaya kesehatan
			Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat
C.	Belum optimalnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya kualitas perempuan dan pemuda	Kurangnya pembinaan perempuan dan pemuda
			Rendahnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
			Minimnya sarana dan prasarana pembinaan perempuan, pemuda dan olahraga

2. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat

Rendahnya kesejahteraan masyarakat dapat lihat dari belum tingginya PDRB per kapita. Tingkat kesejahteraan masyrakat Hulu Sungai Tengah tergolong masih rendah. Hal ini terlihat dari PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain. PDRB per Kapita Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-5 (kelima) dari 6 (enam) Kabupaten sekitar dengan nilai Rp 27,267 juta per kapita per tahun.

Tabel 4. 12. Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	PDRB per Kapita (Rp. Ribu)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	21.443	22.974	24.504	25.845	27.267
2	Hulu Sungai Selatan	22.613	24.308	26.228	27.611	28.794
3	Hulu Sungai Utara	16.914	18.131	19.504	20.799	21.903
4	Balangan	75.028	78.941	83.019	51.273	82.260
5	Tabalong	62.745	66.459	69.553	70.968	70.104
6	Tapin	37.417	39.791	42.382	44.543	44.310

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan rendahnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas

Perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolak ukur utama dalam melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara makro maupun mikro. Hal tersebut merupakan poin penting mengingat kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh perekonomian karena terkait dengan finansial atau kebutuhan dengan biaya seperti pangan, sandang, papan, sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tersier.

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pertumbuhan setiap tahun, walaupun ada kecenderungan terjadi perlambatan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi ini tentu saja memberikan dampak yang cukup besar pada realisasi pembangunan daerah dimana perekonomian yang memberi ruang lebih bagi pemberdayaan berbagai sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kerakyatan dengan mendorong optimalisasi investasi dan nilai tambah produk berbasis sumberdaya alam.

Tabel 4. 13. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	6,21	5,72	5,16	4,78	-1,01
2	Hulu Sungai Selatan	6,08	6,13	6,14	5,3	-1,19
3	Hulu Sungai Utara	4,65	5,77	5,83	5,52	-0,67
4	Balangan	2,62	2,92	3,13	3,17	-2,47
5	Tabalong	3,11	3,8	3,94	3,71	-2,62
6	Tapin	4,95	5,12	5,01	4,25	-1,5
Kalimantan Selatan		4,38	5,28	5,08	4,08	-1,81

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan data perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; ketiganya merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB setelah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (24,16%), yaitu masing-masing sebesar 14,03%, 11,62% dan 10,29%. Lapangan-lapangan usaha inilah bersama pertanian yang menjadi basis ekonomi daerah, sehingga perlu didorong pertumbuhannya agar bisa berkontribusi maksimal pada peningkatan ekonomi daerah. Empat lapangan usaha ini menyumbang lebih dari 60 % perekonomian daerah. Sejak tahun 2016 - 2020, kontribusi 4 lapangan usaha ini tidak berubah.

Tabel 4. 14. Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020 (%)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,47	25,42	25,13	24,09	24,16
B	Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,74	0,75	0,75	0,74
C	Industri Pengolahan	14,78	14,88	14,51	14,30	14,03
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,14	0,15	0,17	0,17	0,18
E	Pengadaan Air	0,47	0,48	0,49	0,50	0,50
F	Konstruksi	8,60	8,75	8,68	8,66	8,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,46	10,64	11,05	11,69	11,62
H	Transportasi dan Pergudangan	4,96	4,84	4,79	4,83	4,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,53	3,54	3,63	3,77	3,73
J	Informasi dan Komunikasi	4,08	4,16	4,25	4,36	4,68
K	Jasa Keuangan	2,03	2,14	2,19	2,21	2,21
L	Real Estate	3,27	3,18	3,23	3,28	3,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,52	10,24	10,25	10,34	10,29
P	Jasa Pendidikan	7,40	7,31	7,32	7,42	7,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99	1,96	1,96	1,98	2,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,37	1,38	1,40	1,45	1,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten HST, 2021

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya. Sektor dominan yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat tergantung dengan pertumbuhan lapangan usaha tersebut. Dari data terlihat bahwa pertumbuhan lapangan usaha basis ekonomi daerah ini belum optimal. Pertumbuhan lapangan usaha basis ekonomi cenderung stagnan, atau meningkat tetapi sangat kecil bahkan untuk pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan cenderung terjadi penurunan.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, maka pertumbuhan basis ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 15. Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	5,89	5,81	4,32	1,57	- 0,27
2	Hulu Sungai Selatan	4,83	1,67	4,33	2,93	0,03
3	Hulu Sungai Utara	-1,72	4,49	6,13	2,61	-0,04
4	Balangan	4,52	-0,06	4,83	4,05	-1,77
5	Tabalong	4,0	4,51	5,27	1,90	-1,95
6	Tapin	6,33	5,50	-0,43	5,33	-4,34

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, maka pertumbuhan basis ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lapangan usaha pertanian lebih rendah dari beberapa kabupaten lainnya.

Tabel 4. 16. Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	5,83	5,31	4,34	3,52	-3,53
2	Hulu Sungai Selatan	5,38	5,85	4,57	4,39	-3,60
3	Hulu Sungai Utara	5,36	5,45	2,93	2,15	-2,83
4	Balangan	6,07	5,37	3,19	2,39	-2,91
5	Tabalong	6,99	11,46	5,69	2,83	-3,71
6	Tapin	6,45	3,22	3,92	3,96	-3,70

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Begitu pula pada lapangan usaha industri pengolahan, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya.

Tabel 4. 17. Perbandingan Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	7,91	7,14	8,06	8,09	-3,43
2	Hulu Sungai Selatan	4,60	5,28	5,18	5,15	-2,39
3	Hulu Sungai Utara	7,97	8,24	8,14	7,68	-4,82
4	Balangan	7,71	8,12	3,70	4,96	-1,19
5	Tabalong	9,04	11,33	9,47	9,48	-2,30
6	Tapin	8,78	6,49	7,84	6,38	-0,23

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sebagai salah satu penyumbang terbesar ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pertumbuhannya juga lebih rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya.

Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal. Lapangan usaha masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh pertanian. Hampir 2/3 masyarakatnya berusaha di bidang pertanian dalam arti luas. Lapangan usaha pertanian adalah penyumbang 25 % dari PDRB. Tetapi pertanian yang diusahakan masih bersifat subsisten. Sebagai daerah bercorak pertanian, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu penyumbang pangan bagi Provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi tetangga lainnya. Tetapi dari data, diketahui bahwa produktivitas pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih rendah yaitu sebesar 5,35 ton/ha dibandingkan dengan potensi maupun daerah-daerah lain yang sudah maju pertaniannya.

Tabel 4. 18. Perkembangan Kinerja Urusan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	4,86	5,07	5,10	5,25	5,25	5,35	5,49
2	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	25,74	25,53	25,47	25,50	25,20	25,24	24,03

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2021

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) lapangan usaha pertanian masih kecil dibanding Kabupaten Tapin dan Tabalong, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 19. Perbandingan Nilai PDRB ADHB Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	PDRB ADHB Pertanian (Rp. trilyun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	1,438	1,552	1,653	1,696	1,704
2	Hulu Sungai Selatan	1,401	1,449	1,547	1,618	1,633
3	Hulu Sungai Utara	0,675	0,721	0,793	0,834	0,839
4	Balangan	1,167	1,186	1,250	1,326	1,312
5	Tabalong	1,685	1,797	1,906	1,976	1,961
6	Tapin	1,519	1,625	1,642	1,777	1,716

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) lapangan usaha industri pengolahan masih lebih kecil dibanding Kabupaten Tabalong, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 20. Perbandingan Nilai PDRB ADHB Industri Pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	PDRB ADHB (Rp. Milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	834,63	909,13	954,49	1.006,45	989,95
2	Hulu Sungai Selatan	426,75	474,45	499,53	525,27	512,71
3	Hulu Sungai Utara	397,99	439,18	456,47	473,37	467,73
4	Balangan	180,26	200,61	207,48	213,60	212,65
5	Tabalong	1.260,85	1.458,58	1.550,36	1.605,43	1.574,35
6	Tapin	486,84	522,24	545,99	573,73	561,28

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga masih terbatas dan kecil, jika dibandingkan dengan 5 (lima) kabupaten sekitar pada tahun 2019.

Tabel 4. 21. Jumlah UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019

No	Kabupaten	Jumlah UKM (unit)
1	**Hulu Sungai Tengah**	4.213
2	Hulu Sungai Selatan	1.266
3	Hulu Sungai Utara	35.279
4	Balangan	3.928
5	Tabalong	64.845
6	Tapin	1.200

Sumber : Berbagai Sumber, 2021

Berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih lebih kecil dibanding Kabupaten Tabalong, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 22. Perbandingan Nilai PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	PDRB ADHB (Rp. milyar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	590,75	650,14	727,33	823,18	819,73
2	Hulu Sungai Selatan	474,47	520,95	570,03	618,14	614,06
3	Hulu Sungai Utara	536,85	601,12	672,52	746,23	722,65
4	Balangan	480,28	544,16	590,46	640,68	639,48
5	Tabalong	1.109,13	1.274,01	1.436,26	1.603,97	1.591,40
6	Tapin	659,74	732,86	813,70	892,40	906,92

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2021

Belum optimalnya perkembangan ekonomi selain karena belum optimalnya pertumbuhan lapangan usaha basis ekonomi daerah, tetapi juga disebabkan oleh belum berkembangnya potensi ekonomi lainnya. Banyak potensi ekonomi non basis yang belum tergali secara maksimal seperti pariwisata, maupun pemanfaatan posisi strategis letak wilayah untuk menjadi pusat distribusi barang dan jasa. Hal ini perlu didorong dengan meningkatkan investasi. Dari data informasi yang ada bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum menjadi tujuan investasi khususnya untuk kawasan Hulu Sungai/Banua Anam.

Investasi yang belum berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebabkan ketertimpangan dalam perekonomian wilayah. Meskipun pemerataan mulai terjadi, investor masih belum melirik Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai tujuan penanaman modalnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar dalam pengembangan perekonomiannya berfokus pada daerah-daerah yang belum berkembang terutama pada daerah yang kurang memiliki aksesibilitas wilayah. Dilihat dari tabel di bawah, realisasi investasi di Hulu Sungai Tengah tahun 2020 sebesar Rp98,655 milyar, dengan jumlah investor sebanyak 66, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan data angka nilai

investasi dan jumlah investor pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa investasi yang terjadi masih berskala kecil.

Tabel 4. 23. Perkembangan Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2014 - 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2	1	0	98	13	187	66
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp Milyar	15,4	4,7	79,331	40,22	61,265	114,156	98,655

Sumber : Dinas PM, PTSP, Naker Kab.HST, 2021

Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih relative kecil dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4. 24. Perbandingan Nilai Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2019

No	Kabupaten	Nilai Investasi (Rp Milyar)			
		2016	2017	2018	2019
1	**Hulu Sungai Tengah**	79,33	40,22	61,26	114,15
2	Hulu Sungai Selatan	16,27	23,75	289,34	n/a
3	Hulu Sungai Utara	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Balangan	10,06	23,59	27,39	93,13
5	Tabalong	8.087,62	1.415,56	57.026,82	24.332,44
6	Tapin	n/a	n/a	347,68	2.075,06

Sumber : Berbagai sumber, 2021

Perkembangan lapangan usaha basis ekonomi juga masih rendah dibanding lapangan usaha non basis seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 25. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2020 (%)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,89	5,81	4,32	1,57	-0,27
B	Pertambangan dan Penggalian	5,33	8,47	6,18	6,91	-2,17
C	Industri Pengolahan	5,83	5,31	4,34	3,52	-3,53
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,90	5,13	7,20	4,92	4,22
E	Pengadaan Air	7,12	7,66	5,63	7,63	-0,37
F	Konstruksi	6,33	7,36	4,11	5,10	-2,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,91	7,14	8,06	8,09	-3,43
H	Transportasi dan Pergudangan	6,70	5,11	5,14	5,29	-3,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,52	5,89	6,78	7,73	-2,65
J	Informasi dan Komunikasi	8,90	7,00	7,32	7,88	8,12
K	Jasa Keuangan	6,31	9,16	5,70	4,77	1,09
L	Real Estate	6,02	5,01	6,72	6,96	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	7,33	6,88	7,39	6,42	-3,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,06	2,67	3,76	5,65	-1,86
P	Jasa Pendidikan	7,99	5,23	5,58	6,62	1,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,13	4,88	4,31	5,97	6,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,97	5,12	5,96	5,95	-1,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**6,21**	**5,73**	**5,16**	**4,78**	**-1,01**

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai potensi-potensi ekonomi yang berkembang dengan baik seperti pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Dengan kondisi alam dan budaya yang khas, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki destinasi-destinasi wisata alam, budaya dan wisata religius serta wisata kuliner yang bisa dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat bertaraf regional dan nasional. Data perbandingan jumlah wisatawan pada tahun 2020 antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan 5 Kabupaten sekitarnya,

menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tergolong rendah.

Tabel 4. 26. Perbandingan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020

No.	Kabupaten	Jumlah Wisatawan (orang)	
		Domestik	Asing
1	**Hulu Sungai Tengah**	78.829	18
2	Hulu Sungai Selatan	266.977	52
3	Hulu Sungai Utara	n/a	n/a
4	Balangan	n/a	n/a
5	Tabalong	29.124	n/a
6	Tapin	827.012	4

Sumber : Berbagai Sumber, 2021

Pariwisata merupakan prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu dilakukan pengembangan pariwisata sebagai alternatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diluar basis ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi terkadang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena disebabkan faktor masih tingginya angka kemiskinan dan PDRB per kapita yang masih rendah. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat.

b. Tingginya Tingkat Kemiskinan Penduduk

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk, sehingga menjadi kendala bagi masyarakat. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat. Faktor utama yang memicu ketimpangan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah masih tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyakit sosial ekonomi bagi Negara berkembang. Permasalahan kemiskinan yang

terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur dengan melihat ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan) serta tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi. Dilihat dari tabel di bawah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi.

Tabel 4. 27. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	16,220	16,169	16,140	16,096	15.470
2	Hulu Sungai Selatan	14,420	13,447	12,224	12,636	12.385
3	Hulu Sungai Utara	15,380	15,352	14,919	15,398	14.718
4	Balangan	7,090	7,213	7,214	7,266	7.064
5	Tabalong	15,400	15,003	14,874	15,222	14.695
6	Tapin	6,810	7,011	6,979	6,507	5.899

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitar. Secara persentase penduduk miskin, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 mencapai 5,64%, angka itu berada diatas tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang mencapai 5,00%, serta berada pada peringkat ke-4 dari 6 Kabupaten sekitarnya. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 28. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Tingkat Kemiskinan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	6,18	6,09	6,01	5,93	5,64
2	Hulu Sungai Selatan	6,29	5,8	5,21	5,33	5,17
3	Hulu Sungai Utara	6,76	6,65	6,38	6,50	6,14
4	Balangan	5,67	5,68	5,59	5,55	5.32
5	Tabalong	6,35	6,09	5,95	6,01	5,72
6	Tapin	3,7	3,77	3,7	3,41	3,06
Kalimantan Selatan		4,52	4,70	4,54	4,55	5,00

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

c. Rendahnya Produktifitas dan Kemandirian Tenaga Kerja

Sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, SDM tenaga kerja merupakan aset berharga dalam peningkatan capaian pembangunan, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja yang berdaya saing sangatlah penting karena tenaga kerja merupakan bagian dari subyek pembangunan yang tidak bisa dianggap remeh.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya, seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran. Dengan tingkat pendidikan baru mencapai jenjang Pendidikan Menengah Pertama (SMP), maka tentu kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang ada sangat rendah.

Pada tahun 2020, persentase angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sekitar 71,15%, sedangkan yang bukan angkatan kerja sekitar 28,85%, dari jumlah penduduk berumur 15

tahun keatas (usia kerja). Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 71,15% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,90%.

Rendahnya produktivitas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dapat digambarkan dengan angka rasio ketergantungan. Semakin tingginya rasio ketergantungan (***persentase dependency ratio***) menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan ***persentase dependency ratio*** yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4. 29. Perkembangan Tingkat Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten	Tingkat Ketergantungan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	50.55	50.34	50.16	50.01	49,87
2	Hulu Sungai Selatan	49.87	49.67	49.5	49.34	49,19
3	Hulu Sungai Utara	51.19	50.97	50.78	50.58	50,38
4	Balangan	51.06	50.81	50.57	50.33	50,07
5	Tabalong	42.76	41.44	42.75	42.35	47,71
6	Tapin	47.25	47.05	46.88	46.71	46,54
Kalimantan Selatan		48.49	48.29	48.11	47,93	47,72

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Posisi tingkat ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 masih lebih tinggi dari angka tingkat ketergantungan Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada urutan ke-4 dari 6 kabupaten sekitar. Dari 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan 49-50 orang yang tidak produktif. Dilihat dari data jumlah penduduk pengangguran/mencari kerja Kabupaten

Hulu Sungai Tengah cukup tinggi dan berada pada peringkat ke-5 dari 6 kabupaten sekitar pada tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 30. Perkembangan Jumlah Pengangguran (Pencari Kerja) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2018 - 2020

No	Kabupaten	Jumlah Pengangguran (orang)		
		2018	2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	5.335	4.147	1.357
2	Hulu Sungai Selatan	3.013	3.201	1.139
3	Hulu Sungai Utara	4.621	4.079	325
4	Balangan	1.645	1.549	705
5	Tabalong	4.216	4.287	1.962
6	Tapin	4.085	3.725	1.241

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2021

Berkaitan dengan uraian data dan informasi di atas, serta terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan pembangunan daerah "**Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat**" yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 31. Rumusan Permasalahan Pokok "Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat"

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
A.	Belum Optimalnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan ekonomi yang Berkualitas	Belum optimalnya pertumbuhan sektor ekonomi basis (pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta jasa)	Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan
			Rendahnya nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan investasi

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum berkembangnya potensi ekonomi non basis potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis daerah dalam pengembangan ekonomi
			Belum berkembangnya produk /komoditas potensial desa
B.	Tingginya tingkat kemiskinan penduduk	Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan infrastruktur dasar	Belum terlayani sepenuhnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Lemahnya ketahanan ekonomi keluarga	Rendahnya kompetensi dan akses masyarakat miskin terhadap sumber ekonomi
C.	Rendahnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja	Rendahnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja

3. Lambannya Perkembangan Kawasan Pertumbuhan dan Belum Terpenuhinya secara Merata Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, energi dan pertanian. Begitu pula halnya dengan kelengkapan dan mutu infrastruktur dan fasilitas suatu wilayah juga sangat mempengaruhi pada kemajuan suatu wilayah.

Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang menjadi daerah maju ketika infrastruktur dan fasilitas wilayah/kawasan semakin lengkap dan baik.

Berikut analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan "**Lambannya perkembangan kawasan pertumbuhan dan belum terpenuhinya secara merata pembangunan infrastruktur**" di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar perumusan kebijakan pembangunannya dapat sesuai dengan yang diharapkan.

a. Lambannya Perkembangan Kota dan Desa

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemerataan pembangunan sulit diwujudkan. Minimnya dana pembangunan ekonomi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana pembangunan terserap pada belanja pegawai sehingga porsi untuk peningkatan infrastruktur dasar menjadi berkurang.

Adanya paradigma buruk terkait pembangunan ekonomi, paradigma pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bukan fundamental ekonomi yang menyebabkan sentralisasi pembangunan tetap dipertahankan. Paradigma pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek menyebabkan realisasi pemerataan pembangunan yang lambat, bahkan cenderung diam di tempat. Pemerataan pembangunan ekonomi memang harus dimulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur. Jika infrastruktur memadai maka kegiatan ekonomi dapat meningkatkan akses masyarakat untuk berusaha dan berupaya sehingga pemerataan pembangunan akan terealisasi.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih memiliki 4 desa sangat tertinggal (2,48 %), 9 desa tertinggal (5,59 %), 125 desa berkembang (77,64 %), 23 desa maju (14,29 %), dan belum ada yang menjadi desa mandiri (0,00%). Perkembangan capaian IDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 32. Perkembangan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Jumlah Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	2018	7	45	106	3	0
2.	2019	4	17	131	9	0
3.	2020	4	9	125	23	0

Sumber : Dinas PMD Kabupaten HST, 2021

Tabel 4. 33. Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Desa				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1.	Hulu Sungai Tengah	4	9	125	23	0
2.	Hulu Sungai Selatan	0	2	122	20	0
3.	Hulu Sungai Utara	3	60	143	8	0
4.	Balangan	0	14	127	12	0
5.	Tabalong	0	6	97	18	0
6.	Tapin	0	11	109	6	0

Sumber : Berbagai sumber, 2021

Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, maka desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 8,07 %, Kabupaten Hulu Sungai Selatan 1,39 %, Kabupaten Hulu Sungai Utara 29,44 %, Balangan 9,15 %, Tabalong 4,96 % dan Tapin 8,73 %. Tetapi Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih mempunyai 4 desa yang sangat tertinggal, tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitar.

Kualitas infrastruktur transportasi menjadi penting karena menyangkut pergerakan manusia. Kualitas, keamanan dan keselamatan transportasi sangat dipengaruhi oleh kualitas jalan dan kelengkapan fasilitas penunjang lainnya. Dari panjang jalan Kabupaten 725,37 km, jalan aspal sepanjang 600,67 km (82,81%), jalan kerikil sepanjang 81,46 km (11,23%), jalan tanah sepanjang 22,56 km (3,11%) dan jalan beton 20,69 km (2,85%). Kemudian kondisi jalan masuk kategori baik baru mencapai 395,98 km (54,59%), kondisi sedang sepanjang 136,07 km (18,76%), kondisi rusak sepanjang 136,88 km (18,87%), kondisi rusak berat sepanjang 56,44 km (7,78%). Untuk data kondisi jembatan pada tahun 2019, dari 899 buah jembatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada 279 buah jembatan kayu (31,03%). Tidak semua panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas keselamatan transportasi lainnya.

Kondisi jalan yang baik capaian tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan dan Tabalong, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 34. Perbandingan Kondisi Jalan Baik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2020

No	Kabupaten	Kondisi Jalan Baik (%)
1	**Hulu Sungai Tengah**	65,23
2	Hulu Sungai Selatan	47,99
3	Hulu Sungai Utara	n/a
4	Balangan	55,66
5	Tabalong	45,93
6	Tapin	51,41

Sumber : Berbagai sumber, 2021

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketersediaan utilitas perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, sanitasi dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sektor riil. Permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi permukiman yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi dalam mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata dan perdagangan.

Dari data tahun 2019, cakupan pelayanan air minum baru mencapai 80,58% dari target nasional 100%. Begitu pula dengan akses layanan sanitasi layak baru mencapai 81,21% dari target 100%. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk akses layanan air minum pada tahun 2019 masih rendah, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 35. Perbandingan Akses Layanan Air Minum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019

No	Kabupaten	Akses Layanan Air Minum (%)
1	**Hulu Sungai Tengah**	80,58
2	Hulu Sungai Selatan	n/a
3	Hulu Sungai Utara	85,43

No	Kabupaten	Akses Layanan Air Minum (%)
4	Balangan	95,45
5	Tabalong	82,38
6	Tapin	n/a

Sumber : Berbagai sumber, 2021

Sedangkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, capaian tahun 2019 masih berada di bawah Kabupaten Tabalong, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 36. Perbandingan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019

No	Kabupaten	Akses Layanan Sanitasi Layak (%)
1	**Hulu Sungai Tengah**	81,21
2	Hulu Sungai Selatan	n/a
3	Hulu Sungai Utara	77,62
4	Balangan	80,45
5	Tabalong	97,89
6	Tapin	78,05

Sumber : Berbagai sumber, 2021

Kualitas lingkungan perumahan dan permukiman juga dipengaruhi oleh penanganan persampahan. Penanganan persampahan belum optimal baik dari aspek penanganan sampah maupun dari aspek upaya pengurangan sampah. Data tahun 2019, jumlah sampah yang terkelola baru mencapai 72,46% yang terdiri dari pengurangan sampah ada 24,32% dan penanganan sampah 48,14%. Perkiraan timbunan sampah pada tahun 2019 sebesar 39.272,16 ton/tahun dan terus meningkat setiap tahunnya. Berarti masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sebesar 27,54% atau 10.844 ton/tahun.

Kondisi penanganan persampahan capaian tahun 2019 masih rendah dan bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 37. Perbandingan Kondisi Penanganan Persampahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019

No.	Kabupaten	Penanganan Sampah (%)	Pengurangan Sampah (%)
1	**Hulu Sungai Tengah**	48,14	24,32
2	Hulu Sungai Selatan	n/a	n/a
3	Hulu Sungai Utara	47,22	n/a
4	Balangan	50,82	11,70
5	Tabalong	30,35	n/a
6	Tapin	80	20

Sumber : Berbagai sumber, 2021

b. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Belum berkembangnya suatu wilayah akibat dari belum lengkapnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Pada tahun 2020, dari aspek konektivitas, maka desa yang sudah terkonektivitas dengan baik melalui transportasi darat bermotor roda 4 baru mencapai 97,02%. Dari 168 desa dan kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih ada 5 desa yang belum terkonektivitas dengan baik atau 2,98%, bahkan masih ada yang belum terkonektivitas dengan moda transportasi roda 2.

Begitu pula dengan perkembangan wilayah menjadi lamban karena terbatas atau belum lengkapnya sarana dan prasarana serta fasilitas kawasan. Beberapa kawasan strategis maupun kawasan pertumbuhan yang direncanakan pada RTRW seperti pusat pertumbuhan wilayah kota Birayang dan kota Pantai Hambawang serta pusat pertumbuhan kawasan agropolitan, kawasan pariwisata belum terlaksana sepenuhnya. Bahkan secara RTRW Prov. Kalimantan Selatan, ada kecenderungan telah terjadinya pergeseran pusat pertumbuhan kawasan ke Kabupaten/daerah lain. Hal ini

terlihat dari penunjukan RSUD H. Hasan Basri Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai RSUD rujukan pelayanan kesehatan untuk wilayah utara Provinsi. Begitu pula dengan adanya konektivitas jalan poros Batu Licin - Loksado serta penunjukan wilayah Loksado sebagai tujuan wisata prioritas nasional, semakin terlihat arah pergeseran pusat pertumbuhan.

c. Kualitas lingkungan hidup semakin menurun

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah belum optimalnya upaya pengelolaan SDA yang ramah lingkungan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus bertekad untuk memproyeksikan daerahnya menjadi daerah yang mampu mengelola SDA dan Lingkungan secara efisien, mandiri dan ramah lingkungan. Terwujudnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat mewujudkan tumbuhnya kenyamanan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, generasi sekarang dan selanjutnya.

Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik dan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alamiah. Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan

ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara dan lain sebagainya. Dilihat pada tabel di bawah ini, persentase lahan kritis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk tinggi, walaupun jumlah lahan kritisnya masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Balangan.

Tabel 4. 38. Persentase Lahan Kritis Terhadap Jumlah Keseluruhan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2017

No	Kabupaten	Jumlah Lahan		Persentase
		Seluruh Lahan	Lahan Kritis	
1	Hulu Sungai Selatan	180.494,00	30.650,50	16,98
2	**Hulu Sungai Tengah**	**147.200,00**	**41.296,50**	**28,05**
3	Hulu Sungai Utara	95.125,00	13.630,50	14,33
4	Balangan	181.975,00	43.347,70	23,82
5	Tabalong	359.995,00	56.297,30	15,64
6	Tapin	217.495,00	28.839,00	13,26
Kalimantan Selatan		**3.753.052,00**	**761.041,00**	20,28

Sumber: RKPD Kalimantan Selatan, 2020

Kualitas lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga terjadi penurunan dilihat dari data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang semakin menurun seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 39. Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018-2019

Tahun	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2018	92.73	66	59.71	71.5
2019	92.06	61	38.85	61.46

Sumber: Dinas LH dan Perhubungan Kab. HST, 2021

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, maka tutupan lahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah yang paling rendah, dengan kualitas air dan udara yang lebih baik.

Tabel 4. 40. Data Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019

Kabupaten	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Hulu Sungai Tengah	**92.06**	**61**	**38.85**	**61.46**
Hulu Sungai Selatan	86,24	51,67	55,42	n/a
Hulu Sungai Utara	89,64	45	-	n/a
Balangan	93,33	40,83	52,76	n/a
Tabalong	98,44	54,33	68,35	n/a
Tapin	93,31	54,67	46,52	63

Sumber: Berbagai sumber, 2021

d. Terjadinya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam

Dengan rendahnya indeks tutupan lahan, menyebabkan hampir selalu terjadi bencana setiap tahun khususnya bencana banjir yang menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2019 telah terjadi 76 kali bencana alam yang terdiri dari 6 kali berupa bencana tanah longsor, 66 kali berupa kebakaran hutan dan lahan dan 4 kali berupa bencana angin puting beliung. Dari bencana tersebut menyebabkan kerugian berupa rumah rusak sebanyak 62 buah. Pada tahun 2019, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memang tidak terjadi bencana banjir, tetapi pada tahun 2018 telah terjadi bencana banjir pada 47 desa di 8 kecamatan. Kemudian pada bulan Januari 2021 terjadi lagi banjir yang lebih besar yang merendam 92 desa/kelurahan pada 10 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada. Jumlah rumah tangga yang terdampak ada 29.062 KK dan 87.506 jiwa. Fasilitas infrastruktur yang terdampak ada 183 rumah hanyut, 2.973 buah rumah rusak, 11.309 Ha lahan

pertanian rusak, 9 bangunan irigasi juga rusak dan 32.220 meter jalan rusak serta 32 jembatan hilang dan 19 buah rusak dengan nilai kerugian diperkirakan lebih dari Rp 141 milyar.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan daerah "**Lambannya perkembangan kawasan pertumbuhan dan belum terpenuhinya secara merata pembangunan infrastruktur**" di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4. 41. Rumusan Permasalahan Pokok "Lambannya perkembangan kawasan pertumbuhan dan belum terpenuhinya secara merata pembangunan infrastruktur"

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
A.	Lambannya perkembangan kota dan desa	Belum terpenuhi infrastruktur publik yang berkualitas	Belum optimalnya penyediaan fasilitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi	Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya kurang mantap
			Fasilitas jalan yang belum lengkap
			Belum optimalnya manajemen LLAJ
		Belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	Belum terpenuhinya cakupan layanan dan kualitas air bersih
			Belum terpenuhinya cakupan layanan sanitasi
			Masih terdapat rumah tidak layak huni

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kawasan Perumahan dan permukiman, termasuk kawasan kumuh
		Belum optimalnya pengelolaan limbah	Belum optimalnya upaya pengurangan sampah
			Belum optimalnya upaya penanganan sampah
			Belum berfungsinya pengelolaan limbah terpadu
B.	Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang	Peraturan tentang penataan ruang belum lengkap dan perlu penyesuaian dengan perkembangan situasi kondisi
		Kurangnya prasarana dan sarana pertumbuhan wilayah/kawasan strategis	Kurangnya penyediaan prasarana dan sarana kawasan potensial /kawasan strategis perencanaan
		Belum optimalnya konektivitas antar wilayah	Belum tersedianya jalan dan jembatan untuk roda 2
C.	Kualitas lingkungan hidup semakin menurun	Pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup masih tinggi	Makin rendahnya tutupan lahan pada DAS
			Masih adanya ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup Pegunungan Meratus

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum terpenuhinya ruang terbuka hijau perkotaan
D.	Terjadinya kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Belum efektifnya mitigasi bencana dan penanganan bencana secara terpadu	Belum tersedianya pemetaan dan penyediaan informasi tingkat kerawanan bencana
			Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan pada daerah rawan bencana

4. Adanya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat, kecenderungan naiknya kejadian penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas

Dalam menjalani kehidupan tidak bisa dipungkiri adanya gesekan-gesekan yang dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik dalam kehidupan sosial maupun beragama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban diantara mereka, antara yang satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari toleransi bermasyarakat.

Dalam kehidupan beragama, sikap toleransi sangatlah dibutuhkan karena dengan sikap toleransi ini kehidupan antar dan inter umat beragama dapat berlangsung dengan tetap saling menghargai dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya kesadaran pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antar warga negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan percepatan pembangunan negeri ini. Sebagai Kabupaten yang cukup memiliki keberagaman masyarakat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup memiliki potensi untuk tercipta suatu konflik yang menimbulkan perpecahan, baik karena

kriminalitas murni maupun karena unsur SARA. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih bagi pemangku kebijakan untuk mengkondisikan keamanan dan kedamaian di masyarakat melalui kebijakan strategis dalam kerangka toleransi dan kebersamaan.

Dalam mengkaji permasalahan pokok "**Adanya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat, kecenderungan naiknya kejadian penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas serta bencana"**, maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Belum kokohnya keharmonisan kehidupan beragama masyarakat

Paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, seringkali membuat penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa ataupun saling menyalahkan dan saling klaim kebenaran.

Perbedaan praktek keagamaan khususnya intern ummat beragama juga terjadi di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman, penafsiran dan pengamalan ajaran agama dari tokoh-tokoh/pemuka agama, yang menimbulkan saling curiga dan kecemburuan antar pengikut, saling sindir, saling menjelekkan sehingga toleransi menjadi turun yang merupakan potensi konflik yang akan mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Potensi masuk dan berkembangnya paham keagamaan yang menyimpang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga cukup besar. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya kasus penistaan agama dalam bentuk pengakuan nabi dan ajaran menyimpang lainnya yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu,

tidak menutup kemungkinan bahwa paham ini ataupun paham radikal lainnya akan masuk ke kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Belum kokohnya tata kehidupan sosial budaya masyarakat

Selain karena paham radikal, meningkatnya penyakit masyarakat atau Pekat menjadi akar masalah dari menurunnya ketahanan sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya serta sendi kehidupan yang agamis sudah semakin longgar terjadi di masyarakat. Kemajuan kehidupan masyarakat yang semakin modern telah berdampak pada peningkatan terjadinya kejahatan di perkotaan. Kriminalitas, kenakalan remaja, berkembangnya pekat seperti prostitusi, penggunaan narkoba dan obat terlarang, judi, mabuk, pergaulan bebas dan lain-lain sudah semakin banyak terjadi.

Data tahun 2019 jumlah kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 156 kasus, memang turun kalau dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 204 kasus dan tahun 2017 sebanyak 199 kasus. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kriminalitas yang terjadi menjadi 281 kasus.

Dilihat dari tabel di bawah ini, kasus kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya.

Tabel 4. 42. Perbandingan Jumlah Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019 - 2020

No	Kabupaten	Jumlah Kasus Kriminalitas Yang Ditangani Kepolisian (orang)	
		2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	156	281
2	Hulu Sungai Selatan	136	281
3	Hulu Sungai Utara	93	n/a
4	Balangan	n/a	n/a
5	Tabalong	140	n/a
6	Tapin	151	134

Sumber: Berbagai sumber, 2021

Dengan kasus kriminalitas tersebut maka angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 43. Perbandingan Angka Kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Sekitarnya Tahun 2019 - 2020

No	Kabupaten	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	
		2019	2020
1	**Hulu Sungai Tengah**	8	6
2	Hulu Sungai Selatan	6	11,69
3	Hulu Sungai Utara	4	n/a
4	Balangan	n/a	n/a
5	Tabalong	5,5	n/a
6	Tapin	8	7

Sumber: Berbagai sumber, 2021

Dengan berkembangnya konektivitas antar daerah maka akan semakin mudah dan lancar pergerakan masyarakat. Dengan demikian, semakin terbukanya daerah, maka akan semakin heterogen masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Demikian juga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terus berkembang dan maju maka akan semakin banyak pendatang yang masuk sehingga akan semakin beragam suku, agama dan ras yang hidup di daerah. Tentunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan semakin tinggi potensi terjadinya gesekan-gesekan ke arah antar suku, ras, maupun agama. Isu-isu SARA akan semakin menguat ketika wawasan kebangsaan masyarakat lemah. Begitu pula dengan terjadinya realitas perbedaan pandangan politik dan belum matangnya sistem dan cara berdemokrasi baik pada tingkat desa maupun daerah juga berpotensi untuk menimbulkan gejolak-gejolak yang bersifat anarkisme yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban serta kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Dengan semakin beragamnya suku bangsa dan ummat beragama yang hidup dengan perbedaan status sosial yang lebih baik dari kaum pendatang, akan mudah memicu konflik di

masyarakat. Dengan kemajuan tuntutan kehidupan dan berkembangnya kehidupan hedonisme, membuat rasa persaudaraan, kebangsaan dan nasionalisme menjadi semakin luntur. Jiwa kegotongroyongan juga semakin menurun, sehingga ikatan kekeluargaan, perasaan senasib sepenanggungan menjadi berkurang. Hal tersebut akan menjadi potensi timbulnya ketidakharmonisan tatanan kehidupan bermasyarakat yang akan mengganggu jalannya pembangunan.

Berkaitan dengan uraian data dan informasi di atas, serta terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 44. Rumusan Permasalahan Pokok "Adanya ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat, kecenderungan naiknya kejadian penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas serta bencana"

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
A.	Belum kokohnya keharmonisan kehidupan beragama masyarakat	Belum mantapnya pemahaman dan pengamalan agama serta suasana kehidupan yang agamis	Belum optimalnya komunikasi dan pengamalan agama serta adanya perbedaan praktek keagamaan di masyarakat
			Menurunnya minat pendalaman agama dan nilai-nilai spritual
B.	Belum kokohnya tata kehidupan sosial budaya masyarakat	Menurunnya ketahanan sosial dan budaya di masyarakat	Menurunnya wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat
			Menurunnya nilai-nilai kultural masyarakat dengan masuknya budaya luar

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
			Menurunnya kamtrantibum dengan meningkatnya penyakit masyarakat dan kejadian kriminalitas

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat

Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinilai belum berhasil. Kondisi ini tercermin dengan belum optimalnya pelayanan publik. Kinerja buruk birokrasi selama ini diyakini menjadi sumber kesulitan bangsa untuk keluar dari berbagai keterpurukan. Birokrasi yang mestinya mengembangkan ideologi, etos dan beragam prosedur formal untuk melayani kepentingan publik, selama ini justru dibiarkan berjalan tanpa arah. Tidak optimalnya pelayanan birokrasi terjadi pada instansi pemerintah pusat maupun daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam mengkaji permasalahan pokok "**Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat",** maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Pelayanan pemerintahan yang belum responsif dengan kebutuhan masyarakat

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu

sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani merupakan aspek-aspek permasalahan layanan publik yang banyak disoroti.

SPM atau Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh daerah. Belum maksimalnya upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2018 terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapat predikat kepatuhan tinggi dengan nilai 83,96. Dari hasil survei terhadap kepuasan layanan masyarakat mencapai angka 83,18%. Dengan berubahnya situasi dan kondisi dengan semakin majunya masyarakat, maka tuntutan akan pelayanan publik yang baik,

mudah dan dekat akan semakin meningkat, sehingga hal tersebut harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional

Permasalahan birokrasi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance*, yaitu belum melembaganya karakteristik *good governance* di dalam pemerintahan daerah, baik dari segi struktur dan kultur serta nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan kaidah *good governance* di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih bersifat ***sloganistik***.

Berdasarkan data tahun 2019 bahwa capaian penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru mencapai 63,9 (B). Dibandingkan dengan 13 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada peringkat ke 12.

Tabel 4. 45. Perbandingan Tingkat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 13 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
1	Hulu Sungai Selatan	76,23	BB
2	Banjarmasin	71,04	BB
3	Banjar	68,70	B
4	Tabalong	67,46	B
5	Tapin	67,23	B
6	Batola	67,00	B
7	Tanah Bumbu	65,97	B
8	Balangan	65,45	B

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Tingkat Akuntabilitas Kinerja
9	Tanah Laut	64,89	B
10	Hulu Sungai Utara	64,82	B
11	Banjarbaru	63,96	B
12	**Hulu Sungai Tengah**	**63,90**	**B**
13	Kotabaru	60,30	B

Sumber: Berbagai sumber, 2021

Berdasarkan data tahun 2019, Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum dilaksanakan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Data capaian penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 12 Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, selain Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019, adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 46. Capaian Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 12 Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Hulu Sungai Selatan	65,69	B
2	Banjarmasin	68,87	B
3	Banjar	-	-
4	Tabalong	-	-
5	Tapin	53,02	CC
6	Batola	52,18	CC
7	Tanah Bumbu	54,90	CC
8	Balangan	51,84	CC
9	Tanah Laut	53,48	CC
10	Hulu Sungai Utara	53,8	CC
11	Banjarbaru	61,22	B

No	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
12	**Hulu Sungai Tengah**	**-**	-
13	Kotabaru	54,73	CC
14	Kalimantan Selatan	67,88	B

Sumber: Berbagai sumber, 2021

Dari gambaran tersebut diatas, maka Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlambat melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Baru pada tahun 2020, dilakukan penilaian dengan hasil sebesar **50,93 (CC)**. Dengan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih rendah.

Fakta yang sangat mencolok sebagai bukti bahwa masih lemahnya *good governance* selama ini adalah dari tingginya korupsi yang terjadi. Korupsi, yang biasanya disertai dengan tindakan kolusi dan nepotisme, dapat dikatakan merajalela terutama di kalangan birokrasi pada institusi publik atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun lembaga bukan departemen.

Berdasarkan data hasil penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target indeks maturitas SPIP tahun 2019 sebesar 3,3 dari skala 5, maka capaian indeks maturitas SPIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada pada level 2,80.

Berkaitan dengan uraian data dan informasi di atas serta terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar permasalahan pembangunan daerah yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 47. Rumusan Permasalahan Pokok
"Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat"

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
A.	Pelayanan pemerintahan yang belum responsif dengan kebutuhan masyarakat	Belum terpenuhinya aspek-aspek pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Belum terpenuhinya kebijakan pelayanan
			Belum terpenuhinya sarana prasarana pelayanan
			Belum terpenuhinya SDM yang profesional
			Belum terpenuhinya sistem informasi pelayanan
B.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional	Belum optimalnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
			Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
		Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai peraturan-perundangan
			Belum optimalnya Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal
			Belum optimalnya kualitas dan konsistensi perencanaan
			Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah

No	Permasalahan Strategis	Permasalahan	Akar Masalah
			Belum optimalnya pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Profesionalisme ASN belum tinggi
			Kurang kuatnya kelembagaan organisasi pemerintah daerah

6. Permasalahan Berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), permasalahan yang muncul adalah belum tercapainya Target Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 48. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang Belum Mencapai Target di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) -Ringkasan-	Data Kab. HST 2019
TPB 1. Tanpa Kemiskinan				
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	3.361
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurun menjadi 2,8 juta	21.944
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	80,58%

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) -Ringkasan-	Data Kab. HST 2019
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkat menjadi 100%	81,21%
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Meningkat menjadi 94,78%	87,73%
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat	Meningkat menjadi 82,2%	80,39%
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Meningkat menjadi 100%	89,5 %
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Meningkat menjadi 39 daerah	8 daerah
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	10
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Menurun	6,5 M
TPB 2. Tanpa Kelaparan				
2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/ kapita/ tahun (Kalimantan Selatan: s tingkat konsumsi ikan 52,75 kg/ kapita/ tahun)	93,91 51,45
TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
3	3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Meningkat menjadi 95%	85%
3	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Menurun menjadi angka 0,02%	56

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) -Ringkasan-	Data Kab. HST 2019
3	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Menurun menjadi 9,91%	11,4%
TPB 4. Pendidikan Berkualitas				
4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Meningkat menjadi 81%	70,27%
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Meningkat menjadi 114,09%	99,87%
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Meningkat menjadi 106,94%	86,6%
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,9%
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77,2%	75,81%
4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Meningkat	SD = 87,73; SMP = 80,39
TPB 5. Kesetaraan Gender				
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Meningkat	Masih tetap 20,00%
TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak				
6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Meningkat menjadi 100%	80,58%
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Meningkat menjadi 100%	81,21%

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) -Ringkasan-	Data Kab. HST 2019
6	6.2.1.(e)	Jumlah Kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Meningkat menjadi 438 Kabupaten/kota.	0
6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Meningkat	0
6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Meningkat	0
TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Meningkat	4,03 (2018) menjadi 3,64 (2019)
8	8.1.1.(a)	PDRB per kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	25.909
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	51%	4,8%
8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	43,48% (2018) menjadi 36,17% (2019)
8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	25%	223 org
8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	Menurun	57,94% (2015) menjadi 56,00% (2019)
8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Meningkat	2,72% (2018) menjadi 2,08% (2019)
8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	13,75% (2018) menjadi 13,61% (2019)
TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkat	14,64 (2018) menjadi 14,46 (2019)
9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB	3,47

NO. TPB	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET (PERPRES 59/2017) -Ringkasan-	Data Kab. HST 2019
TPB 10. Berkurangnya Kesenjangan				
10	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) 10 desa (skala kab)	28
10	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Meningkat paling sedikit 2.000 desa (skala nasional) 4 desa (skala kab)	0
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	Menurun	Tetap 72,45
TPB 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan				
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Meningkat menjadi 80%	72,45
TPB 12. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan				
12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Meningkat	0
12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Meningkat	0
TPB 15. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat				
15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Meningkat	1 (2018) tetap sama 1 (2019)
TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan				
16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Menurun	6
16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Meningkat	0,20% (2018) menjadi 0,20% (2019)
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Meningkat menjadi 77,4%	40,80%

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, maka ada 13 tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target pada tahun 2020 yaitu :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
8. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
9. Berkurangnya kesenjangan
10. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
11. Konsumsi & Produksi Berkelanjutan
12. Pelestarian & Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
13. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan

4.2. Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian dari rencana pembangunan tentang pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, Isu-isu strategis berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat *antisipatif* dan *solutif* atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan

demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu *strategis* merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun mendatang.

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas pembangunan yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan, baik internasional, nasional hingga regional karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun, jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, hal sebaliknya akan terjadi, yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

a. Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals /SDG's)*

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan dokumen yang menjadi acuan pembangunan secara internasional sebagai kelanjutan dari konsep pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs). Para pemimpin negara anggota PBB mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. SDG's melihat kemiskinan, kesenjangan, dan degradasi lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sebagai isu-isu *global* yang perlu ditangani oleh semua negara ke depan, meliputi:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan dan Baik Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

b. Perubahan iklim global (*global warming/climate change*)

Perkembangan lingkungan pada *era globalisasi* sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup

sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk sebagai akibat dari ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir, longsor dan lain sebagainya.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming* ini. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

c. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat. Hal ini mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi ini, Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan *globalisasi* yang ada sehingga mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

d. Bencana Pandemi Covid-19

Adanya bencana pandemic covid sejak akhir tahun 2019 yang pertama kali muncul di kota Wuhan China, dalam waktu singkat menyebar ke seluruh dunia dengan jumlah negara yang terdampak sebanyak 189 negara. Bencana ini terus berlanjut sampai tahun 2021 dengan kasus di dunia mencapai lebih dari 117 juta orang. Dampak bencana ini diperkirakan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang. Hampir seluruh sector kehidupan terdampak, bukan saja pada sector kesehatan, tetapi juga telah memberikan dampak yang besar pada perekonomian dunia dan prilaku masyarakat. Dengan pembatasan aktivitas manusia untuk menanggulangi penyebaran covid 19, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang berimbas pada perekonomian dunia. Hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang negative, bahkan banyak negara masuk dalam situasi resesi ekonomi. Perlambatan perekonomian dunia menyebabkan meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin.

Adanya kejadian bencana pandemic covid 19 juga berdampak pada munculnya kebiasaan-kebiasaan baru (new normal) perilaku masyarakat yang sebelumnya hampir tidak ada, tidak berkembang, sekarang menjadi berkembang dengan pesat seperti pembelajaran secara daring, berkembangnya perdagangan online, sepinya perdagangan konvensional, pertemuan-pertemuan, webinar dan lain-lain. Teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan baru bagi seluruh masyarakat dengan tumbuhnya berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Semua dampak dan timbulnya kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku baru masyarakat yang berkembang dengan pesat harus diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat agar pembangunan tidak menjadi ketinggalan.

4.2.2. Isu Pembangunan Nasional

RPJMN 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan tingkat nasional yang menjadi salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti atau menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Visi RPJMN 2020 – 2024 yang merupakan Visi Presiden adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**", dengan Misi yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga telah menetapkan 5 (lima) Arahan Utama sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi tersebut, yaitu :

a. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

b. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

c. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan ***Omnibus Law***, terutama menerbitkan 2 undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Regulasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

e. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

4.2.3. Isu Pembangunan Regional

A. RTRW Provinsi Kalimantan Selatan

Kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas :

a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah antara wilayah Barat dengan wilayah tengah dan antara wilayah Timur dengan wilayah Tenggara Daerah;
b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah;
c. peningkatan perlindungan Kawasan Lindung;
d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Lindung;
e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antarkegiatan budidaya;
f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
g. peningkatan fungsi Kawasan Lindung untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional; dan
i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi atas kebijakan pengurangan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah terdiri atas :

a. meningkatkan keterkaitan, peran dan fungsi Kota Rawa sebagai pusat pertumbuhan Kawasan Rawa dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya terutama pada wilayah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan Utara wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah yang belum terlayani oleh infrastruktur perkotaan;

c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan terutama pada koridor alur Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Martapura;
d. mengendalikan perkembangan kota yang langsung berhubungan dengan kawasan pesisir laut dan kawasan bantaran sungai ; dan
e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi atas kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terdiri atas :

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, transportasi sungai termasuk anjir, transportasi laut, dan transportasi udara;
b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk seluruh wilayah hingga ke pelosok wilayah;
c. meningkatkan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik hingga ke pelosok wilayah;
d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Strategi atas kebijakan peningkatan Kawasan Lindung, terdiri atas :

a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. menetapkan kawasan rawan bencana banjir dan longsor sesuai dengan tipologi dan zonanya;
c. mewujudkan Kawasan Lindung dalam satu wilayah provinsi dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai sesuai dengan kondisi ekosistemnya;

d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi Kawasan Lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
e. melakukan penuntasan tata batas Kawasan Lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
f. mengelola Kawasan Lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta Masyarakat sekitarnya.

Strategi atas kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia meliputi :

a. melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan illegal dalam Kawasan Lindung;
b. menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah yang mempengaruhi Kawasan Lindung;
c. memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi tumbuhan; dan
d. mengurangi secara bertahap tingkat emisi karbon dan efek gas rumah kaca.

Strategi atas kebijakan pewujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya terdiri atas :

a. menetapkan Kawasan Budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam pada ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana terpadu pada kawasan sentra produksi, kawasan industri, perdagangan dan jasa, kawasan rawan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan; dan
c. membangun dan mengembangkan industri hulu dan industri hilir yang didukung peningkatan produksi budidaya daratan dan budidaya perairan termasuk gugusan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya meliputi :

a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, proporsional dan berkelanjutan;
b. mengembangkan mutu, produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;
c. mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional;
d. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan meningkatkan daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
e. membatasi perkembangan kawasan terbangun kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan melalui optimalisasi pemanfaaatan ruang secara vertikal dan kompak serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
f. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
g. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan hutan lindung meliputi :

a. menetapkan kawasan strategis provinsi berfungsi lindung;
b. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
c. memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;

d. merehabilitasi dan merestorasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Provinsi;
e. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem Kawasan Lindung; dan
f. mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian Kawasan Lindung.

Strategi atas kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian wilayah meliputi:

a. menetapkan Kawasan Strategis Provinsi yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah;
b. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
c. mengembangkan pusat industri yang terhubung secara terpadu dan terintegrasi dengan daerah sumber bahan baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan pelabuhan laut dan bandar udara serta sarana dan prasarana penunjang ekonomi lainnya;
d. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
e. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
f. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
g. mengintensifkan promosi peluang investasi menciptakan iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan.

Strategi atas kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :

a. menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan Kawasan Strategis Nasional dengan budidaya terbangun; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang wilayah provinsi Kalimantan Selatan meliputi sistem perkotaan nasional dan sistem perkotaan provinsi. Sitem perkotaan nasional meliputi:

a. PKN berada di Kota Banjarmasin; dan
b. PKW berada di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, perkotaan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, perkotaan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dan perkotaan Kotabaru Kabupaten Kotabaru.

Sistem perkotaan meliputi : Kota Banjarbaru; Perkotaan Rantau di Kabupaten Tapin; Perkotaan Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Perkotaan Paringin di Kabupaten Balangan; Perkotaan Tanjung di Kabupaten Tabalong; Perkotaan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut; dan Perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

PKNp dan PKWp meliputi:

a. PKNp di perkotaan Martapura Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru;
b. PKWp di perkotaan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, perkotaan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

B. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Tidak dapat menyajikan data, karena RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2021-2026 belum dapat disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini baru penetapan Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024, belum dilakukan pelantikan Gubernur terpilih. Hal ini disebabkan adanya Sengketa Pilkada Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebagai gambaran disajikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan terpilih yang telah ditetapkan KPUD Kalimantan Selatan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2024 terpilih adalah **"Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan (Kalsel Maju)"**. Misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata
3. Memperkuat sarana dan prasarana dasar dan perekonomian
4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik
5. Memperbaiki lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana

C. Kabupaten Sekitar

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah dengan Kabupaten Balangan di sebelah utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah Barat dan Kabupaten Kotabaru di sebelah Timur. Dalam penyusunan RPJMD ini, maka perlu juga melihat perencanaan masing-masing daerah yang berbatasan.

a. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023 adalah **"Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat".**

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

- Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
- Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
- Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan :
   - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan;
   - Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
   - Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman;
   - Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat; dan
   - Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat

ii. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, dengan sasaran pembangunan :
   - Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;
   - Menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
   - Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
   - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   - Meningkatnya investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
   - Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat

iii. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

iv. Meningkatkan Sumber Daya Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Menjamin Pembangunan Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
   - Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat;
   - Meningkatnya pemberdayaan reponsif gender dan perlindungan terhadap anak;
   - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

v. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi :
   - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
   - Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
   - Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
   - Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan :

a) Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah dengan arah kebijakan yaitu :
   - Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat
   - Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan pendidikan
   - Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat
   - Membangun kerjasama dan kemitraan pengembangan kesehatan
b) Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah :
   - Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana
   - Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama
   - Penegakan hukum dan pencegahan konflik social
c) Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis pariwisata :
   - Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sector pertanian, UMKM dan ekonomi kreatif
   - Penguatan databased objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif
   - Penguatan investasi dalam negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership
   - Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata, industri olahan dan pertanian
   - Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif

d) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian Melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan :
   - Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan
   - Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan
   - Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan

e) Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment, melalui penguatan interkonektivitas spasial :
   - Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan
   - Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

f) Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level pemerintahan :
   - Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan
   - Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien
   - Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah efisien

g) Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil :
   - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan yang berorientasi pada hasil

- Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah
- Memfasilitasi dan pendampingan dalam pemanfaatan teknlogi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

h) Mengembangkan sistem pembiayaan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat :

- Peningkatan penggunaan instrument pembiayaan non konvensional

b. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode tahun 2017-2022 kedepan adalah **"Hulu Sungai Utara MANTAP"**. Ungkapan MANTAP sebagaimana visi tersebut di atas merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS dan PRODUKTIF**.**

Untuk terwujudnya visi daerah, maka ditetapkan misi daerah yaitu :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah
3. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah
4. Membangun infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal
5. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif Dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Tujuan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif
2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan prestasi olahraga
5. Memelihara kehidupan sosial dan keagamaan yang kondusif
6. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
7. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan yang berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut terhadap berbagai rumusan tujuan di atas, maka sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

i. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
ii. Meningkatnya pelayanan publik yang prima
iii. Meningkatnya kapasitas fiskal/pembiayaan daerah
iv. Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan
v. Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat
vi. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
vii. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
viii. Menekan laju pertumbuhan penduduk
ix. Meningkatnya prestasi olahraga
x. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis
xi. Meningkatnya hasil-hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
xii. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
xiii. Berkembangnya peran ekonomi kreatif industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)

xiv. Meningkatnya sektor pariwisata
xv. Menurunnya Angka Pengangguran
xvi. Menurunnya Angka Kemiskinan
xvii. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah
xviii. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan
xix. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan permukiman
xx. Pengurangan lokasi banjir
xxi. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan

Dengan berlandaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, maka rumusan strategi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 sampai tahun 2022 meliputi :

1. Strategi meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah. Arah kebijakan yang ditetapkan untuk penerapan strategi ini, yaitu:
   a. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
   b. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
   c. Peningkatan profesionalisme pengawasan
   d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Strategi meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik. Kebijakan yang ditempuh untuk strategi ini, yaitu :
   a. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur
   b. Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah
   c. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi

3. Strategi meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang profesional. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP)
4. Strategi meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi kependudukan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
5. Strategi memberdayakan dan mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan kapasitas PAD
6. Strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
   a. Peningkatan aksesibilitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan
   b. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan keterampilan dan pengembangan karakter
   c. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan daerah
   d. Pengembangan manajemen sekolah
7. Strategi meningkatkan promosi kesehatan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong peningkatan dan pembudayaan pola hidup bersih dan sehat.
8. Strategi meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
   a. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
   b. Peningkatan status gizi masyarakat

c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular

9. Strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh daalam penerapan strategi ini, yaitu :
   a. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kreativitas masyarakat
   b. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan untuk menangani permasalahan secara bersama-sama.
10. Strategi meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kebijakan pengarusutamaan gender. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di berbagai sector.
11. Strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu percepatan pelaksanaan program penguatan perlindungan perempuan dan anak
12. Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB serta pembangunan keluarga. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana dan cakupan partisipasi keluarga dalam kegiatan kelompok keluarga sejahtera
13. Strategi meningkatkan SDM Pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu peningkatan pemuda pelopor dalam pembangunan
14. Strategi meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga berstandar nasional

15. Strategi meningkatkan keamanan dan ketertiban umum. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
    b. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum
16. Strategi meningkatnya kerukunan antar dan inter umat beragama. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Pembinaan forum kerukunan antar ummat beragama (FKAUB)
17. Strategi merevitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan
    b. Peningkatan daya saing dan nilai tambah poduk pertanian, petenakan dan perikanan
    c. Penataan lahan pertanian pangan berkelanjutan
    d. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya
18. Strategi memperkuat ketahanan pangan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Penguatan lembaga ketahanan pangan daerah
    b. Penguatan kecukupan minimal pangan dan cadangan pangan
    c. Peningkatan akses dan distribusi pangan
    d. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pola pangan harapan
19. Strategi memberdayakan Ekonomi Kreatif, IKM, UMKM dan koperasi. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan IKM, UMKM, dan koperasi
    b. Peningkatan nilai tambah produk IKM dan UMKM

c. Perluasan jangkauan pemasaran IKM dan UMKM berbasis teknologi informasi

20. Strategi meningkatkan pendapatan masyarakat Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Pengembangan saana dan prasarana ekonomi daerah
    b. Pengembangan kawasan ekonomi
21. Strategi pengembangan kualitas dan kuantitas seni dan budaya serta pariwisata lokal. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan promosi pariwisata lokal/daerah
    b. Peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata
    c. Peningkatan kualitas seni dan budaya yang dilestarikan
22. Strategi mengembangkan kemampuan kerja dan berusaha (wiraswasta). Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja dan peluang kerja
23. Strategi mengembangkan program padat karya dan usaha produktif. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan investasi yang bersifat padat karya
24. Strategi Memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS). Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat
25. Strategi optimalisasi program penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
    b. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa berasal dari keluarga tidak mampu
    c. Peningkatan kulitas dan kuantitas penyelenggaraan perumahan masyarakat miskin
    d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

26. Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Peningkatan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala sarana dan prasarana tansportasi darat dan sungai
    b. Peningkatan aksesibilitas antar daerah baik darat maupun sungai
    c. Melanjutkan pembangunan jalan penghubung antar wilayah
27. Strategi meningkatkan cakupan layanan telekomunikasi dan informatika. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Peningkatan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur komunikasi dan informatika
28. Strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan dan irigasi. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
29. Strategi meningkatkan cakupan layanan air bersih. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dan sistem penyediaan air bersih dan air minum
    b. Memperluas jaringan perpipaan kabupaten
    c. Menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat
30. Strategi mencegah dan menurunkan tingkat kekumuhan di perkotaan. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu :
    a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
    b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan
31. Strategi meningkatkan cakupan sanitasi dasar layak. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini,

yaitu Percepatan pembangunan sanitasi permukiman (air limbah domestik, persampahan, drainase dan promosi PHBS).

32. Strategi pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu mendorong investasi di bidang perumahan
33. Strategi meningkatkan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu peningkatan kapasitas penanggulangan bencana (mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)
34. Strategi Perlindungan kawasan khusus. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Memperkuat kerangka regulasi dalam penataan ruang dan pengembangan data spasial.
35. Strategi meningkatkan kualitas udara. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi terhadap terjadinya pencemaran udara
36. Strategi peningkatan kualitas air baku. Kebijakan yang ditempuh untuk penerapan strategi ini, yaitu Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi aktivitas yang berpotensi terhadap pencemaran sungai, air tanah dan rawa.

c. **Kabupaten Balangan**

Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 adalah " **MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**" , dengan misi yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan adalah :

a. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan; dengan sasaran :
   - ❖ Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dengan sasaran :
   - ❖ Meningkatnya indeks lingkungan hidup
c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan; dengan sasaran :
   - ❖ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
d. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
   - ❖ Menurunnya angka pengangguran terbuka
e. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas
   - ❖ Meningkatnya Indeks Pendidikan
   - ❖ Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel
   - ❖ Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

g. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif
   - ❖ Menurunkan Angka Kemiskinan
   - ❖ Meningkatnya kerukunan umat beragama
   - ❖ Meningkatkan Ketentaraman dan Ketertiban Umum
   - ❖ Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Balangan

h. Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun
   - ❖ Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan

Strategi pembangunan yang dijalankan adalah :

1. Meningkatkan akses dan kualitas prasarana dan sarana transportasi
2. Meningkatkan ketersedian rumah layak huni dan kawasan permukiman yang layak
3. Mengembangkan sistem pelayanan pusatpusat kota secara hirarki dan merata
4. Meningkatkan Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
5. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
6. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
7. Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
8. Meningkatkan Nilai Investasi
9. Menurunkan Angka Pengangguran Terbuka
10. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
11. Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah
12. Meningkatkan Usia Harapan Hidup
13. Menurunkan Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
14. Menurunkan Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)
15. Menurunkan Angka Pernikahan Dini
16. Meningkatkan Nilai NILAI SAKIP
17. Meningkatkan Nilai Opini BPK
18. Meningkatkan Nilai EKPPD
19. Meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik

20. Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)
21. Penurunan angka kemiskinan
22. Meningkatkan Angka PMKS yang tertangani
23. Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama
24. Meningkatkan Ketentaraman dan Ketertiban Umum
25. Meningkatkan kemampuan pengendalian dan pencegahan serta penanganan bencana
26. Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan
27. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Arah kebijakan umum yang ditempuh adalah :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan dan Peningkatan prasarana trasnportasi
3. Peningkatan layanan trayek angkutan
4. Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor
5. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni
6. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
7. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
8. Peningkatan ketertiban tata ruang
9. Peningkatan penataan dan pemanfaatan ruang
10. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan air
11. Peningkatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam
12. Peningkatan luasan dan pengelolaan RTH
13. Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah
14. Peningkatan produksi dan produktivitas holtikultura
15. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan
16. Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan
17. Peningkatan produksi dan produktivitas Perikanan
18. Peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
19. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa

20. Peningkatan kemitraan dan Pengembangan Pelaku Usaha di Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
21. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya menuju dan di objek wisata
22. Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif
23. Pengembangan wisata alam, seni dan budaya Balangan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
24. Peningkatan pengembangan dan kemitraan UMKM
25. Peningkatan peran BUMDes dalam perekonomian desa
26. Peningkatan pembinaan koperasi
27. Peningkatan sumber sumber pendanaan pembangunan melalui peran BUMD
28. Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja
29. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
30. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan
31. Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi/ Perguruan Tinggi
32. Peningkatan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi
33. Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan informal/kesetaraan
34. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
35. Peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan.
36. Peningkatan akses bagi masyarakat bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu melalui peningkatan jaminan kesehatan
37. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
38. Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
39. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rumah sakit daerah
40. Peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan lingkungan sehat
41. Peningkatan upaya promosi kesehatan tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

42. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil
43. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada bayi dan balita
44. Peningkatan penyuluhan dan edukasi terkait resiko pernikahan dini
45. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menurunkan angka pernikahan dini
46. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
47. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran
48. Pelaksanaan Singkronisasi Penyusunan SAKIP dan LPPD
49. Peningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku
50. Peningkatkan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan
51. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
52. Pelaksanaan Penguatan pengendalian gratifikasi
53. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik
54. Pengembangan dan Penyelarasan Proses bisnis instansi dan unit
55. Pemantauan Implementasi SPM Kabupaten
56. Peningkatkan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM)
57. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
58. Peningkatkan dan Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik.
59. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala
60. Pelaksanaan Survei dan Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala
61. Peningkatan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
62. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera

63. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
64. Meningkatkan efektifitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
65. Peningkatan bantuan dan pendampingan bagi warga masyarakat miskin, anak yatim piatu, warga penyandang disabilitas dan lansia
66. Peningkatan peran pendamping kesejateraan sosial
67. Peningkatan nilai bantuan kepada Panti-panti Sosial
68. Peningkatan peran Tim Penanganan Konflik Daerah, Forum Kewaspadaan Dini di Masyarakat (FKDM) dan Komisi Intelejen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
69. Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten secara rutin
70. Peningkatan pembinaan, kerjasama dan bantuan bagi organisasi keagamaan, adat dan sosial kemasayrakatan
71. Penguatan peran dan fungsi SATLINMAS di desa-desa
72. Peningkatan kegiatan operasi dan monitoring pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
73. Peningkatan upaya penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
74. Peningkatan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
75. Peningkatan pemenuhan dan kualitas SDM tanggap darurat bencana
76. Peningkatan bantuan bagi korban bencana alam dan kebakaran
77. Inventarisasi dan pendataan ragam budaya, adat dan kesenian khas Balangan
78. Revitalisasi, pengembangan dan Pembinaan kebudayaan dan adat istiadat, kesenian lokal
79. Pelaksanaan even-even Kesenian dan budaya khas Balangan secara berkala.
80. Peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa

81. Peningkatan peran aktif BUMDes dalam Peningkatan perekonomian desa
82. Peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM Aparatur Pemerintaha Desa

4.2.4. Isu Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

A. RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD tahun 2022 – 2026 merupakan tahapan IV (akhir) dari RPJPD. Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah "**HULU SUNGAI TENGAH MENJADI Kabupaten MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI Provinsi Kalimantan Selatan BERBASIS LINGKUNGAN".** Misi Pembangunan Jangka Panjang, adalah :

a. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan IMTAQ dan IPTEK.
b. Mengembangkan Ekonomi Daerah
c. Mengembangkan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
d. Mengembangkan Mutu Pelayanan Publik
e. Mengembangkan Sosial Budaya Masyarakat Bernuansa Religius.
f. Mengembangkan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten HST.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV dari masing-masing Misi adalah :

1. **Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan Imtaq dan Iptek**

   Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

   - Mengembangkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
   - Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

- Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
- Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan sistem surveilance, monitoring dan informasi kesehatan.
- Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja.
- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan imtaq dan iptek.

2. **Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berbasis Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan)**

Arah kebijakan yang akan ditempuh adalah :

- Mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.
- Mendorong peningkatan investasi.
- Mengembangkan pertanian dalam arti luas menuju Agribisnis dan Agroindustri.
- Mendorong peningkatan mekanisasi pertanian baik untuk alat dan mesin pertanian pra panen (hand tractor) maupun pasca panen perontok/power thresher).
- Mengembangkan Industri rumah tangga dan industri kecil menuju usaha dan produk yang berdaya saing.
- Mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Mendorong berkembangnya sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.
- Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. **Mengembangkan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan**

Arah Kebijakan yang ditempuh adalah :

- Meningkatkan sarana dan prasarana (sumber daya air, transportasi, informatika, energi dan ketenaga listrikan, serta air minum dan sanitasi) yang merata dan berkualitas.
- Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.
- Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang unggul berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil.

4. **Mengembangkan Mutu Pelayanan Publik**

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- Meningkatkan standar pelayanan prima.
- Mengembangkan Birokrasi yang Profesional dan Berdedikasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).
- Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah (kelembagaan, aparat, keuangan dan lembaga legislatif).

5. **Untuk Mewujudkan Misi Mengembangkan Sosial Budaya Masyarakat Bernuansa Religius.**

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- Memantapkan nilai-nilai keagamaan dan demokrasi.
- Mengembangkan pelayanan kependudukan.
- Mengembangkan peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- Meningkatkan peranan dan kemandirian kaum wanita.

- Mendorong kesadaran hukum dan hak azazi manusia untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam ikatan NKRI.
- Mengembangkan kebudayaan daerah.

6. Untuk Mewujudkan Misi Mengembangkan Penataan Ruang

Arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- Memantapkan pengkajian struktur dan pola tata ruang wilayah.
- Meningkatkan pengaturan ruang secara khusus pada kawasan-kawasan yang dinilai rawan bencana.
- Memperjelas produk rencana tata ruang, baik pada batas wilayah administratif, maupun pertimbangan asfek fungsional.
- Peningkatan pengaturan sangsi dan pengaturan penyelesaian sengketa penaataan ruang.

Mempertimbangkan konstelasi beragam kecenderungan lokal, regional, nasional, dan global, beragam masalah, potensi, kekuatan kini dan beberapa tahun ke depan maka arah pembangunan ditempuh dengan strategi : a) pengembangan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat; 2) revitalisasi dan reposisi Kota Barabai sebagai salah satu pusat pertumbuhan (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW) di Kalimantan Selatan; 3) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dengan memperhatikan potensi-potensi unggulan daerah.

Tabel 4. 49. Sasaran Pembangunan SDM Kabupaten Hulu Tengah Tahun 2005 - 2025

No.	Bidang	Indikator	Tahap IV (2021-2025)	Keterangan
1	Pendidikan	- APK SD	105	Program/Renstra PD
		- APK SMP	100	Program/Renstra PD
		- APK SMA	95	Program/Renstra PD
		- APM SD	99	Program/Renstra PD
		- APM SMP	99	Program/Renstra PD
		- APM SMA	90	Program/Renstra PD
		- Rata2 UAN SD	8	Program/Renstra PD
		- Rata2 UAN SMP	7,75	Program/Renstra PD
		- Rata2 UAN SMA/SMK	7,8	Program/Renstra PD
		- % SD taraf nasional	27,88 (73)	Program/Renstra PD
		- % SMP taraf nasional	25 (9)	Program/Renstra PD

No.	Bidang	Indikator	Tahap IV (2021-2025)	Keterangan
		- % SMA taraf nasional	77,78 (7)	Program/Renstra PD
		- % SMA taraf internasional	3	Program/Renstra PD
		- % Tenaga profesional guru	90	Program/Renstra PD

No.	Bidang	Indikator	Tahap IV (2021-2025)	Keterangan
		- Rasio siswa sekolah kejuruan dan umum	70 : 30	Program/Renstra PD
2	Kesehatan	- Angka kematian ibu	76/100.000	Program/Renstra PD
		- Angka kematian bayi	9/1000	Program/Renstra PD
		- % Gizi kurang	< 10 %	Program/Renstra PD
		- % Gizi buruk	< 1 %	Program/Renstra PD
		- Umur harapan hidup	69	Sasaran RPJMD
		- IPM	74,50	Sasaran RPJMD

Sumber : RPJPD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025

Tabel 4. 50. Sasaran Pembangunan Prasarana & Sarana Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 - 2025

INDIKATOR	IV 2021-2025
Transportasi Terpadu	
Jalan	100 %
• Jalan Propinsi	
• Jalan Kabupaten	
Jembatan	100 %
• Jembatan Propinsi	
• Jembatan Kabupaten	
Revitalisasi dan Pembangunan Terminal Antar Kota dan Propinsi	100 %
Telematika	
Cakupan Pelayanan	100 %
Listrik	

INDIKATOR	IV 2021-2025
Cakupan Pelayanan	95 %
Air Bersih	
Cakupan Pelayanan	85 %
Perumahan dan Pemukimam	
• Sarana dan Prasarana Perumahan	95 %
• Air Limbah	85 %
• Drainase	100 %
• Persampahan	85 %
• Fasilitas Umum	85 %
Pertanian	
Mekanisasi Pertanian	
• Alsintan Pra Panen	20 %
• Alsintan Pasca Panen	100 %
Perkantoran	
Pemenuhan Kuantitas	100 %

Sumber : RPJPD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025

1) Sasaran yang ingin dicapai Peningkatan Transportasi yang Terpadu dengan tahapan pencapaian

- **Tahap IV (2021-2025) :**

Tersedianya sarana dan prasarana jalan, dalam kondisi baik 100%, jembatan dalam kondisi baik 100%, prasarana pelayanan dalam kondisi ± 95%, serta prasarana umum pelayanan lainnya. Alternatif Revitalisasi dan Pembangunan Terminal Antar Kota dan Propinsi sudah mulai dalam tahap 100%.

2) Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

- **Tahap IV (2021-2025) :**
  - Terlaksananya pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan standar pelayanan minimum bidang lingkungan hidup
  - Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perijinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
  - Tersedianya lembaga pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.
  - Terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan
  - Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.915 Ha atau 16,07 % dari lahan kritis dan dapat menekan seminimal mungkin percepatan penambahan luasan lahan kritis.
  - Dapat dipertahankannya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai prinsip berkesesuaian standar yang berlaku yang selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - Pengelolaan DAS telah dapat dilakukan secara terpadu sehingga ancaman bahaya banjir dan tanah longsor dapat ditekan serendah mungkin.
  - Berkurangnya kawasan hutan dan lahan terbakar hingga 50% dari luasan yang terbakar pada periode sebelumnya melalui upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu tegaknya hukum tanpa diskriminasi bagi setiap pelanggaran akan ketentuan pelestarian hutan dan lingkungan hidup .
  - Tersusunya neraca air tanah
  - Inventarisasi potensi mineral langka
  - Tersosialisasinya dan terdiseminasinya informasi secara dini terhadap ancaman dan mekanisme antisipasi bencana alam kepada masyarakat.
  - Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai substitusi energi konvensional.
  - Terpenuhinya kebutuhan air bersih
  - Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan
  - Tersusunnya neraca energi daerah.

- Tercapainya kegiatan pengelolaan dan pengembangan migas yang aman dan berwawasan lingkungan.
- Tersedianya lumbung pangan di setiap desa
- Mengembangkan aksesibilitas permodalan, pemasaran, informasi dan teknologi pangan.
- Tumbuhnya Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM - LUEP) yang berjalan secara mandiri
- Berkembangnya Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) secara mandiri.
- Tumbuh berkembangya konsumsi pangan lokal di masyarakat.
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100

3) Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang politik, pembangunan, dan hukum

- **Tahap IV (2021 – 2025) :**

  Penerapan prinsip *good governance* :

  - Terciptanya kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan dan tertib hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Terciptanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Terciptanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
  - Terciptanya partisipasi masyarakat dalam kebijakan public pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

4) Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang Sosial Budaya, dan Agama

- **Tahap IV (2021-2025) :**

  Terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis

5) Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Bidang Penataan Ruang

- **Tahap IV (2021 – 2025) :**
  - Tersedianya data hasil evaluasi pelaksanaan RTRW Kabupaten HST
  - Mantapnya lembaga penataan ruang
  - Terwujudnya pola ruang sesuai RTRW Kabupaten HST

B. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Amanat Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang RTRW kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2016 – 2036, memuat tentang kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:

a. pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu;
b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
c. pengembangan kawasan wisata alam dan buatan dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
d. pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
e. pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam;
f. pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Adapun strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan pertanian yang produktif melalui kawasan agropolitan terpadu dengan strategi meliputi:
   a. mengembangkan ketersediaan infrastruktur penunjang dan pelayanan sub-terminal agribisnis pada kawasan agropolitan;

b. mengembangkan lumbung desa modern;
c. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;
d. mempertahankan luas pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai basis perekonomian kabupaten;
e. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
f. mengembangkan irigasi pertanian;
g. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
h. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering;
i. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
j. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;
k. meningkatkan produktivitas hortikultura, perkebunan dan perikanan;
l. mengembangkan sentra peternakan; dan
m. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia dengan strategi meliputi:
a. mengembangkan kegiatan ekonomi skala besar;
b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
c. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
d. meningkatkan penataan sentra industri kecil dan mikro serta industri menengah;
e. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
f. mengoptimalkan sentra industri dan pengembangan kawasan industri; dan
g. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
h. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
i. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan dan jasa

3. Pengembangan wisata alam dan buatan dengan memanfaatkan potensi alam serta memperhatikan kelestraian lingkungan hidup dan budaya dengan strategi meliputi:
   a. mengembangkan kawasan wisata agro, wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam serta wisata buatan;
   b. mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan pengembangan kawasan wisata;
   c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
   d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
   e. mengadakan dan memperbanyak event festival wisata dan gelar seni budaya; dan
   f. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal (local indigenous).
4. Pengembangan pusat pelayanan bersinergis didukung prasarana wilayah dan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi meliputi:
   a. meningkatkan akses jaringan jalan antar PKL dengan arteri primer, PPK dengan kolektor primer dan PPL dengan lokal primer;
   b. meningkatkan pengawasan terhadap ketinggian bangunan, Building Capacity Ratio (BCR), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
   c. mengembangkan prasarana wilayah terinterkoneksi;
   d. mengembangkan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung lingkungan dan penduduk; dan
   e. memantapkan keterkaitan fungsional antar PKL, PPK, dan PPL.
5. Pengembangan dan pelestarian kawasan berfungsi lindung sesuai dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam dengan strategi meliputi:
   a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
   b. mempertahankan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan fungsinya;
   c. mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan berfungsi lindung;

d. menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan dengan upaya rehabilitasi hutan;
e. meningkatkan kegiatan yang mendorong pengembalian fungsi lindung;
f. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perlindungan setempat dan ruang evakuasi bencana alam;
g. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat;
h. memantau dan mengendalikan kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya dengan melakukan kerjasama antar wilayah maupun antar instansi terkait; dan i. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.

6. Pendistribusian penduduk sesuai dengan pengembangan sistem perkotaan dengan strategi meliputi:
   a. menetapkan distribusi kepadatan penduduk untuk setiap pusat pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   b. meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan standar tingkat pelayanan penduduk;
   c. membuka kawasan pusat pertumbuhan di setiap pusat kegiatan; dan
   d. memeratakan persebaran penduduk dengan perbaikan saranaprasarana dan infrastruktur di kawasan perdesaan atau kawasan kurang berkembang guna mengurangi urbanisasi.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
   a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
   b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan

c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang wialayah untuk sistem perkotaan terdiri atas :

a. PKWp dengan lokasi berada di Perkotaan Barabai.
b. PKL dengan lokasi meliputi perkotaan Birayang di Kecamatan Batang Alai Selatan dan perkotaan Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan.
c. PKLp dengan lokasi meliputi: 1. Perkotaan Pagat di Kecamatan Batu Benawa
d. PPK dengan lokasi meliputi: perkotaan Pandawan di Kecamatan Pandawan, perkotaan Haruyan di Kecamatan Haruyan, perkotaan Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara, perkotaan Ilung di Kecamatan Batang Alai Utara, perkotaan Hantakan di Kecamatan Hantakan, perkotaan Tandilang di Kecamatan Batang Alai Timur, dan perkotaan Limpasu di Kecamatan Limpasu.

Rencana struktur ruang sistem perdesaan berupa PPL meliputi :

a. Kecamatan Pandawan ditetapkan di Desa Kambat Utara dan Desa Mahang Sungai Hanyar
b. Kecamatan Batang Alai Selatan ditetapkan di Desa Anduhum;
c. Kecamatan Haruyan ditetapkan di Desa Mangunang dan Desa Batu Panggung.
d. Kecamatan Batang Alai Utara ditetapkan di Desa Telang dan Desa Semanggi Seberang
e. Kecamatan Hantakan ditetapkan di Desa Murung B
f. Kecamatan Limpasu ditetapkan di Desa Abung
g. Kecamatan Batang Alai Timur ditetapkan di Desa Hinas Kiri dan Desa Nateh.
h. Kecamatan Batu Benawa ditetapkan di Desa Kalibaru dan Desa Baru.
i. Kecamatan Labuan Amas Utara ditetapkan di Desa Sungai Buluh, Desa Pamangkih dan Desa Banua Kupang.

j. Kecamatan Labuan Amas Selatan ditetapkan di Desa Murung Ta'al; dan Desa Tabudarat Hilir.

Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri dari rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya.

C. Isu Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama ini memiliki berbagai permasalahan yang cukup beragam, baik permasalahan *series* (terus mengiringi) maupun permasalahan baru yang muncul berdasarkan kondisi global. Permasalahan tersebut akan membentuk suatu rumusan-rumusan yang jika diintegrasikan dengan kajian dan analisis isu-isu strategis pembangunan akan memberikan sebuah antisipasi dan jalan keluar permasalahan selama ini.

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu global, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis Provinsi, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan

kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Saat ini, sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya. Sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki ijazah SD atau sederajat bahkan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah utamanya bidang terkait perlu memfokuskan terhadap isu ketenagakerjaan ini agar kedepannya kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi lebih optimal.

Aspek peningkatan SDM memerlukan prasyarat :

- Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan tata kelola kependudukan yang lebih baik.
- Adanya perlindungan sosial yang memadai khususnya bagi penduduk yang rentan goncangan.
- Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta sanitasi dan air minum.
- Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
- Peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja.
- Mengurangi kemiskinan.

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi strategis untuk terus ditingkatkan. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh,

tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Tentunya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Perekonomian masyarakat di Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan kecil, perdagangan, dan jasa.

- **Pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian**

Peningkatan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian menjadi sangat strategis karena sebagian besar penduduk HST hidup dari sektor pertanian. Walaupun ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah baik, namun tetap harus menjadi perhatian baik dari aspek kuantitas maupun kualitas karena semakin bertambahnya penduduk. Aspek ketahanan pangan juga masih perlu tata kelola yang lebih baik pada aspek penyediaan yang beragam, distribusi dan keamanan pangan.

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan harus senantiasa diwujudkan sebagai prasyarat keberlanjutan ketahanan pangan. Dalam pembangunan pertanian tidak terlepas permasalahan seperti rendahnya efektivitas dan efisiensi tata kelola pertanian, kelestarian sumber daya pertanian dan daya dukung lahan. Efektivitas dan efisiensi tata kelola dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pertanian dan penerapan/alih teknologi dan permodalan seta tata niaga. Ciri utama pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu dan kontinuitas pasokan yang terus menerus harus selalu meningkat dan terpelihara.

- **Pengembangan Industri Kecil (Industri Rumah Tangga)**

Industri pengolahan merupakan salah satu basis ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Industri pengolahan ini masih didominasi oleh industri skala rumah tangga/industri kecil. Industri rumah tangga ini mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

- **Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata**

Sektor perdagangan dan jasa juga merupakan penyumbang PDRB Kabupaten HST. Hal ini didukung oleh letak geografis yang berada ditengah-tengah Kabupaten yang ada di banua enam dan perlintasan antar Provinsi di Kalimantan. Kedudukan yang strategis tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi.

Kondisi alam yang masih asri dan terjaga di kawasan pegunungan /hutan meratus dan budaya lokal yang khas bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif pengembangan perekonomian daerah.

c. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi, energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal.

Pembangunan pada dasarnya adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan suatu wilayah biasanya diukur dari berkembangtidaknya suatu wilayah. Wilayah akan semakin maju dan berkembang apabila didukung dengan semakin lengkap dan baiknya kondisi infrastruktur wilayah yang ada, baik infrastruktur pelayanan dasar maupun penunjang.

d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih mempunyai kawasan hutan hujan tropis yang terjaga kelestariannya dengan baik. Sebagai satu-satunya kawasan yang masih lestari di Provinsi Kalimantan Selatan, maka hal tersebut harus dipertahankan kelestarian. Selain itu setiap pembangunan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercapai.

Lingkungan hidup yang baik juga akan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Selama ini Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu mengalami bencana khususnya bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengurangi resiko bencana, maka perlu peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Adanya kejadian bencana pandemic covid 19 sejak awal tahun 2020, telah berdampak pada munculnya kebiasaan-kebiasaan baru (new normal) perilaku masyarakat yang sebelumnya hampir tidak ada, tidak berkembang, sekarang menjadi berkembang dengan pesat seperti pembelajaran secara daring, berkembangnya perdagangan online, sepinya perdagangan konvensional, pertemuan-pertemuan, webinar dan lain-lain. Teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan baru bagi seluruh masyarakat dengan tumbuhnya berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Semua dampak dan timbulnya kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku baru masyarakat yang berkembang dengan pesat harus

diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat agar pembangunan tidak menjadi ketinggalan.

e. Reformasi Birokrasi

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah, perlu adanya perwujudan good governance dengan prinsip dasarnya yaitu akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hokum, pada Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar capaian kinerja lebih optimal.

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan dengan standar yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan publik di era reformasi merupakan harapan seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan reformasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Berbagai tanggapan masyarakat justru cenderung menunjukkan bahwa berbagai jenis pelayanan publik mengalami kemunduran yang utamanya ditandai dengan banyaknya penyimpangan dalam layanan publik tersebut. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh sebagian aparatur pemerintahan atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani merupakan aspek-aspek permasalahan layanan publik yang banyak disoroti. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang baik akan meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat / publik.

f. Keharmonisan kehidupan bermasyarakat

Suasana masyarakat yang kondusif dan harmonis merupakan prasyarat mutlak untuk berjalannya pembangunan. Dengan demikian menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan. Terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan pandangan keagamaan maupun perbedaan sosial dan golongan akan menghambat pembangunan.

Keharmonisan kehidupan masyarakat yang tercipta akan mampu menjadikan masyarakat menjadi lebih dinamis sehingga dapat mengakselerasi pembangunan. Kehidupan masyarakat yang terjaga dengan suasana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga dan terkendali mampu meningkatkan dinamisasi kehidupan masyarakat.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa rumusan konsep perencanaan pembangunan difokuskan pada penguatan peran Pemerintah Daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya, dilakukan dengan memerhatikan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan pusat, serta arti penting *paradigma* pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026 merupakan tahap ke-4 (terakhir) pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sebagaimana diamanatkan dalam tahapan dan prioritas pembangunan yang didasarkan kepada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, bahwa tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan *urgensi* permasalahan yang akan diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Visi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan adalah "**Hulu Sungai Tengah Menjadi Kabupaten Maju dan Sejahtera Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan Berbasis Lingkungan**".

Hulu Sungai Tengah yang **MAJU** digambarkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, infrastruktur yang dinamis dan sumber daya alam yang berkelanjutan. **SEJAHTERA** digambarkan dengan kondisi terjadinya penigkatan pendapatan masyarakat. **PUSAT KEGIATAN WILAYAH** digambarkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat pemukiman, pusat distribusi barang dan jasa dan simpul transportasi di kawasan hulu sungai. **BERBASIS LINGKUNGAN** digambarkan dalam pelaksanaan pembangunan tidak merusak lingkungan dan semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan kualitas lingkungan.

Berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, Visi Daerah yang dituangkan sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi yang diusung oleh pasangan kepala daerah yang terpilih. Visi sendiri secara akademis dikatakan sebagai gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang akan datang dan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih selanjutnya dijabarkan sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa bhakti jabatan selama 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan suatu gambaran utuh sebagai tujuan akhir pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara madani, konsisten, dan merata. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020, ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)"

Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2021-2024, gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.



Gambar 5. 1. Diagram Elemen Visi

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat tiga elemen utama yaitu aspek makmur, aspek unggul, dan aspek dinamis. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. **Makmur** yaitu suatu keadaan dimana masyarakat HST dapat merasakan taraf hidup yang layak dan manusiawi yang dapat ditilik dari dimensi material maupun dirasakan melalui dimensi spiritual.
2. **Unggul** yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kemandirian kerja serta terciptanya infrastruktur daerah yang efektif dan mampu mendorong semangat yang kompetitif.
3. **Dinamis** merupakan wujud suasana kehidupan dimana masyarakat memanfaatkan nilai-nilai positif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga norma agama dan budaya luhur sebagai jadi diri. Dinamis dalam konteks ini adalah merupakan *konklusi* dari terwujudnya kemakmuran suatu daerah dengan keunggulan sumber daya manusianya.

Tabel 5. 1. Penjelasan Perumusan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang lebih Makmur, Unggul dan Dinamis (MUDA)	**Makmur**	Adalah suatu keadaan dimana masyarakat HST dapat merasakan taraf hidup yang layak dan manusiawi yang dapat ditilik dari dimensi material maupun dirasakan melalui dimensi spiritual.
	Unggul	Adalah suatu kondisi sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kemandirian kerja serta terciptanya infrastruktur daerah yang efektif dan mampu mendorong semangat yang kompetitif.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Dinamis	Adalah suatu suasana kehidupan dimana masyarakat memanfaatkan nilai-nilai positif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga norma agama dan budaya luhur sebagai jadi diri. Dinamis dalam konteks ini adalah merupakan *konklusi* dari terwujudnya kemakmuran suatu daerah dengan keunggulan sumber daya manusianya.

Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 - 2025 adalah bahwa RPJMD periode ini merupakan pelaksanaan dari tahapan IV RPJPD.

Tabel 5. 2. Persandingan Visi RPJPD dengan RPJMD

	V I S I
RPJPD Kab. HST Tahun 2005-2025	***"HULU SUNGAI TENGAH MENJADI Kabupaten MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI Provinsi Kalimantan Selatan BERBASIS LINGKUNGAN".***
RPJMD Kab. HST Tahun 2021-2026	***Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)***

Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Periode 2021-2026, yaitu **Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)** adalah untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum pada RPJPD Tahun 2005-2025, yaitu "**HULU SUNGAI TENGAH MENJADI Kabupaten MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI Provinsi Kalimantan Selatan BERBASIS LINGKUNGAN".** Pokok-pokok visi RPJMD yaitu peningkatan kemakmuran, keunggulan dan kedinamisan pembangunan diperlukan untuk mendukung perwujudan pokok-pokok visi RPJPD yaitu menjadi kabupaten maju dan sejahtera.

Keterkaitan antara visi pembangunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 - 2026 dengan visi RPJMN tahun 2020 - 2024 dan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 3. Persandingan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Visi RPJMN 2020 - 2024		**"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**
Visi RPJMD Provinsi Kalsel 2021 - 2026		**Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan (Kalsel Maju)** *)
Visi RPJMD Kabupaten HST 2021-2026		**Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)**

**) Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalsel Tahun 2021-2024*

Dari persandingan tersebut secara substansi ada kesamaan antara visi nasional, provinsi dan kabupaten. Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah dalam rangka mendukung pencapaian Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan Visi Pembangunan Nasional.

5.2 Misi

Misi merupakan upaya umum pemerintah daerah untuk mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang *efektif* dan *efisien*. Misi juga menjadi alasan utama mengapa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan Visi di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.**
2. **Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.**
3. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.**
4. **Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.**
5. **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.**

Keterkaitan antara Misi yang ditetapkan dengan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 4. Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Kata Kunci Visi	Penjabaran Misi
Makmur Unggul Dinamis	Menerapkan tata kehidupan sosial dengan nilai-nilai spiritual dan kultural (M-1)
	Mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, responsive dan professional (M-2)
	Meningkatkan kualitas SDM dengan prinsip memanusiakan manusia (M-3)
	Mengembangkan perekonomian Daerah dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup (M-4)
	Menerapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan lestari dan tata kelola yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial (M-5)

Penjelasan masing-masing Misi tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.1. Misi Pertama : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak bisa berjalan lancar apabila tidak ada tata kehidupan sosial yang harmonis. Pelaksanaan pembangunan memerlukan manusia yang mampu menerapkan tata kehidupan sosial dengan nilai-nilai spritual dan nilai-nilai kultural. Perlu Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter budi luhur. Dalam penjabarannya, berbudi luhur memiliki lima nilai dasar yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 5 (lima) nilai luhur yang dimaksud tersebut yakni jujur, sabar, antusias, cinta, dan peduli.

Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan terus meningkatkan akhlak yang mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur, berbudaya, dan harmonis.

NIlai-nilai spritual dan kultural merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai agama dan budaya lokal yang positif terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Mental dan karakter bangsa yang cenderung *destruktif* dan koruptif mengakibatkan tujuan pembangunan akan sulit terlaksana. Di sisi lain pembangunan multisektor juga membutuhkan peranan nilai-nilai spritual dan kultural untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan prilaku, karakter dan budaya masyarakat tertentu.

5.2.2. Misi Kedua : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan,

prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan dan masih belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat adalah perihal yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca pada berbagai media massa. Di lain pihak masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat ini, perlu dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu akan tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya.

5.2.3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kerja. Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya manusia yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang harus terpenuhi. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan akses dan mutu serta jumlah tenaga kependidikan yang baik pula. Dengan peningkatan akses, mutu dan penambahan jumlah tenaga kependidikan otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain pendidikan, kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Hidup sehat adalah salah satu hak dan kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kesehatan ditunjang prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang ada. Dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan serta jumlah tenaga medis yang mencukupi akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, untuk meningkatkan mutu hidup sehat atau kesehatan, tenaga medis perlu memberikan motivasi lebih terhadap masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu hidup sehat sehingga mempunyai kemampuan kerja.

Tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia pelaku pembangunan. Membangun sumber daya manusia juga harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tersebut dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.

Begitu pula dengan perempuan dan pemuda sebagai bagian dari masyarakat juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan peran serta perempuan dan pemuda

dalam pembangunan menjadi pendorong percepatan pencapaian pembangunan.

5.2.4. Misi Keempat : Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Pengembangan dan pembangunan basis ekonomi seperti sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang banyak menjadi lapangan usaha masyarakat perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. Ekonomi kerakyatan perlu dikembangkan sebagai konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertitik tolak pada sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pengembangan dan pembangunan sektor-sektor tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

Selain peningkatan lapangan usaha basis ekonomi daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu juga didorong pengembangan dan peningkatan sektor-sektor non basis ekonomi potensial seperti ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan pengembangan sektor-sektor potensial ekonomi diharapkan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja, investasi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

5.2.5. Misi Kelima : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial

Belum meratanya pembangunan infrastruktur menyebabkan adanya ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur yang handal dalam perencanaan wilayah dan kota dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pemerataan pembangunan, penghematan energi, pelestarian ekologi atau lingkungan, pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada peningkatan performa, dan menyerap peran serta masyarakat dalam proses pembangunan secara maksimal.

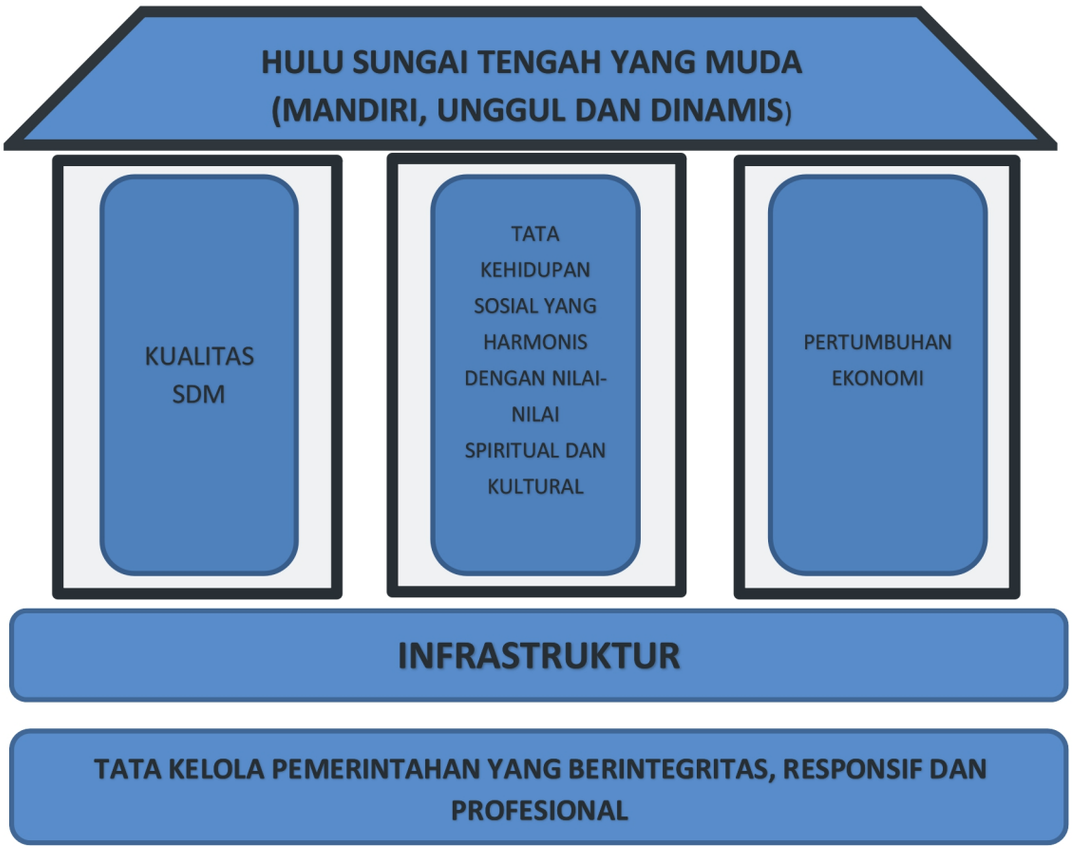
Pembangunan infrastruktur merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua.

Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat serta pendukung terciptanya ketahanan pangan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pemenuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tapi juga untuk kebutuhan generasi mendatang. Sumber daya alam yang *renewable* dikelola secara optimal dan terencana, sehingga semakin meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya dari waktu ke waktu. Sedangkan sumber daya alam yang *non renewable* tidak dieksploitasi secara maksimal hanya demi kepentingan sekarang.

Konstruksi bangunan misi dalam rangka pencapaian visi seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 5. 2. Konstruksi Bangunan Misi Dalam Pencapaian Visi

Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 dengan misi RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 - 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 5. Persandingan Misi RPJPD dengan RPJMD

No.	RPJPD	RPJMD
1.	Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan IMTAQ dan IPTEK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.

No.	RPJPD	RPJMD
2.	Mengembangkan Ekonomi Daerah	Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
3.	Mengembangkan Mutu Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.
4,	Mengembangkan Sosial Budaya Masyarakat Bernuansa Religius.	Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
5.	Mengembangkan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan	Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.
6.	Mengembangkan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten HST	

Keterkaitan antara misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 6. Persandingan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

RPJMN	RPJMD Prov. Kalsel 2021-2026 *)	RPJMD Kab. HST 2021-2026
		
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata	Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	

RPJMN	RPJMD Prov. Kalsel 2021-2026 *)	RPJMD Kab. HST 2021-2026
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.
Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Memperbaiki Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana	
Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga		
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Tata Kelola Pemerintahan yang lebih fokus pada Pelayanan Publik	Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

**) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalsel Tahun 2021-2024*

5.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah untuk enam tahun mendatang (tahun 2021-2026). Visi dan misi pembangunan harus dijabarkan ke dalam suatu formulasi kebijakan hingga pada akhirnya menjadi suatu rumusan program dan kegiatan. Terkait hal tersebut, untuk menjembatani antara visi, misi dan pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskanlah tujuan serta sasaran pembangunan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan agar tepat sasaran dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tujuan yang telah ditetapkan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah. Masing-masing tujuan dalam rumusan sasaran direncanakan lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja beserta targetnya.

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1) Untuk mencapai Misi 1 : **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural,** maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 1 :
Meningkatkan Keharmonisan Tata Kehidupan Sosial, Budaya dan Beragama di Masyarakat

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah jumlah kejadian konflik SARA.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah **:**

a. Terwujudnya tata kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya
b. Terjalinnya keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat

2) Untuk mencapai Misi 2 : **Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 2 :
Meningkatkan Pemerintahan yang Berintegritas, Responsif dan Profesional

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah indeks reformasi birokrasi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

3) Untuk mencapai Misi 3 : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prinsip Memanusiakan Manusia**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 3 :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah **:**

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan

4) Untuk mencapai Misi 4 : **Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 4 :
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah PDRB per kapita dan indeks gini (gini ratio).

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah **:**

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
b. Menurunnya penduduk miskin
c. Meningkatnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja

5) Untuk mencapai Misi 5 : **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan dan Sosial**, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan 5 :
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah, **pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana**

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah indeks infrastruktur wilayah.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah :

a. Meningkatnya infrastruktur wilayah, dan kawasan pertumbuhan/strategis
b. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan maka ditetapkan indikator makro pembangunan sebagai berikut :

Tabel 5. 7. Indikator Tujuan (Makro Pembangunan) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Makro Pembangunan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1.	Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, budaya dan beragama di masyarakat	Jumlah kasus konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
2.	Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	50,93	52	56	61	63	67	71
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	68,84	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	72,5
4.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	PDRB per kapita (Rp juta)	27,267	28,000	29,000	30,000	31,250	32,500	34,000
		Indeks Gini	0,3	0,298	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288

No	Tujuan	Indikator Makro Pembangunan	Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
5.	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana	Indeks Infrastruktur Wikayah	-	55	56	57	58	59	60

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Proyeksi					Kondisi Akhir	Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	**Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural**	Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, budaya dan beragama di masyarakat	Terwujudnya tata kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya	Jumlah kasus konflik sosial	0	0	0	0	0	0	0	
				Angka Kriminalitas	< 10	< 10	< 9,5	< 9	< 8,5	< 8	< 7,5	
			Terjalinnya keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat	Jumlah kasus konflik agama	0	0	0	0	0	0	0	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Proyeksi					Kondisi Akhir	Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	**Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional**	Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.67	81	82	83	84	85	86	
				Indeks Profesionalisme ASN	42,5	48	53	58	62	65	67	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,10	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,35	
				Nilai AKIP	66,17	68,60	71,10	73,50	75,00	77,50	80,25	
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia**	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	60.55	61.78	62	63	64	65	67	
				Usia Harapan Sekolah	12,20	12,32	12,44	12,56	12,68	12,80	12,92	
				Rata-rata Lama Sekolah	8	8,13	8,26	8,39	8,52	8,65	8,78	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Proyeksi					Kondisi Akhir	Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76.68	77.16	77.67	78.33	78.83	79.5	80	
				Usia Harapan Hidup	66,01	66,51	66,71	67,01	67,21	67,51	67,71	
			Meningkatnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPG)	96,50	97,5	97,7	97,9	98,1	98,3	98,5	
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	40	41	42	43	44	45	
4	**Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan**	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	-1.01	2 - 3	3,0 -3,5	4 - 4,5	5 - 5,5	5,5 - 6	6 - 6,5	
				Laju Pertumbuhan NTB Pertanian	-0,27	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 -5	5,5 - 6	6 - 6,5	
				Laju Pertumbuhan NTB Industri Pengolahan	-3,53	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5,5 - 6	6,5 -7	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Proyeksi					Kondisi Akhir	Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup			Laju Pertumbuhan NTB Perdagangan	-3,43	1 - 2	3 - 4	5 - 6	6,5 - 7,0	7,5 - 8	8 - 8,5	
				Laju Pertumbuhan NTB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-2,65	1 - 2	3 - 4	5 - 6	6,5 - 7,0	7,5 - 8	8 - 8,5	
			Menurunnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan	5.64	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5	
			Meningkatnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja	Angka Pengangguran	3.96	3.8	3.7	3.6	3.5	3,4	3,3	
5	**Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang**	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan kawasan pertumbuhan/ strategis	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar	85,71	88,54	90,25	92,75	95	97	100	
				% Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan	-	0	10	20	40	60	75	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Proyeksi					Kondisi Akhir	Ket
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial		Meningkatnya pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,65	63,9	64,37	64,78	65,16	65,52	65,80	
				Indeks resiko bencana daerah	140,40	140,40	140,35	140,30	140,20	140,10	140,00	

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021–2026, adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

VISI :
Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)

Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**	
MISI 1 : **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural**					
1	Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, budaya dan beragama di masyarakat	1	Terwujudnya tata kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya	1	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Forkopimda serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan tokoh pemuda
		2	Terjalinnya keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat	2	Mengoptimalkan peran tokoh agama dalam penyebarluasan pemahaman dan pengamalan agama serta membangkitkan suasana keagamaan di masyarakat
MISI 2 : **Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional**					
1	Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	1	Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	1	Optimalisasi pemenuhan dan kualitas pelayanan masyarakat sesuai karakteristik masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis

Tujuan		Sasaran		Strategi	
				2	Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan
		2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	1	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, terpadu dan terintegrasi berbasis elektronik
				2	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
MISI 3 : **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia**					
1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Mendorong pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui keterlibatan segenap pemerhati pendidikan
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
		3	Meningkatnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan kualitas perempuan dan pemuda
MISI 4 : **Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup**					

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan serta jasa
				2	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
		2	Menurunnya penduduk miskin	1	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dan infrastruktur dasar
				2	Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga
		3	Meningkatnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja	1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja
MISI 5 : **Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial**					
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan serta ketahanan bencana	1	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan kawasan pertumbuhan / strategis	1	Peningkatan penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas
				2	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman
				3	Peningkatan pengelolaan limbah
				4	Peningkatan penyediaan dan kehandalan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi

Tujuan		Sasaran		Strategi	
				5	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang
				6	Peningkatan prasarana dan sarana wilayah pertumbuhan dan kawasan strategis
				7	Peningkatan konektivitas antar wilayah/desa
		2	Meningkatnya pelestarian Lingkungan Hidup dan ketahanan bencana	1	Peningkatan pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup
				2	Mengefektifkan mitigasi bencana untuk meminimalisasi dampak dan kerugian akibat bencana melalui antisipasi risiko dan siaga bencana, tanggap dan penanganan bencana secara terpadu dan terintegrasi semua komponen masyarakat dalam dan luar daerah

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah

kebijakan ini merupakan pedoman dalam mengarahkan program-program agar lebih sistematis dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rumusan strategi beserta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan masing-masing sasaran pembangunan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 6. 2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	ARAH KEBIJAKAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat						
2.	Meningkatkan pengembangan budaya daerah untuk menangkal budaya luar yang negatif						
3.	Meningkatkan kamtrantibum dan pencegahan perkembangan kriminalitas						
4	Mengintensifkan dialog dan keterlibatan masyarakat dalam pengamalan agama serta mendorong praktek-praktek keagamaan						
5	Memasyarakatkan kegiatan pendalaman agama dan nilai-nilai spritual di masyarakat						
6	Mendorong kualitas kebijakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang rasional, teliti dan sistematis (*evidence based policy*)						
7	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data kependudukan						
8	Pengembangan kualitas dan kompetensi SDM penyelenggara layanan publik						

NO	ARAH KEBIJAKAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
9	Pengembangan inovasi dan sistem informasi pelayanan publik						
10	Pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN						
11	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan						
12	Perluasan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat						
13	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan desa sesuai peraturan-perundangan						
14	Manajemen pengelolaan keuangan daerah dan desa berbasis elektronik						
15	Pembinaan perencanaan pembangunan daerah						
16	Manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah yang efektif dan efisien						
17	Pengelolaan barang jasa pemerintah secara terpadu dan terintegrasi sesuai perkembangan peraturan perundangan						
18	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah						
19	Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan yang merata						
20	Pengembangan kompetensi tenaga guru dan administrator pendidikan yang merata dan berkualitas						
21	Inovasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien						

NO	ARAH KEBIJAKAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
22	pengembangan kurikulum berbasis karakteristik sumber daya unggulan daerah						
23	Mempermudah akses pembelajaran dan budaya literasi pelajar dan masyarakat luas						
24	Meningkatkan penyediaan dan kompetensi tenaga kesehatan						
25	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan akses dan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat						
26	Peningkatan layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat						
27	Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS						
28	Meningkatkan pembinaan dan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan daerah						
29	Peningkatan kualitas penduduk						
30	Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan perempuan, pemuda dan olahraga						
31	Optimalisasi peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah/nasional						
32	Meningkatkan nilai tambah produk, penciptaan lapangan kerja dan investasi						
33	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif						

NO	ARAH KEBIJAKAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
36	Meningkatkan pemanfaatan posisi strategis daerah sebagai pusat distribusi barang dan jasa						
37	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi desa						
38	Peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial						
39	Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni						
40	Meningkatkan kompetensi dan akses masyarakat miskin terhadap sumber ekonomi						
41	Meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja						
42	Meningkatkan penyediaan fasilitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan						
43	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum						
44	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak						
45	Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kawasan Perumahan dan permukiman, termasuk kawasan kumuh						
46	Meningkatkan pengurangan sampah						
47	Meningkatkan pengelolaan penanganan sampah						
48	Meningkatkan pengelolaan limbah terpadu						
49	Meningkatkan penyediaan sarana transportasi yang mantap						
50	Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanaan transportasi						

NO	ARAH KEBIJAKAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
51	Meningkatkan manajemen LLAJ						
52	Optimalisasi Penyelenggaraan penataan ruang (melakukan peninjauan kembali RTRW dan penetapan RDTR pada kawasan prioritas)						
53	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertumbuhan wilayah/kawasan strategis						
54	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan bagi kawasan terpencil dan sangat terpencil						
55	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penurunan tutupan lahan						
56	Meningkatkan advokasi dan kampanye kelestarian lingkungan hidup (#saveMeratus)						
57	Meningkatkan pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan						
58	Mapping serta penyediaan dan penyebarluasan informasi kerawanan bencana yang lebih komprehensif dan menyeluruh kepada kepala kelompok rentan risiko bencana						
59	Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada daerah rawan dan risiko terdampak bencana						

6.3 Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah missleading dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan

suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Pengembangan kewilayahan diarahkan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas pelayanan baik pelayanan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat lainnya berdasarkan karakteristik dan perkembangan situasi kondisi sosial dan lingkungan strategis. Pengembangan wilayah diarahkan untuk terbentuknya wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru baik secara pemerintahan maupun ekonomi. Pengembangan kawasan strategis Hulu Sungai Tengah diarahkan sesuai dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kabupaten sosial budaya, dan kawasan strategis kabupaten fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

6.4 Program Pembangunan

Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri, yang mampu merefleksikan tujuan strategis Kepala Daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah merupakan

program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Kepala Daerah terpilih.

Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Kepala Daerah terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah atau kedalam arah kebijakan mapun strategi. Jika janji dari Kepala Daerah terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan maupun strategi.

Program-program pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Misi 1 :

Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.

Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.

Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
8. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
9. Program Aplikasi Informatika
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
12. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13. Program Administrasi Pemerintahan Desa
14. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
16. Program Perekonomian Dan Pembangunan
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Misi 3 :

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia

Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Misi 4 :

Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Penyuluhan Pertanian
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

7. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
10. Program Promosi Penanaman Modal
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
12. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
14. Program Pengembangan UMKM
15. Program Rehabilitasi Sosial
16. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
17. Program Pemberdayaan Sosial
18. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
19. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
20. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
21. Program Penempatan Tenaga Kerja
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Misi 5 :

Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial

Untuk mewujudkan misi tersebut, program-program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
2. Program Penataan Bangunan Gedung
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Kawasan Permukiman

6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
7. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
8. Program Pengelolaan Persampahan
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
11. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
13. Program Penanganan Bencana
14. Program Penanggulangan Bencana
15. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
16. Program Pengembangan Perumahan
17. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Penjabaran janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dari keterkaitan antara janji-janji politik daerah dengan program pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 6. 3. Penjabaran Janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Ke Dalam Program Pembangunan Daerah

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural	Memberikan beasiswa penuh berupa biaya hidup, sarana dan prasarana pendukung belajar bagi anak-anak Tahfidz Al-Qur'an hingga mereka dewasa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatkan alokasi dan pemerataan bantuan keagaamaan kepada pondok pesantren dan madrasah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama di masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatkan alokasi dan pemerataan bantuan honorarium bagi ulama, penceramah keliling dan guru TPA Al-Qur'an	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
	Menguatkan dan meningkatkan eksistensi kebudayaan dengan mendorong berkembangnya kesenian dan budaya yang ada di Hulu Sungai Tengah	Program Pengembangan Kebudayaan
	Mengadakan event kesenian guna mengenali budaya sendiri sebagai bentuk pelestarian budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
	Mendorong pembangunan pusat kebudayaan terpadu di Hulu Sungai Tengah sebagai pusat kebudayaan bagi komunitas lokal untuk menjadi tempat berkumpulnya pegiat dan penikmat seni	Program Pengembangan Kebudayaan
Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional	Menjadikan birokrasi pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai agen perubahan dan angket pembahasan serta dapat menjadi teladan dalam pemberian layanan publik, seperti : - Menciptakan database perizinan terpadu dengan peta spesial yang	Program Pelayanan Penanaman Modal

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	terbuka bagi seluruh warga untuk menghindari sengketa izin dan penerbitan izin yang tumpang tindih.	
	Rotasi, Mutasi dan demosi pegawai dilakukan dengan transparan melalui berbagai pertimbangan yang tercatat dalam system kepegawaian.	Program Kepegawaian Daerah
	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi dengan rasionalisasi jumlah pegawai melalui seleksi penerimaan yang lebih ketat, objektif, terbuka dan penegakan disiplin yang lebih terukur.	Program Kepegawaian Daerah
	Melanjutkan keterlibatan auditor profesional dalam proses penyisiran anggaran untuk meminimalisasi penyalahgunaan dan pemborosan anggaran	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Menyederhanakan proses pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan dengan : - Mengurangi persayaratan yang tidak krusial namun memberatkan	Program Pendaftaran Penduduk

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	- Menggabungkan proses pengurusan beberapa izin dengan penerbitan secara simultan. - Meminimalisir kesulitan warga dalam pengurusan izin dengan menjadikan birokrasi lebih proaktif	Program Pencatatan Sipil
	Menyempurnakan penggunaan Indikator kinerja atau Key Performance Indicators (KPI) dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi, demosi dan penentuan besaran tunjangan kinerja daerah (TKD).	Program Kepegawaian Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia	Meningkatkan kualitas tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan kader posyandu melalui pelatihan rutin dan penguasaan teknologi informasi.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Meningkatkan tunjangan para dokter dan perawat agar dapat menarik minat SDM kedokteran yang terbaik untuk mengabdikan ilmu dan keahliannya di puskesmas dan rumah sakit daerah.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatkan tunjangan kepada guru, perawat, dan kader posyandu.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan aksebilitas fasilitas pelayanan kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Memberikan beasiswa pendidikan bagi putera dan puteri terbaik Hulu Sungai Tengah. .	Program Pengelolaan Pendidikan
	Mengembangkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata	Program Pengelolaan Pendidikan
	Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatakan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit	Program Kepegawaian Daerah
	Melanjutkan rehabilitasi bagunan sekolah-sekolah milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditunjang dengan Fasilitas Pendidikan yang layak sesuai standart Nasional dan berbasis IT	Program Pengelolaan Pendidikan
	Merehabilitasi sarana kesehatan yang ada dan meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit daerah.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Membagun dan revitalisasi GOR untuk setiap cabang olah raga dengan retribusi yang kompetitif atau keijasama dengan pihak ketiga agar pengelola GOR mandiri dan berkualitas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Memberikan edukasi melalui pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat pelaku ekonomi kerakyatan yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan.	Program Penyuluhan Pertanian
	Memberikan bantuan bibit unggul tanaman/temak/ikan, pupuk, obat tanaman, serta sarana pengelolaan (contoh: handtraktor, kolam bioflok, dll) bagi para petani dan peternak.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Memberikan insentif bagi para petani untuk menggunakan mekanisasi pertanian baik pra-panen maupun pasca-panen agar dapat meningkatkan hasil pertanian dan menjaga ketahanan pangan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Memberikan fasilitas dan insentif pada pelaku usaha hortikultura yang ramah lingkungan.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Memberikan bantuan kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang mampu mengembangkan produk hasil tangan/ olahan hasil alam menjadi produk kreatif sehingga berdaya saing tinggi dan menjadi simpul kemajuan di wilayah Kalimantan Selatan.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	Mengembangkan klaster-klaster pedesaan yang memiliki produk ekonomi unggulan yang berdaya saing.	Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Rekontruksi pasar Murakata yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan penghasilan masyarakat HST dengan standar yang berpihak kepada masyarakat.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Memperkuat daya saing perdagangan kecil dengan mendorong pelatihan sertifikasi untuk pedagang kecil, melanjutkan permberian kredit yang terjangkau bagi UMKM yang diintegrasikan dengan lokasi binaan, serta penyediaan lokasi usaha pedangan kecil dilokasi-lokasi yang strategis	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
	Merawat Daerah Irigasi (DI) yang sudah ada dan membangun irigasi sekunder, tersier, dan quarter agar menunjang pertanian masyarakat dengan prinsip mengoptimalkan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Menambah jalan usaha tani.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	Mewujudkan pengembangan pariwisata di Hulu Sungai Tengah khususnya kawasan Gunung Halau-Halau sebagai destinasi pariwisata regional	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial	Meningkatkan ketersediaan air bersih melalui optimalisasi pelayanan PDAM HST.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Menegakkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap perusahaan ekstraktif di Hulu Sungai Tengah, baik yang telah beroperasi maupun yang ingin beroperasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai upaya untuk menjamin kualitas lingkungan yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Misi	Janji-janji Politik	Program Pembangunan
	Mewujudkan Daerah yang berkesinambungan dan ramah lingkungan - Membuat sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan terpadu dari pengangkutan sampah dirumah warga hingga pengiriman sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). - Memberikan insentif untuk pembangunan green building dengan sistem pengelolaan limbah secara mandiri, - Menerapkan regulasi pemberian insentifbagi masyarakat untuk melakukan daur ulang dan pengurangan volume sampah.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Persampahan
	Mendorong pengelolaan IPAL di bangunan pemerintah, swasta dan rumah tangga berbasis komunal (sanitasi masyarakat)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
VISI : Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)								
Misi 1 : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural								
1	Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, budaya dan beragama di masyarakat	1.1	Terwujudnya tata kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya	1.1.1	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya melalui kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Forkopimda serta tokoh masyarakat, agama, adat, dan tokoh pemuda	a.	Meningkatkan wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme di masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
						b.	Meningkatkan pengembangan budaya daerah untuk menangkal budaya luar yang negatif	Program Pengembangan Kebudayaan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
								Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
						c.	Meningkatkan kamtrantibum dan pencegahan perkembangan kriminalitas	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
								Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		1.2	Terjalinnya keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat	1.2.1	Mengoptimalkan peran tokoh agama dalam penyebarluasan pemahaman dan pengamalan agama serta membangkitkan suasana keagamaan di masyarakat	a	Mengintensifkan dialog dan keterlibatan masyarakat dalam pengamalan agama serta mendorong praktek-praktek keagamaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
						b	Memasyarakatkan kegiatan pendalaman agama dan nilai-nilai spritual di masyarakat	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif Dan Profesional								
2	Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	2.1	Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	2.1.1	Optimalisasi pemenuhan dan kualitas pelayanan masyarakat sesuai karakteristik masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis	a	Mendorong kualitas kebijakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang rasional, teliti dan sistematis (evidence based policy)	Program Pendaftaran Penduduk
						b	Pengembangan sarana dan prasarana pelayana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data kependudukan	Program Pencatatan Sipil
						c	Pengembangan kualitas dan kompetensi SDM penyelenggara layanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
						d	Pengembangan inovasi dan sistem informasi pelayanan publik	Program Pelayanan Penanaman Modal

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
				2.1.2	Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan	a	Pengembangan kompetensi dan profesionalisme ASN	Program Kepegawaian Daerah
		2.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	2.2.1	Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, terpadu dan terintegrasi berbasis elektronik	a	Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
						b	Perluasan akses informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				2.2.2	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan desa sesuai peraturan-perundangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			b	Manajemen pengelolaan keuangan daerah dan desa berbasis elektronik	Program Administrasi Pemerintahan Desa
					Program Aplikasi Informatika
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			c	Manajemen pengelolaan aset/barang milik daerah yang efektif dan efisien	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			d.	Pembinaan perencanaan pembangunan daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			e	Pengelolaan barang jasa pemerintah secara terpadu dan terintegrasi sesuai perkembangan peraturan perundangan	Program Perekonomian Dan Pembangunan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
						f	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
								Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia								
3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	3.1.1	Mendorong pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui keterlibatan segenap pemerhati pendidikan	a	Pengembangan infratsruktur sarana dan prasarana pendidikan yang merata	Program Pengelolaan Pendidikan
						b	Pengembangan kompetensi tenaga guru dan administrator pendidikan yang merata dan berkualitas	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
						c	Inovasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
						d	Pengembangan kurikulum berbasis karakteristik sumber daya unggulan daerah	Program Pengembangan Kurikulum
						e.	Mempermudah akses pembelajaran dan budaya literasi pelajar dan masyarakat luas	
		3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	a	Meningkatkan penyediaan dan kompetensi tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
						b	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan akses dan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
						c	Peningkatan layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat	

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
						d	Meningkatkan promosi kesehatan dan PHBS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		3.3	Meningkatnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	3.3.1	Peningkatan kualitas perempuan dan pemuda	a	Meningkatkan pembinaan dan peran serta perempuan dan pemuda dalam pembangunan daerah	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
						b	Peningkatan kualitas penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
						c	Peningkatan sarana dan prasarana pembinaan perempuan, pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
Misi 4 : Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup								
4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	4.1.1	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan serta jasa	a	Optimalisasi peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah/nasional	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
								Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
						b	Meningkatkan nilai tambah produk, penciptaan lapangan kerja dan investasi	Program Penyuluhan Pertanian
								Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
								Program Promosi Penanaman Modal
								Program Penempatan Tenaga Kerja
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
								Program Pengembangan UMKM
				4.1.2	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	a	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
						b	Meningkatkan pemanfaatan posisi strategis daerah sebagai pusat distribusi barang dan jasa	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
						c	Meningkatkan pengembangan potensi ekonomi desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
		4.2	Menurunnya penduduk miskin	4.2.1	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dan infrastruktur dasar	a	Peningkatan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Rehabilitasi Sosial
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
								Program Penanganan Kerawanan Pangan
						b	Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				4.2.2	Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga	a	Meningkatkan kompetensi dan akses masyarakat miskin terhadap sumber ekonomi	Program Pemberdayaan Sosial
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
		4.3	Meningkatnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja	4.3.1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	a	Meningkatkan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
Misi 5 : Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial								
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana	5.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah dan kawasan pertumbuhan/ strategis	5.1.1	Peningkatan penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas	a	Meningkatkan penyediaan fasilitas infrastruktur perkotaan dan perdesaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
								Program Penataan Bangunan Gedung
				5.1.2	Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman	a	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
						b	Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi layak	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
						c	Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Program Kawasan Permukiman

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
						d	Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kawasan Perumahan dan permukiman, termasuk kawasan kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
								Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
				5.1.3	Peningkatan pengelolaan limbah	a	Meningkatkan pengurangan sampah	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
						b	Meningkatkan pengelolaan penanganan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
						c	Meningkatkan pengelolaan limbah terpadu	
				5.1.4	Peningkatan penyediaan dan kehandalan fasilitas	a	Meningkatkan penyediaan sarana transportasi yang mantap	Program Penyelenggaraan Jalan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
			keselamatan dan keamanan transportasi	b	Penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanaan transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				c	Meningkatkan manajemen LLAJ	
		5.1.5	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang	a	Optimalisasi Penyelenggaraan penataan ruang (melakukan peninjauan kembali RTRW dan penetapan RDTR pada kawasan prioritas)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		5.1.6	Peningkatan prasarana dan sarana wilayah pertumbuhan dan kawasan strategis	a	Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertumbuhan wilayah/kawasan strategis	Program Kawasan Permukiman
						Program Pengembangan Perumahan
		5.1.7	Peningkatan konektivitas antar wilayah/desa	a	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan bagi kawasan terpencil dan sangat terpencil	Program Penyelenggaraan Jalan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
		5.2	Meningkatnya pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	5.2.1	Peningkatan pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup	a	meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penurunan tutupan lahan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						b	Meningkatkan advokasi dan kampanye kelestarian lingkungan hidup (#saveMeratus)	
						c	Meningkatkan pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				5.2.2	Mengefektifkan mitigasi bencana untuk meminimalisasi dampak dan kerugian akibat bencana melalui antisipasi risiko dan siaga	a	Mapping serta penyediaan dan penyebarluasan informasi kerawanan bencana yang lebih komprehensif dan menyeluruh kepada kepala kelompok rentan risiko bencana	Program Penanganan Bencana

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM PRIORITAS
					bencana, tanggap dan penanganan bencana secara terpadu dan terintegrasi semua komponen masyarakat dalam dan luar daerah	b	Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada daerah rawan dan risiko terdampak bencana	Program Penanggulangan Bencana
								Program Pengembangan Perumahan

Berikut ini terlampir Tabel yang menyajikan Rekapitulasi Program-Program Prioritas untuk setiap Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut diatas, disertai dengan target kinerja dan perkiraan kerangka pendanaan untuk setiap Program Prioritas tersebut pada setiap tahun selama periode tahun 2021-2026.

Tabel 6. 5. Program Pembangunan Daerah yang merupakan Program Prioritas yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I			**MISI 1 =**																		
			Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural																		
X			**TUJUAN 1 =**																		
			Meningkatkan keharmonisan kehidupan sosial, budaya dan beragama di masyarakat	**Jumlah Kasus Konflik SARA**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			
X X			**SASARAN 1.1 =**																		
			Terwujudnya tata kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya	***Jumlah kasus konflik sosial***	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			
				Angka Kriminalitas	**< 10**	**< 10**		**< 9,5**		**< 9**		**< 8,5**		**< 8**		**< 7,5**		**< 7,5**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0 1	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi perpecahan masyarakat di wilayah kecamatan yang muncul	100%	100%	407.945.600	100%	1.674.889.300	100%	1.750.978.803	100%	1.857.821.910	100%	1.912.269.368	100%	1.974.715.797	100%	9.578.620.779	**KECAMATAN**	
8	0 1	x x	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	704.375.000	100%	729.375.000	100%	754.375.000	100%	779.375.000	100%	804.375.000	100%	829.375.000	100%	4.601.250.000	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
2	2 2	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pengembangan Pelaku Kebudayaan yang dibina	-	85%	336.881.400	85%	659.581.400	88%	700.000.000	90%	750.000.000	95%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	4.021.462.800	**KEBUDAYAAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	01	xx	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Prosentase kesepakatan hasil pertemuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	534.750.000	100%	559.750.000	100%	584.750.000	100%	609.750.000	100%	634.750.000	100%	659.750.000	100%	3.583.500.000	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
1	05	xx	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	3.621.180.000	100%	4.121.180.000	100%	4.621.180.000	100%	5.121.180.000	100%	5.621.180.000	100%	6.121.180.000	100%	29.227.080.000	**TRANTIBUM LINMAS**	
7	01	xx	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	1.136.190.200	100%	1.540.535.000	100%	1.608.100.155	100%	1.679.420.921	100%	1.742.364.134	100%	1.814.923.413	100%	9.521.533.822	**KECAMATAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X			**SASARAN 1.2 =**																		
			Terjalinnya keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat	***Jumlah kasus konflik agama***	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			
4	**0 1**	**x x**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase realisasi kebijakan di Bidang Kesra yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	5.838.436.300	100%	8.979.224.000	100%	9.853.580.000	100%	10.862.741.400	100%	11.835.776.500	100%	12.978.295.845	100%	60.348.054.045	**SEKRETARIAT DAERAH**	
				Persentase kebijakan di bidang pemerintahan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**SEKRETARIAT DAERAH**	
				Persentase peraturan perundangan yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**SEKRETARIAT DAERAH**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I I			**MISI 2 =**																		
			Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional																		
X			**TUJUAN 2 =**																		
			Meningkatkan pemerintahan yang berintegritas, responsif dan profesional	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**50,93**	**52**		**56**		**61**		**63**		**67**		**71**		**71**			
X X			**SASARAN 2.1 =**																		
			Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**80,67**	**81**		**82**		**83**		**84**		**85**		**86**		**86**			
				Indeks Profesionalisme ASN	**42,5**	**48**		**53**		**58**		**62**		**65**		**67**		**67**			
2	**1 2**	**x x**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase penyelesaian dokumen kependudukan tepat waktu	100%	100%	2.004.442.200	100%	2.204.886.120	100%	2.425.374.900	100%	2.704.272.650	100%	2.975.064.000	100%	3.272.570.500	100%	15.586.610.370	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 2	x x	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	100%	100%	590.497.500	100%	781.897.500	100%	808.537.500	100%	837.841.500	100%	870.075.000	100%	905.533.750	100%	4.794.382.750	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
7	0 1	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penerapan pelayanan sesuai Standard	82%	87%	528.498.700	90%	1.560.585.400	92%	1.275.269.714	94%	1.309.537.437	97%	1.355.637.797	100%	1.388.716.601	100%	7.418.245.648	**KECAMATAN**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100%	100%	284.619.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.709.619.000	**PENANAMAN MODAL**	
5	0 3	x x	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks kepuasan masyarakat	-	83	8.976.597.100	85	9.045.000.000	87	9.245.000.000	88	9.750.000.000	89	9.950.000.000	90	10.000.000.000	90	56.966.597.100	**KEPEGAWAIAN**	
				Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	-	83		85		87		88		89		90		90		**KEPEGAWAIAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	X		**SASARAN 2.2 =**																		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	***Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***	**3,10**	**3,25**		**3,50**		**3,75**		**4,00**		**4,25**		**4,35**		**4,35**			
				Nilai AKIP	**66,17**	**68,60**		**71,10**		**73,50**		**75,00**		**77,50**		**80,25**		**80,25**			
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	**WDP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**			
5	**0 1**	**x x**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu	100%	100%	2.052.306.900	100%	1.002.508.000	100%	1.659.208.850	100%	1.827.235.000	100%	1.310.372.460	100%	2.152.369.166	100%	10.004.000.376	**PERENCANAAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		PERENCANAAN	
2	1 6	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	40	50	3.224.922.050	60	3.461.973.100	65	3.808.170.410	70	4.188.987.451	75	4.607.886.196	80	5.068.674.816	80	24.360.614.023	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6	0 1	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentasi PD/obrik yang telah selesai menindak lanjuti temuan / rekomendasi hasil pengawasan	72%	85%	725.275.000	90%	908.500.000	92%	1.007.670.000	95%	1.115.060.000	98%	1.223.100.000	98%	1.353.900.000	98%	6.333.505.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6	0 1	x x	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentasi aturan dan kebijakan di bidang pengawasan	100%	100%	2.427.035.600	100%	2.587.025.000	100%	2.991.390.000	100%	3.358.410.000	100%	3.731.874.000	100%	3.902.086.700	100%	18.997.821.300	INSPEKTORAT DAERAH	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase PD yang menindaklanjuti Rekomendasi hasil Pendampingan/ Asistensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**INSPEKTORAT DAERAH**	
7	0 1	x x	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa tertib administrasi dan pembangunan	89%	90%	666.048.900	92%	1.960.787.000	94%	2.072.121.086	96%	2.174.251.903	98%	2.262.269.066	100%	2.365.997.013	100%	11.501.474.967	**KECAMATAN**	
2	1 3	x x	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang administrasinya lengkap	50%	53%	2.306.048.900	56%	2.885.948.800	59%	2.607.413.150	62%	2.676.404.465	65%	2.765.894.912	68%	2.831.144.403	68%	16.072.854.630	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	1 6	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	38%	38%	2.357.491.000	48%	2.818.756.288	58%	3.100.631.917	68%	3.410.695.108	78%	3.751.764.619	88%	4.126.941.081	88%	19.566.280.014	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	0 2	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	209.513.159.057	100%	221.027.000.000	100%	243.129.700.000	100%	267.442.670.000	100%	294.186.937.000	100%	323.605.630.700	100%	1.558.905.096.757	**KEUANGAN**	
				Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%		70%		72%		74%		76%		80%		80%		**KEUANGAN**	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**KEUANGAN**	
5	0 2	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Keakuratan Data Aset/Barang Milik Daerah	80%	95%	792.862.500	100%	1.746.000.000	100%	1.920.600.000	100%	2.112.660.000	100%	2.323.926.000	100%	2.556.318.600	100%	11.452.367.100	**KEUANGAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	80%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		KEUANGAN	
5	01	xx	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD)	100%	100%	1.762.964.200	100%	1.255.615.130	100%	1.203.676.643	100%	1.441.544.307	100%	1.695.698.738	100%	1.992.768.612	100%	9.352.267.630	PERENCANAAN	
4	01	xx	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	774.574.300	100%	3.338.509.000	100%	3.395.359.000	100%	3.546.895.000	100%	3.386.205.000	100%	3.693.824.500	100%	18.135.366.800	SEKRETARIAT DAERAH	
				Tingkat Kematangan UKPBJ	4/9	5/9		6/9		7/9		8/9		9/9		9/9		9/9		SEKRETARIAT DAERAH	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	xx	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase realisasi kebijakan di Bidang Kesra yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	5.838.436.300	100%	8.979.224.000	100%	9.853.580.000	100%	10.862.741.400	100%	11.835.776.500	100%	12.978.295.845	100%	60.348.054.045	SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase kebijakan di bidang pemerintahan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase peraturan perundangan yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	05	xx	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase kebutuhan hasil litbang yang dihasilkan	-	25%	805.892.700	55%	1.000.000.000	78%	1.150.000.000	85%	680.000.000	90%	330.000.000	100%	630.000.000	100%	4.595.892.700	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	
III			**MISI 3 =**																		
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia																		
X			**TUJUAN 3 =**																		
			Meningkatkan Kualitas dan Sumber Daya Manusia	**Indeks Pembangunan Manusia**	**68,84**	**69,40**		**70,00**		**70,60**		**71,20**		**71,80**		**72,50**		**72,50**			
XX			**SASARAN 3.1 =**																		
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	***Indeks Pendidikan***	**60,55**	**61,78**		**62**		**63**		**64**		**65**		**67**		**67**			
				Usia Harapan Sekolah	**12,20**	**12,32**		**12,44**		**12,56**		**12,68**		**12,80**		**12,92**		**12,92**			
				Rata-Rata Lama Sekolah	**8,00**	**8,13**		**8,26**		**8,39**		**8,52**		**8,65**		**8,78**		**8,78**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	01	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	59.916.398.700	83,3	124.633.534.200	84,3	137.683.159.200	85,3	145.080.314.200	86,3	157.893.752.250	87,4	170.547.860.252	87,4	795.755.018.802	**PENDIDIKAN**	
1	01	xx	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan	-	-	296.730.300	-	471.546.100	50	471.546.100	65	471.546.100	80	471.546.100	95	471.546.100	95	2.654.460.800	**PENDIDIKAN**	
1	01	xx	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	-	75%	-	80%	1.473.099.180	85%	1.765.977.380	90%	2.035.347.987	95%	2.344.318.785	100%	2.698.968.953	100%	10.317.712.285	**PENDIDIKAN**	
				Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	80%		85%		87%		90%		93%		95%		95%		**PENDIDIKAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X			**SASARAN 3.2 =**																		
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	***Indeks Kesehatan***	**76,68**	**77,16**		**77,67**		**78,33**		**78,83**		**79,50**		**80,00**		**80,00**			
				Usia Harapan Hidup	**66,01**	**66,51**		**66,71**		**67,01**		**67,21**		**67,51**		**67,71**		**67,71**			
1	**0 2**	**x x**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Prosentasi Faskes dengan SDM sesuai standart	78%	80%	6.818.979.700	85%	7.223.979.700	90%	7.678.979.700	95%	7.678.979.700	100%	7.678.979.700	100%	7.678.979.700	100%	44.758.878.200	**KESEHATAN**	
1	**0 2**	**x x**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	118.546.234.044	100%	124.308.250.000	100%	124.424.162.500	100%	129.242.620.625	100%	136.311.401.650	100%	140.928.371.725	100%	773.761.040.544	**KESEHATAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 2	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)	65%	65%	702.145.000	66%	922.359.500	67%	1.014.595.450	68%	1.116.054.995	69%	1.227.660.495	70%	1.350.426.544	70%	6.333.241.983	**KESEHATAN**	
X X			**SASARAN 3.3 =**																		
			Meningkatnya kemandirian dan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan	***Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPG)***	**96,5**	**97,5**		**97,7**		**97,9**		**98,1**		**98,3**		**98,5**		**98,5**			
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	**-**	**40**		**41**		**42**		**43**		**44**		**45**		**45**			
2	0 8	x x	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentasi SKPD yang melaksanakan PUG	13,90%	28%	229.995.300	42%	246.556.144	56%	264.844.900	69%	284.384.000	83%	304.290.850	100%	325.591.205	100%	1.655.662.399	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	14	xx	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase peningkatan peserta KB aktif MKJP	7,09%	8,91%	2.995.550.000	10,73%	3.015.550.000	12,15%	3.035.550.000	13,38%	3.050.550.000	14,72%	3.080.550.000	15,95%	3.110.550.000	15,95%	18.288.300.000	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
2	19	xx	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	59%	67%	819.244.500	73%	1.261.290.300	80%	1.510.409.500	82%	1.166.609.500	86%	1.098.409.500	96%	1.098.409.500	96%	6.954.372.800	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
2	19	xx	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase peningkatan aktifitas olahraga	33%	33%	2.365.341.700	57%	12.875.706.750	68%	12.453.477.425	79%	6.033.025.168	89%	6.102.527.684	100%	6.162.180.453	100%	45.992.259.179	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
IV			**MISI 4 =**																		
			Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup																

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X			**TUJUAN 4 =**																	
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	**PDRB per kapita (Rp juta)**	**27,267**	**28,000**		**29,000**		**30,000**		**31,250**		**32,500**		**34,000**		**34,000**			
				Indeks Gini	**0,300**	**0,298**		**0,296**		**0,294**		**0,292**		**0,290**		**0,288**		**0,288**			
X X			**SASARAN 4.1 =**																	
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	***Laju Pertumbuhan ekonomi***	**-1,01**	**2 - 3**		**3 - 3,5**		**4 - 5,5**		**5 - 5,5**		**5,5 - 6**		**6 - 6,5**		**6 - 6,5**			
				Laju Pertumbuhan NTB Pertanian	**-0,27**	**1 - 2**		**2 - 3**		**3 - 4**		**4 - 5**		**5,5 - 6**		**6 - 6,5**		**6 - 6,5**			
				Laju Pertumbuhan NTB Industri Pengolahan	**-3,53**	**1 - 2**		**2 - 3**		**3 - 4**		**4 - 5**		**5,5 - 6**		**6,5 - 7**		**6,5 - 7**			
				Laju Pertumbuhan NTB Perdagangan	**-3,43**	**1 - 2**		**3 - 4**		**5 - 6**		**6,5 - 7**		**7,5 - 8**		**8 - 8,5**		**8 - 8,5**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Laju Pertumbuhan NTB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-2,65	1 - 2		3 - 4		5 - 6		6,5 - 7		7,5 - 8		8 - 8,5		8 - 8,5			
3	2 5	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	11%	11%	1.784.864.400	17%	1.963.350.840	23%	2.151.940.000	29%	2.358.613.800	35%	2.585.877.000	47%	2.835.859.600	47%	13.680.505.640	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3	2 7	x x	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.112.768.400	2.76	9.965.351.500	3.36	10.111.238.900	3.96	9.392.172.700	4.56	9.655.708.450	5.16	9.381.252.200	5.16	50.618.492.150	**PERTANIAN**	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15		0.25		0.42		0.50		0.58		0.66		0.66		**PERTANIAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13		14		15		16		17		18		18		PERTANIAN	
3	27	xx	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	1.301.000.000	2.3	1.245.000.000	2.6	750.000.000	2.9	675.000.000	3.2	675.000.000	3.5	650.000.000	3.5	5.296.000.000	PERTANIAN	
				Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30		2.41		2.47		2.49		2.50		2.90		2.90		PERTANIAN	
				Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3		4		5		6		7		8		8		PERTANIAN	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100%	100%	36.520.188.713	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	120.020.188.713	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
3	2 7	x x	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	30	32	1.949.614.000	34	2.193.050.000	36	812.750.000	38	912.750.000	40	1.012.750.000	42	1.112.750.000	42	7.993.664.000	**PERTANIAN**	
				Persentase Skor Kinerja Baik Penyuluhan Pertanian	75	78		80		82		85		87		90		90		**PERTANIAN**	
3	2 5	x x	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Kelompok Pengolahan yang menghasilkan Produk Perikanan	40%	40%	199.921.700	40%	219.913.870	44%	241.905.257	44%	266.095.783	48%	292.705.361	48%	321.975.897	48%	1.542.517.868	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3 1	x x	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	2.854.394.400	49,08%	3.330.414.040	53,72%	3.363.455.444	58,36%	3.399.800.988	63,00%	3.349.781.087	67,64%	3.483.759.196	67,64%	19.781.605.155	**PERINDUSTRIAN**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan LKPM	10%	10%	14.020.000	10%	20.000.000	10%	30.000.000	10%	30.000.000	10%	190.000.000	10%	50.000.000	10%	334.020.000	**PENANAMAN MODAL**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	100%	419.607.500	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	1.019.607.500	**PENANAMAN MODAL**	
2	0 7	x x	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	84%	85%	152.351.000	85%	397.351.000	85%	397.351.000	90%	397.351.000	90%	407.351.000	90%	407.351.000	90%	2.159.106.000	**TENAGA KERJA**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 7	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	10%	12%	244.518.260	14%	268.970.086	16%	295.867.095	18%	325.453.804	20%	357.999.184	22%	393.799.103	22%	1.886.607.532	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
3	2 6	x x	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Wisata	16,70%	33,30%	264.012.000	43,30%	3.775.000.000	50,00%	4.530.000.000	56,70%	5.350.000.000	66,70%	1.300.000.000	83,30%	1.400.000.000	83,30%	16.619.012.000	**PARIWISATA**	
3	2 6	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan SDM dan Ekraf yang berkompeten	33%	42%	24.700.000	46%	421.200.000	50%	421.200.000	58%	421.200.000	71%	421.200.000	100%	421.200.000	100%	2.130.700.000	**PARIWISATA**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30	xx	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar Sehat	38,46%	46,15%	157.980.000	53,85%	5.104.995.000	61,54%	5.115.494.500	69,23%	5.127.043.950	76,92%	5.139.748.345	92,31%	5.153.723.180	92,31%	25.798.984.975	**PERDAGANGAN**	
2	13	xx	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase kerjasama desa yang aktif	0%	0%	36.606.400	20%	550.000.000	40%	690.000.000	60%	838.000.000	80%	705.600.000	100%	1.110.720.000	100%	3.930.926.400	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	17	xx	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase pelaku usaha mikro yang berdaya saing	2,50%	3,00%	454.105.340	3,50%	499.515.874	4,00%	549.467.461	4,50%	604.414.208	5,00%	664.855.628	5,50%	731.341.191	5,50%	3.503.699.702	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
XX			**SASARAN 4.2 =**																		
			Menurunnya penduduk miskin	***Angka Kemiskinan***	**5,64**	**5,5**		**5,3**		**5,1**		**4,9**		**4,7**		**4,5**		**4,5**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 6	x x	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan	80%	85%	4.621.255.000	87%	5.496.013.000	89%	6.405.181.000	91%	7.339.351.000	93%	8.248.519.000	95%	9.152.203.000	95%	41.262.522.000	**SOSIAL**	
1	0 6	x x	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	85%	90%	659.564.200	92%	682.881.200	95%	894.180.000	97%	962.681.000	100%	1.031.181.000	100%	1.234.681.000	100%	5.465.168.400	**SOSIAL**	
2	0 9	x x	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Daerah Rawan Pangan	7%	5,9%	296.929.400	5,3%	326.622.340	4,1%	359.284.574	3,6%	395.213.031	3,0%	434.734.335	3,0%	478.207.768	3,0%	2.290.991.448	**PANGAN**	
1	0 4	x x	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya diluar kawasan kumuh	46,83%	57,09%	7.000.000.000	61,01%	9.100.000.000	64,93%	9.100.000.000	68,85%	9.100.000.000	72,27%	9.100.000.000	76,69%	9.100.000.000	76,69%	52.500.000.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 6	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS Pelembagaan yang berperan aktif dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	2.196.170.000	100%	2.486.107.000	100%	2.901.410.000	100%	3.358.092.000	100%	3.913.911.000	100%	3.819.410.000	100%	18.675.100.000	**SOSIAL**	
2	1 4	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase kelompok masyarakat yang aktif berperan terhadap ketahanan keluarga	100%	100%	254.862.800	100%	274.826.800	100%	284.826.800	100%	299.826.800	100%	314.826.800	100%	324.826.800	100%	1.753.996.800	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
X X			**SASARAN 4.3 =**																		
			Meningkatnya produktivitas dan kemandirian tenaga kerja	***Angka Pengangguran***	**3,96**	**3,8**		**3,7**		**3,6**		**3,5**		**3,4**		**3,3**		**3,3**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0 7	x x	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan	-	4%	133.436.000	12%	675.978.600	12%	705.978.600	12%	711.978.600	12%	625.958.600	12%	666.978.600	12%	3.520.309.000	**TENAGA KERJA**	
V			**MISI 5 =**																		
			Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial																		
X			**TUJUAN 5 =**																		
			Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah, pelestarian lingkungan dan ketahanan bencana	**Indeks Infrastruktur Wikayah**	**-**	**55**		**56**		**57**		**58**		**59**		**60**		**60**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X X			**SASARAN 5.1 =**																		
			Meningkatnya infrastruktur wilayah dan kawasan pertumbuhan/ strategis	***Cakupan pembangunan infrastruktur dasar***	**85,71**	**88,54**		**90,25**		**92,75**		**95**		**97**		**100**		**100**			
				% Infrastruktur Kawasan Pertumbuhan	**-**	**0**		**10**		**20**		**40**		**60**		**75**		**75**			
1	**0 3**	**x x**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase berkurangnya luas genangan	57,78%	57,78%	750.000.000	58,33%	8.600.000.000	59,44%	5.280.000.000	63,89%	5.941.000.000	64,44%	5.245.000.000	65,56%	5.300.000.000	65,56%	31.116.000.000	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	03	xx	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Jumlah Gedung Negara dan Prasarana Publik yang sesuai standar teknis	2,78%	2,78%	110.129.500	5,56%	10.194.100.000	8,33%	10.000.000.000	11,11%	6.645.600.000	13,89%	7.547.400.000	16,67%	6.645.600.000	16,67%	41.142.829.500	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	03	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	73,14%	74,55%	10.873.314.728	75,96%	5.591.276.800	76.98%	5.721.000.000	78,00%	4.100.000.000	79,02%	4.100.000.000	80,04%	4.100.000.000	80,04%	34.485.591.528	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	03	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	2.220.743.950	61,79%	2.310.000.000	62,15%	2.310.000.000	62,51%	2.310.000.000	62,87%	2.310.000.000	63,23%	2.310.000.000	63,23%	13.770.743.950	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04	xx	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan pada tahun berjalan	0%	100%	3.872.500.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	52.021.740.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1	04	xx	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase PSU (jalan dan drainase) yang layak di kawasan perumahan	71,22%	72,36%	10.458.702.000	75,34%	13.203.422.000	78,32%	15.603.422.000	81,30%	15.603.422.000	84,28%	15.603.422.000	87,26%	15.603.422.000	87,26%	86.075.812.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1	04	xx	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya diluar kawasan kumuh	46,83%	57,09%	7.000.000.000	61,01%	9.100.000.000	64,93%	9.100.000.000	68,85%	9.100.000.000	72,27%	9.100.000.000	76,69%	9.100.000.000	76,69%	52.500.000.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 1	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Cakupan Area Pelayan persampahan pada Wilayah Pelayanan	78,00%	79,52%	10.520.306.100	80,27%	10.429.144.490	81,39%	12.844.887.886	83,25%	13.552.123.747	85,46%	15.384.208.354	88,03%	15.606.132.256	88,03%	78.336.802.833	**LINGKUNGAN HIDUP**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Prosentase panjang Jalan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang)	76,42%	76,76%	49.831.187.170	77,11%	60.381.732.500	77,46%	61.382.682.500	77,81%	190.280.137.500	78,16%	190.452.182.500	78,51%	60.029.732.500	78,51%	612.357.654.670	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
2	1 5	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Volume Kapasitas LLAJ	0,352	0,350	5.114.732.000	0,340	10.864.050.000	0,330	7.079.050.000	0,320	7.606.550.000	0,310	7.868.550.000	0,300	8.296.050.000	0,300	46.828.982.000	**PERHUBUNGAN**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 3	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	45,26%	45,28%	836.550.000	45,30%	838.677.500	45,32%	885.611.375	45,34%	853.391.944	45,36%	1.122.061.541	45,38%	1.041.664.618	45,38%	5.577.956.978	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase prasarana dan sarana persampahan yang dapat dipenuhi sesuai persyaratan teknis	65,45%	65,45%	-	67,80%	4.175.000.000	70,68%	13.425.000.000	73,04%	3.575.000.000	75,39%	3.575.000.000	77,75%	3.575.000.000	77,75%	28.325.000.000	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
X X			**SASARAN 5.2 =**																		
			Meningkatnya pelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***	**67,65**	**63,9**		**64,37**		**64,78**		**65,16**		**65,52**		**65,80**		**65,80**			
				Indeks Resiko Bencana Daerah	**140,40**	**140,40**		**140,35**		**140,30**		**140,20**		**140,10**		**140,00**		**140,00**			

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 1	x x	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	1.225.000.000	71%	1.420.000.000	72%	1.615.000.000	73%	1.810.000.000	74%	2.005.000.000	75%	2.200.000.000	75%	10.275.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1 1	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Luasan RTH Kabupaten yang terkelola dengan baik	77%	80%	200.000.000	85%	1.000.000.000	88%	1.300.000.000	92%	1.350.000.000	96%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	4.700.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
1	0 6	x x	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase orang yang mendapat penanganan bencana alam dan sosial	100%	100%	693.815.000	100%	18.583.025.000	100%	18.742.000.000	100%	18.930.250.000	100%	19.093.500.000	100%	19.270.500.000	100%	95.313.090.000	**SOSIAL**	
1	0 5	x x	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	0%	0%	-	100%	3.393.970.980	100%	2.063.523.060	100%	2.269.875.766	100%	2.496.863.342	100%	2.746.549.243	100%	12.970.782.391	**TRANTIBUM LINMAS**	

Kode			Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 4	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase pembangunan rumah yang layak bagi korban bencana	0%	100%	17.276.125.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	92.451.250.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
				Persentase rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
				Persentase pembangunan rumah relokasi program	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VII ini memuat kerangka pendanaan dan seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan. optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Kerangka pendanaan memuat data yang sama dengan kerangka pendanaan pada Bab III RPJMD ini. Kapasitas riil keuangan daerah digunakan untuk membiayai belanja di luar belanja wajib dan mengikat dalam bentuk program perangkat daerah. Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

7.1. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2021 -2026 berasal dari beberapa sumber pendapatan yaitu Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada tahun 2021 - 2026 diproyeksikan bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari pendapatan dana transfer umum dan transfer khusus. Untuk transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk sementara baru diproyeksikan berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak serta bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan dari pendapatan Hibah baik hibah dari pemerintah pusat, swasta maupun luar negeri.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah maka dilakukan strategi berupa optimalisasi seluruh sumber-sumber pendapatan tersebut baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya. Arah Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah berbasis elektronik /digitalisasi.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan sistem dan prasarana dan sarana pemungutan Pajak dan retribusi.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola pendapatan daerah.
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.

8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana transfer yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 5 tahun ke depan (Tahun 2021-2026), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. 1. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Pendapatan Daerah**	**1,153,725,023,275.00**	**1,138,041,306,915.00**	**1,173,401,652,310.00**	**1,208,830,684,764.00**	**1,244,330,227,937.00**	**1,279,902,159,580.00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**135,231,720,597.00**	**128,930,087,915.00**	**131,790,433,310.00**	**134,719,465,764.00**	**137,719,008,937.00**	**140,790,940,580.00**
1.1.1	Pajak Daerah	12,665,452,039.00	13,172,070,120.00	13,698,952,924.00	14,246,911,041.00	14,816,787,482.00	15,409,458,981.00
1.1.2	Retribusi Daerah	9,879,329,225.00	10,126,312,455.00	10,379,470,266.00	10,638,957,022.00	10,904,930,947.00	11,177,554,220.00
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,841,522,022.00	3,232,932,735.00	3,265,262,063.00	3,297,914,683.00	3,330,893,830.00	3,364,202,768.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107,845,417,311.00	102,398,772,605.00	104,446,748,057.00	106,535,683,018.00	108,666,396,678.00	110,839,724,611.00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**989,357,486,916.00**	**1,009,111,219,000.00**	**1,041,611,219,000.00**	**1,074,111,219,000.00**	**1,106,611,219,000.00**	**1,139,111,219,000.00**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**908,750,225,000.00**	**933,750,225,000.00**	**958,750,225,000.00**	**983,750,225,000.00**	**1,008,750,225,000.00**	**1,033,750,225,000.00**
1.2.2	**Transfer Antar Daerah**	**80,607,261,916.00**	**75,360,994,000.00**	**82,860,994,000.00**	**90,360,994,000.00**	**97,860,994,000.00**	**105,360,994,000.00**
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**29,135,815,762.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.1	Hibah	29,135,815,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Dana Darurat		-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

Tabel 7. 2. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**134,668,625,473.00**	**64,809,008,461.00**	**66,997,725,243.00**	**69,392,124,388.79**	**72,016,525,220.00**	**74,898,410,246.36**
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	134,668,625,473.00	64,809,008,461.00	66,997,725,243.00	69,392,124,388.79	72,016,525,220.00	74,898,410,246.36
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	-
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
8	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
10	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
11	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	-
A-B	**JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO**	**134,668,625,473.00**	**64,809,008,461.41**	**66,997,725,243.68**	**69,392,124,388.79**	**72,016,525,220.86**	**74,898,410,246.36**

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas Rill Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7. 3. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

Kode			Kapasitas Rill / Belanja	Proyeksi						Ket
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
			KAPASITAS RIIL KEUANGAN	**365,860,263,999**	**439,119,294,205**	**460,125,180,548**	**480,796,493,465**	**501,134,707,066**	**521,143,438,190**	
5			**BELANJA DAERAH**	**1,293,925,666,611.00**	**1,202,850,315,376.00**	**1,290,399,377,552.00**	**1,278,222,809,152.00**	**1,316,346,753,157.00**	**1,354,800,569,824.00**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**957,850,373,313.00**	**876,805,918,491.00**	**905,744,893,916.00**	**935,723,413,815.00**	**966,780,109,602.00**	**998,955,084,190.00**	
5	**1**	**1**	Belanja Pegawai	572,590,737,537.00	526,783,478,534.00	547,854,817,675.00	569,769,010,382.00	592,559,770,797.00	616,262,161,629.00	
5	**1**	**2**	Belanja Barang dan Jasa	349,942,647,212.00	314,705,451,393.00	322,573,087,677.00	330,637,414,869.00	338,903,350,241.00	347,375,933,997.00	
5	**1**	**3**	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
5	**1**	**4**	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	
5	**1**	**5**	Belanja Hibah	28,617,258,564.00	28,617,258,564.00	28,617,258,564.00	28,617,258,564.00	28,617,258,564.00	28,617,258,564.00	
5	**1**	**6**	Belanja Bantuan Sosial	6,699,730,000.00	6,699,730,000.00	6,699,730,000.00	6,699,730,000.00	6,699,730,000.00	6,699,730,000.00	
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**129,801,841,321.00**	**116,983,001,028.00**	**190,515,083,717.00**	**148,279,250,931.00**	**155,262,914,113.00**	**161,455,226,714.00**	
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14,180,345,000.00**	**20,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**192,093,106,977.00**	**189,061,395,857.00**	**189,139,399,919.00**	**189,220,144,406.00**	**189,303,729,442.00**	**189,390,258,920.00**	
5	**4**	**1**	Belanja Bagi Hasil	2,254,478,127.00	2,329,838,257.00	2,407,842,319.00	2,488,586,806.00	2,572,171,842.00	2,658,701,320.00	
5	**4**	**2**	Belanja Bantuan Keuangan	189,838,628,850.00	186,731,557,600.00	186,731,557,600.00	186,731,557,600.00	186,731,557,600.00	186,731,557,600.00	

Sumber : TAPD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2021

Kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah yang dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu yang kemudian digambarkan/dipetakan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dan kenaikan dalam rentang 5 tahun tersebut. Sebagaimana terlihat pada tabel, pada tahun 2016 kapasitas fiskal daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk kategori tinggi. Namun pada tahun-tahun selanjutnya menurun pada kategori sedang dan rendah dan kemudian naik kembali menjadi sedang.

Tabel 7. 4. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	Indeks KFD	Kategori KFD *)
2016	1,160	Tinggi
2017	0,740	Sedang
2018	0,752	Rendah
2019	0,691	Rendah
2020	0,754	Sedang

*) Tahun 2018 terjadi perubahan rentang indeks kategori KFD

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2020

Menurunnya tingkatan kategori tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melaksanakan pembangunan masih rendah. Oleh karena itu perlu ada strategi pendanaan pembangunan yang tidak bergantung pada APBD khususnya untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur yang memiliki *multiplier effect* yang paling besar, yang berdampak besar pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target RPJMD. Strategi pembiayaan pembangunan tanpa APBD dilakukan melalui kerjasama pemerintah dengan swasta atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau juga

dikenal dengan *Public Private Partnership (PPP).* Strategi lainnya dilakukan melalui penggunaan dana sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR).* Alternatif strategi lainnya adalah dengan menghimpun dana-dana masyarakat (dana gotong royong) untuk membiayai pembangunan-pembangunan infrastruktur publik masyarakat. Dengan strategi-strategi pendanaan pembangunan yang tidak bergantung pada APBD tersebut di atas dapat mempercepat pencapaian pembangunan, serta mengurangi ketergantungan pembangunan pada APBD. Apalagi semakin tahun kebutuhan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program perangkat daerah semakin tinggi, sementara proyeksi pendanaan APBD cenderung stagnan.

7.2. Program Perangkat Daerah

Suatu program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam program prioritas yang pada dasarnya dijabarkan dari strategi yang telah dirumuskan. Berdasarkan arah kebijakan umum pada masing-masing perspektif dan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan maka dirumuskan berbagai jenis program terkait.

Program Perangkat Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program Perangkat Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 - 2026 beserta kebutuhan pendanaannya. Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021 - 2026, maka untuk memenuhi keperluan pendanaan pembangunan program-program perangkat daerah tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN baik berupa hibah maupun dana

dekonsentrasi. Pendanaan pembangunan juga diharapkan dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah daerah lainnya melalui hibah. Selain itu perlu juga dilakukan penggalian potensi pendanaan dari pihak swasta maupun masyarakat atau luar negeri baik dalam bentuk kerjasama pemerintah - swasta maupun murni swasta serta masyarakat. Strategi pendanaan pembangunan tersebut juga bisa dilakukan dalam rangka untuk memperbesar pencapaian target RPJMD.

Program-program Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 beserta kebutuhan pendanaannya.seperti pada tabel berikut.

Tabel 7. 5. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1			*URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR*																		
1	01		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																		
1	01	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	59.916.398.700	83,3	124.633.534.200	84,3	137.683.159.200	85,3	145.080.314.200	86,3	157.893.752.250	87,4	170.547.860.252	87,4	795.755.018.802	**PENDIDIKAN**	
1	01	xx	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan	-	-	296.730.300	-	471.546.100	50	471.546.100	65	471.546.100	80	471.546.100	95	471.546.100	95	2.654.460.800	**PENDIDIKAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 1	x x	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten	-	75%	-	80%	1.473.099.180	85%	1.765.977.380	90%	2.035.347.987	95%	2.344.318.785	100%	2.698.968.953	100%	10.317.712.285	**PENDIDIKAN**	
				Persentase Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	80%		85%		87%		90%		93%		95%		95%		**PENDIDIKAN**	
1	0 2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																		
1	0 2	x x	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Prosentasi Faskes dengan SDM sesuai standart	78%	80%	6.818.979.700	85%	7.223.979.700	90%	7.678.979.700	95%	7.678.979.700	100%	7.678.979.700	100%	7.678.979.700	100%	44.758.878.200	**KESEHATAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 2	x x	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	118.546.234.044	100%	124.308.250.000	100%	124.424.162.500	100%	129.242.620.625	100%	136.311.401.650	100%	140.928.371.725	100%	773.761.040.544	**KESEHATAN**	
1	0 2	x x	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Prosentasi SDM faskes yang kompeten/profesional	100%	100%	-	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	685.000.000	**KESEHATAN**	
1	0 2	x x	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	69.302.656.000	74%	68.994.919.510	76%	74.346.160.081	78%	79.294.382.103	80%	81.938.030.110	82%	84.766.392.753	82%	458.642.540.557	**KESEHATAN**	
				AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH		350/100.000 KH 13/1.000 KH		350/100.000 KH 13/1.000 KH		270/100.000 KH 11/1.000 KH		230/100.000 KH 10/1.000 KH		200/100.000 KH 9/1.000 KH		200/100.000 KH 9/1.000 KH		**KESEHATAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%		7,5%		7,3%		7,0%		6,5%		6%		6%		KESEHATAN	
				Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%		56%		57%		58%		59%		60%		60%		KESEHATAN	
				Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		KESEHATAN	
1	0 2	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)	65%	65%	702.145.000	66%	922.359.500	67%	1.014.595.450	68%	1.116.054.995	69%	1.227.660.495	70%	1.350.426.544	70%	6.333.241.983	KESEHATAN	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	02	xx	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Prosentasi ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sesuai standar	65%	70%	280.951.000	75%	370.195.000	80%	386.285.000	85%	404.525.000	90%	423.130.000	95%	428.130.000	95%	2.293.216.000	**KESEHATAN**	
1	03		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																		
1	03	xx	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Prosentase panjang Jalan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang)	76,42%	76,76%	49.831.187.170	77,11%	60.381.732.500	77,46%	61.382.682.500	77,81%	190.280.137.500	78,16%	190.452.182.500	78,51%	60.029.732.500	78,51%	612.357.654.670	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	03	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100%	100%	36.520.188.713	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	16.700.000.000	100%	120.020.188.713	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 3	x x	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Jumlah Gedung Negara dan Prasarana Publik yang sesuai standar teknis	2,78%	2,78%	110.129.500	5,56%	10.194.100.000	8,33%	10.000.000.000	11,11%	6.645.600.000	13,89%	7.547.400.000	16,67%	6.645.600.000	16,67%	41.142.829.500	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	45,26%	45,28%	836.550.000	45,30%	838.677.500	45,32%	885.611.375	45,34%	853.391.944	45,36%	1.122.061.541	45,38%	1.041.664.618	45,38%	5.577.956.978	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	73,14%	74,55%	10.873.314.728	75,96%	5.591.276.800	76.98%	5.721.000.000	78,00%	4.100.000.000	79,02%	4.100.000.000	80,04%	4.100.000.000	80,04%	34.485.591.528	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	2.220.743.950	61,79%	2.310.000.000	62,15%	2.310.000.000	62,51%	2.310.000.000	62,87%	2.310.000.000	63,23%	2.310.000.000	63,23%	13.770.743.950	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase berkurangnya luas genangan	57,78%	57,78%	750.000.000	58,33%	8.600.000.000	59,44%	5.280.000.000	63,89%	5.941.000.000	64,44%	5.245.000.000	65,56%	5.300.000.000	65,56%	31.116.000.000	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Prosentase pelaku jasa usaha konstruksi yang kompeten	-	30%	416.840.000	30%	331.840.000	30%	331.840.000	30%	331.840.000	35%	498.860.000	35%	498.860.000	35%	2.410.080.000	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Persentase Luasan RTH terhadap Persyaratan Peraturan Perundangan	10,70%	10,70%	110.129.500	10,70%	3.194.100.000	10,80%	200.000.000	10,90%	6.645.600.000	11,01%	7.547.400.000	11,11%	6.645.600.000	11,11%	24.342.829.500	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1	0 3	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Persentase prasarana dan sarana persampahan yang dapat dipenuhi sesuai persyaratan teknis	65,45%	65,45%	-	67,80%	4.175.000.000	70,68%	13.425.000.000	73,04%	3.575.000.000	75,39%	3.575.000.000	77,75%	3.575.000.000	77,75%	28.325.000.000	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
1	04	xx	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pembangunan rumah yang layak bagi korban bencana	0%	100%	17.276.125.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	15.035.025.000	100%	92.451.250.000	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Persentase pembangunan rumah relokasi program	0%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	xx	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan pada tahun berjalan	0%	100%	3.872.500.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	9.629.848.000	100%	52.021.740.000	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 4	x x	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase RTLH yang ditingkatkan kualitasnya diluar kawasan kumuh	46,83%	57,09%	7.000.000.000	61,01%	9.100.000.000	64,93%	9.100.000.000	68,85%	9.100.000.000	72,27%	9.100.000.000	76,69%	9.100.000.000	76,69%	52.500.000.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1	0 4	x x	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase PSU (jalan dan drainase) yang layak di kawasan perumahan	71,22%	72,36%	10.458.702.000	75,34%	13.203.422.000	78,32%	15.603.422.000	81,30%	15.603.422.000	84,28%	15.603.422.000	87,26%	15.603.422.000	87,26%	86.075.812.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1	0 4	x x	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase Pengembang yang bersertifikasi	100%	100%	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
1	05	xx	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	0%	0%	-	100%	3.393.970.980	100%	2.063.523.060	100%	2.269.875.766	100%	2.496.863.342	100%	2.746.549.243	100%	12.970.782.391	**TRANTIBUMLINMAS**	
1	05	xx	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100%	100%	3.621.180.000	100%	4.121.180.000	100%	4.621.180.000	100%	5.121.180.000	100%	5.621.180.000	100%	6.121.180.000	100%	29.227.080.000	**TRANTIBUMLINMAS**	
1	05	xx	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	1.188.931.600	100%	1.688.931.600	100%	2.188.931.600	100%	2.688.931.600	100%	3.188.931.600	100%	3.688.931.600	100%	14.633.589.600	**TRANTIBUMLINMAS**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	06		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																		
1	06	xx	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan	80%	85%	4.621.255.000	87%	5.496.013.000	89%	6.405.181.000	91%	7.339.351.000	93%	8.248.519.000	95%	9.152.203.000	95%	41.262.522.000	**SOSIAL**	
1	06	xx	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	85%	90%	659.564.200	92%	682.881.200	95%	894.180.000	97%	962.681.000	100%	1.031.181.000	100%	1.234.681.000	100%	5.465.168.400	**SOSIAL**	
1	06	xx	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase orang yang mendapat penanganan bencana alam dan sosial	100%	100%	693.815.000	100%	18.583.025.000	100%	18.742.000.000	100%	18.930.250.000	100%	19.093.500.000	100%	19.270.500.000	100%	95.313.090.000	**SOSIAL**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	0 6	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase Taman Makam Pahlawan yang mendapat pengelolaan	100%	100%	18.864.000	100%	136.664.000	100%	152.964.000	100%	169.264.000	100%	185.564.000	100%	201.864.000	100%	865.184.000	**SOSIAL**	
1	0 6	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS Pelembagaan yang berperan aktif dalam penyelanggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	2.196.170.000	100%	2.486.107.000	100%	2.901.410.000	100%	3.358.092.000	100%	3.913.911.000	100%	3.819.410.000	100%	18.675.100.000	**SOSIAL**	
2			***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***																		
2	0 7		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																		
2	0 7	x x	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan	-	4%	133.436.000	12%	675.978.600	12%	705.978.600	12%	711.978.600	12%	625.958.600	12%	666.978.600	12%	3.520.309.000	**TENAGA KERJA**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	07	xx	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	84%	85%	152.351.000	85%	397.351.000	85%	397.351.000	90%	397.351.000	90%	407.351.000	90%	407.351.000	90%	2.159.106.000	**TENAGA KERJA**	
2	07	xx	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan dalam penerapan peraturan ketenagakerjaan	93%	95%	114.803.800	9%	207.761.800	9%	332.761.800	9%	228.583.600	9%	207.761.800	9%	228.583.600	9%	1.320.256.400	**TENAGA KERJA**	
2	08		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																		
2	08	xx	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentasi SKPD yang melaksanakan PUG	13,90%	28%	229.995.300	42%	246.556.144	56%	264.844.900	69%	284.384.000	83%	304.290.850	100%	325.591.205	100%	1.655.662.399	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0 8	x x	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	100%	427.416.400	100%	541.497.644	100%	580.432.300	100%	622.062.600	100%	665.607.000	100%	712.199.490	100%	3.549.215.434	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2	0 8	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase data akurat dan valid	100%	100%	25.368.600	100%	101.016.344	100%	108.087.400	100%	115.653.500	100%	123.749.700	100%	132.211.700	100%	606.087.244	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2	0 8	x x	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Lembaga Ramah Anak	50%	80%	142.280.000	82%	175.699.350	85%	187.998.300	90%	201.158.100	95%	215.239.200	100%	230.306.000	100%	1.152.680.950	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2	0 8	x x	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase kekerasan terhadap anak yang terlayani	100%	100%	-	100%	694.757.800	100%	743.390.750	100%	795.428.100	100%	851.108.100	100%	910.685.750	100%	3.995.370.500	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0 8	x x	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Indeks pembangunan gender	96,5	97,5	-	97,7	633.034.850	97,9	677.347.200	98,1	724.761.500	98,3	775.494.850	98,5	829.779.550	98,5	3.640.417.950	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2	0 9		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																		
2	0 9	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Utama	464%	579%	426.250.000	581%	438.770.000	580%	451.667.000	580%	467.411.700	579%	483.152.870	585%	499.968.157	585%	2.767.219.727	**PANGAN**	
2	0 9	x x	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase Daerah Rawan Pangan	7%	5,9%	296.929.400	5,3%	326.622.340	4,1%	359.284.574	3,6%	395.213.031	3,0%	434.734.335	3,0%	478.207.768	3,0%	2.290.991.448	**PANGAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0 9	x x	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Kenaikan Harga pangan (Beras)	<10%	<9%	779.549.900	<8%	857.514.890	<7%	943.355.379	<6%	1.037.580.900	<5%	1.143.339.000	<4%	1.255.472.900	<4%	6.016.812.969	**PANGAN**	
				Persentase Peningkatan AKG	0,1	0,2		0,2		0,2		0,2		0,3		0,3		0,3		**PANGAN**	
2	0 9	x x	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase Pangan yang Aman dikonsumsi	81%	82%	26.760.600	83%	29.436.660	84%	32.380.326	85%	35.618.359	86%	39.180.194	87%	43.098.214	87%	206.474.353	**PANGAN**	
2	1 0		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																		
2	1 0	x x	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	Persentase Terselesaikannya Sengketa Tanah	0%	100%	27.569.200	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	55.000.000	100%	70.000.000	100%	85.000.000	100%	317.569.200	**PERTANAHAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 0	x x	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase Penyelesaian Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi instansi/OPD yang memerlukan tanah selama masa Renstra 2021-2026	0%	100%	23.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	10.250.000.000	100%	10.250.000.000	100%	10.250.000.000	100%	10.250.000.000	100%	74.000.000.000	**PERTANAHAN**	
2	1 0	x x	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase Luasan Objek Redistribusi Tanah dan Jumlah Subjek Penerima Reforma Agraria (Kantor Pertanahan HST)	0%	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	100%	88.578.050	100%	424.358.550	**PERTANAHAN**	
2	1 0	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase Izin Membuka Tanah yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP)	0%	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	100%	88.578.050	100%	424.358.550	**PERTANAHAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 0	x x	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang dikeluarkan (DPMPTSP)	100%	100%	63.087.600	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	95.000.000	100%	105.000.000	100%	498.087.600	**PERTANAHAN**	
2	1 0	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	Persentase Izin Lokasi yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP)	0%	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	480.000.000	**PERTANAHAN**	
2	1 1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																		
2	1 1	x x	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkesuaian dengan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	36.560.810	100%	40.217.000	100%	45.000.000	100%	49.000.000	100%	54.000.000	100%	59.000.000	100%	283.777.810	**LINGKUNGAN HIDUP**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 1	x x	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	165.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1 1	x x	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Usaha atau Kegiatan yang patuh Terhadap Regulasi LH	100%	45%	20.000.000	60%	25.000.000	75%	30.000.000	90%	35.000.000	95%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	195.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1 1	x x	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	1.225.000.000	71%	1.420.000.000	72%	1.615.000.000	73%	1.810.000.000	74%	2.005.000.000	75%	2.200.000.000	75%	10.275.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	x	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Luasan RTH Kabupaten yang terkelola dengan baik	77%	80%	200.000.000	85%	1.000.000.000	88%	1.300.000.000	92%	1.350.000.000	96%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	4.700.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1	x	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase MHA yang Melakukan Pelestarian Lingkungan Hidup	0%	0%	7.640.000	20%	150.000.000	40%	250.000.000	60%	300.000.000	80%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	1.457.640.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1	x	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase sekolah adiwiyata	4,58%	4,58%	120.000.000	5,09%	150.000.000	5,60%	180.000.000	6,11%	210.000.000	6,62%	240.000.000	7,12%	270.000.000	7,12%	1.170.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 1	x x	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina terkait Lingkungan Hidup	13,33%	28,57%	80.000.000	42,86%	100.000.000	57,14%	120.000.000	71,43%	140.000.000	85,71%	160.000.000	100,00%	180.000.000	100,00%	780.000.000	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1 1	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Cakupan Area Pelayan persampahan pada Wilayah Pelayanan	78,00%	79,52%	10.520.306.100	80,27%	10.429.144.490	81,39%	12.844.887.886	83,25%	13.552.123.747	85,46%	15.384.208.354	88,03%	15.606.132.256	88,03%	78.336.802.833	**LINGKUNGAN HIDUP**	
2	1 2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																		
2	1 2	x x	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase penyelesaian dokumen kependudukan tepat waktu	100%	100%	2.004.442.200	100%	2.204.886.120	100%	2.425.374.900	100%	2.704.272.650	100%	2.975.064.000	100%	3.272.570.500	100%	15.586.610.370	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 2	x x	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	100%	100%	590.497.500	100%	781.897.500	100%	808.537.500	100%	837.841.500	100%	870.075.000	100%	905.533.750	100%	4.794.382.750	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2	1 2	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase database kependudukan yang akurat dan valid	100%	100%	1.144.000.000	100%	1.286.900.000	100%	1.448.635.000	100%	1.631.189.000	100%	1.837.651.000	100%	2.071.343.000	100%	9.419.718.000	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2	1 2	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	100%	100%	955.482.100	100%	1.084.030.310	100%	1.171.602.970	100%	1.247.126.730	100%	1.342.674.940	100%	1.433.223.150	100%	7.234.140.200	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	13		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																		
2	13	xx	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Persentase kerjasama desa yang aktif	0%	0%	36.606.400	20%	550.000.000	40%	690.000.000	60%	838.000.000	80%	705.600.000	100%	1.110.720.000	100%	3.930.926.400	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	13	xx	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa yang administrasinya lengkap	50%	53%	2.306.048.900	56%	2.885.948.800	59%	2.607.413.150	62%	2.676.404.465	65%	2.765.894.912	68%	2.831.144.403	68%	16.072.854.630	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2	13	xx	**PROGRAM PEMBERDAYAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Adat yang aktif	70%	75%	285.803.600	80%	1.840.000.000	85%	2.137.500.000	90%	2.488.225.000	95%	2.740.216.750	100%	3.052.216.603	100%	12.543.961.953	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
				Persentase lembaga / usaha ekonomi desa yang berkembang	0%	0%		3,70%		7,41%		11,11%		14,81%		18,52%		18,52%		**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan	0%	0%		20%		40%		60%		80%		100%		100%		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	14	xx	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan peserta KB aktif MKJP	7,09%	8,91%	2.995.550.000	10,73%	3.015.550.000	12,15%	3.035.550.000	13,38%	3.050.550.000	14,72%	3.080.550.000	15,95%	3.110.550.000	15,95%	18.288.300.000	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	xx	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data dukung yang akurat	100%	100%	838.374.400	100%	848.374.400	100%	850.374.400	100%	852.874.400	100%	872.874.400	100%	922.874.400	100%	5.185.746.400	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	xx	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok masyarakat yang aktif berperan terhadap ketahanan keluarga	100%	100%	254.862.800	100%	274.826.800	100%	284.826.800	100%	299.826.800	100%	314.826.800	100%	324.826.800	100%	1.753.996.800	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	15		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																		
2	15	xx	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Volume Kapasitas LLAJ	0,352	0,350	5.114.732.000	0,340	10.864.050.000	0,330	7.079.050.000	0,320	7.606.550.000	0,310	7.868.550.000	0,300	8.296.050.000	0,300	46.828.982.000	**PERHUBUNGAN**	
2	16		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																		
2	16	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	40	50	3.224.922.050	60	3.461.973.100	65	3.808.170.410	70	4.188.987.451	75	4.607.886.196	80	5.068.674.816	80	24.360.614.023	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	16	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	38%	38%	2.357.491.000	48%	2.818.756.288	58%	3.100.631.917	68%	3.410.695.108	78%	3.751.764.619	88%	4.126.941.081	88%	19.566.280.014	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2	17		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																		
2	17	xx	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentasi SDM koperasi yang terampil	38,46%	41,03%	219.053.900	43,04%	240.959.290	45,00%	265.055.219	46,91%	291.560.741	51,22%	320.716.815	53,01%	352.788.496	53,01%	1.690.134.461	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
2	17	xx	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi aktif	51,28%	52,50%	219.053.900	53,66%	240.959.290	54,76%	265.055.219	58,54%	291.560.741	59,52%	320.716.815	60,47%	352.788.496	60,47%	1.690.134.461	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 7	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase pelaku usaha mikro yang berdaya saing	2,50%	3,00%	454.105.340	3,50%	499.515.874	4,00%	549.467.461	4,50%	604.414.208	5,00%	664.855.628	5,50%	731.341.191	5,50%	3.503.699.702	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
2	1 7	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	10%	12%	244.518.260	14%	268.970.086	16%	295.867.095	18%	325.453.804	20%	357.999.184	22%	393.799.103	22%	1.886.607.532	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
2	1 8		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																		
2	1 8	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan LKPM	10%	10%	14.020.000	10%	20.000.000	10%	30.000.000	10%	30.000.000	10%	190.000.000	10%	50.000.000	10%	334.020.000	**PENANAMAN MODAL**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 8	x x	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100%	100%	419.607.500	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	1.019.607.500	**PENANAMAN MODAL**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penanaman Modal yang dilakukan Pengawasan dan Pemantauan	100%	100%	-	100%	335.173.000	100%	335.173.000	100%	335.173.000	100%	335.173.000	100%	335.173.000	100%	1.675.865.000	**PENANAMAN MODAL**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100%	100%	284.619.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	3.709.619.000	**PENANAMAN MODAL**	
2	1 8	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	50%	50%	105.951.800	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	605.951.800	**PENANAMAN MODAL**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1 9		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																		
2	1 9	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	59%	67%	819.244.500	73%	1.261.290.300	80%	1.510.409.500	82%	1.166.609.500	86%	1.098.409.500	96%	1.098.409.500	96%	6.954.372.800	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
2	1 9	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi pramuka yang aktif	100%	100%	220.500.000	100%	441.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.661.500.000	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
2	1 9	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase peningkatan aktifitas olahraga	33%	33%	2.365.341.700	57%	12.875.706.750	68%	12.453.477.425	79%	6.033.025.168	89%	6.102.527.684	100%	6.162.180.453	100%	45.992.259.179	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	20		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																		
2	20	xx	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data sektoral yang terbaharui	100%	100%	23.341.000	100%	85.886.000	100%	94.474.600	100%	103.922.060	100%	114.314.266	100%	125.745.693	100%	547.683.619	**STATISTIK**	
2	21		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																		
2	21	xx	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi	5,60%	5,60%	-	8,30%	88.062.000	11,10%	96.868.200	13,90%	106.555.020	16,70%	117.210.522	19,40%	128.931.574	19,40%	537.627.316	**PERSANDIAN**	
2	22		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																		
2	22	xx	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pengembangan Pelaku Kebudayaan yang dibina	-	85%	336.881.400	85%	659.581.400	88%	700.000.000	90%	750.000.000	95%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	4.021.462.800	**KEBUDAYAAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	x	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Pengembangan Pelaku Kesenian Tradisional yang dibina	-	-	-	85%	575.750.000	88%	622.250.000	90%	663.750.000	95%	715.250.000	100%	766.750.000	100%	3.343.750.000	**KEBUDAYAAN**	
2	2	x	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Persentase Museum yang dikelola	-	-	-	80%	509.208.600	85%	2.132.208.600	90%	232.208.600	95%	282.208.600	100%	282.208.600	100%	3.438.043.000	**KEBUDAYAAN**	
2	2	x	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	172.791.400	80%	190.791.400	85%	217.791.400	90%	217.791.400	95%	217.791.400	100%	217.791.400	100%	1.234.748.400	**KEBUDAYAAN**	
2	3		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																		
2	3	x	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	IKM terhadap layanan perpustakaan	86	86	308.006.700	86	2.184.800.000	87	727.000.001	87	750.000.000	88	775.000.000	88	782.000.000	88	5.526.806.701	**PERPUSTAKAAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	24		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																		
2	24	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase pengelolaan arsip daerah (SKPD, Kelurahan dan Desa) dengan retensi 10 tahun	-	30%	95.892.500	100%	275.000.000	100%	540.000.000	100%	359.000.000	100%	5.360.000.000	100%	370.000.000	100%	6.999.892.500	**KEARSIPAN**	
				Persentase SKPD yang mengelola arsip dinamis dengan baku.	-	30%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**KEARSIPAN**	
2	24	xx	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase arsip daerah (SKPD, Kelurahan dan Desa) yang bisa dilindungi dan diselamatkan	-	13%	-	13%	75.000.000	33%	80.000.000	50%	85.000.000	75%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	425.000.000	**KEARSIPAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3			*URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*																		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	25	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	11%	11%	1.784.864.400	17%	1.963.350.840	23%	2.151.940.000	29%	2.358.613.800	35%	2.585.877.000	47%	2.835.859.600	47%	13.680.505.640	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3	25	xx	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,99%	1,00%	600.501.800	1,10%	660.551.980	1,20%	726.607.178	1,30%	799.267.896	1,40%	879.194.685	1,50%	967.114.154	1,50%	4.633.237.693	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3	25	xx	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Kasus Pelanggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	662.538.900	100%	728.792.790	100%	735.418.179	100%	736.080.718	100%	736.146.972	100%	736.153.597	100%	4.335.131.156	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	25	xx	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Kelompok Pengolahan yang menghasilkan Produk Perikanan	40%	40%	199.921.700	40%	219.913.870	44%	241.905.257	44%	266.095.783	48%	292.705.361	48%	321.975.897	48%	1.542.517.868	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3	26		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																		
3	26	xx	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Wisata	16,70%	33,30%	264.012.000	43,30%	3.775.000.000	50,00%	4.530.000.000	56,70%	5.350.000.000	66,70%	1.300.000.000	83,30%	1.400.000.000	83,30%	16.619.012.000	**PARIWISATA**	
3	26	xx	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan pada objek wisata yang dipasarkan/diprom osikan	1,12%	1,14%	510.018.100	1,15%	935.000.000	1,16%	935.000.000	1,17%	935.000.000	1,18%	935.000.000	1,19%	935.000.000	1,19%	5.185.018.100	**PARIWISATA**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2 6	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Persentase Jasa Usaha Ekonomi Kreatif yang ber TDUP	19%	23%	-	31%	50.000.000	35%	50.000.000	48%	50.000.000	65%	50.000.000	81%	50.000.000	81%	250.000.000	**PARIWISATA**	
3	2 6	x x	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan SDM dan Ekraf yang berkompeten	33%	42%	24.700.000	46%	421.200.000	50%	421.200.000	58%	421.200.000	71%	421.200.000	100%	421.200.000	100%	2.130.700.000	**PARIWISATA**	
3	2 7		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																		
3	2 7	x x	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.112.768.400	2.76	9.965.351.500	3.36	10.111.238.900	3.96	9.392.172.700	4.56	9.655.708.450	5.16	9.381.252.200	5.16	50.618.492.150	**PERTANIAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15		0.25		0.42		0.50		0.58		0.66		0.66		**PERTANIAN**	
				Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13		14		15		16		17		18		18		**PERTANIAN**	
3	**2 7**	**x x**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terdampak bencana	-	11.5	260.625.000	10.4	517.625.000	10	589.625.000	9.5	627.125.000	9.0	637.625.000	8.5	642.625.000	8.5	3.275.250.000	**PERTANIAN**	
3	**2 7**	**x x**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	30	32	1.949.614.000	34	2.193.050.000	36	812.750.000	38	912.750.000	40	1.012.750.000	42	1.112.750.000	42	7.993.664.000	**PERTANIAN**	
				Persentase Skor Kinerja Baik Penyuluhan Pertanian	75	78		80		82		85		87		90		90		**PERTANIAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2 7	x x	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	1.301.000.000	2.3	1.245.000.000	2.6	750.000.000	2.9	675.000.000	3.2	675.000.000	3.5	650.000.000	3.5	5.296.000.000	**PERTANIAN**	
				Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30		2.41		2.47		2.49		2.50		2.90		2.90		**PERTANIAN**	
				Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3		4		5		6		7		8		8		**PERTANIAN**	
3	2 7	x x	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan angka kematian ternak produktif	5%	4,5%	255.000.000	4%	340.000.000	3,5%	370.000.000	3%	370.000.000	2,5%	385.000.000	2%	385.000.000	2%	2.105.000.000	**PERTANIAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	2	x	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	2	2	19.788.000		-		-		-		-		-		19.788.000	**PERTANIAN**	
3	3		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																		
3	3	x	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar Sehat	38,46%	46,15%	157.980.000	53,85%	5.104.995.000	61,54%	5.115.494.500	69,23%	5.127.043.950	76,92%	5.139.748.345	92,31%	5.153.723.180	92,31%	25.798.984.975	**PERDAGANGAN**	
3	3	x	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	71,43%	72,86%	44.650.000	74,29%	49.115.000	75,71%	54.026.500	77,14%	59.429.150	78,57%	65.372.065	80,00%	71.909.272	80,00%	344.501.987	**PERDAGANGAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3 0	x x	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentasi pengguna UTTP dan BDKT sesuai standard	4,83%	5,15%	53.534.000	33,91%	58.887.400	57,13%	64.776.140	59,91%	71.253.754	62,50%	78.379.129	62,72%	86.217.042	62,72%	413.047.466	**PERDAGANGAN**	
3	3 0	x x	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentasi produk unggulan daerah yang terjual	26,67%	46,67%	305.165.000	66,67%	335.681.500	80,00%	369.249.650	86,67%	406.174.615	93,33%	446.792.077	100%	491.471.284	100%	2.354.534.126	**PERDAGANGAN**	
3	3 1		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																		
3	3 1	x x	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	2.854.394.400	49,08%	3.330.414.040	53,72%	3.363.455.444	58,36%	3.399.800.988	63,00%	3.349.781.087	67,64%	3.483.759.196	67,64%	19.781.605.155	**PERINDUSTRIAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3 1	x x	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri	0.07%	1,15%	19.849.200	2,29%	21.834.120	3,42%	24.017.532	4.54%	26.419.285	5,64%	29.061.214	6,74%	31.967.335	6,74%	153.148.686	**PERINDUSTRIAN**	
4			***UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***																		
4	0 1		**SEKRETARIAT DAERAH**																		
4	0 1	x x	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Presentase realisasi kebijakan di Bidang Kesra yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	5.838.436.300	100%	8.979.224.000	100%	9.853.580.000	100%	10.862.741.400	100%	11.835.776.500	100%	12.978.295.845	100%	60.348.054.045	**SEKRETARIAT DAERAH**	
				Persentase kebijakan di bidang pemerintahan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**SEKRETARIAT DAERAH**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase peraturan perundangan yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH	
4	0 1	x x	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	774.574.300	100%	3.338.509.000	100%	3.395.359.000	100%	3.546.895.000	100%	3.386.205.000	100%	3.693.824.500	100%	18.135.366.800	SEKRETARIAT DAERAH	
				Tingkat Kematangan UKPBJ	4/9	5/9		6/9		7/9		8/9		9/9		9/9		9/9		SEKRETARIAT DAERAH	
				Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	02		**SEKRETARIAT DPRD**																		
4	02	xx	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	18.946.572.400	100%	19.136.100.000	100%	19.518.760.000	100%	19.909.150.000	100%	20.506.500.000	100%	20.916.550.000	100%	118.933.632.400	**SEKRETARIAT DPRD**	
5			***UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***																		
5	01		**PERENCANAAN**																		
5	01	xx	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan dan selesai tepat waktu	100%	100%	2.052.306.900	100%	1.002.508.000	100%	1.659.208.850	100%	1.827.235.000	100%	1.310.372.460	100%	2.152.369.166	100%	10.004.000.376	**PERENCANAAN**	
				Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**PERENCANAAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	0 1	x x	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD)	100%	100%	1.762.964.200	100%	1.255.615.130	100%	1.203.676.643	100%	1.441.544.307	100%	1.695.698.738	100%	1.992.768.612	100%	9.352.267.630	**PERENCANAAN**	
5	0 2		**KEUANGAN**																		
5	0 2	x x	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	209.513.159.057	100%	221.027.000.000	100%	243.129.700.000	100%	267.442.670.000	100%	294.186.937.000	100%	323.605.630.700	100%	1.558.905.096.757	**KEUANGAN**	
				Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%		70%		72%		74%		76%		80%		80%		**KEUANGAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**KEUANGAN**	
5	**0 2**	**x x**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Keakuratan Data Aset/Barang Milik Daerah	80%	95%	792.862.500	100%	1.746.000.000	100%	1.920.600.000	100%	2.112.660.000	100%	2.323.926.000	100%	2.556.318.600	100%	11.452.367.100	**KEUANGAN**	
				Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	80%	95%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**KEUANGAN**	
5	**0 2**	**x x**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Total PAD	58%	10%	1.391.256.650	10%	3.000.000.000	10%	2.350.000.000	10%	1.521.440.000	10%	3.316.405.000	10%	1.667.377.000	10%	13.246.478.650	**KEUANGAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	03		**KEPEGAWAIAN**																		
5	03	xx	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks kepuasan masyarakat	-	83	8.976.597.100	85	9.045.000.000	87	9.245.000.000	88	9.750.000.000	89	9.950.000.000	90	10.000.000.000	90	56.966.597.100	**KEPEGAWAIAN**	
				Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	-	83		85		87		88		89		90		90		**KEPEGAWAIAN**	
5	05		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																		
5	05	xx	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase kebutuhan hasil litbang yang dihasilkan	-	25%	805.892.700	55%	1.000.000.000	78%	1.150.000.000	85%	680.000.000	90%	330.000.000	100%	630.000.000	100%	4.595.892.700	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6			*UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN*																		
6	01		**INSPEKTORAT DAERAH**																		
6	01	xx	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentasi PD/obrik yang telah selesai menindak lanjuti temuan / rekomendasi hasil pengawasan	72%	85%	725.275.000	90%	908.500.000	92%	1.007.670.000	95%	1.115.060.000	98%	1.223.100.000	98%	1.353.900.000	98%	6.333.505.000	**INSPEKTORAT DAERAH**	
6	01	xx	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentasi aturan dan kebijakan di bidang pengawasan	100%	100%	2.427.035.600	100%	2.587.025.000	100%	2.991.390.000	100%	3.358.410.000	100%	3.731.874.000	100%	3.902.086.700	100%	18.997.821.300	**INSPEKTORAT DAERAH**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Persentase PD yang menindaklanjuti Rekomendasi hasil Pendampingan/Asistensi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		**INSPEKTORAT DAERAH**	
7			***UNSUR KEWILAYAHAN***																		
7	**0 1**		**KECAMATAN**																		
7	**0 1**	**x x**	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	1.136.190.200	100%	1.540.535.000	100%	1.608.100.155	100%	1.679.420.921	100%	1.742.364.134	100%	1.814.923.413	100%	9.521.533.822	**KECAMATAN**	
7	**0 1**	**x x**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penanganan potensi perpecahan masyarakat di wilayah kecamatan yang muncul	100%	100%	407.945.600	100%	1.674.889.300	100%	1.750.978.803	100%	1.857.821.910	100%	1.912.269.368	100%	1.974.715.797	100%	9.578.620.779	**KECAMATAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	0 1	x x	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penerapan pelayanan sesuai Standard	82%	87%	528.498.700	90%	1.560.585.400	92%	1.275.269.714	94%	1.309.537.437	97%	1.355.637.797	100%	1.388.716.601	100%	7.418.245.648	**KECAMATAN**	
7	0 1	x x	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa tertib administrasi dan pembangunan	89%	90%	666.048.900	92%	1.960.787.000	94%	2.072.121.086	96%	2.174.251.903	98%	2.262.269.066	100%	2.365.997.013	100%	11.501.474.967	**KECAMATAN**	
7	0 1	x x	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase peningkatan nilai perkembangan kelurahan dan desa	41%	43%	3.806.617.570	45%	11.806.811.570	48%	11.943.200.169	50%	12.980.899.673	52%	13.719.574.820	54%	13.870.165.238	54%	68.127.269.039	**KECAMATAN**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8			*UNSUR PEMERINTAHAN UMUM*																		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																		
8	01	xx	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang dibina yang memahami pancasila dan karakter kebangsaan	65%	65%	321.125.000	70%	346.125.000	75%	371.125.000	80%	396.125.000	85%	421.125.000	90%	446.125.000	90%	2.301.750.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	xx	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase kesepakatan hasil pertemuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	534.750.000	100%	559.750.000	100%	584.750.000	100%	609.750.000	100%	634.750.000	100%	659.750.000	100%	3.583.500.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	xx	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas yang aktif	10%	10%	141.375.000	15%	166.375.000	20%	191.375.000	25%	216.375.000	30%	241.375.000	35%	266.375.000	35%	1.223.250.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	0 1	x x	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu	81%	81%	959.750.000	-	984.750.000	-	1.009.750.000	81%	1.034.750.000	-	1.059.750.000	-	1.084.750.000	-	6.133.500.000	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
8	0 1	x x	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	704.375.000	100%	729.375.000	100%	754.375.000	100%	779.375.000	100%	804.375.000	100%	829.375.000	100%	4.601.250.000	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Urusan	Ket
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X	X		**NON URUSAN**																		
X	X	01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentasi penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standar	100%	100%	581.446.748.588	100%	470.193.066.416	100%	538.102.502.678	100%	493.795.532.242	100%	493.812.807.844	100%	513.414.444.311	100%	3.090.765.102.080	**NON URUSAN (RUTIN)**	
T O T A L (Rp)						**1.288.393.648.748**		**1.202.850.315.376**		**1.240.399.377.553**		**1.278.222.809.152**		**1.316.346.753.157**		**1.354.800.569.826**		**7.681.013.473.812**			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja membutuhkan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang diindikasikan oleh indikator kinerja dengan target capaian selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan secara umum melalui indikator makro daerah, pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator makro daerah yang merupakan indikator pada tingkat dampak (impact). Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Daerah memuat komitmen pemerintah daerah pada tingkat kinerja dampak (impact) dan hasil (outcome). Kinerja dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Sementara kinerja hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021- 2026 dapat diuraikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut.

Tsbel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator Makro Pembangunan Daerah	Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi akhir (2026)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	68,84	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	72,5
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1.01	2 - 3	3,0 -3,5	4 - 4,5	5 - 5,5	5,5 - 6	6 - 6,5
3.	Indeks Gini	0,3	0,298	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288
4.	Angka Pengangguran (%)	3.96	3.8	3.7	3.6	3.5	3,4	3,3
5.	Angka Kemiskinan (%)	5.64	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7	4.5
6.	Inflasi (%)	2,15	3,57	3,32	3,07	2,82	2,57	2,32

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Pembangunan	Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi akhir (2026)
1.	Jumlah kasus konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	50,93	52	56	61	63	67	71
3.	Indeks Pembangunan Manusia	68,84	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	72,5
4.	PDRB per kapita (Rp juta)	27,267	28,000	29,000	30,000	31,250	32,500	34,000
5.	Jumlah kasus konflik agama	0	0	0	0	0	0	0
6.	Angka kriminalitas	< 10	< 10	< 9,5	< 9	< 8,5	< 8	< 7,5
7.	Jumlah kasus konflik sosial	0	0	0	0	0	0	0
8.	Indeks Profesionalisme ASN	42,5	48	53	58	62	65	67
9.	Indeks kepuasan Masyarakat	80,67	81	82	83	84	85	86
10.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,10	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,35
11.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	Nilai AKIP	66,17	68,60	71,10	73,50	75,00	77,50	80,25

No	Indikator Kinerja Utama Pembangunan	Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi akhir (2026)
13.	Indeks Pendidikan	60,55	61,78	62	63	64	65	67
14.	Rata-rata Lama Sekolah	8	8,13	8,26	8,39	8,52	8,65	8,78
15.	Usia Harapan Sekolah	12,20	12,32	12,44	12,56	12,68	12,80	12,92
16.	Indeks Kesehatan	76,68	77,16	77,67	78,33	78,83	79,5	80
17.	Usia Harapan Hidup	66,01	66,51	66,71	67,01	67,21	67,51	67,71
18.	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	96,50	97,5	97,7	97,9	98,1	98,3	98,5
19.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	40	41	42	43	44	45
20.	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	-1.01	2 - 3	3,0 -3,5	4 - 4,5	5 - 5,5	5,5 - 6	6 - 6,5
21.	Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Pertanian	-0,27	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 -5	5,5 - 6	6 - 6,5
22.	Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	-3,53	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5,5 - 6	6,5 -7
23.	Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Perdagangan	-3,43	1 - 2	3 - 4	5 - 6	6,5 - 7,0	7,5 - 8	8 - 8,5
24.	Laju Pertumbuhan NTB Lapangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-2,65	1 - 2	3 - 4	5 - 6	6,5 - 7,0	7,5 - 8	8 - 8,5

No	Indikator Kinerja Utama Pembangunan	Kondisi awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi akhir (2026)
25.	Inflasi	2,15	3,57	3,32	3,07	2,82	2,57	2,32
26.	Persentase Penduduk Miskin	5,64	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5
27.	Indeks Gini	0,3	0,298	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288
28.	Angka Pengangguran	3,96	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3
29.	Indeks infrastruktur wilayah	-	55	56	57	58	59	60
30.	Cakupan pembangunan infrastruktur dasar	85,71	88,54	90,25	92,75	95	97	100
31.	Persentase infrastruktur kawasan pertumbuhan	-	0,0	10	20	40	60	75
32.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,65	63,9	64,37	64,78	65,16	65,52	65,80
33.	Indeks resiko bencana daerah	140,40	140,40	140,35	140,30	140,20	140,10	140,00

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	%	-1.01	2 - 3	3,0 -3,5	4 - 4,5	5 - 5,5	5,5 - 6	6 - 6,5	
2	Laju Inflasi	%	1,68	3,57	3,32	3,07	2,82	2,57	2,32	
3	PDRB ADHB perkapita	Rp juta	27,27	28,00	29,00	30,00	31,25	32,50	34,00	
4	PDRB ADHK perkapita	Rp juta	17,56	17,93	18,3	18,67	19,04	19,41	19,78	
5	Indeks Gini	-	0,285	0,281	0,277	0,274	0,270	0,266	0,262	
6	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,84	69,40	70,00	70,60	71,20	71,80	72,5	
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	94,36	94,50	94,70	94,90	95,10	95,30	95,50	
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	77,69	78	79	80	81	82	83	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96,50	97,5	97,7	97,9	98,1	98,3	98,5	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10	Status Kota Layak Anak	%	0	100	100	100	100	100	100	
11	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	-	< 10	< 10	< 9,5	< 9	< 8,5	< 8	< 7,5	
12	Angka Melek Huruf	%	98,65	98,86	99,07	99,28	99,49	99,7	99,91	
13	Angka rata-rata lama sekolah	thn	8	8,13	8,26	8,39	8,52	8,65	8,78	
14	Angka Harapan Lama Sekolah	thn	12,20	12,2	12,4	12,5	12,7	12,8	13	
15	APK SD/MI/Paket A	%	108,09	102,00	101,95	101,90	101,85	101,80	101,75	
16	APK SMP/MTs/Paket B	%	74,71	85,00	84,50	84,00	83,50	83,00	82,50	
17	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI /Paket A	%	99,01	99.05	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	
18	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs /Paket B	%	72,44	73,00	74,00	75,00	77,00	79,00	82,00	
19	Angka Pendidikan SD/MI yang ditamatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	Angka Pendidikan SMP/MTs yang ditamatkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	985	986	987	988	989	990	990	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
22	Angka Usia Harapan Hidup	thn	66,01	66,51	66,71	67,01	67,21	67,51	67,71	
23	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,06	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
24	Rasio penduduk yang bekerja	%	96	96,2	96,3	96,4	96,5	96,6	96,7	
25	Jumlah Grup Kesenian	Unit	103	103	104	105	106	107	108	
26	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0	0	0	0	0	
27	Jumlah klub olahraga	klub/ org	35	36	37	38	39	40	41	
28	Jumlah gedung olahraga	buah	8	8	9	9	10	10	10	
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	**Pendidikan**									
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (usia 0-6 tahun)	%	35,22	36,00	37,72	40,25	42,45	44,86	47,03	
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	108,09	102,00	101,95	101,90	101,85	101,80	101,75	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	74,71	85,00	84,50	84,00	83,50	83,00	82,50	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	99,01	99.05	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	72,44	73,00	74,00	75,00	77,00	79,00	82,00	
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	99,01	99.05	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	%	72,44	73,00	74,00	75,00	77,00	79,00	82,00	
1.8	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	79.72	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,30	
1.9	Rasio Guru / Murid SD	Angka	1:10	1:10	1:11	1:11	1:12	1:12	1:13	
1.10	Rasio Guru / Murid SMP	Angka	1:10	1:10	1:11	1:11	1:12	1:12	1:13	
1.11	Rasio Guru / Murid per kelas rata-rata SD	Angka	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 12	1 : 13	
1.12	Rasio Guru / Murid per kelas rata-rata SMP	Angka	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 12	1 : 13	
1.13	Sekolah Pendidikan SD kondisi bangunan baik	%	82,35	84,00	85,50	87,00	88,50	89,50	91,00	
1.14	Sekolah pendidikan SMP dan kondisi bangunan baik	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.15	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	%	0,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	2,07	2,02	1,97	1,92	1,87	1,82	1,77	
1.17	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.19	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	%	91,2	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	
1.20	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	%	0	0	0	0	0	0	0	
1.21	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	85	85,88	86,75	87,63	88,5	89,38	90,25	
1.22	Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	37,70	38,00	38,50	39,00	39,25	39,50	39,75	
1.23	Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia SD	Angka	94,80	98,10	102,30	106,50	110,70	112,80	115,20	
1.24	Rasio Ketersediaan sekolah /penduduk usia SMP	Angka	28,17	30,20	32,35	34,50	35,70	36,80	37,95	
1.25	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	50,01	55	60	70	75	78	81	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.26	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,76	98,05	98,35	98,64	98,94	99,23	99,53	
1.27	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	88,56	89,02	89,48	89,93	90,39	90,85	91,3	
1.28	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	66	70	73	76	79	82	85	
1.29	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	40,25	40,50	40,75	41,00	41,25	41,50	
1.30	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	0	40,25	40,50	40,75	41,00	41,25	41,50	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	**Kesehatan**									
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	%	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	60,11	
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,35	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	4,20	0,0038	0,0038	0,0038	0,011	0,012	0,013	
2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk	%	0,33	0,5	1,5	2,5	3,5	4,7	4,7	
2.5	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	%	2,26	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83,40%	83,50%	85%	86%	87%	88%	89%	
2.7	Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	85,14%	89%	91%	93%	95%	96%	97%	
2.8	Cakupan desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	65,5	80,47	85,2	90,5	94,6	94,6	94,6	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	40,23%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.12	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.13	Cakupan Kunjungan Bayi	%	87,51%	88%	88,5%	89%	90%	91%	92%	
2.14	Cakupan Puskesmas	%	173	173	175	177	180	182	185	
2.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	60,50	60,5	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	
2.16	Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,6	96	97	98	100	100	100	
2.17	Angka Kematian Ibu/ 100.000 kelahiran hidup	100.000 KH	428/100 rb KH	202/100 rb KH	210/100 rb KH	198/100 rb KH	187/100 rb KH	177/100 rb KH	167/100 rb KH	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.18	Persentase penurunan kematian ibu (AKI) per tahun	-	-111,8 %	202/100 rb KH	210/100 rb KH	198/100 rb KH	187/100 rb KH	177/100 rb KH	167/100 rb KH	
2.19	Angka Kematian Bayi (AKB) / 1.000 kelahiran hidup	1.000 KH	14,9/1000 KH	19.5/1000 KH	18.6/1000 KH	17.6/1000 KH	16/1000 KH	15/1000 KH	14/1000 KH	
2.20	Angka Kematian Balita / 1.000 kelahiran hidup	1.000 KH	15,4/1000 KH	15/1000 KH	14,5/1000 KH	14/1000 KH	13,5/1000 KH	13/1000 KH	12,5/1000 KH	
2.21	Angka Kematian Neonatal /1.000 kelahiran hidup	1.000 KH	11,6/1000 KH	12.2/1000 KH	11.6/1000 KH	11.0/1000 KH	10.0/1000 KH	9.0/1000 KH	8.0/1000 KH	
2.22	Persentase Capaian pemenuhan SPM Kesehatan	%	63,69	100	100	100	100	100	100	
2.23	Prevalensi HIV/AIDS	%	0,25	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
2.24	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.25	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	77,84	85	90	92	95	95	95	
2.26	Cakupan Pelayanan Nifas	%	82,69	87	89	91	93	94	95	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.27	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	79,65	88	90	92	95	95	95	
2.28	Cakupan pelayanan anak balita	%	67,79	70	75	80	85	87	89	
2.29	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		1:877	1:877	1:877	1:877	1:655	1:655	1:655	
2.30	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.31	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	%	77,84	85	90	92	95	96	97	
2.32	Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan	%	85,14	89	91	93	95	96	97	
2.33	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	88,85	90	92	94	95	96	97	
2.34	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standart	%	71,73	72	75	80	85	87	88	
2.35	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	26,63	60	65	70	75	80	85	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.36	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	43,60	100	100	100	100	100	100	
2.37	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	%	36,71	40	50	60	65	70	75	
2.38	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	18,00	100	100	100	100	100	100	
2.39	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	%	33,90	100	100	100	100	100	100	
2.40	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	%	87,80	100	100	100	100	100	100	
2.41	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	%	31,51	91	92	93	94	95	96	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.42	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart	%	76,3	91	92	93	94	95	96	
2.43	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	85,14	87	90	92	95	96	97	
2.44	Prevalensi stunting pada balita	%	10,92	21,10	18,40	16	14	12	10	
2.45	Prevalensi wasting pada balita	%	5,20	7,80	7,50	7,30	7,00	6,70	6,40	
2.46	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Orang	128	251	262	260	259	259	259	
2.47	Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV	Per 1000 pddk	0,058	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
2.48	Persentase temuan kasus baru TB menggunakan indikator SPM (terduga TB)	%	31,51	91	92	93	94	95	96	
2.49	Treatment coverage pada pasien TB	%	40,22	91	92	93	94	95	96	
2.50	Persentasi bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	72,4	93,6	94,1	94,6	95	95	95	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.51	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standart	%	78,9	80	85	87	90	100	100	
2.52	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun	%	40	40	45	50	55	60	65	
2.53	Persentase puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	%	5	100	100	100	100	100	100	
2.54	Persentase implementasi KTR pada 9 tempat	%	15	50	55	60	65	70	75	
2.55	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	68,50	73,60	78,90	84,21	89,47	94,70	100	
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	48,26	49,68	51,10	52,53	53,95	55,37	56,80	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.2	Rasio jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	18,33	18,35	18,37	18,38	18,40	18,42	18,44	
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	55,99	56,04	56,47	56,89	57,31	57,73	58,15	
3.4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	M	1244	1244	1244	1275	1325	1350	1430	
3.5	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	75,00	75	75	75	75	75	75	
3.6	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	33,60	33,95	35,8	39,85	42,53	45,75	50,15	
3.7	Persentase luasan daerah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	57,00	57,78	58,33	59,44	63,89	64,44	65,56	
3.8	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	29,31	10,09	10,54	10,98	11,43	11,87	12,31	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.9	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	47,91	48,98	50,05	51,13	52,20	53,27	54,34	
3.10	Rasio jaringan irigasi	%	18,33	18,35	18,37	18,38	18,40	18,42	18,44	
3.11	Ketaatan terhadap RTRW	%	45,26	45,28	45,30	45,32	45,34	45,36	45,38	
3.12	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS kewenangan kabupaten	%	9,65	10,09	10,54	10,98	11,43	11,87	12,31	
3.13	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	18,33	18,35	18,37	18,38	18,40	18,42	18,44	
3.14	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	85,06	86,22	86,65	87,07	87,50	87,93	88,35	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.15	Rasio kepatuhan IMB	%	94,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.16	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	76,42	78,99	81,57	84,14	86,71	89,28	91,86	
3.17	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.18	Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara	buah	3	2	2	2	2	1	1	
3.19	Persentase Luasan RTH yang Dibangun di Wilayah Perkotaan terhadap luasan perkotaan	%	3,21	3,21	3,21	3,21	3,24	3,27	3,30	
3.20	Persentase Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	45,26	45,28	45,30	45,32	45,34	45,36	45,38	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	%	95,25	95,87	96,50	97,12	97,74	98,36	98,98	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4.2	Rasio Permukiman Layak Huni	%	98,15	86,87	87,72	88,56	89,41	90,26	91,11	
4.3	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	%	95,25	95,87	96,50	97,12	97,74	98,36	98,98	
4.4	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	%	1,85	13,13	12,28	11,44	10,59	9,74	8,89	
4.5	Persentase permukiman yang tertata	%	98,15	86,87	87,72	88,56	89,41	90,26	91,11	
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	26,65	73,82	67,47	61,12	54,77	48,42	42,07	
4.7	Proporsi Rumah Tangga kumuh perkotaan	%	26,65	73,82	67,47	61,12	54,77	48,42	42,07	
4.8	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	77,90	79,36	82,29	85,21	88,13	91,06	93,98	
4.9	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	-	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4.10	Persentase Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	-	100	100	100	100	100	100	
4.11	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	8,89	92,73	85,46	78,19	70,92	63,64	56,37	
4.12	Persentase rumah tidak layak huni	%	44,46	39,33	34,19	29,06	23,92	18,79	13,65	
4.13	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	77,90	79,36	82,29	85,21	88,13	91,06	93,98	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**									
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	%	75	75	75	75	75	75	75	
5.2	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	%	100	90	90	90	90	90	90	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.3	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran	%	70	72	74	76	78	80	82	
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) penanganan kebakaran	%	25 menit	23 menit	21 menit	19 menit	17 menit	15 menit	15 menit	
5.5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	buah	20	85	85	85	85	85	85	
5.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	82	83	84	85	83	86	87	
5.7	Persentasi masyarakat yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0	0	50	60	70	80	90	
5.8	Persentasi masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	0	50	60	70	80	90	
5.9	Persentasi masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75	75	75	75	75	75	75	
6	**Sosial**									
6.1	Persentase PPKS yang mendapat bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	%	80	85	87	89	91	93	95	
6.3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	7,46	10	12	15	17	19	21	
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	76	80	81	82	83	84	85	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	256	350	400	450	500	550	600	
6.7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan, pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	10	200	250	300	350	400	450	
6.8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	76	80	81	82	83	84	85	
7	**Tenaga Kerja**									
7.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	70,47	76,57	-	-	-	-	-	
7.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	1	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7.3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	1	1	1	1	1	1	1	
7.4	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	336	300	300	300	350	350	350	
7.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.96	3.8	3.7	3.6	3.5	3,4	3,3	
7.6	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3	%	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	
7.7	Besaran Pekerja yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan	orang	3360 orang	15 orang	50 org dari 262 org TK	50 org dari 212 org TK	50 org dari 162 org TK	50 org dari 112 org TK	62 org dari 62 org TK	
7.8	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	0	0	0	0	0	0	0	
7.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, kewirausahaan	orang	60	40	120	120	120	120	120	
7.10	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	30,0	35,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
7.11	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	4,42	2,67	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
7.12	Tingkat produktivitas tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.13	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	7,7	10	9,3	10,2	13,6	13,2	18,2	
7.14	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	%	24,76	20,00	20,00	20,00	23,33	23,33	23,33	
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	64,42	64,5	64,75	65	66	67	69	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
8.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	35,58	35,6	35,75	36	38	39	40	
8.3	Rasio KDRT	%	0	0,0050	0,0051	0,0052	0,0052	0,0053	0,0053	
8.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99	99	99	99	99	99	99	
8.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	8	100	100	100	100	100	100	
8.7	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	18,75	20	25	25	25	25	
8.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
8.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	0	100	100	100	100	100	100	
8.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.11	Persentase ARG pada belanja APBD	%	35,14	65	70	75	80	85	89	
8.12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.13	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0046	0,0045	0,0044	0,0043	0,0042	0,0041	0,0040	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	**Pangan**									
9.1	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	646	579	580	581	582	583	585	
9.2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Kkl/hr dan gr/hr	1901 dan 48	1910 dan 48,5	1920 dan 48,9	1925 dan 49,1	1928 dan 49,3	1930 dan 49,5	1950 dan 49,7	
9.3	Persentase keamanan pangan	**%**	81	82	83	84	85	86	87	
10.	**Pertanahan**									
10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0,11	0,23	0,35	0,47	0,58	0,70	0,87	
10.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	-	95	95	95	95	95	95	
10.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.4	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas ijin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10.5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	95	95	95	95	95	95	
10.6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	95	95	95	95	95	95	
10.7	Tersedianya tanah obyek landreform yang siap di redistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100	95	95	95	95	95	95	
10.8	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	95	95	95	95	95	95	
10.9	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	**Lingkungan Hidup**									
11.1	Persentase penanganan sampah	%	48,25	51,01	52,63	54,24	55,84	57,41	58,97	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
11.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.3	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	0,81	0,78	0,74	0,70	0,68	0,66	0,64	
11.4	Penegakan hukum lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.5	Indeks Kualitas Air	indeks	60,83	50,12	50,25	50,35	50,41	50,63	51,14	
11.6	Indeks Kualitas Udara	indeks	89,75	89,56	89,76	89,84	89,88	90,24	90,35	
11.7	Indeks Tutupan Lahan	indeks	38,50	40,11	41,64	43,23	44,79	45,35	45,55	
11.8	Persentase pelaku usaha /kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan (izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan	%	100	45	60	75	90	95	100	
11.9	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	21,00	21,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
11.10	Persentase cakupan area pelayanan	%	78	79,52	80,27	81,39	83,25	85,46	88,03	
11.11	Timbulan sampah yang ditangani	RT	62.784,00	64.890,00	62.868,00	69.978,00	70.811,00	72.377,00	73.843	
11.12	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.13	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang undangan	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,65	61,50	62,00	62,50	63,00	64,00	65,00	
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
12.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	0,99	96	97	99	99	100	100	
12.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
12.3	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,53	100	100	100	100	100	100	
12.4	Kepemilikan KTP	%	95,82	96	96,89	97,25	98	98,54	99	
12.5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
12.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
12.8	Persentase anak usia 0 - 7 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	31,33	50	60	70	80	90	100	
12.9	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	2	2	5	10	20	30	37	
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
13.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.2	Persentase LPM Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.3	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
13.4	Persentase Posyandu aktif	%	83,41	100	100	100	100	100	100	
13.5	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
13.6	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	220	220	220	220	220	220	220	
13.7	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	47,06	22,22	28,57	40	0	0	0	
13.8	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	2,40	2,78	2,94	3,39	4,08	5	
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
14.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	org	2,51	2,51	2,50	2,49	2,49	2,48	2,48	
14.2	Rasio akseptor KB	%	79	1 : 1,27	1 : 1,27	1 : 1,27	1 : 1, 28	1 : 1,28	1 : 1,28	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14.3	Cakupan peserta KB aktif	%	78,76	78,76	78,77	78,78	78,79	78,8	78,81	
14.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	N/A	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	18.847	
14.5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,59	0,59	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	
14.6	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,51	2,51	2,51	2,50	2,50	2,50	2,5	
14.7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,12	12,13	12,12	12,12	12,11	12,11	12.11	
14.8	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	7,09	8,91	10,73	12,15	13,38	14,72	15,95	
14.9	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	78,76	78,76	78,76	78,76	78,77	78,78	78,79	
14.10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	7.184	7.194	7.204	7.214	7.229	7.239	7.249	
14.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	1.381	1.386	1.396	1.401	1.411	1.416	1.421	
14.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	1.485	1.490	1.495	1.500	1.505	1.510	1.515	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
14.13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Buah	0	1	2	2	2	2	2	
14.14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Kelompok	30	30	30	30	30	30	30	
14.15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	10,00	12,50	13,43	14,08	14,72	14,86	14,86	
14.16	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	%	78,76	78,76	78,77	78,78	78,79	78,8	78,81	
15	**Perhubungan**									
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	org	101450	99.900	98.400	96.950	95.500	94.050	92.650	
15.2	Rasio ijin trayek	%	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	buah	803	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150	
15.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	1	1	1	1	1	1	1	
15.5	Persentase Layanan angkutan darat	%	75,00	75,00	50,00	85,00	95,00	95,00	100,00	
15.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	org	1297	3.000,00	3.030,00	3.090,00	3.120,00	3.150,00	3.180,00	
15.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	60 menit	60	60	60	60	60	60	
15.8	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	0,00	70,00	72,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
15.9	Rasio konektivitas kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15.10	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	85,00	90,00	93,00	90,00	94,00	94,00	95,00	
16	**Komunikasi dan Informatika**									
16.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat kecamatan	Buah	0	0	2	4	6	8	11	
16.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80,47	81,06	81,66	82,25	82,84	83,43	84,02	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
16.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	89,68	76	80,40	83,60	86,60	89,20	91,00	
16.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	%	14,46	16,25	20,83	25,42	30,00	30,59	35,18	
16.5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	91,89	91,89	100	100	100	100	100	
16.6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	37,5	37,5	50,0	62,5	75	87,5	100	
16.7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	78,52	80	82	84	86	88	90	
17	**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**									
17.1	Persentase koperasi aktif	%	51,28	52,50	53,66	54,76	58,54	59,52	60,47	
17.2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	%	98,75	98,96	99,17	99,38	99,59	99,80	100,00	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
17.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.4	Persentase koperasi yang berkualitas	%	10,26	10,50	10,73	10,95	11,71	11,90	12,09	
17.5	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	17,32	19,32	21,32	23,32	25,32	27,32	29,32	
18	**Penanaman Modal**									
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN/ PMA	66	22 Investor	24 Investor	26 Investor	29 Investor	32 Investor	35 Investor	
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp Milyar	98,655	71.799.795 .324	73.235.791 .230	76.897.580 .792	80.742.459 .831	82.357.309 .028	84.004.455 .209	
18.3	Rasio daya serap tenaga kerja	-	136 orang	150	165	180	198	217	238	
18.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp Milyar	-15,50	1,41	1,44	3,66	3,84	1,61	1,65	
18.5	Persentase peningkatan investasi	%	1,90	2	2	5	5	2	2	
19	**Kepemudaan dan Olahraga**									
19.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	44	50	55	60	62	65	70	
19.2	Persentase wirausaha muda	%	20	20	33,3	46,7	60	80	93	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
19.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	18,10	24,76	33,33	42,86	52,38	61,90	71,43	
19.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	38	27,62	41,90	56,19	70,48	84,76	99,05	
19.6	Persentase Atlet yang berprestasi	%	13,3	16,6	19,1	20,8	23,3	25,0	26,6	
19.7	Jumlah prestasi olahraga	medali	8 (7 Popda, 1 Nasional)	10	5	10	5	10	5	
19.8	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	13,72	14,03	14,20	14,26	14,41	14,44	14,59	
19.9	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,50	5,58	5,64	5,65	5,75	5,76	5,80	
19.10	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	8 (7 Popda, 1 Nasional)	10	5	10	5	10	5	
20	**Statistik**									
20.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	-	1	1	1	1	1	1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
20.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
20.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	**Persandian**									
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	0	6	11	25	39	53	67	
21.2	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Indeks	212	246	280	314	348	382	419	
22	**Kebudayaan**									
22.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	event	0	0	0	40	50	50	75	
22.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	19	15	18	20	23	25	28	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
23	**Perpustakaan**									
23.1	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	%	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	
23.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	org	7.857	13.199	13.401	13.979	14.412	15.278	16.000	
23.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	22730	22.730	23.480	24.980	26.480	27.980	29.480	
23.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	9.739	10.666	11.416	11.916	12.146	12.916	13.416	
23.5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	NA	50	55	60	61	63	65	
23.6	Indeks pembangunan literasi masyarakat		10	10	11	12	13	14	15	
24	**Kearsipan**									
24.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	100	100	100	
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		2	27	27	27	27	27	27	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
24.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	-	37 SKPD	600	600	600	600	600	600	
24.4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	-	37 SKPD	600	600	600	600	600	600	
	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	**Pertanian**									
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)	ton/ha	5,49	5,22	5,3	5,38	5,46	5,5	5,58	
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (data yang ada di analisa PDRB hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)	-	24,03*)	25	25	25	25	25	25	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	2	6	5	5	4	4	3	
2	**Pariwisata**									
2.1	Kunjungan wisata	orang	78.847	86500	85000	86000	87000	88000	89000	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,73	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	
2.3	PAD sektor Pariwisata	Rupiah	20.205.000	71.000.000	71.000.000	72.000.000	73.000.000	74.000.000	75.000.000	
2.4	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	0,43	0,5	1	1,5	2	2,5	3	
2.5	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	%	80	10	10	15	15	20	20	
2.6	Tingkat hunian akomodasi	Orang	7643	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500	
3	**Kelautan dan Perikanan**									
3.1	Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	ton	10821	10882,5	10944	11053	11163	11274	11386	
3.2	Konsumsi ikan	%	51,5	51,6	51,7	51,8	51,9	52	52,1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	13	15	17	19	21	23	25	
3.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	7.986	8060	8134	8215	8297	8379	8461	
4	**Perdagangan**									
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	11,66	12,29	12,92	13,55	14,18	14,84	15,4	
4.2	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp Milyar	239,9	240,52	242,40	245,67	245,80	246,20	247,83	
4.3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, IUTM/IUTS)	%	100	75	75	75	75	75	75	
4.4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	70	70	72	76	80	80	90	
4.5	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	%	70	75	80	80	80	85	90	
5	**Perindustrian**									
5.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	14,27	14,37	14,47	14,57	14,67	14,77	14,87	
5.2	Pertumbuhan Industri.	%	3,48	3,48	3,48	3,48	3,58	3,58	3,58	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.3	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	
5.4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah		4330	4350	4370	4390	4410	4430	4450	
5.5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri (turunan indikator RIPIN dan RPIP)	%	N/A	6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	40,00	
5.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKM	-	-	1	1	1	1	1	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.8	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	Kawasan	-	-	-	-	-	1	-	
5.9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	1	1	1	2	3	4	5	
	Fokus Layanan Urusan Penunjang									
1	**Perencanaan Pembangunan**									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	99,99	100	100	100	100	100	100	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	97	≥ 98	≥ 98	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	
2	**Keuangan**									
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini LK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2.2	Persentase SiLPA	%	1,70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2.3	Persentase belanja pendidikan	%	26,95	27,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2.4	Persentase belanja kesehatan	%	20,95	26,77	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.5	Penetapan APBD	-	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	Bln Des	
2.6	Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	%	11,60	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2.8	Manajemen Aset	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.9	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	34,00	20	20	20	20	20	20	
2.10	Deviasi Realisasi belanja terhadap anggaran belanja dalam APBD	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
2.11	Rasio Belanja Pegawai (diluar guru dan tenaga kesehatan)	%	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
2.12	Rasio PAD	%	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	
2.13	Rasio Belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	66,35	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	
2.14	Opini Laporan Keuangan	Opini LK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	**Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan**									
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	20	20	20	20	20	20	20	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,90	3	3	4	4	5	5	
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,00	2	2	3	3	4	4	
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	-	29	30	31	31	31	31	31	
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	-	571	588	306	306	306	306	306	
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	2916	2875	3337	3517	3697	3877	4057	
3.7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22	30	31	31	32	32	33	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3.8	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7	10	12	14	16	17	18	
3.9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9	9	20	23	25	27	29	
4	**Penelitian dan Pengembangan**									
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	75,00	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90	
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00	
5	**Pengawasan**									
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	7	75	80	82	85	90	95	
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	-	-	-	-	-	-	-	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.3	Jumlah temuan BPK	temuan	12	18	16	14	12	10	8	
5.4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	2,8	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5	3,6	
5.5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	2	2	2	2	2	2	2	
6	**Sekretariat DPRD**									
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Program	6	2	2	2	2	2	2	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
6.3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Program	6	2	2	2	2	2	2	
7	**Sekretariat Daerah**									
7.1	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	18,31	20	22,5	25	27,5	27,5	27,5	
7.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	9,50	10	12,5	15	17,5	20	20	
8	**Kewilayahan (Kecamatan)**									
X	.....									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
9	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
9.1	Persentase Ormas yang aktif	%	10	10	15	20	25	30	35	
9.2	Indeks Ketahanan Nasional	-	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh	Tangguh	
9.3	Indeks Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	
9.4	Indeks Demokrasi Indonesia	-	48	50	52	55	60	65	65	
9.5	Tingkat kewaspadaan dan kasus konflik yang berhasil ditangani	%	75	75	75	80	85	90	90	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	Rp	1.122.246	1.099,80	1.110,80	1.121,91	1.133,13	1.144,46	1.155,90	
2	Nilai Tukar Petani	-	100,98	100	100	100	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
3	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp	600.658	505,91	510,97	516,08	521,24	526,45	531,75	
4	Produktivitas total daerah	Rp	N/A	48,54 Jt	49,75 t	52,00 Jt	54,60 Jt	57,32 Jt	60,20 Jt	
5	Angka Kriminalitas (jumlah kasus tertangani per/10.000 penduduk)	%	< 10	< 10	< 9,5	< 9	< 8,5	< 8	< 7,5	
6	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	%	78	44,72	35,40	26,09	16,77	7,45	2,48	
7	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	7,91	8,57	9,23	9,89	10,55	11,21	11,87	
8	Rasio ketergantungan	%	49,87	49,75	49,60	49,40	49,25	49,10	49,00	

BAB IX
P E N U T U P

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam enam tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2024, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, serta memerhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, dan RPJM Nasional 2020-2024. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun masa transisi. Agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan dan arah kebijakan, kerangka pendanaan serta program pembangunan daerah. Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD);

b. Setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memuat program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diemban guna mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang diamanatkan Bupati dan Wakil

Bupati terpilih dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai tujuan dan sasaran capaian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Renstra-PD tersebut dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

c. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar arah kebijakan tahunan yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan dapat dicapai;

d. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah;

e. Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban untuk menyusun kegiatan Rencana strategis PD selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

f. Terhadap Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD ini; dan

g. Dalam rangka terwujudnya segala dokumen perencanaan daerah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kepada Badan yang menangani urusan pemerintahan perencanaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bekewajiban melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan RPJMD ini.

9.2 Pedoman Transisi

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pada saat transisi dan dengan adanya pemilukada serentak dan kekosongan jabatan politik kepala daerah, maka RKPD 2021

merupakan bagian dari RPJMD periode ini serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027-2031 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021–2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 merupakan dasar dalam penyusunan RKPD tahun 2027 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Pedoman masa transisi tersebut bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan periode RPJMD ini berakhir, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. ABLIA OKTAFIANDI

L A M P I R A N

Tabel 1 A.
Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional

No.	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah				
		Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,90	4,50	4,80	5,60	6,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,01	2 - 3	4 - 5	4,5 - 5,5	5 - 6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,20	4,00	3,75	3,24	2,80	Tingkat Kemiskinan (%)	5,64	5,5	5,3	5,1	4,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,00	3,90	3,40	3,10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,96	3,8	3,7	3,6	3,5
4	*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**					75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,84	69,40	70,00	70,60	71,20
5	*Rasio Gini**					0,360 - 0,374	Rasio Gini	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6	*Penurunan Emisi GRK (%)**											

Tabel 2.A
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota terhadap Program Prioritas Nasional

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	01	**01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**													
	01	01-Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW)	686,5	1001,1	1921,8	1778,2	3662,7							
			Pemanfaatan biofuel untuk domestik (Juta kilo liter)	10,0	10,2	14,2	14,6	17,4							
			Intensitas energi primer (SMB/ Rp Miliar)	139,5	138,0	136,6	135,2	133,8							
			Domestic Matric Obligation (DMO) Batubara (Juta Ton)	155,0	168,0	177,0	184,0	187,0							
			Alokasi pemanfaatan gas domestik (persen)	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0							
			TKDN sektor pembangkit EBT (persen)	-	-	-	-	-							
	02	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) (Juta ha)	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0							
			Luas kawasan hutan produksi (Juta ha)	33,9	34,1	34,3	34,5	34,7							
			Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (Hektare) (Hektare)	45.000	113.750	113.750	113.750	113.750							
			Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (Hektare)	229,2	2192,7	2392,7	2592,7	2592,7	Urusan Pertanian - Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9
										Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30	2.41	2.47	2.49
										Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3	4	5	6

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Tambahan penyediaan Air Baku dari Sumber Air Berkelanjutan (m3/detik) (m3/detik)	4,3	11,3	11,4	11,4	11,4	Urusan PUPR - Program pengelolaan sumber daya air	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100	100	100	100	100
			Peningkatan tutupan hutan (Hektar)	375.000	385.000	425.000	450.000	475.000							
			Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) (m3)	14,3	15,2	15,8	16,3	16,8	Urusan PUPR - Program pengelolaan sumber daya air	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100	100	100	100	100
	03	03-Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ta hun)	58,3	58,9	59,5	60,2	60,9	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase Kelompok Pengolahan yang menghasilkan Produk Perikanan	40%	40%	40%	44%	44%
			Konsumsi daging (kg/kapita/ta hun)	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Kenaikan Harga pangan (Beras)	<10%	<9%	<8%	<7%	<6%
			Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita /tahun)	260,2	273,2	286,9	301,3	316,3							
			Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita /hari)	10,7	10,7	10,8	10,9	11,0		Persentase Peningkatan AKG	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
			Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi (% Penerima BPNT)	10 - 20 %	40,0	60,0	80,0	100,0	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	7%	5,9%	5,3%	4,1%	3,6%
			Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	85-95	85-95	85-95	85-95	85-95	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan yang Aman dikonsumsi	81%	82%	83%	84%	85%
			Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	10.000,0	50.000,0	100.000,0	150.000,0	20.000,0	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Kenaikan Harga pangan (Beras)	<10%	<9%	<8%	<7%	<6%
			Persentase pangsa pangan organik** (Persentase)	5,0	8,0	10,0	15,0	20,0		Persentase Peningkatan AKG	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
			Penggunaan benih bersertifikat (persen)	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	Tidak ada kewenangan						
			Ketersediaan Beras (Juta ton)	39,2	42,7	44,0	45,4	46,8	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Produksi jagung (Juta ton)	30,9	31,9	33,0	34,1	35,3	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Produksi daging (Juta ton)	4,0	4,2	4,4	4,6	4,6	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Produksi umbi-umbian (Juta ton)	24,3	24,6	24,9	25,2	25,2	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Teknologi yang diterapkan oleh petani (%) (%)	65 - 80	70 - 80	75 - 80	80 - 90	80 - 95	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	30	32	34	36	38
										Persentase Skor Kinerja Baik Penyuluhan Pertanian	75	78	80	82	85
			Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)	49,2	51,7	54,3	57,0	58,9	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	30	32	34	36	38
										Persentase Skor Kinerja Baik Penyuluhan Pertanian	75	78	80	82	85
			Nilai Tukar Petani	103,0	103,0	104,0	104,0	105,0							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50,0	65,0	80,0	90,0	100,0	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9
										Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30	2.41	2.47	2.49
										Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3	4	5	6
			Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	30 dan 8	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Aksesi)	4.250,0	4.250,0	4.250,0	4.250,0	4.250,0	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
										Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
										Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
	04	04-Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Global Food Security Index	64	65,5	66,9	68,4	69,8							
			Pengelola WPP (unit)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0							
			Akurasi dan pendataan stock dan pemanfaatn WPP (WPP)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0							
			Penyelesaian penataan ruang laut dan zoonasi peisisir (RZ)	14,0	24,0	26,0	26,0	12,0							
			Produksi ikan (Juta ton)	15,5	16,3	17,6	18,5	20,4	Urusan Perikanan dan Kelautan - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,99%	1,00%	1,10%	1,20%	1,30%
										Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	11%	11%	17%	23%	29%
			Produksi rumput laut (Juta ton)	11,0	11,6	11,9	12,1	12,3		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	11%	11%	17%	23%	29%
			Produksi garam (Juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4		Persentase Kelompok Pengolahan yang menghasilkan Produk Perikanan	40%	40%	40%	44%	44%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	05	05-Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Proporsi IKM dengan pinjaman kredit (persen)	2,4	2,8	3,4	4,1	5							
			Proporsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor produksi (persen)	60	65	70	75	80							
			Jumlah koperasi moderen yang dikembang kan (unit)	25,0	75,0	200,0	340,0	500,0	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentasi SDM koperasi yang terampil	38,46%	41,03%	43,04%	45,00%	46,91%
			Pertumbuhan jumlah wirausaha (Persen)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase pelaku usaha mikro yang berdaya saing	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%
			Penumbuhan startup (unit)	700,0	1.400,0	2.100,0	2.800,0	3500 (kumulatif)							
			Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Kumulatif)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	49,08%	53,72%	58,36%
			Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (Persen)	18,5	18,9	19,3	19,6	20,0							
	06	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (Persen)	8.09 - 8.22	8.21 - 8.37	8.33 - 8.51	8.45 - 8.65	8.57 - 8.79	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentasi produk unggulan daerah yang terjual	26,67%	46,67%	66,67%	80,00%	86,67%
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan(9 .2.1*) (Persen)	19,7	19,8	20,0	20,4	21,0	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	49,08%	53,72%	58,36%
			Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (Persen)	5,5	6,1	6,9	7,7	8,4							
			Pertumbuhan PDB perkebunan (Persen)	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas TPH	-8.34	2.16	2.76	3.36	3.96
			Peningkatan produksi kakao (Persen)	2,1	2,3	2,5	2,6	3							
			Peningkatan produksi kopi (Persen)	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5							
			Peningkatan produksi kelapa sawit (Persen)	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0		Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditas Perkebunan	0.08	0.15	0.25	0.42	0.50
			Pertumbuhan PDB hortikultura (Persen)	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0							
			Peningkatan produksi buah-buahan (Persen)	3,9	4,3	4,7	5,2	5,7							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Peningkatan produksi sayuran (Persen)	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1		Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	12	13	14	15	16
			Peningkatan produksi florikultura (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5							
			Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)	5 KI - 8 KEK	9 KI - 8 KEK	12 KI - 8 KEK	15 KI - 8 KEK	16 KI - 8 KEK	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	49,08%	53,72%	58,36%
			Revitalisasi destinasi Bali (Destinasi)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							
			Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembang annya (Destinasi	5 (kumulatif)	10 (kumulatif)	10 Kumulatif)	10 Kumulatif)	10 Kumulatif)	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Wisata	16,70%	33,30%	43,30%	50,00%	56,70%
			Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas (Unit)	25 (Kumulatif)	25 (Kumulatif)	25 (Kumulatif)	25 (Kumulatif)	25 (Kumulatif)							
			Destinasi wisata berbasis Geopark (Destinasi)	16 (Kumulatif)	16 (Kumulatif)	16 (Kumulatif)	16 (Kumulatif)	16 (Kumulatif)							
			Destinasi wisata bahari (Destinasi)	6 (Kumulatif)	6 (Kumulatif)	6 (Kumulatif)	6 (Kumulatif)	6 (Kumulatif)							
			Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (Persen)	5,3	5.34 - 5.5	5.38 - 5.7	5.42 - 5.9	5.45 - 6.10	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Jasa Usaha Ekonomi Kreatif yang ber TDUP	19%	23%	31%	35%	48%
			Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunika si (Kab/kota Jumlah kab/kota kreatif yang dikembang kan(Kab/kota)	7.26 - 7.54	7.40 - 7.95	7.40 - 8.22	7.54 - 8.37	7.54 - 8.78							
			Jumlah kab/kota kreatif yang dikembang kan(Kab/ kota)	4,0	5,0	5,0	3,0	3,0							
			Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikem bangkan (Lokasi)	8,0	8,0	8,0	8,0	11,0							
			Revitalisasi ruang kreatif (Unit)	30,0	31,5	34,0	31,0	27,0							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema) Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EODB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha jumlah prosedur dan waktu (Ranking EoDB)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							
			Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp triliun)	886,0	991,3	1128,3	1294,1	1500,0	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penanaman Modal yang dilakukan Pengawasan dan Pemantauan	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782,0	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang melakukan pelaporan LKPM	10%	10%	10%	10%	10%
			Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67							
			Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	selesai	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Kawasan Industri yang difasilitasi (Jumlah Kawasan Industri)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentasi IKM binaan yang terampil	39,81%	44,44%	49,08%	53,72%	58,36%
	07	07-Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor pertanian (Persen)	9 - 10	9 -10	9 - 10	9 - 10	9 -10							
			Ekspor hasil pertanian (US$ juta)	30.305,0				33.327,1							
			Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,2	6,6	7,1	7,7	8,24							
			Kontribusi ekspor industri pengolahan (Persen)	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (Persen)	10,8	11,4	11,9	12,5	13,0							
			Pertumbuhan ekspor non migas (Persen)	5,2	6,3	7,2	8,5	9,8							
			Rasio ekspor jasa terhadap PDB (Persen)	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0							
			Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	2,4	2,6	2,9	3,2	3,5							
			Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)	219,0	220,0	221,0	222,0	223,0							
			Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Persen)	0,8	1,3	1,8	2,3	2,8							
			Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (Persen)	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2							
			Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (Persen)	43,3				50,0	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentasi produk unggulan daerah yang terjual	26,67%	46,67%	66,67%	80,00%	86,67%
			Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (produk per tahun)	6000	6500	7000	7500	8000	-						
			Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)	310,0	320-333	330-355	340-378	350-400	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Wisata	16,70%	33,30%	43,30%	50,00%	56,70%
			Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Persen)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentasi produk unggulan daerah yang terjual	26,67%	46,67%	66,67%	80,00%	86,67%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	3,0	4,0	4,0	5,0	5,0	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%	70%	72%	74%
										Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah wisatawan mancanegara (Juta orang)	18,0	19,0	20,0	21,0	22,3	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan daya tarik destinasi Wisata	16,70%	33,30%	43,30%	50,00%	56,70%
			Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD miliar)	21.5-22.6	22.25-23.4	23-24.2	23.75-25	24,5							
			Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (negara)	90,0	92,0	94,0	96,0	98,0							
			Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatwan mancanegara ke Indonesia (negara)	82,0	82,0	86,0	92,0	94,0							
			Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (ratifikasi)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0							
			Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0							
	08	08-Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Rasio M2/PDB (Persen)	41,6	41,8	42,2	42,5	43,2	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
										Tingkat Kematangan UKPBJ	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9
										Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)	55,8	56,3	56,7	57,1	57,5	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%	70%	72%	74%
										Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata Persentase Program dan kegiatan serta indikator kinerja yang sesuai antar dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%
			Kontribusi ekonomi digital (Persen)	3,2	3,5	3,9	4,3	4,7	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri	0.07%	1,15%	2,29%	3,42%	4.54%
			Nilai transaksi ecommerce (Rp triliun)	260,0	345,0	430,0	515,0	600,0	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%	70%	72%	74%
										Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)	8.500,0	9.000,0	10.100,0	8.500,0	7.500,0	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan SDM dan Ekraf yang berkompeten	33%	42%	46%	50%	58%
			Tingkat inflasi (Persen)	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
										Tingkat Kematangan UKPBJ	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9
										Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Perusahaan)	1.845,0	2.634,0	3.423,0	4.211,0	5.000,0	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang patuh Terhadap Regulasi LH	100%	45%	60%	75%	90%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	12,0	5,0	17,0	20,0	22,0							
			Rasio perpajakan terhadap PDB (Persen)	9.7-10.5	10.1-10.7	10.3-11.2	10.5-11.7	10.7-12.3	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Total PAD	58%	10%	10%	10%	10%
			Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administra tion system) (Persen)	1,5	9,5	52,4	100,0	selesai							
			Imbal hasil (yield) surat berharga negara (persen)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun							
			Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD Meningkat (Persen)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%	70%	72%	74%
										Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data Base)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0							
			Ketersediaan data dan informasi statistik e- commerce (Data Base)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0							
			Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data Base)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0							
2	**02**	**02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**													
3	**03**	**03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya**													
	01	01-Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (persen)	25,0	50,0	60,0	70,0	80,0							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (persen)	15,0	30,0	50,0	60,0	70,0							
			Persentase Provinsi/Kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan	15,69	30,0	40,0	50,0	60,95							
			Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota	90	90	95	95	100	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase database kependudukan yang akurat dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaat kan analisis kependudu kan dan informasi kependudu kan (termasuk hasil Pendataan Keluarga) - (Persen Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota)	20	25	30	35	40							
	02	02-Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	85%	90%	92%	95%	97%
			Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000							
			Penyaluran Bantuan LPG 3 Kg	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000							
			Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000	31.400.000							
			Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif												

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	18,9	20	22	24	25							
			Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar (%)	37,5	42	45	48	50	Program rehabilitasi sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan	80%	85%	87%	89%	91%
			Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kab/kota inklusif (%)	2,7 2,7	5 5	10 10	15 15	20 20	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
										Tingkat Kematangan UKPBJ	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9
										Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
	03	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	64	68	71	75	90	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	40	45	50	55	60	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	16,0	14,5	13,0	11,5	10,0	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,08	7,8	7,52	7,26	7,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Orang Dengan HIVAIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	40	45	50	55	60	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate	90	90	90	90	90	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota yang g mencapai eliminasi malaria	416	436	458	428	514	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko	85	90	95	100	100	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	416	436	458	428	514	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH

No.		RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang h mencapai eliminasi	80	93	106	150	190	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah desa endemis schistosomia sis yang mencapai eliminasi	11	15	19	24	28	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	52	129	232	360	514	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	324	374	424	474	514	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)	65%	65%	66%	67%	68%
			Jumlah kabupaten/ kota sehat	110	220	280	380	420	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)	65%	65%	66%	67%	68%
			Persentase puskesmas tanpa dokter	6	0	0	0	0	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Prosentasi Faskes dengan SDM sesuai standart	78%	80%	85%	90%	95%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Prosentasi SDM faskes yang kompeten/profesional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35	47	59	71	83	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Prosentasi Faskes dengan SDM sesuai standart	78%	80%	85%	90%	95%
										Prosentasi SDM faskes yang kompeten/profesional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase RSUD kabupaten/ kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	70	75	80	85	90	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Prosentasi Faskes dengan SDM sesuai standart	78%	80%	85%	90%	95%
										Prosentasi SDM faskes yang kompeten/profesional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	85	90	92	94	96	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kabupaten/ kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan	25	35	45	55	65	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Prosentasi masyarakat yang terlayani di Pusat Kesehatan Masyarakat	80%	100%	100%	100%	100%
										Prosentasi Rata-rata IKM Pusat Kesehatan Masyarakat	70%	72%	74%	76%	78%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										AKI dan AKB	428/100.000 KH 15/1.000 KH	390/100.000 KH 14/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	350/100.000 KH 13/1.000 KH	270/100.000 KH 11/1.000 KH
										% status gizi buruk dan gizi kurang	-	7,80%	7,5%	7,3%	7,0%
										Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55%	55%	56%	57%	58%
										Presentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Tidak Menular dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	70%	100%	100%	100%	100%
			Persentase obat memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90,0	92,3	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Prosentasi ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sesuai standar	65%	70%	75%	80%	85%
			Persentase makanan memenuhi syarat	78	80	82	84	86	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Prosentasi ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman sesuai standar	65%	70%	75%	80%	85%
	04	04-Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen): Membaca, Matematika dan Sains	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
				26,5	27,4	28,3	29,2	30,1							
				30,4	31,4	32,4	33,4	34,4							
			Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen)	67,5	70,9	74,6	78,2	81,8	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
			Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B: SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA	80,11	81,19	82,28	83,37	84,46	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
				74,54	76,01	77,48	78,95	81,33							
				73,65	74,53	75,41	76,29	80,86							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Perguruan Tinggi Terakreditasi A	135,0	160,0	185,0	205,0	225,0	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase realisasi kebijakan di Bidang Kesra yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase kebijakan di bidang pemerintahan yang ditetapkan dan dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase peraturan perundangan yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
	05	05-Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak						Program pemenuhan hak anak (pha)	Persentase Lembaga Ramah Anak	50%	80%	82%	85%	90%
									Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	59%	67%	73%	80%	82%
	06	06-Pengentasan Kemiskinan	Penyelenggar aan bantuan usaha ekonomi produktif dan pembiayaan ultra mikro bagi penduduk (KK)	11500	11600	11700	11800	11900	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase pelaku usaha mikro yang berdaya saing	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%
			Desa yang mengembang kan keperantaraan usaha pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya	8.687.613	8.687.613	8.687.613	8.687.613	8.687.613	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase pelaku usaha mikro yang berdaya saing	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%
			Pengembangan kewirausahaan sosial	535	535	535	535	535							
			Luas bidang tanah yang diretribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agrari	1.502.135	1.766.315	1.766.315	1.766.315	1.766.315	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase Luasan Objek Redistribusi Tanah dan Jumlah Subjek Penerima Reforma Agraria (Kantor Pertanahan HST)	0%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah kelompok masyarakat penerima tanah objek reforma agrarian (TORA) yang memperoleh pemberdayaan	176	429	429	429	429	Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase Luasan Objek Redistribusi Tanah dan Jumlah Subjek Penerima Reforma Agraria (Kantor Pertanahan HST)	0%	100%	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	07	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi	1.890.345	1.890.345	1.890.345	1.890.345	1.890.345	Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
			PT vokasi berakredirasi A	8	10	12	14	16							
			Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)	1.829.664	1.890.345	1.890.345	1.890.345	1.890.345							
			Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)	60.681,0	64.224,0	67.767,0	71.310,0	74.853,0							
			Jumlah lulus pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	2 Juta	2.2 Juta	2.4 Juta	2.6 Juta	2.8 Juta							
			Jumlah pemagangan dalam negeri (orang)	1,824,466 (SMK)	1,908,367 (SMK)	1,992,268 (SMK)	2,076,169 (SMK)	2,160,070 (SMK)							
			Jumlah pemagangan luar negeri (orang)	5,198 (SMK)	5,437 (SMK)	5,676 (SMK)	5,915 (SMK)	6,154 (SMK)							
			Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7							
			Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional	14300	15730	17303	19033	20937							
			Jumlah sitasi di jurnal internasional	5760	6336	6969	7666	8433							
			Jumlah KI yang didaftarkan	3751	4502	5402	6482	7779							
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	Meningkat	35,40	Meningkat	Meningkat	40	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan aktifitas olahraga	33%	33%	57%	68%	79%
			Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games	2	N/A	N/A	N/A	3							
			Jumlah perolehan medali emas pada Paralimpic Games	1	N/A	N/A	N/A	3							
			Peringkat pada Asian Games Peringkat pada Asian Para Games	N/A	N/A	5	N/A	N/A							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	04	**04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**													
	01	01-Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						Program pengelolaan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	81,2	82,2	83,3	84,3	85,3
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	59%	67%	73%	80%	82%
									Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentasi penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
									Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan masyarakat	-	83	85	87	88
										Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	-	83	85	87	88
									Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentasi SKPD yang melaksanakan PUG	13,90%	28%	42%	56%	69%
									Program peningkatan kualitas keluarga	Indeks pembangunan gender	96,5	97,5	97,7	97,9	98,1
									Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
									Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Prosentase masyarakat yang dibina yang memahami pancasila dan karakter kebangsaan	65%	65%	70%	75%	80%
	02	02-Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia							Program pengembangan kebudayaan	Persentase Pengembangan Pelaku Kebudayaan yang dibina	-	85%	85%	88%	90%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	03	03-Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial							Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase kesepakatan hasil pertemuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	04	04-Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter							Program pembinaan perpustakaan	IKM terhadap layanan perpustakaan	86	86	86	87	87
									Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase kebutuhan hasil litbang yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
										Persentase peningkatan inovasi daerah	9,04%	54,87%	71,14%	73,47%	78,09%
5	**05**	**05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**													
	01	01-Infrastruktur Pelayanan Dasar	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah (unit)	48391	154310	164310	241415	261565	Program kawasan permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan pada tahun berjalan	0%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha (unit)	157762	194763	253986	291403	355387							
			Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan, termasuk SMF dan TAPERA (rumah tangga)	58460	85000	110000	135000	161540							
			Jumlah rumah tangga berpendapa tan rendah yang menerima bantuan/ subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	112500	216154	200000	220000	220000							
			Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah (unit)	219005	152510	152510	208765	212210							
			Jumlah kabupaten/ kota yang mengembang kan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan (kabupaten /kota)	48	48	48	48	48	Program pengelolaan izin lokasi	Persentase Izin Lokasi yang dikeluarkan Izinnya (Kantor Pertanahan HST dan DPMPTSP)	0%	100%	100%	100%	100%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah kabupaten /kota yang mengimplem entasikan pemenuhan standar keandalan bangunan (kabupaten /kota)	48	48	48	48	48	Program penataan bangunan gedung	Persentase Jumlah Gedung Negara dan Prasarana Publik yang sesuai standar teknis	2,78%	5,56%	8,33%	11,11%	13,89%
			Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (Hektar)	1221	5779	1000	1000	1000	Program kawasan permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan pada tahun berjalan	0%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	62352,00	62352,00	62352,00	62352,00	62352,00	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	61,79%	6215,00%	6287,00%
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR) Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	303028,2607	284145,2607	284145,2607	284145,2607	284145,2607							
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	39	56	74	74	76	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase PSU (jalan dan drainase) yang layak di kawasan perumahan	71,22%	72,36%	75,34%	78,32%	81,30%
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	223005,1183	255938,3636	316629,6299	376144,709	409077,9543							
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	144127,6836	164717,3527	308845,0364	473562,3891	494152,0582							
			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87	87	87	88	88	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	61,79%	62,15%	62,51
			Jumlah kabupaten/ kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83	83	83	84	84	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional						
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (SR)	15600000	17100000	19100000	21600000	24600000	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	73,14	74,55	75,96	76,98	78
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (RT)	48309000	48808000	49309000	49813000	50465000							
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (RT)	5030000	5858000	7100000	8772000	10892000							

No.	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
		Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	67,2	75,4	83,6	91,8	100							
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	61,79%	62,15%	62,51
			Tambahan penyediaan air baku dari sumber air berkelanjutan (m3/detik)	4,27	11,43	11,43	11,43	11,43	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah wilayah sungai yang menetapkan kebijakan pengelolaan SDA Terpadu (wilayah sungai)	0	5	17	21	21							
			Jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan Pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management) (unit)	0	7	8	9	10							
			Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (Rasio)	1,27	1,25	1,23	1,21	1,19							
			Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (Rasio)	70	65	60	55	50							
			Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (Rasio)	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23							
			Rata - rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	30	29	29	28	28							
									Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio Volume Kapasitas LLAJ	0,352	0,350	0,340	0,330	0,320
			Jumlah Provinsi yang meningkatkan ketahanan pangan bencana (hidrometeorologi, geologi dan lingkungan (Provinsi)	20	20	20	20	20							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah wilayah sungai yang menerapkan restorasi dan konvervasi lingkungan dan sumberdaya air (wilayah sungai)	20	20	20	20	20							
			Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	14,2	15,1	15,8	16,2	16,5	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (kumulatif)	14	17	28	40	50							
			Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	10	20	20	20	20							
			Persentase arah irigasi dengan Indeks Kinerja di atas 70 persen (persen) (kumulatif)	2	7	13	19	25							
			Luas lahan beririgasi untuk komuditas non padi (Hektare)	229,2	7192,7	7392,7	7592,7	7592,7	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9
										Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30	2.41	2.47	2.49
										Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3	4	5	6
	02	02-Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)						Program penyelenggaraan jalan						
			Persentase kondisi mantap jalan nasional (97%)												
			Persentase kondisi mantap jalan provinsi (75%)												
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (65%)												
			Panjang jalan baru yang dibangun (3.000 km)												
			Persentase kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Indeks) kategori 1 dan 2												
			Panjang jalur KA yang beroperasi (km)												

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah simpul transportasi yang terakses KA (bandara dan pelabuhan) (lokasi)												
			Jumlah pelabuhan-pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (28 pelabuhan) (lokasi)												
			Jumlah trayek subsidi tol laut (25 trayek) (trayek)												
			Jumlah rute jembatan udara (43 rute) (rute)												
			Jumlah bandara baru yang dibangun (21 lokasi) (lokasi)												
			Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi) (lokasi)												
			Jumlah andara perairan (waterbased airport) yang dibangun (5 lokasi) (lokasi)												
			Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 lokasi) lokasi												
	03	03-Infrastruktur Perkotaan	Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)												
			Jumlah jalur khusus BRT yang dibangun/dikembangkan (kota)												
			Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)						Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Rasio Volume Kapasitas LLAJ	0,352	0,350	0,340	0,330	0,320
			Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pita lebar terhadap total rumah tangga (persen) (kumulatif)												
			Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggar aan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/kota)	6	7	7	7	7	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Bersanitasi Layak	61,03%	61,43%	61,79%	62,15%	62,51

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum	73,14%	75,55%	75,96%	76,98%	78,00%
			Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan (kawasan)	0	4	6	8	10	Program kawasan permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh yang direncanakan pada tahun berjalan	0%	100%	100%	100%	100%
	04	04-Energi dan Ketenagalistrikan	Penurunan intensitas Energi Final (SBM / Miliar Rupiah)												
			Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)												
			SAIDI menjadi (jam / pelanggan)												
			Penyediaan gas BBM												
			Produksi tenaga listrik (TWh)												
			Cadangan operasional BBM (hari)												
	05	05-Transformasi Digital	Persentase desa berpenduduk yang mendapatkan akses mobile broadband	98	98,5	99	99,5	100	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	40	50	60	65	70
			Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serta optik (kumulatif)	36,4	37,2	42,9	50	60							
			Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan perkapita (pada kecepatan up to 30 Mbps)	11	10	9	8	7							
			Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan perkapita (dilihat dari rata - rata kouta 1 GB)	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25							
			Persentase jangkauan populasi penyiaran TV Digital	53	60	70	75	80							
			Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik	90	91	93	94	95							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB	4,5 - 5,7	4,5 - 5,7	4,5 - 5,7	4,5 - 5,7	4,5 - 5,7							
			Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi	40	60	80	90	100	Program pelayanan penanaman modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah peserta pelatihan digital skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital	5000	5000	5000	5000	5000							
6	06	**06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**													
	01	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	1.139	1.141	1.141	1.141	1.141	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	71%	72%	73%
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	1668	2625	3000	3375	3750	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang patuh Terhadap Regulasi LH	100%	45%	60%	75%	90%
			Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	70	70	70	70	70							
			Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun terhadap baseline rerata luas karhutla tahun 2015 - 2019 (persen)	2	2	2	2	2							
			Luas kawasan konservasi (juta ha)	27	27	27	27	27	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase Luasan RTH Kabupaten yang terkelola dengan baik	77%	80%	85%	88%	92%
			Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,40	24,20	25,10	26,00	26,90							
			Akurasi informasi meteorol0gi (persen)	75,7	76,7	77,7	78,7	79,7							
			Akurasi informasi klimatologi (persen)	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00							
			Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	64,80	67,10	68,51	69,20	69,80	Program pengelolaan persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayan persampahan pada Wilayah Pelayanan	78,00%	79,52%	80,27%	81,39%	83,25%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen)	20	30	40	50	60	Program pengelolaan persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayan persampahan pada Wilayah Pelayanan	78,00%	79,52%	80,27%	81,39%	83,25%
			Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	89,44	98,68	107,99	117,22	26,49							
			Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD / hari (persen)	0,025	0,032	0,039	0,046	0,053							
			Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difaslitasi restorasi gambut (ha)	301.800	318.200	325.000	325.000	330.000							
			Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)	260.000	220.000	270.000	220.000	230.000							
			Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	20	21	22	24	26							
			Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	25	25	25	25	25							
			Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	50	60	65	68	70	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang patuh Terhadap Regulasi LH	100%	45%	60%	75%	90%
			Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	219	387	427	472	540	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	1.700.000	1.900.000	2.150.000	2.150.000	2.100.000							
			Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	5	7	7	8	7	Program perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkesuaian dengan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
	02	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio)	0,36	0,47	0,77	1,06	1,36							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorol ogis dan tektonis	90,00	92,00	94,00	96,00	100,00	Program penanggulangan bencana	Persentase Capaian Penanggulangan Bencana	0%	0%	100%	100%	100%
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen)	0,256	0,412	0,543	0,650	0,732	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	71%	72%	73%
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (persen)	0,009	0,028	0,045	0,060	0,072	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	71%	72%	73%
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen)	0,054	0,107	0,156	0,207	0,251	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang terdampak bencana	-	11.5	10.4	10	9.5
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen)	0,024	0,044	0,062	0,078	0,093	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan	68%	70%	71%	72%	73%
	03	03-Pembangunan Rendah Karbon	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5							
			Intensitas energi primer (SBM / Rp miliar)	139,5	138,0	136,6	135,2	133,8							
			Penurunan intensitas Energi Final (SBM / Rp miliar)	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80							
			Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difaslitasi restorasi gambut (ha)	301.800	318.200	325.000	325.000	330.000							
			Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	366.000	370.000	400.000	425.000	420.000							
			Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B (persen)	60	70	80	90	100	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Luas Panen Komoditas TPH	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9
										Persentase Peningkatan Luas Tanam Menghasilkan Komoditas Perkebunan	2.20	2.30	2.41	2.47	2.49
										Persentase Pertumbuhan Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau di RPH	2	3	4	5	6

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	64,80	67,10	68,51	69,20	69,80	Program pengelolaan persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayan persampahan pada Wilayah Pelayanan	78,00%	79,52%	80,27%	81,39%	83,25%
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	3.885.755	3.885.755	3.885.755	3.885.755	3.885.755							
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	223.005	255.938	316.630	376.145	409.078							
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	144.128	164.717	308.845	473.562	494.152							
			Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (persen)	9	9	9	10	10	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri	0.07%	1,15%	2,29%	3,42%	4.54%
			Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)	5.000	11.250	11.250	11.250	11.250							
7	07	**07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**													
	01	01-Konsolidasi Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	75,30	75,35	75,40	75,45	75,50	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu	81%	81%	-	-	81%
			Skor IDI Variabel Kebebasan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00							
			Skor IDI Variabel Kesetaraan (Angka target merupakan Proyeksi dengan Intervensi Kebijakan)	76,89	77,90	78,82	79,67	80,47							
			Indeks Kerawanan Pemilu	47	45	43	41	39							
			Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	N/A	N/A	N/A	22,52%							
			Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00%	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentasi SKPD yang	12,90%	28%	42%	56%	69%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	17%	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	melaksanakan PUG	13,96%	28%	42%	56%	69%
			Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	70	71	71	72	72	Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	40	50	60	65	70
			Persentase (%) konten informasi publik yang berkualitas	80	83	85	90	95							
			Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompoten dan profesional	50000 orang	50000 orang	50000 orang	50000 orang	50000 orang							
	02	02-Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	43,2	46,8	50,5	56,3	57,8							
			Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI	86,0	87,0	88,0	89,0	90,0							
			Jumlah program/kegiatan kerjasama selatan - selatan triangular	86	100	115	133	152							
			Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3,8	3,836	3,882	3,942	4							
			Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	10	11	3	14	16							
	03	03-Penegakan Hukun Nasional	Persentase judicial review yang dikabulkan MK dan MA	12,15% dan 11,05%	11,15% dan 10,05	10,15% dan 9,05%	9,15% dan 8,05%	8,15% dan 7,05%							
			Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek resolving insolvency	Peringkat 30	Peringkat 28	Peringkat 26	Peringkat 24	Peringkat 20							
			Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credit	Peringkat 30	Peringkat 28	Peringkat 26	Peringkat 24	Peringkat 20							
			Persentase pelaku residivis	8,56	8,06	7,56	7,06	6,56							
			IPAK	4,00	4,03	4,06	4,09	4,14							
			Indeks Akses terhadap keadilan	65 - 70 %	65 - 70 %	71 - 80 %	71 - 80 %	71 - 80 %							

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	04	04-Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	90	100	100	100	100	Program kepegawaian daerah	Indeks kepuasan masyarakat	-	83	85	87	88
			Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	65	80	95	100	100							
			Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	37	49	61	73	85		Indeks NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	-	83	85	87	88
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas	10	15	20	25	30							
			Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	54 IP	108 IP	162 IP	216 IP	270 IP	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio Volume Kapasitas LLAJ	0,352	0,350	0,340	0,330	0,320
			Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	70		80		100	Program Pengelolaan aplikasi informatika	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	38%	38%	48%	58%	68%
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	50		60		80							
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas	20		30		50							
			Persentase Instansi Pemerintah Pusat yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95							
			Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD menyusun RKA/DPA, SPM, dan Laporan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP	77	80	82	83	85		Persentase Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti	65%	68%	70%	72%	74%

No.	RPJMN Tahun 2020-2024								RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP	91	92	93	94	95		Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian /Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	94	96	98	100	100	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentasi penunjang urusan sekretariat berjalan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	85	87	90	100	100							
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/ Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	50	55	65	74	80							
	05	05-Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,24	38,14	38	37,90	37,80	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Risiko Terorisme (Target)	54,46	54,36	54,26	54,16	54,00							
			Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	300	<300	<250	<200	<150							
			Angka Kejadian Konflik	55 Kejadian	50 Kejadian	45 Kejadian	40 Kejadian	35 Kejadian							
			Angka Korban Pengungsi Internal	≤ 16,000 Orang	≤ 15,500 Orang	≤ 15,000 Orang	≤ 14,500 Orang	≤ 14,000 Orang							
			Pemenuhan MEF	72%	79%	86%	93%	1,00							
			Persentase Kontribusi Industri Pertahanan	> 50%	> 50%	> 50%	> 50%	> 50%							
			Angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di laut	285 kasus	265 kasus	246 kasus	224 kasus	202 kasus							
			Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,68%	1,68%	1,68%	1,69%	1,69%	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase kesepakatan hasil pertemuan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Crime Rate	129 orang / 100,000 penduduk	112 orang / 100,000 penduduk	112 orang / 100,000 penduduk	111 orang / 100,000 penduduk	111 orang / 100,000 penduduk	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

No.		RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah						
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
			Pelayanan Publik Polri yang Prima	62%	63%	64%	64%	65%	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu	81%	81%	-	-	81%
			Skor Global Cyber Security Index	0,792	0,792	0,826	0,826	0,838	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Prosentase potensi ATHG / konflik yang dapat dideteksi dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

